



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Daerah adalah Kota Palu.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Juni 2019

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Juni 2019

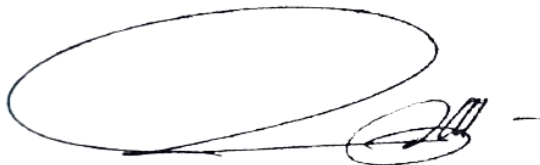
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more detailed flourish.

ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah



KOTA PALU

TAHUN

2020

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERATURAN WALI KOTA PALU

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-9
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
	1.5. Sistematika Penyusunan	I-11
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II-1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
	2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ...	II-1
	2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-15
	2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-23
	2.1.1.4. Demografi	II-36
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-39
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-79
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-129
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-196
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-252
	2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-252
	2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-262
	2.3.2.1 Identifikasi Permasalahan Terkait	

	dengan Urusan Wajib Pemerintahan di Kota Palu.....	II-263
	2.3.2.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu.....	II-268
	2.3.2.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu.....	II-278
	2.3.2.4 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu.....	II-283
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019	III-2
	3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-17
	3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global	III-18
	3.1.4. Perkembangan Perekonomian Indonesia	III-24
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-39
	3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-39
	3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-43
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.1.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Palu.	IV-1
	4.1.2. Tema Pembangunan	IV-13
	4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan	IV-17
	4.1.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan	IV-27
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020	IV-43
	4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional	IV-43
	4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	IV-47
	4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu	IV-51
	4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu	IV-66
	4.2.5. Sasaran Pembangunan	IV-69

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1. Program Kegiatan Pemerintah Kota Palu Terkait Dimensi Pembangunan Nasional	V-6
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2018	II-2
Tabel 2.2	Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu	II-4
Tabel 2.4	Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu Menurut Kecamatan	II-8
Tabel 2.5	Rata-rata Suhu Udara dan Kelembapan Relatif Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2108	II-9
Tabel 2.6	Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Arah Angin Terbanyak Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2018	II-10
Tabel 2.7	Rata-rata Hari Hujan, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2018	II-11
Tabel 2.8	Penggunaan Lahan pada Kawasan Peruntukan Fungsional Di Kota Palu	II-16
Tabel 2.9	Luas Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Palu	II-17
Tabel 2.10	Lokasi dan Potensi Bahan Tambang di Kota Palu	II-19
Tabel 2.11	Kejadian Gempa Bumi di Sulawesi Tengah (September 2018-Oktober 2018)	II-25
Tabel 2.12	Wilayah Kota Palu Rawan Gelombang Pasang Tsunami ...	II-29
Tabel 2.11	Bencana di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-35
Tabel 2.12	Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2018	II-36
Tabel 2.13	Komposisi Penduduk Kota Palu Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2018	II-37
Tabel 2.14	Komposisi Penduduk Kota Palu Menurut Struktur Usia Tahun 2018	II-38
Tabel 2.15	Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu	II-39
Tabel 2.16	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013-2018 (Juta Rp)	II-42
Tabel 2.17	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Juta Rp)	II-44
Tabel 2.18	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu 2018 (persen)	II-46

Tabel 2.19	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Palu, 2014-2018.....	II-47
Tabel 2.20	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018	II-48
Tabel 2.21	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2014-2018	II-49
Tabel 2.22	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2014-2018	II-51
Tabel 2.23	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha(persen) Tahun 2014-2018	II-52
Tabel 2.24	PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)	II-55
Tabel 2.25	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Ata Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2014-2018	II-58
Tabel 2.26	Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2014-2018	II-60
Tabel 2.27	Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2014-2018 ...	II-61
Tabel 2.28	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia untuk Kota Palu	II-65
Tabel 2.29	Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu Tahun 2015-2018	II-66
Tabel 2.30	APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK Kota Palu (%) Tahun 2014-2018	II-69
Tabel 2.31	Perbandingan APM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2018	II-71
Tabel 2.32	AKHB dan AKB Kota Palu (per 1000 Kelahiran Hidup) Tahun 2014-2018	II-73
Tabel 2.33	Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-77
Tabel 2.34	Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-78
Tabel 2.35	Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000) Tahun 2014-2018	II-82
Tabel 2.36	Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kota Palu (per 1.000 Murid)	

	Tahun 2014-2018	II-83
Tabel 2.37	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu Tahun 2014-2018	II-85
Tabel 2.38	Jumlah Kondisi Bangunan Sekolah Baik PAda Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-85
Tabel 2.39	Jumlah Kondisi Bangunan Sekolah Baik PAda Jenjang SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-85
Tabel 2.40	Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palu Tahun 2014-2018	II-86
Tabel 2.41	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Palu (persen) Tahun 2014-2018	II-87
Tabel 2.42	Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2016-2018	II-89
Tabel 2.43	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-90
Tabel 2.44	Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2014-2018	II-91
Tabel 2.45	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Palu (per 100.000 penduduk) Tahun 2014-2018	II-92
Tabel 2.46	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-93
Tabel 2.47	Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-94
Tabel 2.48	Jumlah dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2016-2018	II-95
Tabel 2.49	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2016-2018	II-96
Tabel 2.50	Panjang Ruas Jalan Bertrotoar dan Berdrainase (Km) Tahun 2014-2018	II-97
Tabel 2.51	Jaringan Irigasi di Kota Palu (meter) Tahun 2014-2018	II-97
Tabel 2.52	Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per 1.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2016-2018	II-98
Tabel 2.53	Perkembangan Rasio Tempat Pemakaman Per Penduduk di Kota Palu Tahun 2016-2018	II-99
Tabel 2.54	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-103
Tabel 2.55	Rasio Izin Trayek di Kota Palu Tahun 2014-2017	II-104

Tabel 2.56	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis Kota Palu Tahun 2014-2018	II-105
Tabel 2.57	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-106
Tabel 2.58	Luas Lahan Bersertifikat di Kota Palu Tahun 2016-2018..	II-106
Tabel 2.59	Persentase Pekerja Perempuan di Kota Palu Tahun 2018..	II-109
Tabel 2.60	Jumlah Sarana Sosial	II-111
Tabel 2.61	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2016-2018	II-111
Tabel 2.62	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-112
Tabel 2.63	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2014-2018 Kota Palu ...	II-113
Tabel 2.64	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2014-2015	II-113
Tabel 2.65	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-114
Tabel 2.66	Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu Tahun 2014 s.d 2018	II-115
Tabel 2.67	Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu Tahun 2014 s.d 2018	II-115
Tabel 2.68	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-116
Tabel 2.69	Jaringan Komunikasi Propinsi/Kota Palu Tahun 2014-2018	II-119
Tabel 2.70	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-120
Tabel 2.71	Jumlah Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2013-2018	II-121
Tabel 2.72	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-122
Tabel 2.73	Destinasi Wisata di Kota Palu	II-125
Tabel 2.74	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan Tahun 2018	II-131
Tabel 2.75	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2018	II-132
Tabel 2.76	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2014-2018 ...	II-134
Tabel 2.77	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2015-	

	2018	II-136
Tabel 2.78	Jumlah Penumpang Bandara Tahun 2014-2018	II-137
Tabel 2.79	Jumlah Penumpang Pelabuhan Tahun 2014-2018	II-138
Tabel 2.80	Jumlah Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan di Kota Palu Tahun 2017-2018	II-140
Tabel 2.81	Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-140
Tabel 2.82	Luas Wilayah Industri dan Perkotaan di Kota Palu Tahun 2016-2018	II-141
Tabel 2.83	Jumlah Bank di Kota Palu tahun 2014-2018	II-142
Tabel 2.84	Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-142
Tabel 2.85	Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-143
Tabel 2.86	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2018.	II-144
Tabel 2.87	Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik Tahun 2014-2018	II-145
Tabel 2.88	Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (PLN) Tahun 2014-2018	II-146
Tabel 2.89	Penduduk yang Menggunakan Telepon Tahun 2014-2018.	II-146
Tabel 2.90	Angka Kriminalitas di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-148
Tabel 2.91	Jumlah Demonstrasi di Kota Palu Tahun 2014-2018	II-148
Tabel 2.92	Lama Proses Perizinan, Jumlah Persyaratan dan Biaya Perizinan di Kota Palu Tahun 2018	II-149
Tabel 2.93	Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2014-2018	II-150
Tabel 2.94	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Palu Tahun 2015-2018	II-152
Tabel 2.95	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2014-2018	II-153
Tabel 2.96	Rasio Ketergantungan Kota Palu	II-154
Tabel 2.97	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palu Tahun 2014-2018	II-155
Tabel 2.98	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2017 s.d Triwulan II (Dua) Tahun 2019	II-196
Tabel 2.99	Rekapan Hasil Evaluasi RKPD Terhadap RPJMD s/d Tahun 2016	II-249
Tabel 2.100	Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan Urusan	

	Pemerintahan Wajib	II-263
Tabel 2.101	Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	II-269
Tabel 2.102	Permasalahan Kota Palu Berkaitan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-279
Tabel 2.103	Permasalahan Kota Palu Berkaitan Urusan Pemerintahan Penunjang	II-284
Tabel 3.1	PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 (Jutaan Rupiah)	III - 5
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2011-2018	III - 7
Tabel 3.3	Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2011 – 2017..	III - 7
Tabel 3.4	Perbandingan Garis Kemiskinan.....	III – 11
Tabel 3.5	<i>Gini Ratio</i> Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah	III – 12
Tabel 3.6	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia untuk Kota Palu.....	III – 13
Tabel 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	III – 16
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Palu Tahun 2017 s.d Tahun 2021.....	III – 41
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2017 s.d Tahun 2021	III – 50
Tabel 3.10	Realisasi Pembiayaan dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kota Palu.....	III – 53
Tabel 4.1	Perbandingan Tingkat Kemiskinan.....	IV – 7
Tabel 4.2	Relasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, dan RKPD Kota Palu Tahun 2020.....	IV – 16
Tabel 4.3	Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2019.....	IV – 18
Tabel 4.4	Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021.....	IV – 21
Tabel 4.5	Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (<i>Nawacita</i>) dengan Prioritas Pembangunan Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah.....	IV – 49
Tabel 4.6	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	IV – 51
Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2020, Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, dan Prioritas P-RPJMD Kota Palu 2016-2021	IV – 55

Tabel 4.8	Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020	IV – 58
Tabel 4.9	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2020 serta PD Penanggung jawab.....	IV – 60
Tabel 4.10	Matriks Keterkaitan <i>Nawacita</i> , Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu.....	IV – 67
Tabel 4.11	Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2020.....	IV – 69
Tabel 5.1	Keterkaitan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palu dengan Dimensi Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020	V – 8
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2020	VI – 2
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palu Tahun 2020	VI - 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kota Palu	II – 3
Gambar 2.2	Peta Class Kelerengan.....	II – 6
Gambar 2.3	Peta Penggunaan Lahan di Kota Palu	II – 15
Gambar 2.4a	Bagan Alir Sungai – Sungai Yang Mengalir Ke Sungai Palu.....	II – 21
Gambar 2.4b	Peta Analisa Rawan Gempa di Kota Palu	II – 26
Gambar 2.5a	Peta Analisa Rawan Longsor di Kota Palu	II – 27
Gambar 2.5b	Peta Analisa Rawan Tsunami di Kota Palu.....	II – 29
Gambar 2.6a	Cakupan Wilayah Terdampak Likuifaksi Di Balaroa, Palu dari Citra Satelit	II – 31
Gambar 2.6b	Cakupan Wilayah Terdampak Likuifaksi Di Petobo, Palu Teridentifikasi dari Citra Satelit	II – 32
Gambar 2.6c	Peta Class Ancaman Bencana Banjir	II – 34
Gambar 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu adh berlaku Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Juta Rp)	II – 42
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan dan PDRB Kota Palu adh Konstan menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2014-2018	II – 43
Gambar 2.9	Struktur Perekonomian Kota Palu Menurut tiga Sektor tahun 2016 dan 2017 (persen).....	II – 45
Gambar 2.10	PDRB Perkapita Kota Palu dan Propinnsi Sulawesi Tengah (Ribuan Rp) Tahun 2014-2018	II – 57
Gambar 2.11	PDRB Perkapita Kota Palu dan Propinnsi Sulawesi Tengah (Ribuan Rp) Tahun 2014-2018	II – 62
Gambar 2.12	Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2014 – 2018 ...	II – 63
Gambar 2.13	Angka Melek Huruf Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018	II – 67
Gambar 2.14	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Palu, tahun 2014-2018.	II – 68
Gambar 2.15	Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2014-2018 ...	II – 70
Gambar 2.16	Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi	

	Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018	II – 74
Gambar 2.17	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu	II – 76
Gambar 2.18	Perkembangan APS SD/MI, SMP / MTs / SMA / MA / SMK di Kota Palu (persen) Tahun 2014 – 2018	II – 80
Gambar 2.19	Angka Putus Sekolah SD / MI, SMP /MTs /SMA / MA/SMK di Kota Palu Tahun 20180	II – 87
Gambar 2.20	Rasio TPS Persatuan Penduduk di Kota Palu (Ton) Tahun 2017 – 2018	II – 100
Gambar 2.21	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 101
Gambar 2.22	Persentase Pelanggan Pengguna Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga di Kota Palu Tahun 2014 –2018	II – 102
Gambar 2.23	Persentase Uji Kir Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 103
Gambar 2.24	Rasio Penduduk Ber KTP di Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 107
Gambar 2.25	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 108
Gambar 2.26	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Palu Tahun 2014 – 2016	II – 108
Gambar 2.27	Rata-rata Anak Per Keluarga di Kota Palu Tahun 2016 – 2018	II – 109
Gambar 2.28	Rasio Akseptor KB di Kota Palu Tahun 2016 – 2018	II – 110
Gambar 2.29	Cakupan Peserta KB di Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 110
Gambar 2.30	Rasio Polisi Pamong Praja di Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 117
Gambar 2.31	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2014-2018	II – 117
Gambar 2.32	Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 118
Gambar 2.33	Rasio Wartel/Warnet di Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 120

Gambar 2.34	Total Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 121
Gambar 2.35	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2014-2018 ...	II – 123
Gambar 2.36	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kota Palu (%) Tahun 2014 – 2018	II – 124
Gambar 2.37	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) di Kota Palu Tahun 2014 – 2017	II – 125
Gambar 2.38	Kontribusi Sektor PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 126
Gambar 2.39	Produksi Ikan di Kota Palu (Ton) Tahun 2014 – 2018	II – 127
Gambar 2.40	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 128
Gambar 2.41	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2014 – 2018	II – 128
Gambar 2.42	Rerata Pengeluaran Perkapita (Rp/Tahun)	II – 130
Gambar 2.43	Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum .	II – 135
Gambar 2.44	Jumlah Orang Yang Melalui Terminal	II – 137
Gambar 3.1	PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Jutaan rupiah) Tahun 2015 – 2017	III – 6
Gambar 3.2	Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kota Palu	III – 9
Gambar 3.3	Penduduk Miskin Kota Palu	III – 10
Gambar 3.4	Garis Kemiskinan Kota Palu	III – 10
Gambar 3.5	Indeks Pembangunan Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu	III – 14
Gambar 3.6	Angka Harapan Hidup	III – 14
Gambar 3.7	Dimensi Pendidikan	III – 15
Gambar 3.8	Dimensi Daya Beli Masyarakat	III – 16
Gambar 3.9	Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Negara (% YoY)..	III - 20
Gambar 4.1	Penduduk Miskin Kota Palu	IV – 7
Gambar 4.2	Posisi RKPD Tahun 2020 dalam Tahapan P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021	IV – 14

Gambar 4.3	Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu Tahun 2016-2021	IV - 15
Gambar 5.1	Alokasi Pembiayaan Program Prioritas Tahun 2020	V - 13

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA
PALU TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD. Secara substansial RKPD merupakan penjabaran dari visi, misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RKPD memuat kebijakan umum, arahan operasional serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk satu tahun ke depan. Selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD.

Penyusunan RKPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Orientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan, Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah

I-1

RKPD KOTA PALU
TAHUN 2020

pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, hingga nasional. Selanjutnya, secara substansi dokumen RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Penyusunan RKPD Tahun 2020 yang merupakan tahapan tahun keempat pelaksanaan P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021. Perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terutama menyangkut urusan dan kewenangan pemerintahan daerah, serta terjadinya perubahan dan penyesuaian tata laksana organisasi perangkat daerah, sehingga P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sudah mengakomodir perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 secara jelas telah mengatur mekanisme dan waktu pelaksanaan penyusunan hingga penetapan RKPD, secara hierarkis penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2020 berpedoman dan mengacu pada dokumen RPJPD Kota Palu 2005-2025, dengan tetap memperhatikan RTRW Kota Palu 2010 – 2030, P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, RKP Tahun 2020 dan RTRW Nasional.

RPJP Kota Palu 2005 – 2025 menyatakan bahwa sasaran pokok dan sekaligus merupakan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam tahap keempat pembangunan jangka panjang Kota Palu adalah meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan tersedianya Kawasan Pusat Industri Perdagangan dan Industri, Pariwisata, serta

Pelayanan Publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga Keseimbangan Lingkungan.

Hasil pembangunan yang ingin dicapai pada akhir tahap keempat RPJPD Kota Palu, ialah :

- Setiap wilayah kecamatan telah memiliki Kawasan Pusat Perdagangan dan Industri, Pariwisata, serta tersedianya Fasilitas untuk Kemudahan Pelayanan Publik, tanpa mengabaikan persoalan lingkungan;
- Terciptanya kondisi ketertiban dan keamanan yang kondusif, melalui pemahaman nilai - nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, kesetaraan dan nondiskriminasi, meningkatnya kesadaran dan penerapan penegakan hukum, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang didukung profesionalitas aparatur;
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial, yang mengarah pada perbaikan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatnya kualitas dan relevansi, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dengan didukung manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif dalam menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa;
- Daya saing perekonomian yang semakin kuat dan kompetitif dengan terpadunya sektor perdagangan, pariwisata, industri dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan;
- Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, Iptek, dan industri;
- Terlaksananya penata kelolaan lembaga ekonomi masyarakat yang mendorong pada peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta penguasaan dan penerapan teknologi dalam kegiatan perekonomian;

- Ketersediaan dan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang daerah, melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam ketersediaan, air minum melalui konservasi, pengembangan dan keberlanjutan sumber daya air, pemukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, termasuk pemenuhan pasokan tenaga listrik hingga ke tingkat elektrifikasi rumah tangga;
- Pembangunan berkelanjutan menuju kota ekologis, yang dicerminkan oleh indikator terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara lestari; Semakin membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan dan semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang serta meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.

Selain pencapaian RPJP dan RPJMD Kota Palu Tahun 2016 - 2021, juga dimaksudkan untuk penyesuaian dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Palu sesuai dengan Keputusan Walikota Palu Nomor 360/294.a/BPBD/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020.

Pada tataran tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, RKPD Kota Palu Tahun 2020 diorientasikan untuk mendukung visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 yaitu Sulawesi Tengah Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing. Untuk tingkat nasional, RKPD Kota Palu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan dokumen rencana kerja Pemerintah Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional meliputi: 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; 2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah; 3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; 4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

I-4

RKPD KOTA PALU TAHUN 2020

Pada akhirnya, RKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja PD, terkait arah kebijakan, kerangka pendanaan serta implementasi dan operasionalisasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 2) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

I-5

- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966);
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

- 24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

I-8

**RKPD KOTA PALU
TAHUN 2020**

- (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 76);
- 36) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13).
- 37) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
- 38) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Palu Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang masih relevan dan berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan yang telah ada, serta dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan daerah provinsi dan nasional,

serta kabupaten yang berbatasan (antar waktu, antar ruang, antar wilayah dan antar urusan pemerintahan).

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 ini berpedoman pada P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, memperhatikan dan selaras dengan agenda, arah kebijakan RKP Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 serta dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kota Palu Tahun 2019-2020. Penyusunan RKPD dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu. Selanjutnya, RKPD Tahun 2020 akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja PD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD Tahun 2020.

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Kota Palu Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Secara substansial, normatif, operasional dan faktual penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2020 bertujuan:

- a. Sebagai arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan diusulkan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai

landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. Sebagai arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
- d. Menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palu Tahun 2020 berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
 - 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
 - 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu. Kota Palu ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi, dalam struktur tata ruang kota palu juga ditunjuk sebagai PKN (pusat kegiatan nasional). Secara umum, kota palu disebut sebagai kota lima dimensi, sebab berpadunya unsur alami gunung, pantai, lembah, sungai dan bukit dalam satu landskep hamparan yang utuh. Adapun informasi Kondisi umum Kota Palu dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut :

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi Kota Palu, menggambarkan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Palu.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Palu terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%). Luas Wilayah Kota Palu secara rinci tergambar dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1**Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,78
3.	Ulujadi	40,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
Kota Palu		395,06	100,00

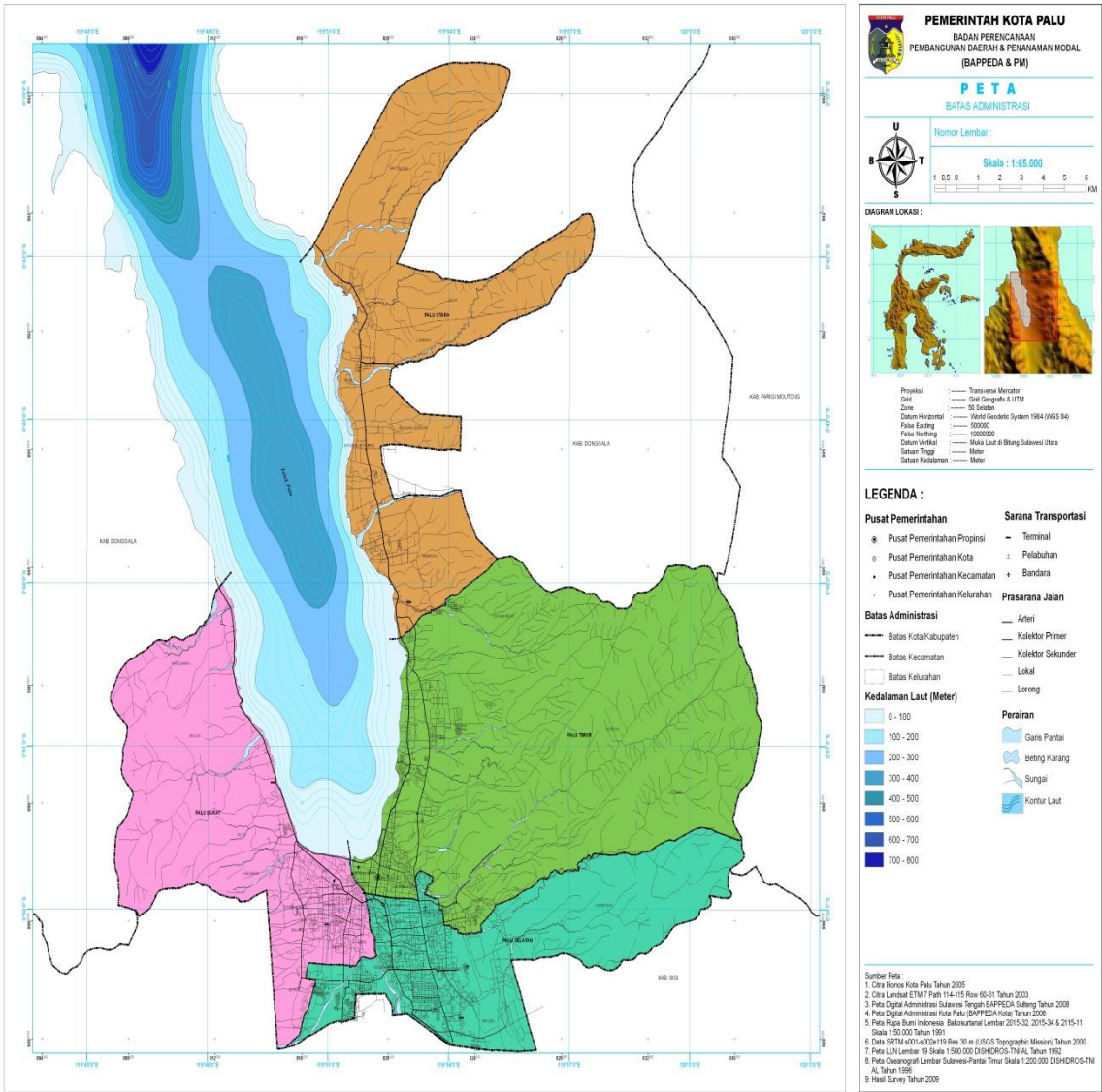
Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Kota Palu berada di sekitar garis Khatulistiwa, sebagian besar kelurahan berada pada daratan lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Palu yang berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu, secara astronomis terletak antara 0°,36” - 0°,56” Lintang Selatan dan 119°,45” - 121°,1” Bujur Timur. Luas wilayah Kota Palu, adalah 395,06 km² yang berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 2.1.



Sumber: RTRW kota palu, 2010-2030

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Letak Kecamatan Kota Palu menurut posisi pantai diuraikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Letak	
			Pantai	Bukan Pantai
1	Palu Barat	6	1	5
2	Tatanga	6	-	6
3	Ulujadi	6	4	2
4	Palu Selatan	5	-	5
5	Palu Timur	5	1	4
6	Mantikulore	8	3	5
7	Palu Utara	5	4	1
8	Tawaeli	5	4	1
Kota Palu		46	17	29

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

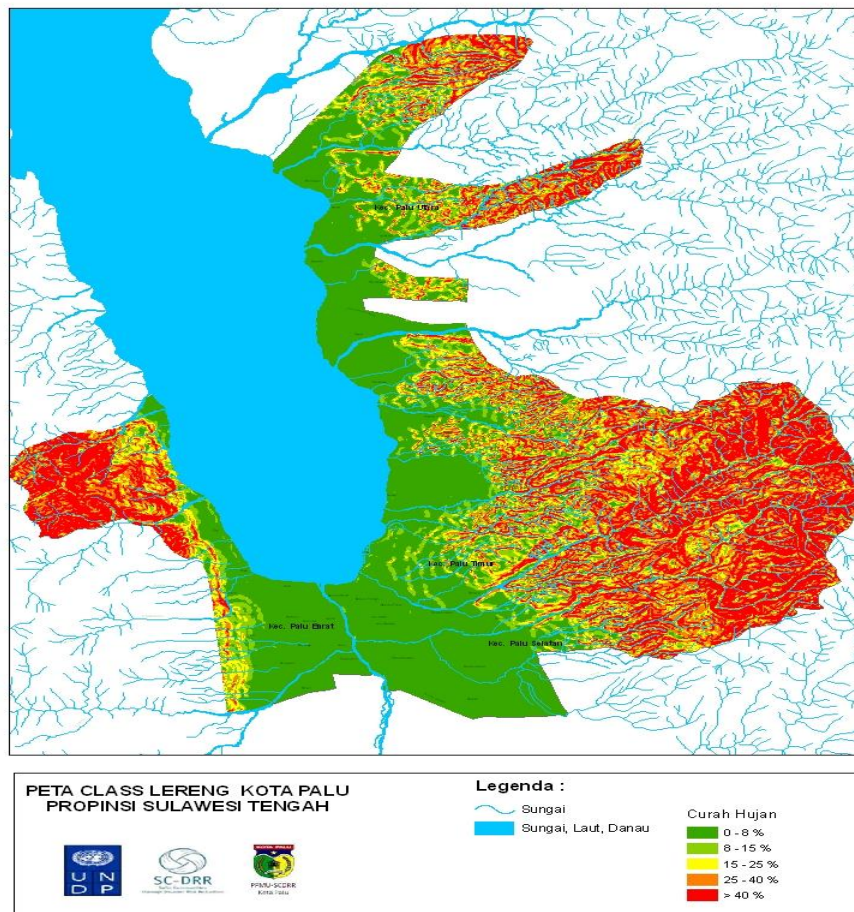
Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan seluruhnya berada di wilayah lembah yang tidak memiliki pantai. Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli hampir semuanya berada pada pesisir pantai, dimana terdapat 4 (empat) Kelurahan yang berada pada pesisir pantai dan hanya terdapat 1 (satu) Kelurahan yang berada pada wilayah bukan pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, 4 (empat) diantaranya berada disepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya berada pada wilayah bukan pantai.

C. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Kota Palu adalah datar sampai berombak-ombak dengan beberapa daerah yang berlembah. Keadaan topografi secara tak langsung merupakan kendala aktif atas penggunaan lahan. Tampak daerah pedataran merupakan pusat dari berbagai sektor kehidupan, seperti misalnya permukiman, perkotaan, pesawahan dan kebun palawija. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan umumnya merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai kebun-kebun, tanah tegalan, perkebunan permanen, hutan produksi dan hutan lindung, serta Taman Hutan Raya (*TAHURA*).

Hasil analisis terhadap peta topografi diperoleh klasifikasi kemiringan lereng terdapat di wilayah Kota Palu sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.2, sebagai berikut :

1. Daerah pedataran berkemiringan lereng kurang dari 0% - 8% dan 8% - 15%, meliputi seluruh wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Palu, termasuk semua kelurahan yang ada didalamnya;
2. Daerah landai dengan kemiringan lereng antara 15% - 25%, meliputi seluruh wilayah kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan Kota Palu;
3. Daerah agak terjal berkemiringan lereng 25% - 40%, meliputi wilayah yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Buluri, Watusampu, Kabonena, dan Donggala Kodi dll;
4. Daerah terjal berkemiringan lereng > 40%, meliputi wilayah Pegunungan di wilayah Timur, Utara dan Barat Kota Palu yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Buluri dan Watusampu.



Sumber : Bappeda Kota Palu, 2010

Gambar 2.2.
Peta Class Kelerengan

Secara umum wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi tiga zona ketinggian, yaitu:

1. Sebagian daerah bagian barat sisi timur memanjang dari utara ke selatan, bagian timur arah utara dan bagian utara sisi barat yang memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0-100 meter diatas permukaan laut (mdpl).
2. Daerah bagian barat sisi barat dan selatan, daerah bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl).
3. Daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter diatas permukaan laut (mdpl).

D. Kondisi Geologi

Geologi tanah dataran lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan *alluvial* dan *colluvial* yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang. Secara umum batuan yang menyusun daerah penelitian terdiri atas Aluvium muda, berasal dari endapan sungai, aluvium, endapan kipas aluvial, koluvium, andesit basalt, batu pasir, konglomerat, batu lumpur, granit, granodiorit, riolit, quartzite, filit, serpih dan schist yang kesemuanya tersebar pada daerah di wilayah Kota Palu.

Secara geologis, orientasi fisiografi Kota Palu berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun Kota Palu, dimana sisi kiri dan kanan Kota Palu merupakan jalur patahan utama, yaitu patahan Palu-Koro serta wilayahnya disusun oleh batuan yang lebih keras dibanding material penyusun bagian lembah.

Berdasarkan hubungan geologi, geomorfologi Kota Palu dapat dibagi kedalam tiga satuan geomorfologi, yaitu :

1. Satuan Geomorfologi Dataran, dengan kenampakan morfologi berupa topografi tidak teratur, lemah, merupakan wilayah dengan banjir musiman, dasar sungai umumnya meninggi akibat sedimentasi fluvial. Morfologi ini disusun oleh material utama berupa aluvial sungai dan pantai. Wilayah tengah Kota Palu didominasi oleh satuan geomorfologi ini;
2. Satuan Geomorfologi Denudasi dan Perbukitan, dengan kenampakan berupa morfologi bergelombang lemah sampai bergelombang kuat. Wilayah kipas aluvial (aluvial fan) termasuk dalam satuan morfologi ini. Di wilayah Palu morfologi ini meluas di wilayah Palu Timur, Palu Utara, membatasi antara wilayah morfologi dataran dengan morfologi pegunungan.
3. Satuan Geomorfologi Pegunungan Tebing Patahan, merupakan wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Kenampakan umum berupa tebing-tebing terjal dan pelurusan morfologi akibat proses patahan. Arah pegunungan ini hampir utara-selatan, baik di timur maupun di barat dan menunjukkan pengaruh

struktur/tektonik terhadap bentuk kini morfologi Kota berupa lembah. Umumnya wilayah ini bukan merupakan wilayah hunian.

E. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai, melintas melalui semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Matikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Sementara 5 (lima) Kecamatan dilalui 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Tabel 2.4 menunjukkan nama-nama sungai yang mengalir melewati semua Kecamatan yang berada diwilayah Kota Palu.

Tabel 2.4
Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Palu Barat	Sungai Palu
2.	Tatanga	Sungai Lewara
3.	Ulujadi	Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo
4.	Palu Selatan	Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.
5.	Palu Timur	Sungai Palu, dan Sungai Pondo
6.	Mantikulore	Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela
7.	Palu Utara	Sungai Taipa dan Sungai Pajeko
8.	Tawaeli	Sungai Pantoloan, dan Sungan Tawaeli

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

Pada tahun 2018, suhu udara maksimum yang tercatat pada Stasiun Udara Mutiara Palu adalah 33,8°C terjadi pada bulan april, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan januari yaitu sebesar 21,9°C. Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan desember yaitu sebesar 28,3°C. Sementara, rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan juni, yaitu sebesar 26,7°C, Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan juni yang mencapai 84,0 persen, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan desember yaitu 74,9 persen.

Tekanan udara tertinggi yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu tahun 2018 terjadi pada bulan juli yaitu 1.012,0 mb, sedangkan tekanan udara terendah terjadi pada bulan desember yaitu 1.010,4 mb.

Tabel 2.5
Rata-rata Suhu Udara dan Kelembapan Relatif Setiap bulan di Kota Palu tahun 2018

Bulan	Suhu Udara			Kelembapan
	Minimum	Maximum	Rata-rata	(%)
Januari	21,9	32,3	27	79,4
Pebruari	23,9	32,7	27,4	78,8
Maret	23,8	32,9	27,3	78,2
April	24,2	33,8	28,1	75,5
Mei	24,6	33,5	28	80,1
Juni	23,7	30,9	26,7	84
Juli	23,5	31,7	26,8	82,6
Agustus	23,7	31,8	26,9	82,3
September	23,6	32,8	27,4	80,1
Oktober	24	32,9	27,9	78,8
Nopember	24,4	33,1	28,2	77,1
Desember	24,2	33,2	28,3	74,9

Sumber: Stasiun Udara Mutiara Palu, 2018

Kecepatan angin bertiup dengan kecepatan yang nyaris konstan, antara 4-5 knots, angka 5 knots terjadi pada bulan februari, maret, april, mei, oktober dan november, sedangkan kecepatan angin dengan kecepatan 4 knots terjadi pada bulan

januari, juni, juli, agustus, september dan desember. Arah angin terbanyak pada tahun 2018 masih berada pada posisi barat laut, meskipun pada bulan januari, februari dan maret arah angin dari posisi utara.

Tabel 2.6
Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan
Arah Angin Terbanyak Setiap bulan di Kota Palu, Tahun 2018

Bulan	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)	Arah Angin
Januari	1010,9	4	Utara
Pebruari	1011,4	5	Utara
Maret	1011,5	5	Utara
April	1010,4	5	Barat laut
Mei	1011	5	Barat laut
Juni	978,1	4	Barat laut
Juli	1012	4	Barat laut
Agustus	1011,3	4	Barat laut
September	1011,5	4	Barat laut
Oktober	1010,4	5	Barat laut
Nopember	1009,3	5	Barat laut
Desember	1011,1	4	Barat laut

Sumber: Stasiun Udara Mutiara Palu, 2018

Pada tahun 2018, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juni yaitu 166 mm. Rata-rata jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan oktober yaitu sebanyak 25 hari, sedangkan jumlah hari hujan paling sedikit terjadi di bulan desember sebanyak 14 hari. Penyinaran matahari pada tahun 2018 tertinggi terjadi pada bulan oktober yaitu sebanyak 67 %, sedangkan penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan februari sebanyak 49%.

Tabel 2.7
Rata-rata Hari Hujan, Curah Hujan dan
Penyinaran Matahari Setiap bulan di Kota Palu, Tahun 2018

Bulan	Jumlah hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	17	44	61
Pebruari	19	52	49
Maret	22	43	56
April	18	37	62
Mei	16	72	64
Juni	22	166	50
Juli	23	95	58
Agustus	23	121	54
September	24	86	64
Oktober	25	85	67
Nopember	20	36	65
Desember	14	25	59

Sumber: Stasiun Udara Mutiara Palu, 2018

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan perkotaan, khusus luas lahan pemukimannya mencapai 2.477,16 ha, apabila dirinci per kecamatan diketahui luas lahan terluas untuk pemukiman adalah Kecamatan Palu Selatan yakni 583,59 ha (23,56%), kemudian Mantikulore seluas 477,67 ha (19,28%), Kecamatan Palu Utara seluas 398,17 ha (16,07%), Kecamatan Palu Barat seluas 267,58 ha (10,80 %), Kecamatan Ulujadi seluas 244,78 ha (9,88 %), Kecamatan Palu Timur seluas 237, 2 ha (9,58 %), Kecamatan Tavaili seluas 140, 15 ha (5,66%) dan terkecil adalah Kecamatan Tatanga yaitu 128,02 ha (5,17 %).

Rencana pola ruang Kota Palu mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya pada kawasan daratan seluas ± 39.504 ha dan laut seluas ± 10.460 ha. Klasifikasi pola ruang wilayah Kota Palu terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, sebagai berikut:

- a. Kawasan Lindung Kota Palu seluas ± 22.290 ha yang terdiri atas:
- Hutan lindung;
 - Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air;
 - Ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan permakaman;
 - Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir dan kawasan lindung lainnya.
- b. Kawasan budidaya Kota Palu meliputi kawasan budidaya wilayah darat dengan luas ± 17.216 ha dan Kawasan Budi Daya wilayah laut dengan luas ± 10.460 ha yang terdiri atas :
- Kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah;
 - Kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - Kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;
 - Kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan;
 - Kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
 - Kawasan ruang terbuka non hijau;
 - Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi *melting point* ketika bencana terjadi;
 - Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan Kawasan peruntukan lainnya, antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan,

peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Berdasarkan Perda Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010-2030, bahwa Rencana kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palu terdiri atas RTH publik dan RTH privat. RTH publik publik yang telah ada di Kota Palu meliputi kawasan seluas kurang lebih 1.833 hektar atau sekitar kurang lebih 4,64 persen dari luas wilayah Kota Palu yang meliputi:

- taman kota yang terdistribusi di Kecamatan Palu Timur, Palu Selatan, dan Palu Barat, dengan luas kurang lebih 7,39 hektar;
- hutan kota kurang lebih seluas 395,56 hektar yang meliputi wilayah Kecamatan Palu Timur;
- pemakaman umum dan Taman Makam Pahlawan seluas kurang lebih 91,39 hektar yang terdistribusi di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat;
- arboretum di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 95 hektar;
- daerah penyangga Tahura di Kelurahan Poboya seluas kurang lebih 21,64 hektar;
- daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Barat seluas kurang lebih 208,40 hektar;
- daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 134,41 hektar;
- daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Utara seluas kurang lebih 327,69 hektar;
- daerah penyangga kawasan industri hilir di Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 112,79 hektar;
- daerah penyangga kawasan industri hilir di Kecamatan Palu Selatan seluas kurang lebih 135,81 hektar;
- daerah penyangga kawasan perkandangan ternak di Kecamatan Palu Selatan seluas kurang lebih 94,25 hektar;
- daerah penyangga KKOP di sekitar Bandara Mutiara Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan seluas 127,17 hektar;

- jalur hijau pada sepanjang ruas jalan di Kota Palu seluas 2,15 hektar; dan
- lapangan terbuka hijau terdapat di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat seluas kurang lebih 79,34 hektar.

Sedangkan RTH privat meliputi pekarangan rumah tinggal dan halaman perkantoran. Rencana pengembangan RTH Kota Palu untuk mencapai 30,10 persen dari luas wilayah kota yaitu seluas 11.889,74 hektar, yang terdiri dari 20,00 persen RTH Publik dan 10,10 persen RTH Privat meliputi:

- pengembangan taman RT dan RW yang akan didistribusikan pada pusat unit-unit pengembangan perumahan;
- pemanfaatan halaman depan perkantoran pemerintahan dan swasta sebagai taman publik;
- pengembangan taman kota yang akan didistribusikan di setiap kelurahan dan kecamatan pada wilayah Kota Palu;
- pengembangan median dan pedestrian ruas jalan di Kota Palu sebagai ruang terbuka hijau;
- pengembangan ruang terbuka hijau pada Kawasan Industri Palu di Kecamatan Palu Utara berupa taman lingkungan, taman pada pedestrian dan median jalan kurang lebih seluas kurang lebih 300 hektar;
- pengembangan agro wisata di Kelurahan Lambara Kecamatan Palu Utara seluas kurang lebih 150 hektar;
- pengembangan hutan kota di Kelurahan Kawatuna Kecamatan Palu Selatan seluas kurang lebih 100 hektar dan kebun raya di Kecamatan Palu Utara seluas kurang lebih 200 hektar;
- Pengembangan daerah sempadan SUTT di Kecamatan Palu Utara dan Palu Timur seluas kurang lebih 55,18 hektar;
- Pengembangan Hutan Kota di Kecamatan Palu Timur seluas kurang lebih 612 hektar;
- Pengembangan daerah KKOP disekitar Bandara Mutiara Palu menjadi Ruang Terbuka Hijau seluas kurang lebih 165,3 hektar;

Penentuan penggunaan lahan di Kota Palu dibagi ke dalam kawasan fungsional (wilayah keputusan) berlandaskan kepada enam zona yang dibagi ke dalam 21 kawasan. Adapun pembagian kawasan tersebut diuraikan secara rinci dalam Tabel 2.8

Tabel 2.8
Penggunaan Lahan pada Kawasan Peruntukan Fungsional
Di Kota Palu

Bagian Wilayah	Penamaan	Fungsi Saat Ini
Zona I	Z.I	Kawasan Industri, Permukiman, Perdagangan, Kawasan Lindung, Hutan, Sawah Jasa Lainnya, Sarana Olahraga, Sarana Transportasi, Tegalan, Semak Belukar, dan Kebun
Zona II	Z.II	Permukiman, Kebun, Semak Belukar, Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan, Kawasan Pendidikan, Sarana Kesehatan, Hutan,Sarana Olahraga, Peternakan
Zona III	Z.III	Kawasan Tahura, Kawasan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Semak Belukar, Permukiman, Kebun, Sawah
Zona IV	Z.IV	Permukiman, Perdagangan, Taman Kota, Pertanian, Perkantoran, Kawasan Wisata, Sarana Kesehatan, Sarana Transportasi, IPLT, Kawasan Wisata Budaya, Kawasan Peruntukan Lainnya.
Zona V	Z.V	Permukiman, Perdagangan, Kawasan Wisata, Sarana Kesehatan,Kawasan Wisata Budaya, Pertanian, Taman Kota, Sarana Transportasi, Kebun.
Zona VI	Z.VI	Kawasan Lindung, Hutan, Permukiman, Kebun, Tegalan, Sawah, Semak Belukar, Kawasan Wisata.

Sumber: RTRW Kota Palu, 2010

Pilihan kemungkinan peruntukan fungsional dilihat berdasarkan fungsi yang telah ada saat ini dan akan tetap

dipertahankan selama kurung waktu analisis disesuaikan dengan fungsi masing-masing pembagian yang telah diarahkan dalam analisis tata ruang wilayah. Adapun berbagai potensi lahan dikota palu, secara umum sebagai berikut :

a) Potensi Lahan Kota Palu

Jenis penggunaan lahan oleh masyarakat di wilayah Kota Palu meliputi perumahan/permukiman, lahan basah, perkebunan, kawasan hutan, ruang terbuka hijau dan lain-lain. Adapun luas masing-masing jenis penggunaan lahan disajikan pada Tabel 2.9

Tabel 2.9
Luas Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Palu

No	Jenis Penggunaan Lahan	Palu Barat dan ulujadi (ha)	Palu Timur dan Mantikulore (ha)	Palu Utara dan Tavaili (ha)	Palu selatan dan Tatanga (ha)	Jumlah
1	Perumahan/Pemukiman	593.50	518.47	538.76	854.32	2,505.05
2	Lahan Basah	171.88	81.58	537.01	524.38	1,314.84
3	Perkebunan	63.17	314.48	203.64	29.35	610.64
4	Perkantoran	1.61	3.52	2.66	4.18	11.97
5	Sarana Pendidikan	35.93	208.25	11.76	24.66	280.60
6	Sarana Kesehatan	1.41	4.79	1.42	4.08	11.70
7	Sarana Peribadatan	8.25	2.07	1.19	5.60	17.10
8	Perdagangan	26.92	9.66	0.89	25.66	63.13
9	Kawasan Wisata	7.37	63.70	9.72	15.38	96.17
10	Kawasan Industri	5.41	17.10	69.15	2.91	94.57
11	Kawasan Lapangan Olahraga	6.84	4.00	3.96	0.86	15.66
12	Kawasan Peternakan	0.53	5.63	-	5.63	11.79
13	Kawasan Pemakaman	3.79	8.66	0.11	2.80	15.36
14	TPA dan IPLT	-	1.915	-	7.037	8.95
15	Hutan Produksi Terbatas	-	2,358.22	2,017.77	-	4,375.99
16	Hutan Lindung	2,512.91	3,728.19	-	899.88	7,140.98
17	Lahan Terbuka Hijau	0.021	226.91	0	4.91	231.841
18	Tahura Palu	-	4,253.76	-	1,535.24	5,789.00
19	Lain-lain	2,307.45	6,844.11	5,570.96	2,188.13	16,910.65
Jumlah		5,747.00	18,655.00	8,969.00	6,135.00	39,506.00

Sumber: Dokumen RP-RHL Kota Palu,

b. Potensi Pertambangan

Terdapat berbagai potensi pertambangan di Kota Palu yaitu galian C, emas, gipsum, andesit, dll.

✓ *Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil)*

Bahan galian ini terdapat di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Layana Indah (sekitar Vatutela) di Kecamatan Palu Timur dan Kelurahan Mamboro di Kecamatan Palu Utara. Sedangkan Pasir dan Batu (Sirtu) tersebar di semua sungai di Kota Palu. Lokasi potensi material ini umumnya terdapat di sekitar wilayah sungai, baik sungai permanen maupun sungai tadah hujan. Ijin Pengusahaan Bahan Galian C Sirtu di Kota Palu saat ini terdapat pada lokasi-lokasi, yaitu :

- S. Lambagu, Kelurahan Pantoloan (10 Ha)
- S. Sombe Lewara, Kelurahan Pengawu (19 Ha)
- S. Nyoli, Kelurahan Watusampu (6 Ha)
- S. Wala, Kelurahan Watusampu (7 Ha)
- Bukit Buluri Ipi, Kelurahan Watusampu (21 Ha)
- S. Nggolo, Kelurahan Buluri (17 Ha)
- S. Taipa, Kelurahan Taipa (4 Ha)

✓ *Granit dan Andesit*

Granit dan andesit merupakan batuan beku insitu yang dalam penambangannya berbeda dengan cara penggalan tasirtu. Mengingat sifat yang keras dan tubuh batuan yang besar maka penambangan bahan galian ini akan memerlukan energi yang besar guna memungkinkan bagi adanya jalur retakan untuk kemudahan penggalan. Granit terdapat di daerah Silae sampai dengan Watusampu serta di Vatutela Tondo. Sedangkan batuan andesit terdapat wilayah antara Buluri dan Watusampu.

✓ *Lempung dan Gipsum*

Lempungyang dimaksud adalah lempung merah yang dapat digunakan sebagai bahan baku batubata yang banyak terdapat di

bagian tengah dan selatan Kota Palu. Adapun gipsum, dijumpai di wilayah perbukitan dusun Vatutela kelurahan Tondo.

✓ *Garam (KCl)*

Garam banyak dijumpai di sepanjang pantai di Kota Palu, khususnya di Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur.

✓ *Emas*

Di wilayah Kota Palu, bahan galian yang termasuk golongan B ini terdapat di Kelurahan Poboya. Luas areal pertambangan emas di Kelurahan tersebut sekitar 7.120 Ha. Secara rinci potensi bahan tambang di Kota Palu dapat dilihat pada Tabel 2.10. berikut

Tabel 2.10
Lokasi dan Potensi Bahan tambang di Kota Palu

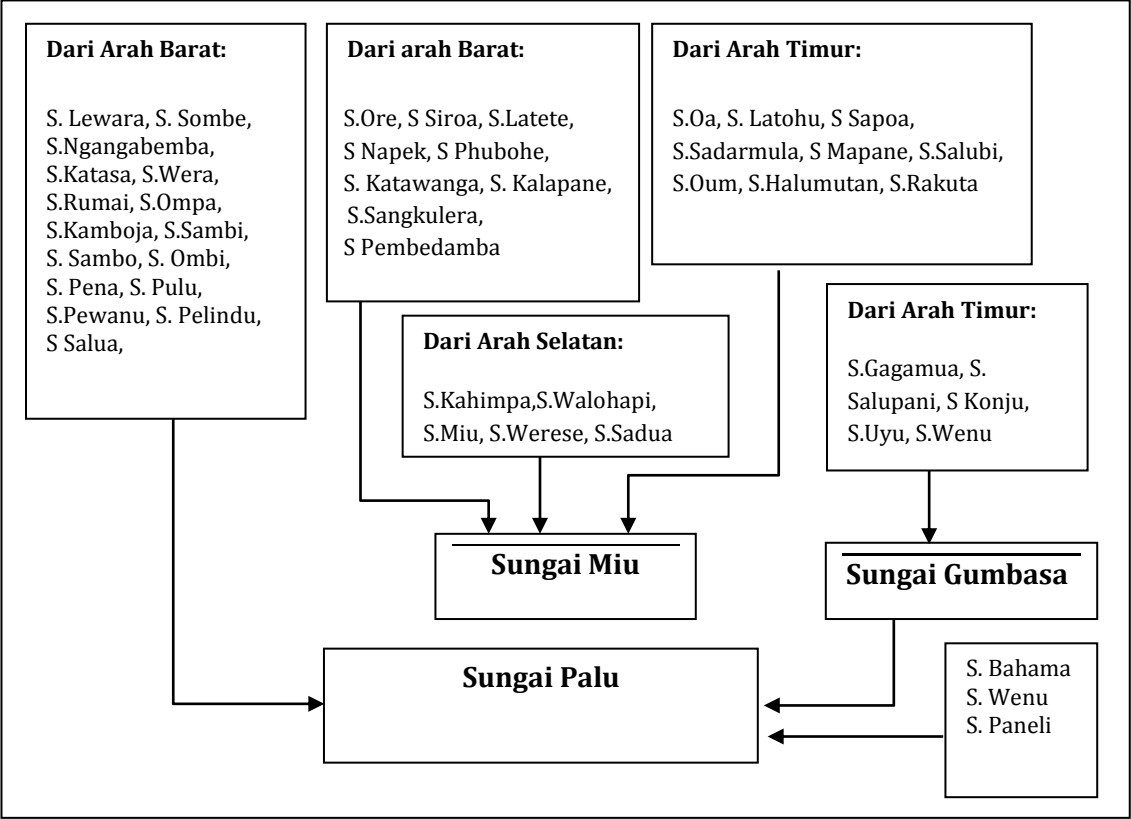
No.	Nama Bahan Galian	Lokasi	Potensi/Sebaran	Keterangan
1.	Pasir Batu Kerikil (Sirtukil)	S. Labuan, S. Taipa, S. Paboya, S. Kawatuna, S. Palu, S. Tawaeli, S. Pantoloan, S. Lambagu, S. Layana, S. Sombe Lewara, S. Palupi, S. Rato, S. Nggolo, S. Pokove, S. Watusampu, Bukit Watusampu dan Bukit Nyoli.	Sangat berpotensi dengan cadangan yang sangat besar, terutama S.Labuan, S.Taipa, S. Tawaeli dan S. Watusampu	Eksplorasi saat ini dilakukan S. Tawaeli (46,65 Ha), S.Watusampu (14,3 Ha), S. Lambagu (10 Ha), Bukit Watusampu (15 Ha), S. Nggolo (5 Ha) dan Bukit Nyoli (14 Ha)
2.	Emas	Desa Poboya., Palu Timur	Terdapat sebagai urat-urat dalam granit	Ijin eksplorasi oleh PT. Citra Palu Minerals
3.	Granit	Silae, Watusampu, Buluri, Kabonena,	Cukup di Silae, Watusampu, Buluri,	Sebaran granit merupakan batas litologi bagian timur dan

No.	Nama Bahan Galian	Lokasi	Potensi/Sebaran	Keterangan
		Donggala Kodi, dan Watutela	Donggala Kodi, Kabonena dan hanya setempat di Watutela	meluas sampai wilayah Kab. Donggala.
4.	Andesit	Buluri dan bagian barat Watusampu, Kec. Palu Barat	Sedang	Umumnya terletak dibawah lapisan pelapukan perbukitan, kecuali areal sepanjang sungai dan jalan. Sebaran meluas hingga wilayah Kab. Donggala
5.	Lempung	Kel. Tatura Utara dan Birobuli Selatan (Palu Selatan) dan Kawatuna (Palu Timur)	Sedang	Sebagian telah menjadi areal pemukiman
6.	Gypsum	Dusun Watutela, Tondo Kec. Palu Timur	Terbatas	Dijumpai setempat-setempat dalam formasi batuan molase

Sumber : RTRW Kota Palu, 2010

c. Potensi Sungai

Aliran sungai di Kota Palu umumnya bersumber dari arah yang variatif yaitu dari Selatan mengalir ke Utara, dari Barat Ketimur, dari Timur ke barat yang kesemuanya bermuara pada teluk Palu, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4. Sungai-sungai tersebut membentuk pola subtrellis dan dendritik ditunjukkan oleh cabang anak-anak sungai, sedangkan pola radier ditemukan di daerah pegunungan.



Gambar 2.4a
Bagan Alir Sungai- Sungai Yang Mengalir ke Sungai Palu

d. Potensi Pariwisata

Wilayah Kota mempunyai beberapa kawasan wisata yang merupakan tujuan wisatawan domestik maupun manca negara. Potensi wisata tersebut terdiri atas :

❖ Museum Sulawesi Tengah

Museum Sulawesi Tengah yang terletak di Kota Palu sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tengah menyimpan sekitar 7.000 koleksi. Sebagian koleksi ditata dalam dua Gedung Pameran Tetap dan sebagian lainnya masih tersimpan dalam Gedung Penyimpanan Koleksi (*Storage*). Dalam gedung Pameran Tetap dapat disaksikan aneka kebudayaan dari 12 etnis seperti upacara daur hidup, pembuatan kain tenun donggala, meramu sagu dan pembuatan kain kulit kayu.

❖ Sou Raja

Rumah raja atau Sou Raja atau juga disebut Banua Mbaso yang berarti rumah besar. Rumah berbentuk panggung ini

merupakan warisan nenek moyang keluarga para bangsawan suku Kaili. Saat ini Banua Mbaso masih dapat dilihat di Kabupaten Sigi, Tavaili, Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Khusus Kota Palu dapat dilihat keberadaan rumah Sou Raja yang masih terawat sebagai salah satu cagar budaya terdapat di kelurahan Lere kecamatan Palu Barat.

❖ Hutan Kota Kaombona

Hutan Kota Kaombona merupakan obyek wisata baru yang memiliki panorama indah yang terbentang diatas pebukitan yang dapat memandang lepas panorama Teluk Palu secara bebas, berada di Kelurahan Talise, obyek wisatanya berupa sarana olahraga, venue seni pertunjukan dan jajanan kuliner. Ramai dikunjungi pada malam hari, letaknya strategis terletak di tengah kota Palu.

❖ Sarung Tenun Donggala

Sarung Donggala adalah kain tenun tradisional diproduksi dalam bentuk tenun ikat yang memiliki ciri dan motif spesifik. Teknik pembuatannya masih secara manual dengan peralatan tradisional atau ATBM. Bahan baku Sarung Donggala berasal dari benang baik sutra maupun non sutra. Benang-benang itu biasanya sudah diberi zat pewarna. Sarung tenun ini dapat dijumpai di beberapa toko di Kota Palu, sedangkan atraksi penenunan dapat disaksikan langsung oleh pengunjung di Kelurahan Watusampu kecamatan Ulujadi, di lambara dan pantoloan boya Kecamatan tavaili.

❖ Makanan Khas

Kota Palu, seperti halnya wilayah lainnya di Indonesia mempunyai beragam makanan khas telah dikenal oleh masyarakat. Makanan tersebut antara lain Kaledo, Uta Dada, Bau Tunu dan Uta Kelo yang bisa dijumpai di beberapa rumah makan yang menjual makanan khas tersebut.

❖ Makam Datok Karamah

Salah satu saksi sejarah masuknya agama Islam pertama di Sulawesi Tengah adalah Makam Dato Karama yang terletak di Kampung Lere, Kota Palu. Nama asli Dato Karama adalah Abdullah Raqie, seorang tokoh agama Islam asal Minangkabau, Sumatera Barat. Sekitar abad XVII Abdullah Raqie tiba di Palu untuk menyebarkan agama. Beliau diberi gelar Dato Karama karena memiliki kesaktian. Masyarakat mengaguminya dan memeluk agama Islam termasuk Raja Kabonena bernama *I Pue Njidi*. Dato Karama menikah dengan *Ince Jille* dan dikaruniai dua anak perempuan, *Ince Dongho* dan *Ince Saharibanong*. Karena dianggap memiliki kesaktian makam Dato Karama hingga kini selalu diziarahi, bahkan banyak orang datang melepaskan nazarnya di makam tersebut.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kota Palu terdiri dari Kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang/tsunami, kawasan rawan banjir serta likuifaksi yang terjadi akibat gempa yang melanda Kota Palu.

a. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Di Kota Palu, gempa bumi yang potensial terjadi adalah jenis gempa bumi tektonik. Gempa jenis ini diakibatkan oleh pergeseran didalam bumi. Magnitude gempabumi berkisar kecil sampai besar, daerahnya luas, kedalaman sumber gempa bisa dangkal, menengah hingga dalam. Aktivitas gempa bumi di Kota Palu dan sekitarnya terutama dikarenakan oleh patahan aktif Palu Koro dan Patahan Pasternoster.

Jalur gempa sangat berkaitan dengan jalur patahan. Kota Palu dilalui/dipengaruhi oleh tiga jalur patahan yang saling sejajar berarah barat laut – tenggara, yaitu :

1. Patahan vertikal di sebelah timur melewati jalur perbukitan;

2. Patahan vertikal di bagian tengah Kota Palu, melewati Tondo, Talise, Biromaru, Bora dan memanjang ke arah Palolo;
3. Patahan vertikal di sebelah barat, Jalur patahan secara relatif terdapat memanjang dari tepi pantai Kabonga melewati Loli, Buluri, Watusampu, Balane dan selanjutnya memanjang ke selatan yang kemudian akan bersambung dengan patahan Matano.

Ketiga patahan tersebut secara regional merupakan akibat gravitasi dari proses patahan geser Palu-Koro. Berdasarkan letak dan orientasi garis patahan tersebut maka wilayah yang sangat dekat akan jalur patahan rawan kerusakan akibat gempa adalah : Watusampu, Buluri, Silae, Kabonena, Donggala Kodi dan Duyu.

Berdasarkan pada data BNPB, terdapat sejumlah peristiwa gempa besar yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Tengah yang terasa sampai di Kota Palu, yakni:

1. Pada tanggal 1 Desember 1927, gempa berkekuatan 6,5 SR yang berasal dari aktivitas tektonik Watusampo dengan pusat gempa di Teluk Palu. Akibatnya 14 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka;
2. Tahun 1994 gempa mengguncang Kabupaten Donggala;
3. 11 Oktober 1998, gempa berkekuatan 5,5 SR mengguncang Kabupaten Donggala;
4. 24 Januari 2005, gempa berkekuatan 6,2 SR dengan pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu;
5. 17 November 2008, gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah
6. 18 Agustus 2012, gempa berkekuatan 6,2 SR terjadi di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 berkekuatan 7,4 SR terjadi pada pukul 17:02:45 WITA. Pasca gempa bumi ini, terdapat beberapa kejadian gempa bumi lainnya, sebagai berikut:

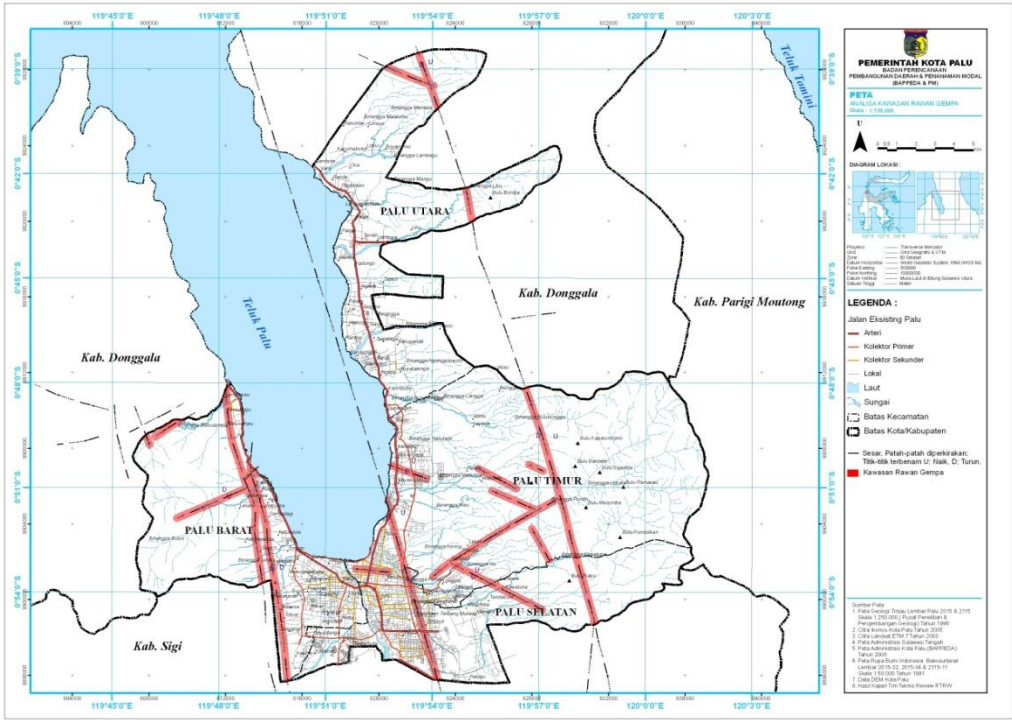
Tabel 2.11
**Kejadian Gempa Bumi di Sulawesi Tengah (September 2018-
 Oktober 2018)**

No	Waktu	Lintang	Bujur	Magnitudo	Kedalaman	Wilayah
1	22-Oct-18 23:07:49 WIB	-1.63	120.18	5.2	10 Km	42 km Tenggara Sigi
2	09-Oct-18 04:15:47 WIB	-0.89	119.93	5.2	10 Km	5 km TimurLaut Palu
3	02-Oct-18 11:59:26 WIB	-1.59	120.2	5.3	10 Km	41 km Tenggara Sigi
4	02-Oct-18 06:46:41 WIB	-0.57	119.87	5.3	10 Km	16 km Tenggara Donggala
5	02-Oct-18 00:39:02 WIB	-0.55	119.87	5.0	11 Km	14 km Tenggara Donggala
6	01-Oct-18 12:43:35 WIB	0.06	119.55	5.5	10 Km	62 km BaratLaut Donggala
7	30-Sep-18 21:38:44 WIB	-1.18	120.1	5.1	10 Km	33 km TimurLaut Sigi
8	29-Sep-18 17:30:20 WIB	-1.43	120.21	5.1	10 Km	36 km Tenggara Sigi
9	29-Sep-18 14:40:15 WIB	-1.85	120.57	5.1	102 Km	54 km BaratDaya Poso
10	29-Sep-18 09:32:52 WIB	-1.49	120.04	5.4	10 Km	21 km Tenggara Sigi
11	29-Sep-18 04:24:02 WIB	-1.52	120.16	5.5	10 Km	34 km Tenggara Sigi
12	28-Sep-18 21:26:01 WIB	0.03	119.54	5.4	10 Km	60 km BaratLaut Donggala
13	28-Sep-18 20:35:30 WIB	0.15	119.62	5.8	10 Km	68 km BaratLaut Donggala
14	28-Sep-18 19:27:39 WIB	-0.49	120.28	5.0	10 Km	50 km Tenggara Donggala
15	28-Sep-18 18:06:52 WIB	-1.56	119.95	5.4	10 Km	18 km Tenggara Sigi

16	28-Sep-18 17:50:28 WIB	-0.76	120.04	5.9	10 Km	23 km TimurLaut Palu
17	28-Sep-18 17:47:45 WIB	-0.46	119.91	5.0	10 Km	9 km Tenggara Donggala
18	28-Sep-18 17:39:05 WIB	-0.54	119.86	5.5	11 Km	13 km Tenggara Donggala
19	28-Sep-18 17:02:45 WIB	-0.2	119.89	7.4	11 Km	25 km TimurLaut Donggala
20	28-Sep-18 17:25:07 WIB	-0.93	119.99	5.9	10 Km	12 km Tenggara Palu
21	28-Sep-18 17:14:25 WIB	0.09	119.94	6.1	10 Km	58 km TimurLaut Donggala

Sumber: Pusdatinhumas BNPB, 2018

Untuk informasi sebaran, peruntukan ruang daerah rawan gempa dapat dilihat pada Gambar 2.4b.



Sumber: RTRW Kota Palu, Tahun 2010

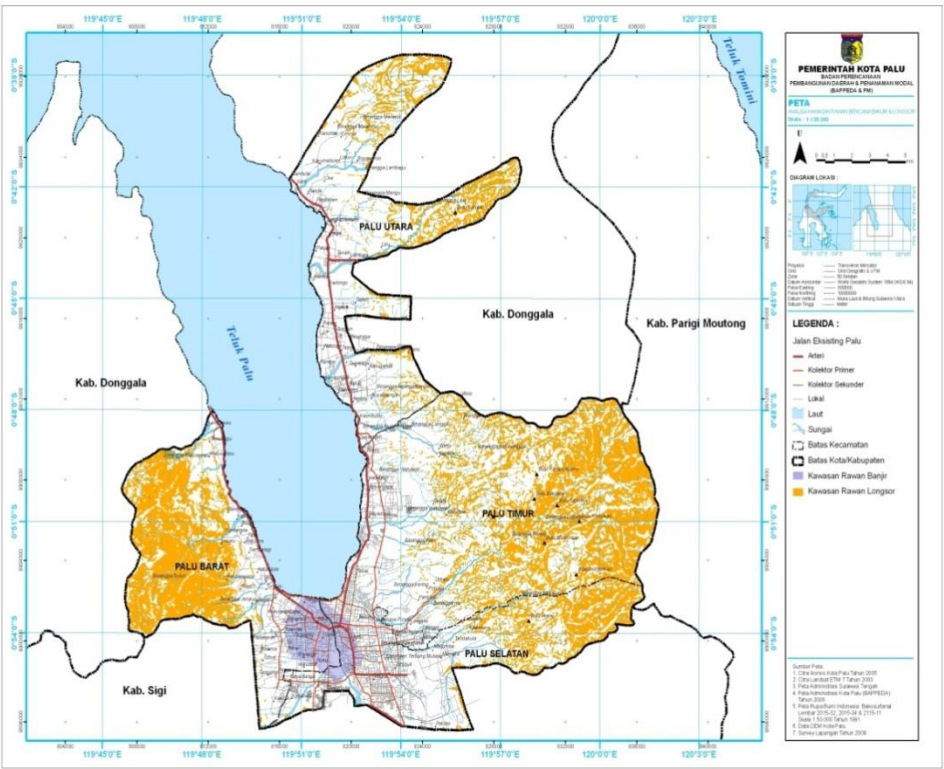
Gambar 2.4b
Peta Analisa Rawan Gempa di Kota Palu
RKPD KOTA PALU
TAHUN 2020

b. Kawasan rawan tanah longsor

Longsor adalah pergerakan massa batuan/tanah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Longsor mudah terjadi pada wilayah yang relatif terjal dengan formasi batuan yang telah mengalami pelapukan dan erosi berat, dan juga pada wilayah rawan gempa. Agen utamanya adalah hujan dan kadang-kadang dipicu oleh beban dan getaran serta akar tunggang. Lokasi longsor dan rawan longsor banyak ditemui di sisi-sisi jalan, tebing-tebing dekat sungai (di bagian hulu), tebing sungai dan lahan perkebunan.

Wilayah di Kota Palu yang teridentifikasi rawan longsor adalah wilayah sebelah barat Silae, Kabonena dan Donggala Kodi, hulu sungai Watutela, dan tebing bukit di Poboya. Pengamatan di wilayah bantaran sungai menunjukkan kondisi rawan gerusan tebing sungai di S. Taipa, S. Watutela dan S. Poboya. Gerusan pada tebing sungai Poboya ke arah Talise bahkan mengancam struktur jalan dan jembatan dan kawasan perumahan pada bantaran sungai.

Adapun peta sebaran rawan longsor di Kota Palu, secara spatial dapat dilihat pada Gambar 2.5a.



Gambar 2.5a
Peta Analisa Rawan Longsor di Kota Palu

c. **Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami**

Tsunami pada prinsipnya diawali oleh gempa bumi, yang menimbulkan gangguan impulsif terhadap air laut karena adanya perubahan bentuk dasar laut.

Proses terjadinya tsunami dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Gempa bawah laut merenggutkan massa besar air laut dalam satu hentakan kuat.
- Gelombang balik air menerjang dengan kecepatan hingga 800 Km/jam
- Mendekati pantai, gelombang melambat namun mendesak ke atas
- Gelombang menghempas ke daratan dan menghancurkan apapun di belakang pantai

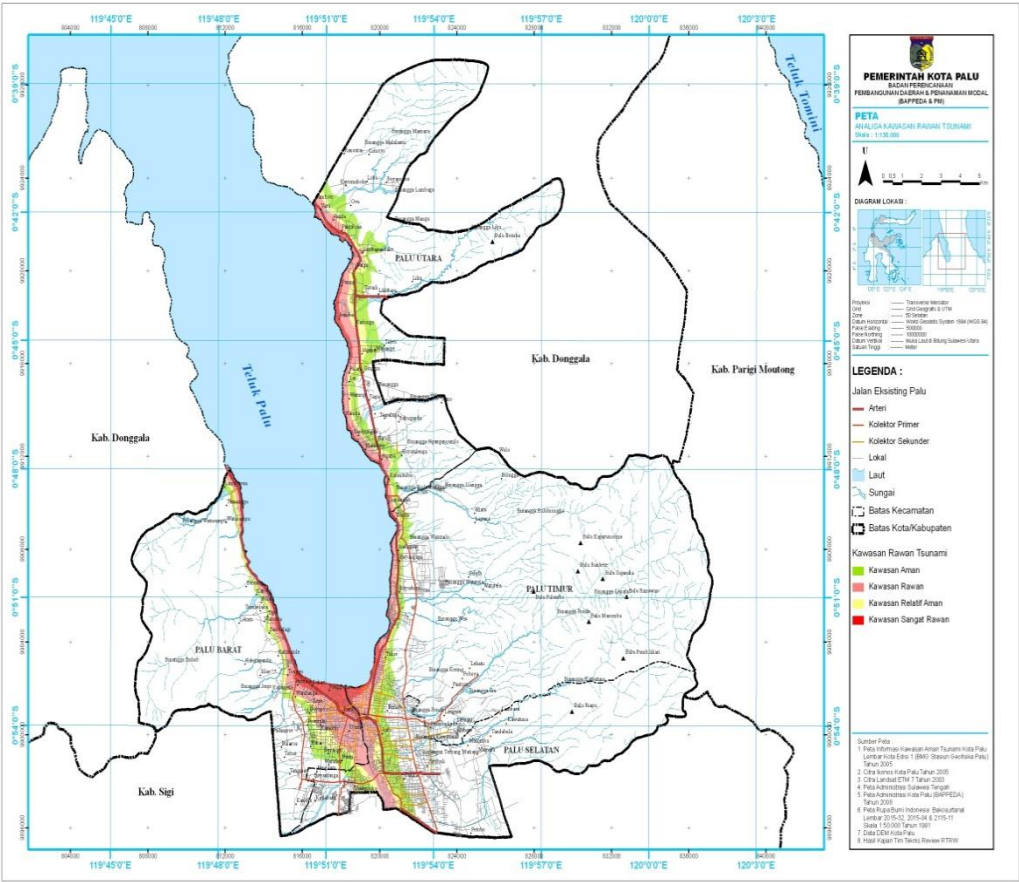
Wilayah Selat Makassar dimana Kota Palu terdapat memiliki frekuensi yang tinggi kejadian tsunami. Selat ini memiliki aktivitas seismik akibat adanya konvergensi empat lempeng tektonik yang menghasilkan struktur yang kompleks. Kenampakan *tsunamigenic* utama di Selat Makassar adalah zone patahan Palu-Koro dan Pasternoster, yang membentuk batas cekungan Selat Makassar. Analisa seismisitas, tektonik dan sejarah tsunami menunjukkan kedua zona patahan ini memiliki karakteristik yang berbeda.

Perairan pantai Kota Palu berpeluang terjadi tsunami, dikarenakan gempa-gempa yang berpusat di barat laut Kota Palu, yaitu Selat Makassar dan sekitarnya. Gempa bumi yang terjadi di wilayah ini memiliki magnitude > 6,3 SR, kedalaman dangkal (kurang dari 60 km), bentuk patahan naik, turun atau terbelah dan bentuk pantai yang cekung memungkinkan energi gelombang yang terjadi dapat terakumulasi menjadi lebih besar di Teluk Palu, yaitu kemungkinan terjadinya gelombang tsunami bisa mencapai Up > 15m (berkategori berbahaya, *BMG Palu, 2004*). Berdasarkan data BMG Palu tersebut, wilayah Kota Palu yang rawan tsunami ditampilkan pada tabel 2.12 berikut. Adapun gambaran spasialnya dapat dilihat pada gambar 2.6. tentang peta rawan tsunami di kota Palu:

Tabel 2.12
Wilayah Kota Palu Rawan Gelombang Pasang Tsunami

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	Palu Utara	Panau, Kayumalue, Baiya, Lambara, Mamboro dan Taipa dan Pantoloan.
2	Palu Timur	Talise, Tondo, Layana Indah, Besusu Barat
3	Palu Selatan	Dataran banjir S. Palu di Lolu Utara dan Lolu Selatan
4	Palu Barat	Ujuna, dataran banjir S. Palu di Nunu, Silae, Tipu, Buluri, Watusampu dan Lere

Sumber : BMKG Kota Palu, 2004



Gambar 2.5b
Peta Analisa Rawan Tsunami di Kota Palu

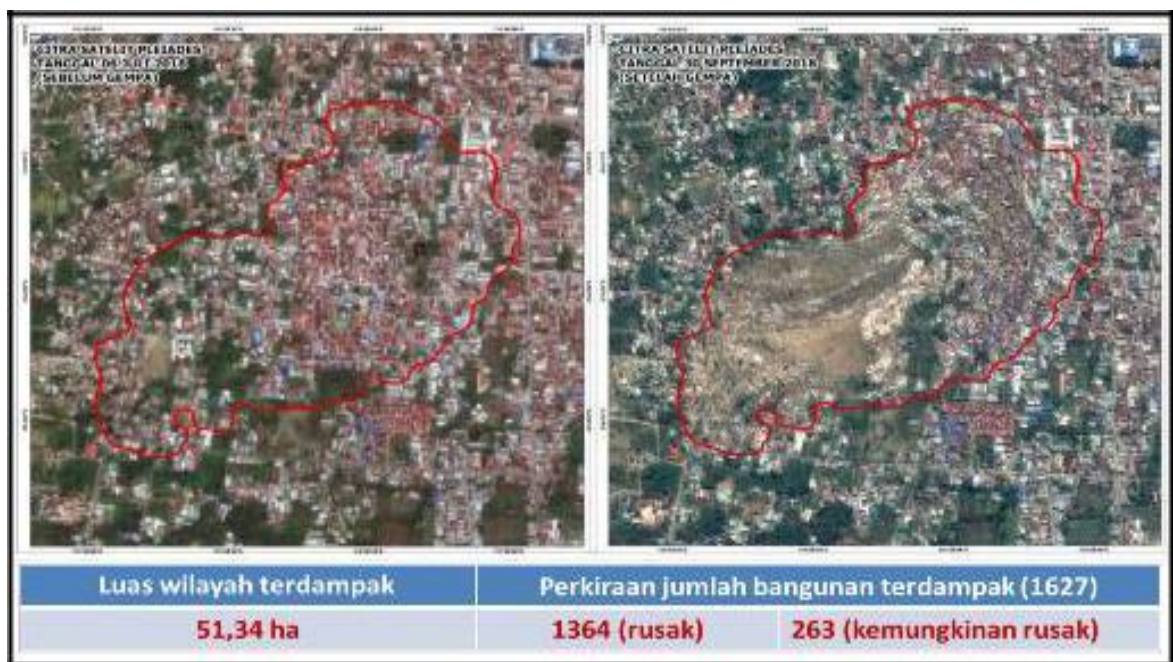
d. Kawasan Rawan Likuifaksi

Gempa 7.4 SR yang mengguncang Palu pada tanggal 28 September 2018 mengakibatkan beberapa wilayah mengalami fenomena mengejutkan yang disebut likuifaksi. Wilayah Balaroa dan Petobo di Palu, Sulawesi Tengah mengalami fenomena likuifaksi yang mengakibatkan pengangkatan dan amblesan di tiga wilayah tersebut. Likuifaksi disebabkan oleh hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan guncangan gempa sehingga tidak memiliki daya ikat.

jumlah bangunan terdampak yang diperoleh melalui pengamatan citra satelit tersebut adalah data indikatif yang perlu dilakukan verifikasi dengan data yang dilaporkan oleh BNPB sebagai lembaga terkait yang melakukan pendataan terkait jumlah wilayah dan bangunan terdampak. Sebaran wilayah terdampak likuifaksi beserta perkiraan jumlah bangunan yang terpapar secara spasial bisa merujuk pada gambar 2.2 – 2.5 berikut.

Likuifaksi di wilayah Balaroa, Palu

Kelurahan Balaroa merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah yang diakibatkan oleh gempa yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Meski tidak terdampak tsunami, namun hampir seluruh wilayah Balaroa, termasuk Perumnas Balaroa terkubur oleh tanah yang mengalami likuifaksi atau ambles, yang diakibatkan oleh gempa besar yang terjadi. Identifikasi wilayah yang terdampak yang dilakukan oleh LAPAN dan mitra terkait seperti OSM menggunakan citra satelit sebelum dan setelah bencana, diperoleh informasi bahwa luas wilayah terdampak di Balaroa adalah 51,34 Ha. Sedangkan bangunan yang berada di wilayah terdampak likuifaksi sebelum bencana yang teridentifikasi melalui citra satelit sejumlah 1,364 bangunan rusak, dan 263 bangunan diperkirakan rusak, sehingga total bangunan di wilayah terpapar 1,627.



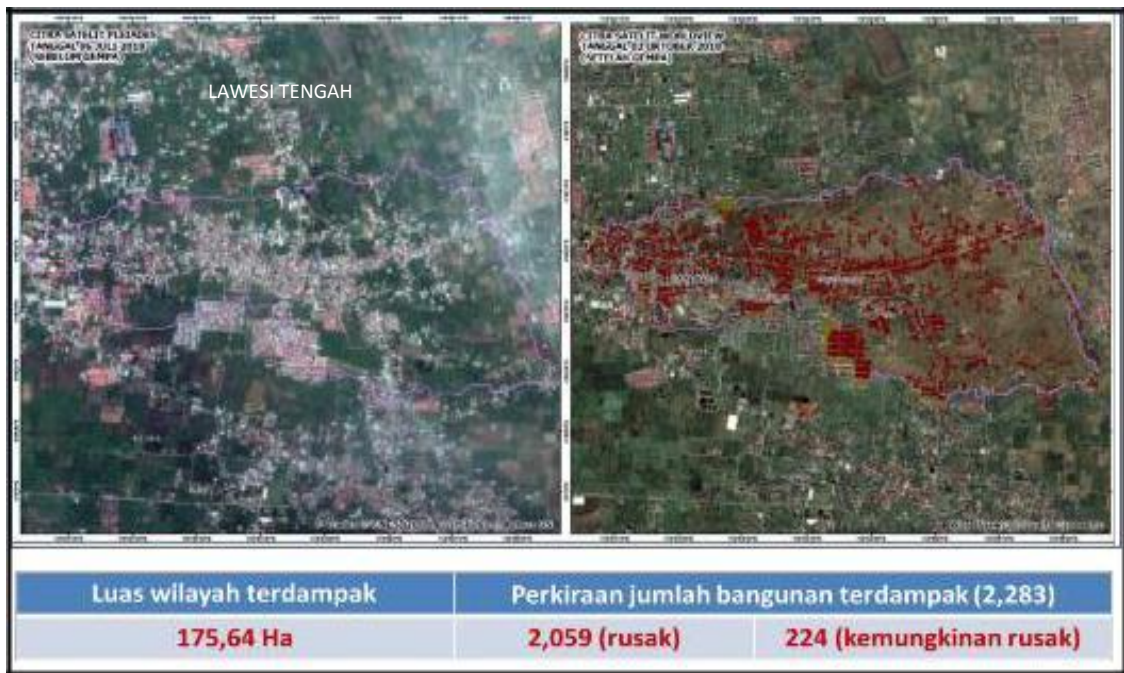
Sumber: LAPAN, dan perkiraan jumlah bangunan dari OSM, 2018

Gambar 2.6a

Cakupan wilayah terdampak likuifaksi di Balaroa, Palu dari citra satelit

Likuifaksi di wilayah Petobo, Palu

Wilayah Petobo merupakan salah satu dari dua wilayah di Kota Palu yang terdampak bencana likuifaksi cukup parah selain Balaroa. Berdasarkan pengamatan dan hasil interpretasi yang dilakukan oleh LAPAN dengan menggunakan citra satelit sebelum dan sesudah bencana, diperkirakan bahwa total wilayah terdampak likuifaksi di wilayah Petobo ini adalah 175,64 Ha, sedangkan total bangunan terpapar adalah 2,283, dimana 2,059 bangunan rusak, sedangkan 224 bangunan lainnya dikategorikan sebagai bangunan yang “kemungkinan rusak”.



Sumber: LAPAN

Gambar 2.6b

Cakupan wilayah terdampak likuifaksi di Petobo, Palu
teridentifikasi dari citra satelit

e. Kawasan rawan banjir

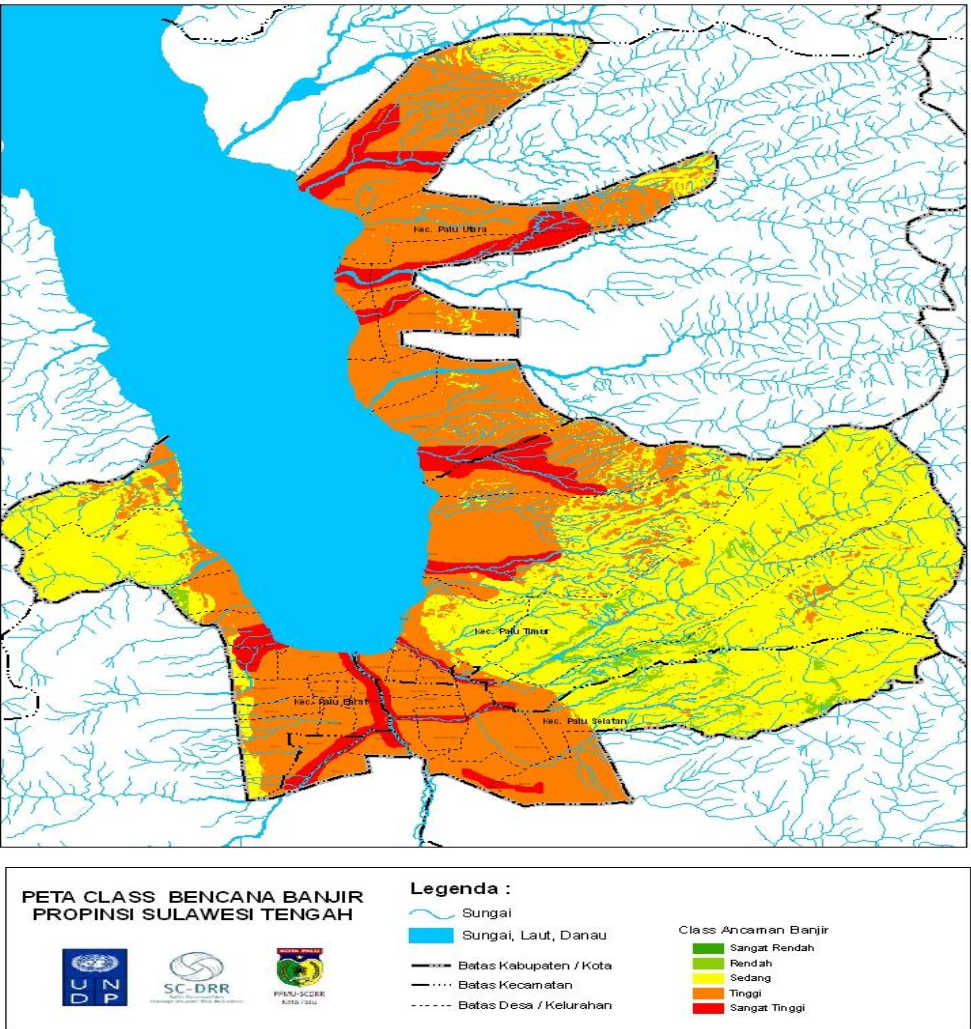
Kota Palu mempunyai beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana banjir. Disamping faktor curah hujan, faktor topografi sangat berpengaruh, termasuk diantaranya beda tinggi dasar sungai dan tanah setempat relatif kecil. Karakteristik banjir di Kota Palu adalah berupa banjir bandang dengan periode genangan singkat. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi permukaan lahan tandus serta topografi wilayah yang memiliki kelerengan. Tiga arah aliran utama sungai serta karakteristik banjir di Kota Palu adalah :

- Sungai yang berhulu di timur berarah timur-barat bermuara di Teluk Palu, secara topografi potensi banjir genangan relatif kecil tetapi mengingat adanya beda tinggi yang cukup besar maka dapat menimbulkan banjir debris yang membawa sedimentasi

material yang cukup besar. Sungai Tawaeli (Kelurahan Lambara dan Kelurahan Panau), Sungai Taipa (Kelurahan Taipa), Sungai Layana (Kelurahan Mambo dan Kelurahan Layana Indah), Sungai Watutela (Kelurahan Tondo) dan Sungai Pondo (Kelurahan Poboya, Kelurahan Lasoani, Kelurahan Tanamodindi dan Kelurahan Talise).

- Sungai yang berhulu di barat berarah barat-timur bermuara di Teluk Palu, secara topografi potensi banjir relatif kecil tetapi mengingat adanya beda tinggi yang cukup besar maka dapat menimbulkan banjir debris yang membawa sedimentasi material yang cukup besar. Sungai Uwenumpu, Sungai Kalora (Kelurahan Donggala Kodi, Kelurahan Kabonena, Kelurahan Silae dan Kelurahan Tipo), Sungai Buluri (Kelurahan Tipo dan Kelurahan Buluri).
- Sungai yang berhulu di barat, timur dan selatan menyatu di S. Palu. Kearah pusat kota sungai ini sangat berpotensi menimbulkan banjir genangan karena gradien kelerengan yang rendah serta adanya kawasan hunian yang terletak pada lokasi yang memiliki ketinggian mendekati elevasi bantaran sungai. Kawasan tersebut terdapat di kecamatan Palu Barat (Kelurahan Nunu, Kelurahan Ujuna, Kelurahan Baru dan Kelurahan Lere), Kecamatan Palu Selatan (Kelurahan Pengawu, Kelurahan Palupi, Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan Birobuli Selatan, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan Lolu Utara dan Kelurahan Lolu Selatan), Kecamatan Palu Timur (Kelurahan Besusu Barat).

Gambar 2.6c menyajikan peta tentang ancaman banjir pada pada wilayah Kota Palu sebagai berikut :



Gambar 2.6c.
Peta Class Ancaman Bencana Banjir

Jumlah kejadian bencana menurut Kecamatan yang terjadi di Kota Palu Tahun 2014 - 2018 secara rinci diuraikan pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Bencana di Kota Palu Tahun 2014 – 2018

No	Kecamatan	2014				2015				2016				2017				2018			
		Banjir	Kebakaran	Angin Topan	Gempa Bumi	Banjir	Kebakaran	Angin Topan	Gempa Bumi	Banjir	Kebakaran	Angin Puting Beliung	Gempa Bumi	Banjir	Kebakaran	Angin Puting Beliung	Gempa Bumi	Banjir	Kebakaran	Angin Puting Beliung	Gempa Bumi
1	Palu Barat	3	30	-	-	-	14	-	-	-	17	-	1	2	-	-	-	2	2	1	105
2	Tatanga	2	5	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	6	-	105
3	Ulujadi	2	4	-	-	1	2	-	-	3	3	4	1	-	-	-	-	2	12	-	105
4	Palu Selatan	1	35	-	-	-	14	-	-	-	32	1	1	2	-	-	-	2	7	-	105
5	Palu Timur	2	12	-	-	-	7	-	-	-	25	-	1	3	-	-	-	-	-	-	105
6	Mantikulore	-	24	-	-	-	3	-	-	8	18	-	1	-	-	-	-	-	2	-	105
7	Palu Utara	-	2	-	-	-	1	-	-	2	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	105
8	Tawaeli	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2015-2018

2.1.1.4. Demografi

A. Jumlah dan persebaran (distribusi) penduduk

Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas 395,06 km², didiami penduduk sebanyak 366.650 jiwa. Penduduk ini tersebar di 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Palu Utara, Palu Timur, Palu Selatan dan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Tawaeli. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Palu Selatan sebanyak 72.137 jiwa (19,52%) sedangkan Kecamatan Tawaeli memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 23.289 jiwa (6,30%).

Tabel 2.12.

Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kota Palu, tahun 2018

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%
Palu Timur	24.113	12,96	24.291	13,23	48.404	13,10
Palu Barat	26.440	14,21	26.145	14,24	52.585	14,23
Palu Barat	36.310	19,52	35.827	19,51	72.137	19,52
Palu Utara	11.752	6,32	11.537	6,28	23.289	6,30
Ulujadi	16.689	8,97	16.213	8,83	32.902	8,90
Tatanga	24.559	13,20	24.295	13,23	48.854	13,22
Tawaili	11.318	6,08	10.782	5,87	22.100	5,98
Mantikulore	34.840	18,73	34.503	18,79	69.343	18,76
Kota Palu	186.021	100	183.593	100	369.614	100

Registrasi Penduduk Kota Palu Tahun 2018 berjumlah sebesar 385.691 jiwa, terdiri dari 193.743 jiwa penduduk laki-laki dan 191.801 jiwa penduduk perempuan. Rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kota Palu Tahun 2108 sebesar 101. Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan kecamatan, dapat dilihat pada tabel 2.13 dan tabel 2.14.

Tabel 2.13

Komposisi Penduduk Kota Palu Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Palu Barat	31.662	31.500	63.162	100
2	Tatanga	20.569	20.056	40.625	103
3	Ulujadi	14.180	14.027	28.207	101
4	Palu selatan	36.117	35.533	71.650	102
5	Palu Timur	35.940	36.586	72.526	98
6	Mantikulore	32.817	32.126	64.943	103
7	Palu Utara	11.781	11.777	23.558	100
8	Tawaeli	10.667	10.353	21.020	103
Jumlah total		193.743	191.801	385.691	101

Sumber Data : Palu Dalam Angka, 2018

Tabel 2.13 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang terbesar di Kecamatan Palu Timur yang mencapai 72.526 jiwa, kemudian Kecamatan Palu Selatan dengan 71.650 jiwa, kecamatan Mantikulore dengan jumlah penduduk 64.943 jiwa, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Tawaeli dengan 21.020 jiwa.

Perkembangan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*).

B. Komposisi Umur Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia di kota palu ditunjukkan pada tabel 2.14 :

Tabel 2.14
Komposisi Penduduk Kota Palu Menurut Struktur Usia
Tahun 2018**

No	Struktur U m u r	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 - 4	17.253	16.663	33.916
2	5 - 9	15.584	14.755	30.339
3	10 - 14	15 332	14.692	30.024
4	15 - 19	20.709	21.688	42.397
5	20 - 24	24.143	23.212	47.355
6	25 - 29	16.907	16.050	32.957
7	30 - 34	15.358	14.733	30.091
8	35 - 39	14.130	14.836	28.966
9	40 - 44	14.137	14.601	28.738
10	45 - 49	12.623	12.264	24.887
11	50 - 54	10.056	9.395	19.451
12	55 - 59	7.216	7.005	14.221
13	60 - 64	4.781	4.789	9.570
14	65+	10.088	7.118	17.206
	TOTAL	163.237	222.454	385.691

Sumber Data : Kota Palu Dalam Angka, 2018

Tabel 2.14 menunjukkan bahwa Komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu selama tahun 2017 menunjukkan bahwa 24,62 persen penduduk di bawah umur 15 tahun, sementara 66,96 persen merupakan usia penduduk produktif (15-64 tahun) dan 3,20 persen berada pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu berada pada kelompok usia muda.

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif dengan penduduk usia produktif dapat diketahui besarnya angka ketergantungan pada tahun 2018 yaitu sebesar 27,82 persen artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak kurang lebih 28

orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 tahun keatas.

C. **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk Kota Palu sebesar 961 jiwa/km² Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Palu Timur dengan tingkat kepadatan 9.267 jiwa/km², sementara Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Mantikulore dengan kepadatan sebesar 309 jiwa/km². Gambaran yang lebih rinci mengenai luas wilayah, kepadatan penduduk, dan presentase penduduk menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2017 diuraikan dalam Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan di Kota Palu
Tahun 2018

Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Persentase penduduk
Palu Barat	8,28	63.162	7.628	16,40
Tatanga	14,95	40.625	2.917	10,54
Ujujadi	40,25	28.207	701	7,31
Palu selatan	27,38	71.650	2.616	18,58
Palu Timur	7,71	72.526	9.406	18,81
Mantikulore	206,8	64.943	314	16,84
Palu Utara	29,94	23.558	787	6,11
Tawaeli	59,75	21.020	353	5,45
KotaPalu 2017	395,06	385.619	979	100

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, 2018

2.1.2. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tingkat Pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan kontribusi dari setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian. Perkembangan perekonomian biasanya akan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam setiap periode kepemimpinan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang diambil akan mempengaruhi perkembangan setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian.

Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat ikut memengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat.

1). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro indikator yang umum digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) cara penilaian/pencatatan PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, angka PDRB juga digunakan untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Ada beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain: (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan perubahan harga produsen.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Palu dapat tetap tumbuh di tengah perekonomian global yang belum stabil. Secara tahunan, pertumbuhan tahun 2014 sampai dengan 2018 secara berturut-turut yaitu 14,22 persen; 13,41 persen; 8,79 persen; 10,27 persen; dan 10,98 persen. Ketahanan ekonomi tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor produksi (*supply side*), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (*demandside*). Pada sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang pada tahun 2018 tumbuh 16,08 persen, sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi permintaan akhir tetap pada ciri khasnya yaitu didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu.

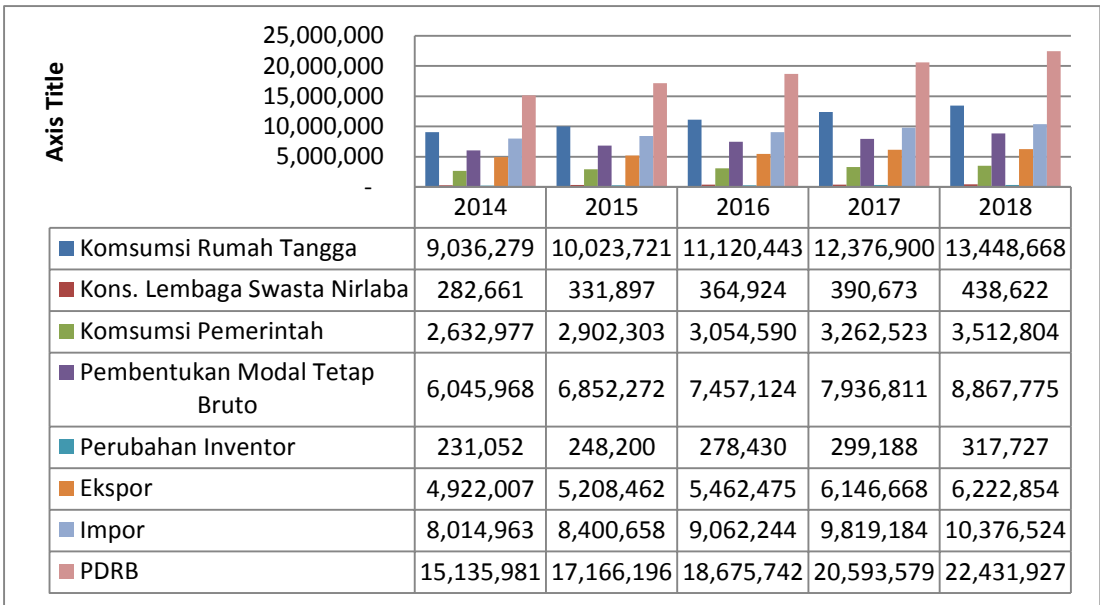
Dalam kurun waktu tahun 2014-2018, nilai PDRB Kota Palu atas dasar harga (adh) Berlaku menunjukkan peningkatan cukup signifikan, yakni berturut-turut sebesar; 15.135 miliar rupiah (2014); 17.166 miliar rupiah (2015); 18.678 miliar rupiah (2016); 20.593 miliar rupiah (2017); dan 21.060 miliar rupiah (2018). Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga maupun volume.

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2013-2018 (Juta Rp)

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Rumah Tangga	7 785 473	9 036 279	10 023 721	11 120 443	12 376 900	13 448 668
Kons.Lembaga Swasta Nirlaba	236 229	282 661	331 897	364 924	390 673	438 622
Konsumsi Pemerintah	2 354 179	2 632 977	2 902 303	3 054 590	3 262 523	3 512 804
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 940 232	6 045 968	6 852 272	7 457 124	7 936 811	8 867 775
Perubahan Inventori	218 432	231 052	248 200	278 430	299 188	317 727
Ekspor	4 938 023	4 922 007	5 208 462	5 462 475	6 146 668	6 222 854
Impor	7 221 449	8 014 963	8 400 658	9 062 244	9 819 184	10 376 524
PDRB	13 251 119	15 135 981	17 166 196	18 675 742	20 593 579	22 431 927

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, 2018

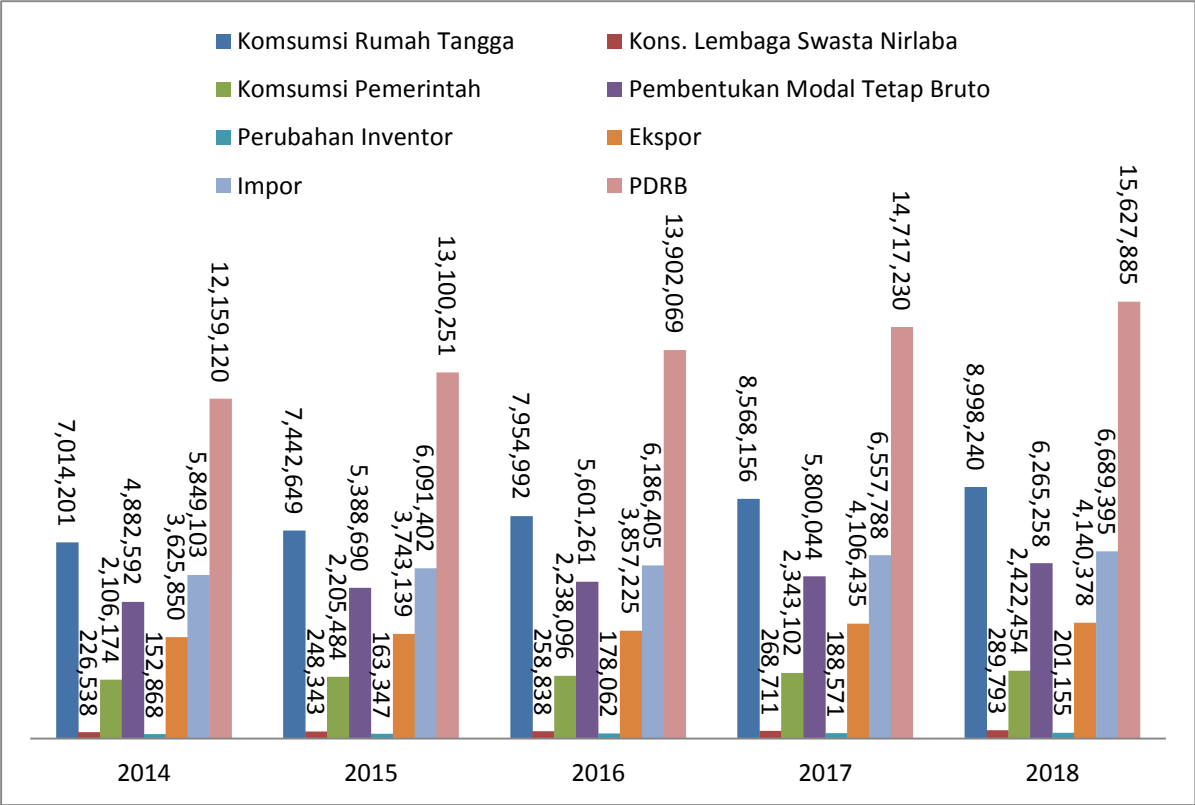
Peningkatan PDRB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDRB (*demand side*) yang akan diuraikan lebih lanjut dalam publikasi ini.



Sumber: Kota Palu Dalam Angka, 2018

Gambar 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu adh
Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Juta Rp)

Selain dinilai adh Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai dengan adh Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dievaluasi dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan itu, maka PDRB untuk masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil. Utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2014-2018, gambaran tentang nilai PDRB adh Konstan dan pertumbuhan ekonomi Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 2. Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Palu melambat dari 9.30 persen pada tahun 2014 menjadi 5.86 persen pada tahun 2018.



Sumber: Kota Palu Dalam Angka, 2018

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan dan PDRB Kota Palu adh Konstan
Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2014-2018

Pada Tabel 2.17 nilai PDRB adh Konstan menunjukkan peningkatan tiap tahunnya yaitu masing-masing sebesar; 11.252 miliar rupiah (2013); 12.159 miliar rupiah (2014); 13.100 miliar rupiah (2015); 13.902 miliar rupiah (2016); dan 14.717 miliar rupiah (2017).

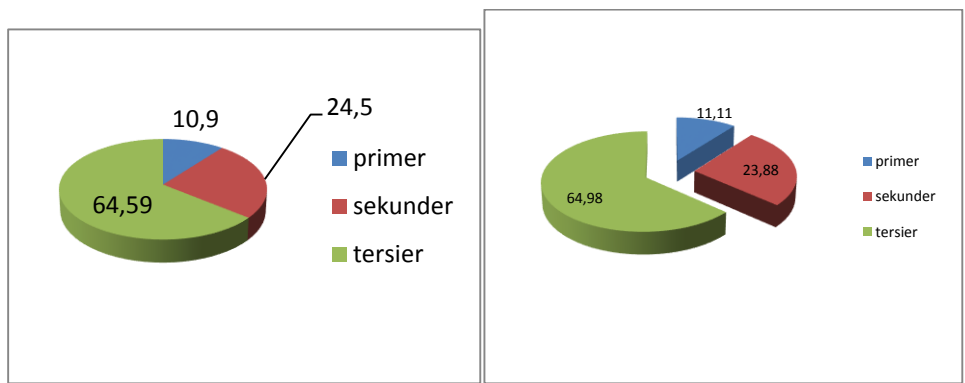
Tabel 2.17
Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2014-2018 (Juta Rp)

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KonsumsiRumah Tangga	6.552.225	7.014.201	7.442.649	7.954.992	8.568.156	8.998.240
Kons.Lembaga SwastaNirlaba	204.022	226.538	248.343	258.838	268.711	289.793
Konsumsi Pemerintah	2.003.886	2.106.174	2.205.484	2.238.096	2.343.102	2.422.454
PembentukanModal TetapBruto	4.412.215	4.882.592	5.388.690	5.601.261	5.800.044	6.265.258
PerubahanInventori	140.288	152.868	163.347	178.062	188.571	201.155
Ekspor	3.648.561	3.625.850	3.743.139	3.857.225	4.106.435	4.140.378
Impor	5.708.519	5.849.103	6.091.402	6.186.405	6.557.788	6.689.395
PDRB	11.252.679	12.159.120	13.100.251	13.902.069	14.717.230	15.627.885

Sumber: Kot aPalu Dalam Angka, 2018

Perekonomian Kota Palu dalam empat tahun terakhir didominasi oleh 3 kategori yaitu Konstruksi (F); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O); dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G). Tahun 2015, Kategori konstruksi memiliki share terbesar dalam perekonomian Kota Palu yang tercatat sebesar 17,42 persen. Adapun kategori yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam perekonomian Kota Palu tahun 2018 adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,67 persen. Sedangkan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki share terbesar ketiga dalam perekonomian Kota Palu tahun 2018 yaitu 9,62 persen.

Adapun kategori yang memiliki share terkecil tahun 2018 adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya menyumbang sebesar 0,11 persen dalam perekonomian Kota Palu.



Sumber : BPS, Kota Palu, 2018

Gambar 2.9
Struktur Perekonomian Kota Palu menurut tiga sektor tahun 2016 dan 2017 (persen)

Dari gambar 2.9 terlihat bahwa di tahun 2016 dan tahun 2018 perekonomian Kota Palu didominasi oleh sektor tersier (Kategori G hingga Kategori U). Sedangkan sektor sekunder yang terdiri dari Industri Pengolahan, Listrik, Gas, Air dan Pengolahan Limbah menempati urutan kedua. Sedangkan sektor primer yang disokong oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terkecil dalam perekonomian Kota Palu. Tahun 2017, sektor tersier memiliki kontribusi sebesar 64,98 persen meningkat dibanding tahun 2016 yaitu 64,59 persen. Sedangkan sektor sekunder memiliki kontribusi 23,88 persen menurun dibanding tahun 2016 sebesar 24,50 persen. Demikian halnya dengan sektor primer, mengalami peningkatan kontribusi dari tahun 2016 sebesar 10,9 persen menjadi 11,11 persen di tahun 2017.

Selain gambaran struktur ekonomi, perkembangan laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi hal menarik untuk dikaji.

Berdasarkan penghitungan PDRB ADH Konstan 2010, perekonomian Kota Palu tahun 2018 tercatat tumbuh sebesar 8,10 persen. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,68 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada kategori Industri Pengolahan sebesar 2,77 persen. Informasi terinci mengenai pertumbuhan ekonomi masing-masing kategori disajikan dalam Tabel 2.18.

Jika ditinjau menurut sumber pertumbuhan ekonomi, dari total laju pertumbuhan ekonomi Kota Palu tahun 2017 sebesar 16,07 persen, bersumber dari Kategori Konstruksi (F) dan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kota Palu. Sumber pertumbuhan terbesar berikutnya adalah Kategori Administrasi Pemerintahan (O) dan Kategori Informasi dan perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor (G) masing-masing sebesar 13,74 persen dan 9,98 persen. Adapun kategori Pengadaan Listrik dan Gas (D) dan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E) memberikan sumbangan terkecil dalam pertumbuhan ekonomi Kota Palu yaitu hanya 0,12 persen.

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Sumber
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu 2018 (persen)

Lapangan Usaha / Industrial Origin		LPE*
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (A)	7,633
2.	Pertambangan dan Penggalian (B)	12,60
3.	Industri Pengolahan (C)	3,03
4.	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	11,29
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)	6,49
6.	Konstruksi (F)	6,66
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)	7,72
8.	Transportasi dan Pergudangan (H)	11,91
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	12,11
10.	Informasi dan Komunikasi (J)	10,71
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	10,53
12.	Real Estate (L)	8,99
13.	Jasa Perusahaan (M,N)	9,05
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O)	7,38

15.	Jasa Pendidikan (P)	8,27
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial (Q)	12,48
17.	Jasa lainnya (R,S,T,U)	10,35
	Kota Palu	8,71

Sumber : BPS, 2018

Perkembangan beberapa indikator makro ekonomi Kota Palu Tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan indikator makro ekonomi kota palu, 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018**
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rp)	15.159.732	17.259.127	18.675.147	20.593.778	21.060.779
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta Rp)	12.187.367	13.174.201	13.902.069	14.717.229	15.442.148
Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE (persen)	8,31	8,1	6,12	5,86	8,71
PDRB Perkapita ADHB (Rp)	35.791.097	37.204.340	49.889.450	54.225.263	55.454.918

Sumber : BPS, 2018

Dari Tabel 2.19 terlihat bahwa, secara umum perkembangan beberapa indikator makro ekonomi Kota Palu periode 2014-2018 membaik. Salah satunya adalah PDRB baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan. Peningkatan PDRB ADH Berlaku antara 2014-2018 sebesar 38,25 persen, sedangkan ADH Konstan 2018 meningkat 26,01 persen dalam kurun waktu yang sama. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi, dalam empat tahun terakhir tumbuh positif namun cenderung melambat di tahun 2014-2018. Adapun PDRB Perkapita yang merupakan indikator awal mengenai kesejahteraan

masyarakat menunjukkan peningkatan sebesar 11,6 persen dalam periode 2014-2018.

Dalam rangka menganalisis perkembangan perekonomian Kota Palu 4 (empat) tahun terakhir, disajikan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Selama lima tahun terakhir perkembangan LPE Kota Palu mengalami fluktuasi, pada Tahun 2014 LPE Kota Palu sebesar 8,31% kemudian terus mengalami fluktuasi sehingga pada Tahun 2018 mencapai 8,71%. Dibandingkan dengan 3 (tiga) Kabupaten yang bertetangga langsung dengan Kota Palu, LPE Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir selalu lebih tinggi. Sementara jika dibandingkan dengan LPE Provinsi Sulawesi Tengah, LPE Sulawesi Tengah umumnya lebih tinggi. Gambaran perkembangan LPE Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018 disajikan dalam Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala,
Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Kota Palu	Kab. Donggala	Kab. Parimo	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah
2014	8,31	5,86	6,47	6,31	5,07
2015	7,48	5,99	7,08	6,60	15,52
2016	6,12	4,89	5,57	5,62	9,98
2017	5,39	4,46	5,53	5,48	12,95
2018**	4,39	3,89	5,12	5,12	14,11

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2018

Tabel 2.21
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Jutaan Rupiah) Tahun 2014 -2018

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	649.005	721.258	782.852	858.768	872.768
B	Pertambangan dan Penggalian	902.807	1.095.987	1.253.844	1.433.271	1.506.271
C	Industri Pengolahan	1.306.515	1.407.897	1.496.280	1.554.610	1.576.610
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.345	19.493	21.767	25.217	38.217
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47.026	51.224	54.879	59.153	80.153
F	Konstruksi	2.517.483	2.915.694	3.003.054	3.279.799	3.291.299
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.444.476	1.647.260	1.866.046	2.052.548	2.066.748
H	Transportasi dan Pergudangan	1.412.917	1.580.694	1.719.791	1.966.076	1.978.576
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	157.077	188.310	212.607	240.971	263.971
J	Informasi dan Komunikasi	1.255.561	1.448.432	1.574.482	1.764.636	1.818.636
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	914.892	970.850	1.140.828	1.270.214	1.295.714
L	Real Estate	393.345	439.543	475.582	528.325	559.325

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018**
1	2	3	4	5	6	7
M	Jasa Perusahaan	178.084	198.098	221.494	243.656	259.656
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.089.157	2.358.576	2.563.798	2.772.792	2.784.792
O	Jasa Pendidikan	1.281.282	1.470.391	1.560.314	1.715.595	1.786.595
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	421.885	488.436	544.264	622.097	660.097
Q	Jasa lainnya	143.122	164.051	183.862	205.853	221.353
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.135.980,91	17.166.195,92	18.675.742,22	20.593.578,74	21.060.779
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		15.135.980,91	17.166.195,92	18.675.742,22	20.593.578,74	21.060.779

Sumber: PDRB Kota Palu Tahun 2014-2018 dan Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Tabel 2.22
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2014 -2018

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	553.802	588.382	613.055	645.000	680.000
B	Pertambangan dan Penggalian	731.002	830.598	920.314	1.016.861	1.111.861
C	Industri Pengolahan	1.125.374	1.156.561	1.184.466	1.189.785	1.214.885
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.813	25.546	27.134	28.672	31.872
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.359	44.790	47.055	48.942	51.442
F	Konstruksi	1.850.215	1.996.665	1.996.354	2.052.119	2.107.119
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.273.901	1.351.650	1.456.662	1.517.812	1.578.812
H	Transportasi dan Pergudangan	1.100.814	1.170.300	1.260.913	1.369.657	1.392.157
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117.161	137.159	150.737	165.033	180.533
J	Informasi dan Komunikasi	1.123.090	1.263.010	1.367.158	1.481.344	1.596.444
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	739.276	765.450	892.031	969.429	1.046.147
L	Real Estate	335.005	358.500	373.269	395.423	410.623
M	Jasa Perusahaan	143.095	153.044	164.144	175.244	185.944
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.570.695	1.713.490	1.819.330	1.912.531	2.006.531
O	Jasa Pendidikan	982.478	1.056.714	1.098.493	1.161.360	1.216.360
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	325.974	355.394	389.093	435.083	469.583
Q	Jasa lainnya	123.065	132.999	141.860	152.935	161.835
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		12.159.120	13.100.251	13.902.069	14.717.230	15.442.148
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		12.159.120	13.100.251	13.902.069	14.717.230	15.442.148

Sumber: PDRB Kota Palu Tahun 2014-2018 dan Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

RKPD KOTA PALU

TAHUN 2020

Tabel 2.23
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku
dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2014 -2018

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018**	
1	2	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	6,86,	2,39,	11,13,	6,24,	8,54,	4,19,	9,7,	5,21,	9,96	5,31
B	Pertambangan dan Penggalian	20,24,	11,53,	21,4,	13,62,	14,4,	10,8,	14,31,	10,49,	14,59	10,61
C	Industri Pengolahan	9,33,	4,17,	7,76,	2,77,	6,28,	2,41,	3,9,	,45,	4,82	1,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,69,	16,65,	(8,68,)	17,11,	11,66,	6,22,	15,85,	5,67,	16,08	6,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,32,	5,5,	8,93,	5,74,	7,13,	5,06,	7,79,	4,01,	8,29	4,68
F	Konstruksi	18,14,	9,18,	15,82,	7,92,	3,,	(,02,)	9,22,	2,79,	9,84	3,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,54,	7,82,	14,04,	6,1,	13,28,	7,77,	9,99,	4,2,	10,56	4,87
H	Transportasi dan Pergudangan	13,53,	8,1,	11,87,	6,31,	8,8,	7,74,	14,32,	8,62,	14,93	8,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,13,	14,56,	19,88,	17,07,	12,9,	9,9,	13,34,	9,48,	13,96	10,25
J	Informasi dan Komunikasi	12,63,	11,03,	15,36,	12,46,	8,7,	8,25,	12,08,	8,35,	12,59	8,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,03,	2,92,	6,12,	3,54,	17,51,	16,54,	11,34,	8,68,	11,95	9,12
L	Real Estate	16,23,	7,61,	11,74,	7,01,	8,2,	4,12,	11,09,	5,94,	11,82	6,17
M	Jasa Perusahaan	16,18,	7,79,	11,24,	6,95,	11,81,	7,25,	10,01,	6,76,	10,91	7,19
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,93,	10,35,	12,9,	9,09,	8,7,	6,18,	8,15,	5,12,	8,97	5,79
O	Jasa Pendidikan	12,97,	7,53,	14,76,	7,56,	6,12,	3,95,	9,95,	5,72,	10,45	6,09

RKPD KOTA PALU

II - 52

TAHUN 2020

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018**	
1	2	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,12,	9,88,	15,77,	9,03,	11,43,	9,48,	14,3,	11,82,	14,91	10,05
Q	Jasa lainnya	15,8,	8,99,	14,62,	8,07,	12,08,	6,66,	11,96,	7,81,	12,62	8,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14,22,	8,06,	13,41,	7,74,	8,79,	6,12,	10,27,	5,86,	10,98	6,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		14,22,	8,06,	13,41,	7,74,	8,79,	6,12,	10,27,	5,86,	10,98	6,44

Sumber: PDRB Kota Palu Tahun 2014-2018 dan Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

2) Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menunjukkan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha terhadap Total PDRB yang menunjang ekonomi Kota Palu. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palu secara berturut-turut: Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, Jasa Pendidikan, Pertambangan dan Penggalian, Jasa Keuangan dan Asuransi dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tahun 2018, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 8,71 persen. Empat dari sepuluh lapangan usaha tersebut cenderung mengalami peningkatan kontribusi yaitu: Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Informasi dan Komunikasi, dan Pertambangan dan Penggalian. Dua diantaranya cenderung mengalami penurunan kontribusi yaitu: Industri Pengolahan, dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Secara keseluruhan tujuh belas lapangan usaha terjadi peningkatan kontribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut ini:

Tabel 2.24

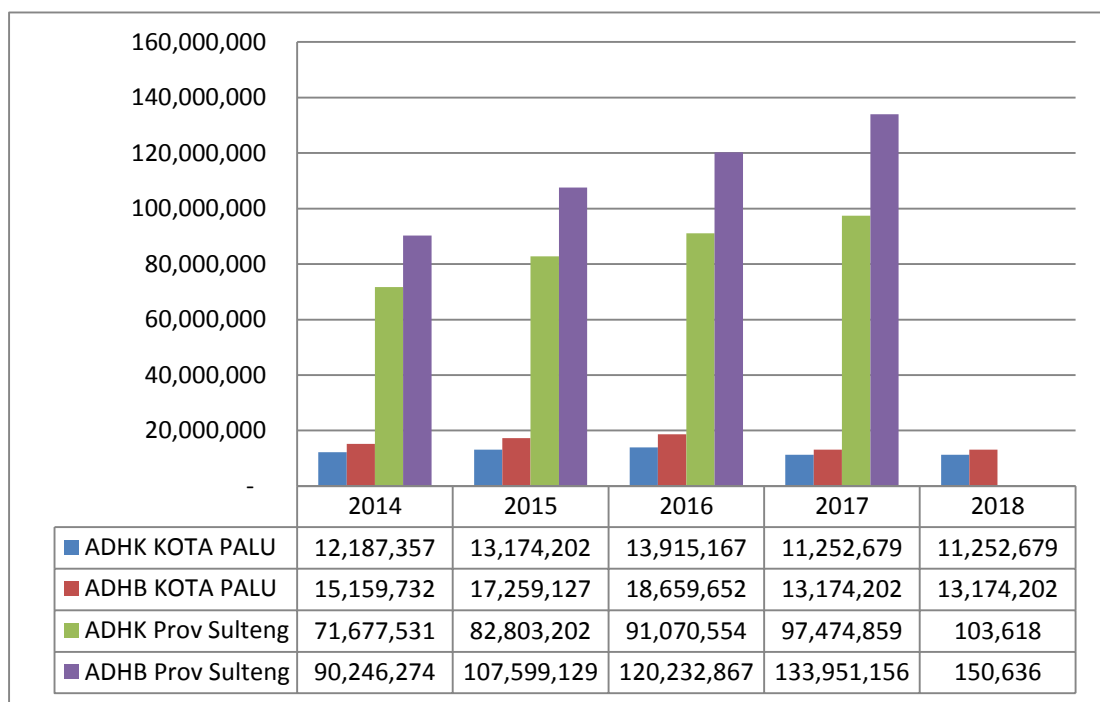
**PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	HK/HB	2014	2015	2016	2017	2018**
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	HK	553.802	588.382	613.055	645.000	683.500
		HB	649.005	721.258	782.852	858.768	924.168
B	Pertambangan dan Penggalian	HK	731.002	830.598	920.314	1.016.861	1.108.161
		HB	902.807	1.095.987	1.253.844	1.433.271	1.602.271
C	Industri Pengolahan	HK	1.125.374	1.156.561	1.184.466	1.189.785	1.198.185
		HB	1.306.515	1.407.897	1.496.280	1.554.610	1.632.610
D	Pengadaan Listrik dan Gas	HK	21.813	25.546	27.134	28.672	30.372
		HB	21.345	19.493	21.767	25.217	27.417
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	HK	42.359	44.790	47.055	48.942	50.842
		HB	47.026	51.224	54.879	59.153	63.053
F	Konstruksi	HK	1.850.215	1.996.665	1.996.354	2.052.119	2.103.819
		HB	2.517.483	2.915.694	3.003.054	3.279.799	3.464.799
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	HK	1.273.901	1.351.650	1.456.662	1.517.812	1.599.812
		HB	1.444.476	1.647.260	1.866.046	2.052.548	2.236.548
H	Transportasi dan Pergudangan	HK	1.100.814	1.170.300	1.260.913	1.369.657	1.458.657
		HB	1.412.917	1.580.694	1.719.791	1.966.076	2.131.076
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	HK	117.161	137.159	150.737	165.033	179.533
		HB	157.077	188.310	212.607	240.971	268.371
J	Informasi dan Komunikasi	HK	1.123.090	1.263.010	1.367.158	1.481.344	1.597.844
		HB	1.255.561	1.448.432	1.574.482	1.764.636	1.923.236
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	HK	739.276	765.450	892.031	969.429	1.045.129
		HB	914.892	970.850	1.140.828	1.270.214	1.310.037

No	Lapangan Usaha	HK/HB	2014	2015	2016	2017	2018**
1	2	3	4	5	6	7	8
L	Real Estate	HK	335.005	358.500	373.269	395.423	414.923
		HB	393.345	439.543	475.582	528.325	568.225
M	Jasa Perusahaan	HK	143.095	153.044	164.144	175.244	185.744
		HB	178.084	198.098	221.494	243.656	265.456
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	HK	1.570.695	1.713.490	1.819.330	1.912.531	2.014.031
		HB	2.089.157	2.358.576	2.563.798	2.772.792	2.980.292
O	Jasa Pendidikan	HK	982.478	1.056.714	1.098.493	1.161.360	1.216.360
		HB	1.281.282	1.470.391	1.560.314	1.715.595	1.846.095
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	HK	325.974	355.394	389.093	435.083	468.583
		HB	421.885	488.436	544.264	622.097	688.097
Q	Jasa lainnya	HK	123.065	132.999	141.860	152.935	162.435
		HB	143.122	164.051	183.862	205.853	226.353
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		HK	12.159.120	13.100.251	13.902.069	14.717.230	15.517.930
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		HB	15.135.980,91	17.166.195,92	18.675.742,22	20.593.578,74	22.158.101
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		HK	12.159.120	13.100.251	13.902.069	14.717.230	15.517.930
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		HB	15.135.980,91	17.166.195,92	18.675.742,22	20.593.578,74	22.158.101

Sumber : BPS Kota Palu, 2018

Perkembangan PDRB perkapita baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan Kota Palu selama kurun waktu empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada periode Tahun 2014-2018 laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga berlaku lebih tinggi dari laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan. Melambatnya laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan seiring dengan meningkatnya laju inflasi Kota Palu khususnya harga bahan makanan.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.10

**PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah
(Ribuan rupiah) Tahun 2014 – 2018**

Apabila dibandingkan PDRB perkapita Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu empat tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.25
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha
(persen) Tahun 2014 -2018

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018**	
1	2	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	4,29,	4,55,	4,2,	4,49,	4,19,	4,41,	4,17,	4,38,	4,21	4,39
B	Pertambangan dan Penggalian	5,96,	6,01,	6,38,	6,34,	6,71,	6,62,	6,96,	6,91,	7,01	7,07
C	Industri Pengolahan	8,63,	9,26,	8,2,	8,83,	8,01,	8,52,	7,55,	8,08,	7,59	8,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	,14,	,18,	,11,	,2,	,12,	,2,	,12,	,19,	0,14	0,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	,31,	,35,	,3,	,34,	,29,	,34,	,29,	,33,	0,30	0,34
F	Konstruksi	16,63,	15,22,	16,99,	15,24,	16,08,	14,36,	15,93,	13,94,	16,11	13,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,54,	10,48,	9,6,	10,32,	9,99,	10,48,	9,97,	10,31,	10,07	10,40
H	Transportasi dan Pergudangan	9,33,	9,05,	9,21,	8,93,	9,21,	9,07,	9,55,	9,31,	9,62	9,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,04,	,96,	1,1,	1,05,	1,14,	1,08,	1,17,	1,12,	1,21	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	8,3,	9,24,	8,44,	9,64,	8,43,	9,83,	8,57,	10,07,	8,59	10,09

RKPD KOTA PALU

II - 58

TAHUN 2020

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018**	
1	2	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,04,	6,08,	5,66,	5,84,	6,11,	6,42,	6,17,	6,59,	6,19	6,63
L	Real Estate	2,6,	2,76,	2,56,	2,74,	2,55,	2,68,	2,57,	2,69,	2,60	2,71
M	Jasa Perusahaan	1,18,	1,18,	1,15,	1,17,	1,19,	1,18,	1,18,	1,19,	1,19	1,20
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,8,	12,92,	13,74,	13,08,	13,73,	13,09,	13,46,	13,,	13,48	13,02
O	Jasa Pendidikan	8,47,	8,08,	8,57,	8,07,	8,35,	7,9,	8,33,	7,89,	8,34	7,90
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,79,	2,68,	2,85,	2,71,	2,91,	2,8,	3,02,	2,96,	3,08	3,09
Q	Jasa lainnya	,95,	1,01,	,96,	1,02,	,98,	1,02,	1,,	1,04,	1,07	1,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS											

Sumber: PDRB Kota Palu Tahun 2014-2018 dan Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

3). Laju Inflasi

Inflasi Kota Palu selama enam tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2014 sebesar 8,85% dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2018 sebesar 1,10 %. Rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir sebesar 3,98 %. Jika dibandingkan dengan rata-rata laju inflasi Indonesia (4,29 %), secara umum rata-rata laju inflasi Kota Palu lebih rendah yaitu 3,98 %. Hal yang menarik tingkat inflasi Tahun 2018 sebesar 1,10 % merupakan inflasi terendah selama satu dekade terakhir. Rata-rata laju pertumbuhan inflasi Kota Palu dan laju pertumbuhan inflasi Indonesia Tahun 2014 – 2018 ditunjukkan pada Tabel 2.26 di bawah ini.

Tabel 2.26
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)
Tahun 2014-2018

Inflasi	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018**	
Kota Palu	8,85	4,17	1,49	4,33	1,10	3,98
Indonesia	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13	4,29

Sumber: BPS Kota Palu, 2017

Inflasi yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum. Adapun laju inflasi tahun 2014 sampai 2018 cenderung menurun dimana tahun 2018 tercatat sebesar 1,10 persen

Secara umum, penyumbang terbesar inflasi dalam enam tahun terakhir di Kota Palu adalah makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 8,85 % sementara sektor sandang berkontribusi paling kecil sebesar 0,16 %. Perkembangan inflasi Kota Palu selama enam tahun terakhir diuraikan dalam Tabel 2.27 sebagai berikut :

Tabel 2.27
Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2014 – 2018

No	Sumber Inflasi	Tahun					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018**	
1.	Umum	8,85	4,17	1,49	4,33	1,55	4,08
2.	Bahan Makan	8,96	8,06	-0,46	3,79	0,22	4,30
3.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	9,82	6,00	3,53	2,96	3,74	5,21
4.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	7,60	3,76	0,42	9,51	1,06	4,47
5.	Sandang	2,82	0,16	3,41	2,09	1,73	2,04
6.	Kesehatan	6,83	2,93	3,38	1,45	1,67	3,25
7.	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	5,53	7,15	4,62	3,63	2,35	4,66
8.	Tansportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	12,61	0,98	0,62	3,08	1,95	3,85

Sumber: BPS Kota Palu, 2018

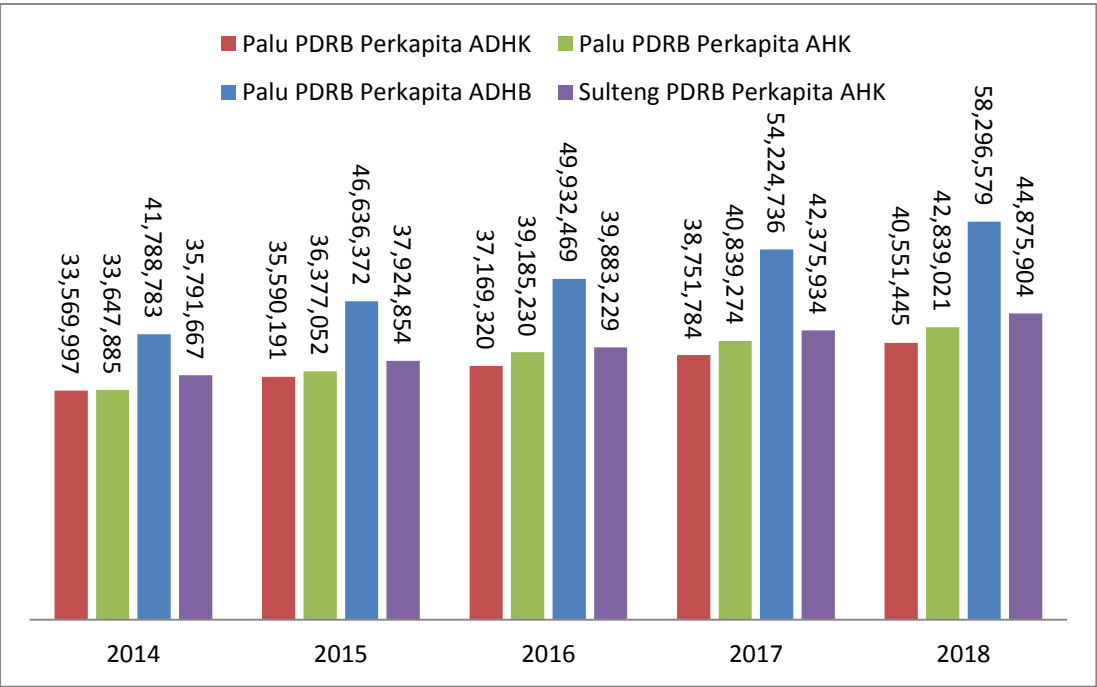
Pada Tahun 2018 penyumbang inflasi terbesar adalah makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (3,74%) sementara penyumbang inflasi terkecil adalah bahan makan (0,22). Pada Tahun 2017 sumber inflasi tertinggi adalah Perumahan, Gas dan Bahan Bakar (9,51%) sementara terendah adalah Kesehatan (1,45%). Kenaikan inflasi pada Tahun 2016 tertinggi bersumber dari Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga (4,62%) sementara terendah bahan makanan sebesar 0,46%. Tingginya inflasi yang terjadi pada Tahun 2015 diakibatkan oleh bahan makanan (8,06%).

4). PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB perkapita baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada periode Tahun 2014-2018 laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga berlaku lebih tinggi dari laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan. Melambatnya laju peningkatan PDRB perkapita

menurut harga konstan seiring dengan meningkatnya laju inflasi Kota Palu khususnya harga bahan makanan.

Gambar 2.11
PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah
(Ribuan rupiah) Tahun 2014 – 2018



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

Apabila dibandingkan PRDB perkapita Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu lima tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

5). Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang

memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

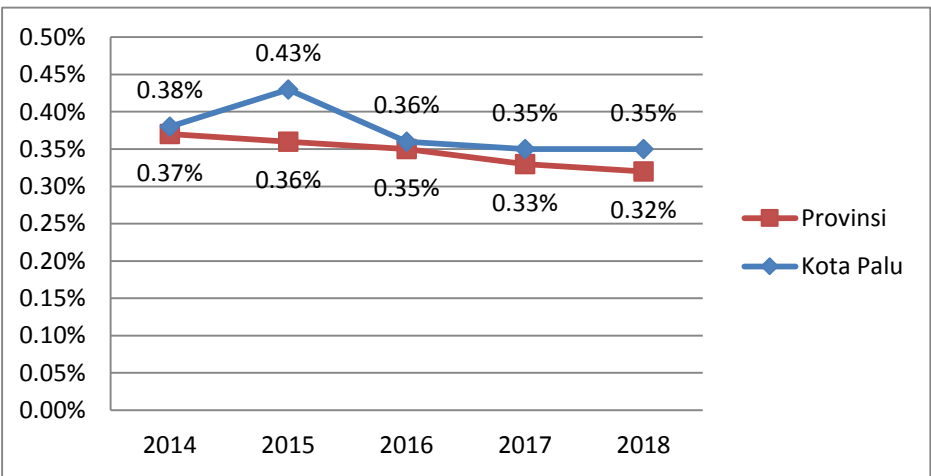
Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (lampiran I) menerangkan angka pada perhitungan rasio gini memiliki arti sebagai berikut:

- Ketimpangan rendah bila gini ratio $< 0,3$
- Ketimpangan sedang bila gini ratio antara $0,3 \leq G \leq 0,5$
- Ketimpangan tinggi bila gini ratio $> 0,5$

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :

Gambar 2.12
Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2014 – 2018



Sumber: Bappeda Kota Palu Tahun 2018.

Berdasarkan Gambar 2.12 di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini di atas angka 0,3, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Indeks gini Kota Palu apabila diperbandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2014.

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka gini rasio yang cenderung menurun di Kota Palu. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu kurang didukung dengan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

6). Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan juga dapat diukur dengan kriteria Bank Dunia. Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk ke dalam tiga kelompok, yaitu 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan terendah, 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan menengah, dan 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi. Kelompok yang 20 persen tertinggi umumnya dikatakan sebagai kelompok terkaya, sedangkan kelompok yang 40 persen terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukkan dalam kelompok menengah. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia secara rinci disajikan dalam Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia untuk Kota Palu

Tahun	Kriteria Bank Dunia (%)		
	40% Bawah	40% Mengengah	20% Atas
2014	15,58	38,54	45,87
2015	16,05	38,40	45,53
2016	16,32	38,67	44,98
2017*	16,60	38,94	44,42
2018**	16,87	39,21	43,87

Sumber: BPS,Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 2.28 menunjukan bahwa selama tiga tahun terakhir, 40% penduduk kalangan bawah menikmati pendapatan sebesar lebih dari 15 % dari total pendapatan. Dengan demikian, Kota Palu berada pada ketimpangan sedang.

7). Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di Kota Palu, mengalami pelambanan penurunan persentase kemiskinnannya, lebih disebabkan penanganan kemiskinan, masih dilakukan secara parsial, yakni belum dalam satu alur rencana dan tindak yang terpadu, hal ini menyebabkan berbagai indikator kemiskinan masih membutuhkan kerja yang lebih keras lagi agar dapat terwujud *trend* kinerja yang lebih positif dan berkualitas, sehingga startegi yang disusun untuk keserempakan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dengan sumberdaya yang terukur, dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu penanganan. Adapun kinerja penanggulangan kemiskinan di kota palu, dari tahun 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel. 2.29
Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu
Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun				Ket.
		2015	2016	2017	2018**	
1	Jumlah penduduk miskin (org)	27.190	26.240	25.500	25.263	
2	Persentase orang miskin	7,42	7,06	6,74	6,58	
3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)(%)	0,97	1,19	1,02	0,91	
4	Indeks keparahan kemiskinan (P2) (%)	0,27	0,32	0,24	0,19	
5	Jumlah penerima Jamkesmas/jamkesda	79,358	83,885	27.000	27.000	
6	Kemiskinan					
6.1	Garis kemiskinan	416.59	451.43	473.555	492.08	
6.2	Penduduk dibawah garis kemiskinan	27.190	26.240	25.500	25.263	
6.3	Beras untuk penduduk miskin	13.673	13.673	12.478	12.478	
7	Keluarga menurut tingkat kesejahteraan					
7.1	Keluarga pra sejahtera	8.835	9.651	9.848	10.757	
7.2	Keluarga sejahtera tahap 1	15.056	47.508	45.742	36.102	
7.3	Keluarga sejahtera tahap 2	24.338	18.506	21.584	21.476	
7.4	Keluarga sejahtera tahap 3	24.351	18.493	21.548	20.321	
7.5	Keluarga sejahtera tahap 3 plus	11.795	5.937	8.992	7.756	

Sumber : SIPD, 2016, BPS, 2018

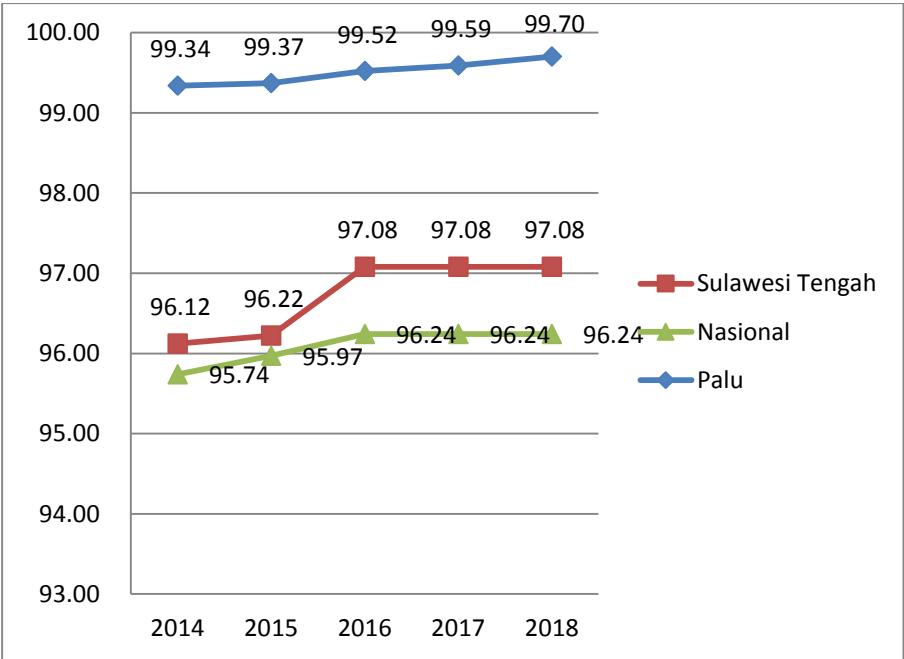
Trend penduduk miskin Kota Palu menurun secara jumlah penduduk dan persentase kemiskinan, dan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) juga semakin menurun ditahun 2018, hal ini mengindikasikan berfungsinya program/kegiatan yang bersentuhan langsung untuk meringankan beban moril dan tekanan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga secara nyata membantu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan mereka.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Aspek Pendidikan

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf menunjukkan kemampuan baca tulis penduduk di Kota Palu. Angka melek huruf Kota Palu terus meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Angka tersebut meningkat hingga mendekati angka 100%. Angka Melek Huruf Kota Palu lebih tinggi jika dibandingkan dengan AMH Sulawesi Tengah dan Nasional. Angka Melek Huruf menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan disetiap daerah, dimana selalu menjadi harapan bahwa tidak ada lagi penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

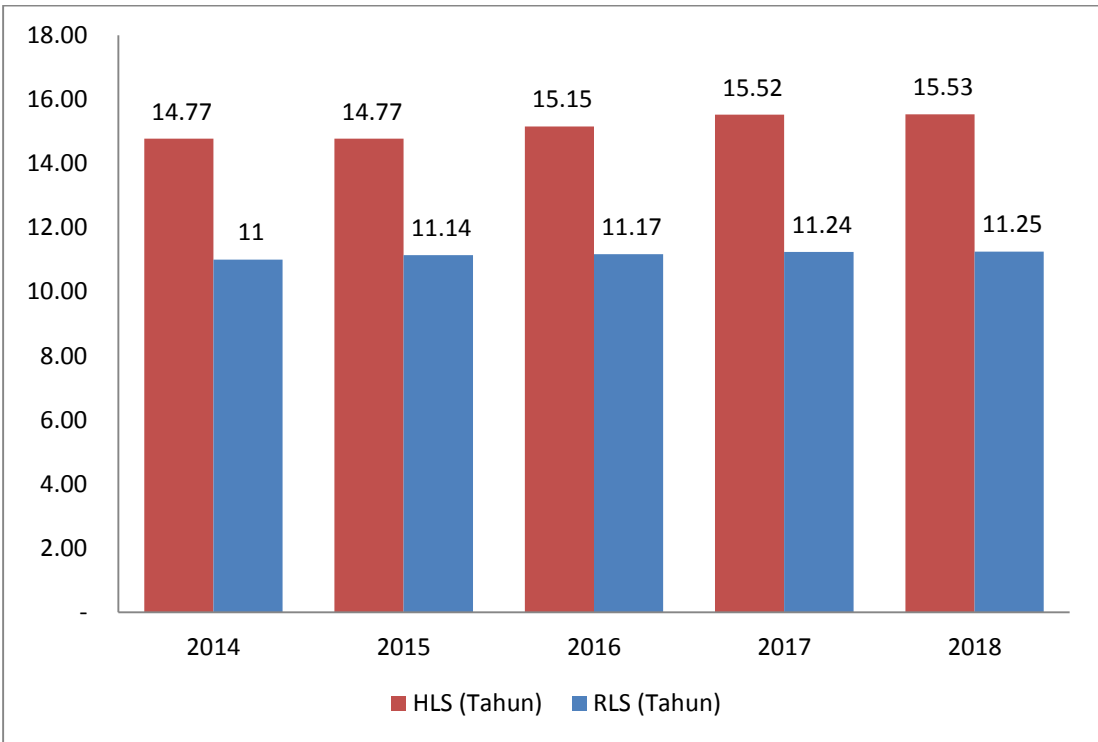
Gambar 2.13
Angka Melek Huruf Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2014 - 2018

Gambaran AMH Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018 secara rinci diuraikan dalam Gambar 2.13. Capaian Angka Melek Huruf Kota Palu hingga Tahun 2015 menunjukkan bahwa program-program pemberantasan buta huruf di Kota Palu telah membuahkan hasil. Selain itu, peningkatan AMH juga membawa dampak baik bagi penduduk Kota Palu dalam

menyerap informasi dari berbagai media sehingga diharapkan semua penduduk dapat berkontribusi dengan baik bagi pembangunan daerah.

b. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata lamanya setiap penduduk mengenyam pendidikan dibangku sekolah. Berikut ini rata-rata lama sekolah penduduk Kota Palu.



Gambar 2.14
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah
(HLS) Kota Palu, tahun 2014-2018

Gambar 2.14 menunjukkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ada kecenderungan peningkatan angka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Palu, ditahun 2014 RLS mencapai 11,11 sedangkan ditahun 2016 rata-rata lama sekolah menjadi 12,25. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palu dari tahun ke tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mulai menunjukkan perhatian yang lebih pada dunia pendidikan, sehingga waktu untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah semakin bertambah.

Indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Tahun 2016, RLS penduduk Kota Palu mencapai 12,25 tahun, artinya rata-rata penduduk di Kota Palu mampu menyelesaikan pendidikannya sampai kelas 2 SLTA, selain itu ditahun 2018 penduduk kota palu diharapkan dapat bersekolah selama 14,67 tahun atau level perguruan tinggi.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari berbagai usia yang sedang sekolah pada setiap jenjang pendidikan masing-masing. Adapun angka partisipasi kasar Kota Palu Tahun 2014-2018 di secara rinci diuraikan dalam Tabel 2.21.

Tabel 2.30
APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK
Kota Palu (%) Tahun 2014 – 2018

Tahun	Kota Palu			Provinsi Sulawesi Tengah		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA /SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA /SMK
2014	100	99,8	85,58	104,71	88,53	83,35
2015	99,42	104,09	96,95	107,28	90,73	82,87
2016	101,4	87,53	103,37	107,74	95,39	89,68
2017	101,07	92,129	108,39	108,85	99,19	94,29
2018	101,41	90,1	114,46	109,97	102,99	98,91

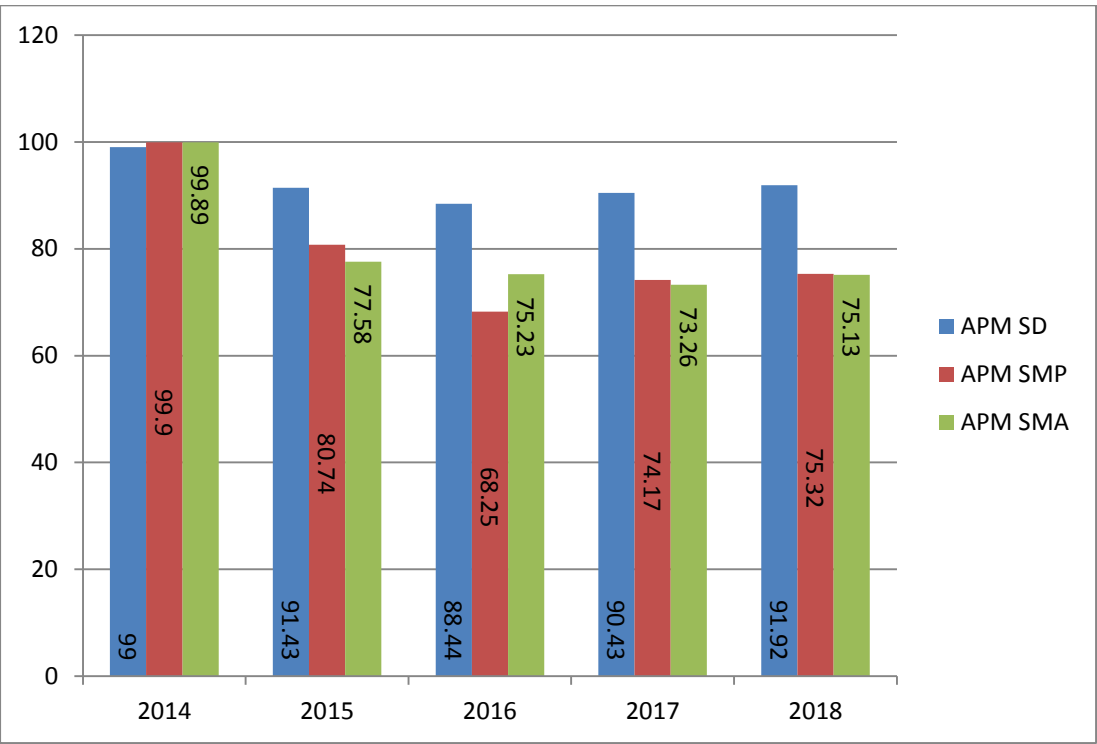
Sumber: BPS dan SIPD Kota Palu Tahun 2018

Tabel di atas menunjukan bahwa walaupun Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah dasar Kota Palu sudah cukup stabil namun lebih rendah dibandingkan dengan APK Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Untuk jenjang pendidikan

SMP dan SMA Kota Palu masih lebih tinggi dibandingkan dengan APK jenjang pendidikan SMP dan SMA di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan kata lain, penduduk usia sekolah ditingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah di Kota Palu lebih banyak mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukkan perbandingan jumlah usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar bersekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni merupakan indikator daya serap untuk mengetahui partisipasi penduduk kelompok usia pada jenjang pendidikan tertentu yang bersekolah sesuai jenjang pendidikan. Perkembangan APM Kota Palu Tahun 2014-2018 diuraikan dalam Gambar 2.15.



Sumber: BPS, 2018

Gambar 2.15
Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2014-2018

Gambar 2.15 menunjukkan bahwa APM Kota Palu umumnya cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2014 ke Tahun 2018. Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI pada Tahun 2014 sebesar 99% mengalami penurunan menjadi 91,43% pada Tahun 2015. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs pada Tahun 2014 sebesar 99,9% mengalami penurunan menjadi 80,74% pada Tahun 2015. Penurunan APM SD/MI dan SMP/MTs tersebut merupakan dampak dari adanya kecenderungan usia masuk SD/MI kurang dari 7 tahun. Untuk hal tersebut diharapkan adanya perbaikan akses PAUD di Kota Palu. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA pada Tahun 2014 sebesar 99,89% mengalami penurunan menjadi 77,58% pada Tahun 2015. Kecenderungan penurunan APM SMA/MA/SMK tersebut merupakan dampak dari tingginya biaya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK, untuk itu diperlukan program untuk menurunkan biaya pendidikan, sehingga pendidikan pada jenjang tersebut dapat diakses oleh semua penduduk khususnya penduduk yang berpenghasilan rendah.

Perbandingan APM antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2018 pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK diuraikan dalam Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Perbandingan APM Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah
Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
1	Banggai Kepulauan	90,34	80,54	60,69
2	Banggai	90,64	74,23	71,58
3	Morowali	99,21	71,66	76,96
4	Poso	95,38	80,48	61,71
5	Donggala	97,72	63,92	53,50
6	ToliToli	89,31	63,55	68,05
7	Buol	90,03	72,43	65,62
8	Parigi Moutong	87,77	63,86	53,38
9	Tojo Una-Una	96,23	67,96	55,88
10	Sigi	93,96	64,26	57,02

No.	Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
11	Banggai Laut	93,50	83,27	37,38
12	Morowali Utara	92,71	78,38	71,01
13	Kota Palu	91,43	80,74	77,58
	Sulawesi Tengah	92,35	71,10	63,32

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kota Palu Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi masih relatif rendah. Terdapat 7 (tujuh) Kabupaten yang memiliki APM lebih tinggi dibanding APM Kota Palu Tahun 2018 yaitu; Kabupaten Morowali (99,71%), Kabupaten Donggala (97,72%), Kabupaten Tojo Una-Una (96,23%), Kabupaten Poso (95,38%), Kabupaten Sigi (93,96%), Kabupaten Banggai Laut (93,50%), dan Kabupaten Morowali Utara (92,71%), Kabupaten lainnya masih lebih rendah dibanding Kota Palu. Sementara APM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 juga masih lebih tinggi dibanding Kota Palu.

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Palu masih lebih tinggi dari beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan di atas rata-rata APM Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian pula yang terjadi pada APM SMA/MA/SMK Kota Palu yang termasuk tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 77,58 pada Tahun 2018. Hal ini dimungkinkan karena aksesibilitas penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Palu lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Aksesibilitas yang dimaksudkan adalah ketersediaan sarana pendidika SMP dan SMA yang lebih banyak serta kemampuan masyarakat dalam mendanai pendidikan anak lebih baik dari daerah lainnya. Selain aksesibilitas sarana pendidikan, faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi pengembangan anak di masa akan datang sangat mempengaruhi tingginya APM pada tingkatan pendidikan SMP dan SMA.

2) Aspek Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.32. Perkembangan AKHB Kota Palu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana dari Tahun 2014 mengalami peningkatan hingga Tahun 2018. Sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2018 AKHB di Kota Palu mengalami penurunan. Seiring dengan menurunnya AKB, AKHB telah mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun terakhir. Pada Tahun 2014 AKHB di Kota Palu sebesar 990 per 1.000 kelahiran hidup mengalami penurunan hingga menjadi 3 per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2018. Secara lebih rinci, AKHB dan AKB di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 diuraikan pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup)
Tahun 2014-2018

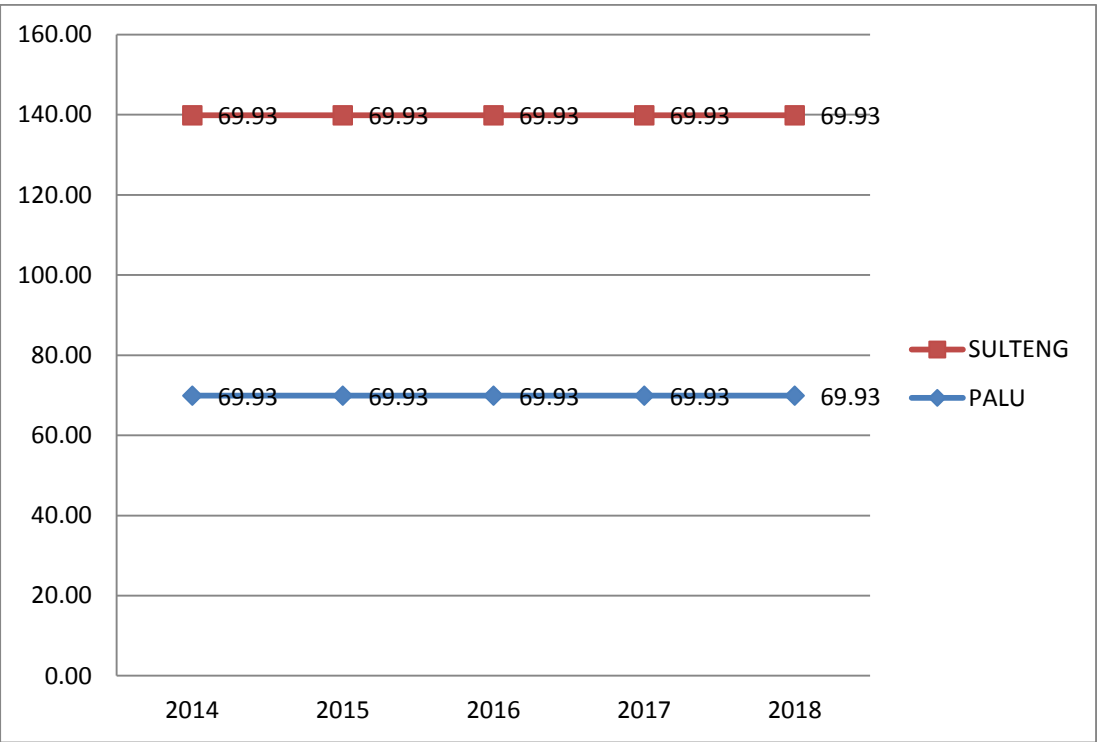
No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	5,12	3,26	4,17	1,42	2,67
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	994,8	996,7	995,8	998,5	997,3

Sumber: Data MDGs Tahun 2018

b. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Kecenderungan perkembangan angka harapan hidup di Kota Palu stabil dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018, yaitu sebesar 69,93%. Data angka harapan hidup padatahun sebelumnya yaitu Tahun 2014 sebesar 70,72%. Pada Tahun 2018

angka harapan hidup di Kota Palu tidak mengalami perubahan, atau tetap pada umur 69,93 tahun. Menurunnya Angka Harapan Hidup Kota Palu merupakan indikator memburuknya kesejahteraan masyarakat Kota Palu khususnya di bidang kesehatan.



Sumber: BPS Statistik Daerah Kota Palu 2018

Gambar 2.16
Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018

Apabila dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu masih lebih tinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi ini menggambarkan bahwa, kualitas kesehatan masyarakat Kota Palu lebih baik di bandingan beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Tingginya harapan hidup masyarakat Kota Palu didukung oleh ketersediaan sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, praktek dokter, serta tenaga kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan kabupetan lainnya, serta tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan yang lebih tinggi.

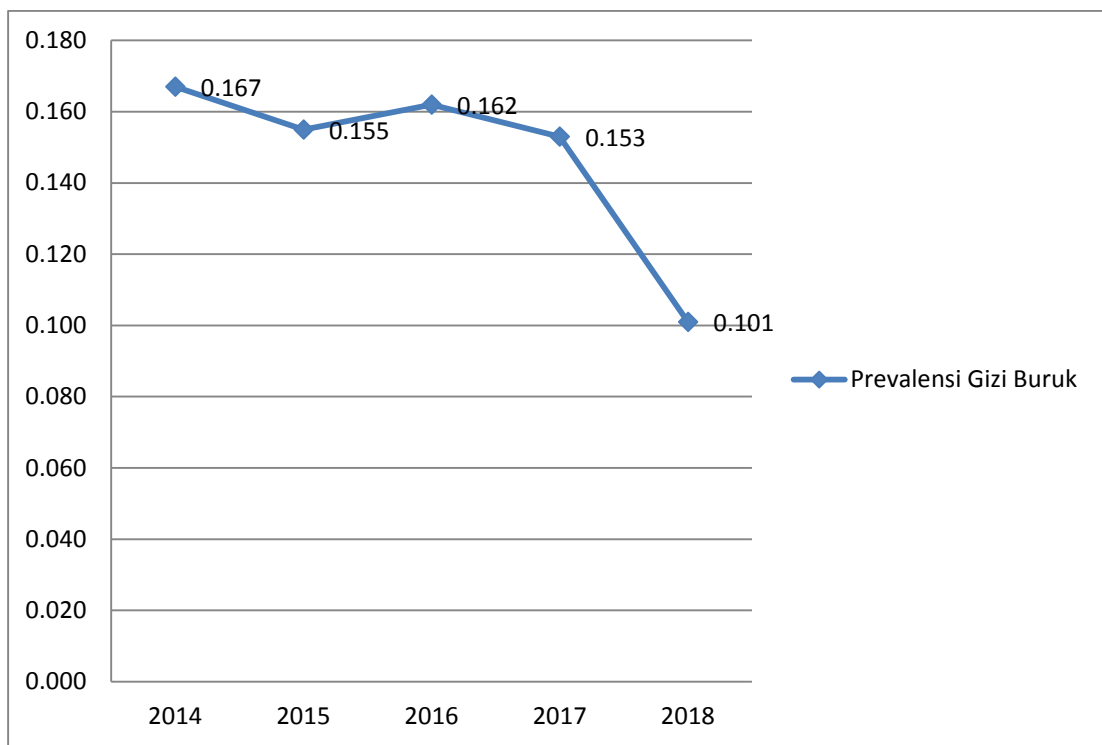
c. Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Perkembangan persentase balita gizi buruk Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Pada Tahun 2014 persentase balita gizi buruk Kota Palu mencapai 0,17% menurun menjadi 0,16% pada Tahun 2015. Persentase balita gizi buruk Kota Palu pada Tahun 2016 meningkat menjadi 0,16% kemudian menurun hingga mencapai 0,15% pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 persentase balita gizi buruk di Kota Palu mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 0,10%. Namun demikian secara keseluruhan persentase balita gizi buruk di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir tergolong sangat rendah. Gambaran ringkas persentase balita gizi buruk di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 ditunjukkan dalam Gambar 2.17.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2016

Gambar 2.17
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu

3) Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Pada Tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka di Kota Palu sebesar 5,69% meningkat menjadi 8,32% pada Tahun 2015. Pada Tahun 2016 tidak dilakukan survey. Pada Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka menurun hingga mencapai 6,56% dan terus menurun pada Tahun 2018 hingga mencapai 5,81%. Gambaran tingkat pengangguran terbuka, TPAK dan angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2014-2018 diuraikan dalam Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka
di Kota Palu Tahun 2014– 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
I. Angkatan Kerja	174.308	177.951	-	190.455	192.243
1. Bekerja/Working	164.396	163.147	-	177.959	181.079
2. Pengangguran/ Unemployment	9.912	14.804	-	12.496	11.164
II. Bukan Angkatan Kerja	97.791	99.254	-	98.354	99.327
Total	446.407	455.156	-	479.264	483.813
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64.06	64.19	-	66,28	65,82
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,69	8,32	-	6,56	5,81
Rasio Penduduk yang bekerja	0,93	0,91	-	0,92	0,93

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olah raga di Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan diukur dari ketersediaan sarana dan prasaran seni budaya dan olah raga. Pada Tahun 2014 organisasi kepemudaan di Kota Palu sebanyak 382 organisasi meningkat menjadi 384 organisasi pada Tahun 2016. Organisasi kepemudaan ini tersebar di semua Kecamatan di Kota Palu, Kecamatan yang paling banyak terdapat organisasi pemuda adalah Kecamatan Palu Selatan sebanyak 91 organisasi dan paling sedikit adalah Kecamatan Tatanga sebanyak 25 organisasi.

Jumlah organisasi olah raga di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perkembangan. Tercatat pada Tahun 2014 sebanyak 203 organisasi hingga Tahun 2018 bertambah menjadi 205 organisasi. Organisasi olah raga tersebut tersebar di semua Kecamatan di Kota Palu, terbanyak di Kecamatan Palu Timur sebanyak 54 organisasi dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tawaeli sebanyak 10 organisasi. Jumlah

organisasi pemuda dan olah raga di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 menurut Kecamatan diuraikan dalam Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kota Palu
Tahun 2014– 2018

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018
JUMLAH ORGANISASI PEMUDA						
1	Kecamatan Palu Selatan	91	91	91	91	91
2	Kecamatan Palu Barat	65	65	65	65	62
3	Kecamatan Palu Timur	46	46	46	46	46
4	Kecamatan Palu Utara	28	28	25	25	29
5	Kecamatan Tawaeli	63	63	65	65	65
6	Kecamatan Mantikulore	29	29	29	29	32
7	Kecamatan Tatanga	25	25	29	29	30
8	Kecamatan Ulujadi	35	35	34	34	36
	Se-Kota Palu	382	382	384	384	385
JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA						
1	Kecamatan Palu Selatan	33	33	33	33	33
2	Kecamatan Palu Barat	19	19	19	19	19
3	Kecamatan Palu Timur	54	54	54	54	54
4	Kecamatan Palu Utara	20	20	20	20	20
5	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	10
6	Kecamatan Mantikulore	36	36	36	36	36
7	Kecamatan Tatanga	18	18	19	19	19
8	Kecamatan Ulujadi	13	13	14	14	14
	Jumlah	203	203	204	204	205

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun 2018

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

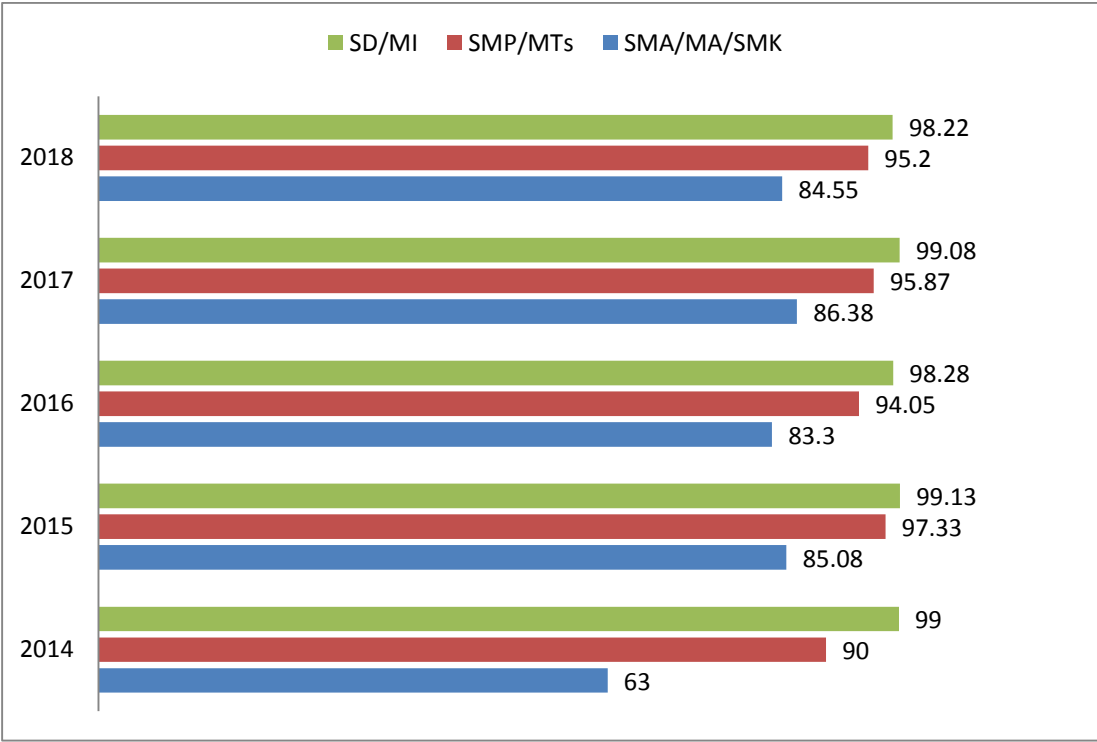
1) Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Pembangunan sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah jenjang pendidikan SD/MI selama 5 (lima) tahun tidak banyak mengalami perubahan. Pada Tahun 2014 APS SD/MI di Kota Palu sebesar 99% mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2015 menjadi sebesar 99,13%. Pada Tahun 2014 APS SMP/MTs di Kota Palu sebesar 90,00% meningkat hingga mencapai 97,33% pada Tahun 2015, kemudian menurun Pada Tahun 2016 menjadi sebesar 94,05%, dan terus meningkat hingga mencapai 95,87% pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 kembali menurun menjadi 95,20 % pada Tahun 2018.

Pada jenjang pendidikan SMA/MA/MK, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, APS cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014 APS SMA/MA/MK di Kota Palu sebesar 63% terus mengalami peningkatan hingga mencapai 85,08% pada Tahun 2016. Gambaran secara rinci mengenai APS di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 diuraikan dalam Gambar 2.18.



Sumber: SIPD Kota Palu 2018 dan BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018.

Gambar 2.18
Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs/SMA/MA/SMK di Kota Palu (persen) Tahun 2014 – 2018

APS jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu sudah cukup tinggi walaupun belum mencapai 100 persen, yang bermakna masih terdapat 0,7 persen penduduk usia 7 tahun hingga 13 tahun yang tidak bersekolah di SD/MI. Apabila di kaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun kondisi ini belum ideal, karena masih ada anak-anak yang tidak masuk sekolah pada pada jenjang sekolah dasar hingga SMP.

Masih rendahnya APS pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK disebabkan oleh sebagian penduduk usia sekolah pada jenjang SMP/MTs dan jenjang SMA/MA/SMK berhenti sekolah dan menjadi pekerja. Penyebab lainnya yang dapat diidentifikasi adalah karena tingginya biaya pendidikan pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK sehingga sebagian penduduk yang berpenghasilan rendah tidak memiliki cukup akses untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang tersebut.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Perkembangan rasio ketersediann sekolah di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.35.

Rasio ketersedian sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat. Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs cenderung konstan, sementara rasio ketersediaan sekolah jenjang SMA/SMK/MA selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir di Kota Palu cenderung menurun. Pada Tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI sebesar 47,66 per 10.000 penduduk, terus meningkat hingga mencapai 56,42 per 10.000 penduduk pada Tahun 2015. Pada Tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs sebesar 32,86 per 10.000 penduduk sedikit mengalami peningkatan menjadi 32,88 per 10.000 pada Tahun 2015. Rasio ketersediaan sekolah jenjang SMA/SMK/MA pada Tahun 2014 sebesar 25,18 per 10.000 penduduk, sedikit mengalami penurunan hingga mencapai 21,83 per 10.000 penduduk pada Tahun 2018.

Tabel 2.35
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu(per 10.000)
Tahun 2014-2018

No.	Jenjang pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	SD/MI					
1.1	Jumlah Sekolah	182	184	184	162	165
1.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 12 tahun	38.213	32.611	33.218	34.526	33.830
1.3	Rasio Palu	47.62	56.42	55.39	46.92	48,77
2.	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Sekolah	73	69	54	46	47
2.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 15 tahun	20.398	20.712	18.832	13.078	13.645
2.3	Rasio Palu	35.78	33.31	28.67	35.17	34.44

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

c. Rasio Ketersediaan Guru

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata mengindikasikan ketersediaan guru per kelas rata-rata dalam Kota Palu pada setiap jenjang pendidikan.

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu pada Tahun 2014 sebesar 57,65 atau 58 guru per 1.000 murid SD/MI. Pada Tahun 2016 rasio guru terhadap murid SD/MI di Kota Palu meningkat menjadi 60,65 atau 61 per 1.000 murid SD/MI. Pada Tahun 2016 rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SD/MI meningkat menjadi 60,65 atau 61 per 1.000 murid SD/MI. Rasio guru terhadap murid jenjang

pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di uraikan dalam Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kota Palu (per 1.000 Murid)
Tahun 2014 -2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. SD/MI:					
1.1 Jumlah Guru	2.393	2.610	2.390	2.150	1.910
1.2 Jumlah Murid	39.465	43.036	39.485	38.618	37.751
1.3 Jumlah Kelas	1.410	1.232	1.334	1.365	1.396
1.4 Rasio Guru/Murid	60,64	60,65	60,75	55,67	50,59
1.5 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	35,73	31,17	35,81	35,35	36,98
2. SMP/MTs:					
2.1 Jumlah Guru	1.165	1.443	1.231	1.192	1.153
2.2 Jumlah Murid	19.654	21.056	16.678	16.982	17.296
2.3 Jumlah Kelas	425	880	672	660	648
2.4 Rasio Guru/Murid	59,28	87,07	73,72	70,19	66,66
2.5 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	21,62	53,1	40,25	38,86	37,47
3. SMA/SMK/MA:					
3.1 Jumlah Guru	885	942	999	1.056	1.113
3.2 Jumlah Murid	10.161	10.407	10.653	10.899	11.145
3.3 Jumlah Kelas	316	466	616	766	916
3.4 Rasio Guru/Murid	87,10	90,52	93,94	97,36	98,78
3.5 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	31,10	44,78	58,47	72,14	85,82

Sumber: Data SIPD Kota Palu Tahun 2018

Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2014 sebesar 59,28 atau 60 per 1.000 murid. Sementara rasio guru/murid per kelas rata-rata sebesar 21,62 atau 22 per 1.000 murid. Pada Tahun 2015 rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu meningkat menjadi 87,07 atau 87 per 1.000 murid, sementara rasio guru/murid per kelas rata-rata meningkat menjadi 53,10 atau 53 guru per 1.000 murid per kelas rata-rata. Peningkatan tersebut akibat meningkatnya jumlah murid

SMP/MTs yang tidak dibarengi oleh meningkatnya guru, sementara peningkatan rasio guru/murid per kelas rata-rata selain akibat karena meningkatnya murid juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah kelas pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

d. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk:

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
- Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media cetak.
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Penduduk Kota Palu yang berusia diatas 15 tahun dan tidak buta aksara selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan, Pada Tahun 2015 angka melek huruf di Kota Palu sebesar 99,72% terus mengalami peningkatan hingga mencapai 99,72% pada Tahun 2015. Angka melek huruf di Kota bersumber dari penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak mungkin lagi bersekolah. Angka melek huruf di Kota Palu diperkirakan menjadi 100% pada Tahun 2021 yang berarti pada Tahun 2021 tidak ada lagi penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Palu yang tidak bisa baca tulis. Perkembangan angka melek Huruf di Kota Palu Tahun 2014– 2018 disajikan dalam Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu
Tahun 2014-2018

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Melek Huruf (Persen)	88,52	99,59	99,7	99,69	99,68

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kota Palu 2018

e. Kondisi Bangunan Sekolah

Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik di Kota Palu tahun 2014-2018 seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari tabel 2.38 yang menunjukkan 100% sekolah dengan kondisi baik pada tiap tahunnya.

Tabel 2.38
Jumlah Kondisi Bangunan Sekolah Baik Pada Jenjang SD/MIDI Kota Palu Tahun 2014 -2018

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Sekolah Kondisi Baik	182	184	176	162	148
Jumlah Sekolah	182	184	186	162	165
Kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: SIPD Kota Palu 2015 & BPS, Palu Dalam Angka Tahun 2018

Sekolah dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2014-2018 dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari tabel 2.39 yang menunjukkan 100% sekolah dengan kondisi baik pada tiap tahunnya.

Tabel 2.39
Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2014 - 2018

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Sekolah Kondisi Baik	73	73	73	46	46
Jumlah Sekolah	73	73	73	46	47
Kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2018

f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami Fluktuasi di seriap tahunnya. Pada Tahun 2017 jumlah murid TK/RA/Penitipan Anak di Kota Palu sebesar 8.888 murid menurun menjadi 6.675 murid pada Tahun 2018. Sementara persentase murid terhadap penduduk usia 4 – 6 tahun di Kota Palu pada Tahun 2017 sebesar 68,38% meningkat menjadi 81,75% pada Tahun 2018. Perkembanggan kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Palu Tahun 2014 -2018

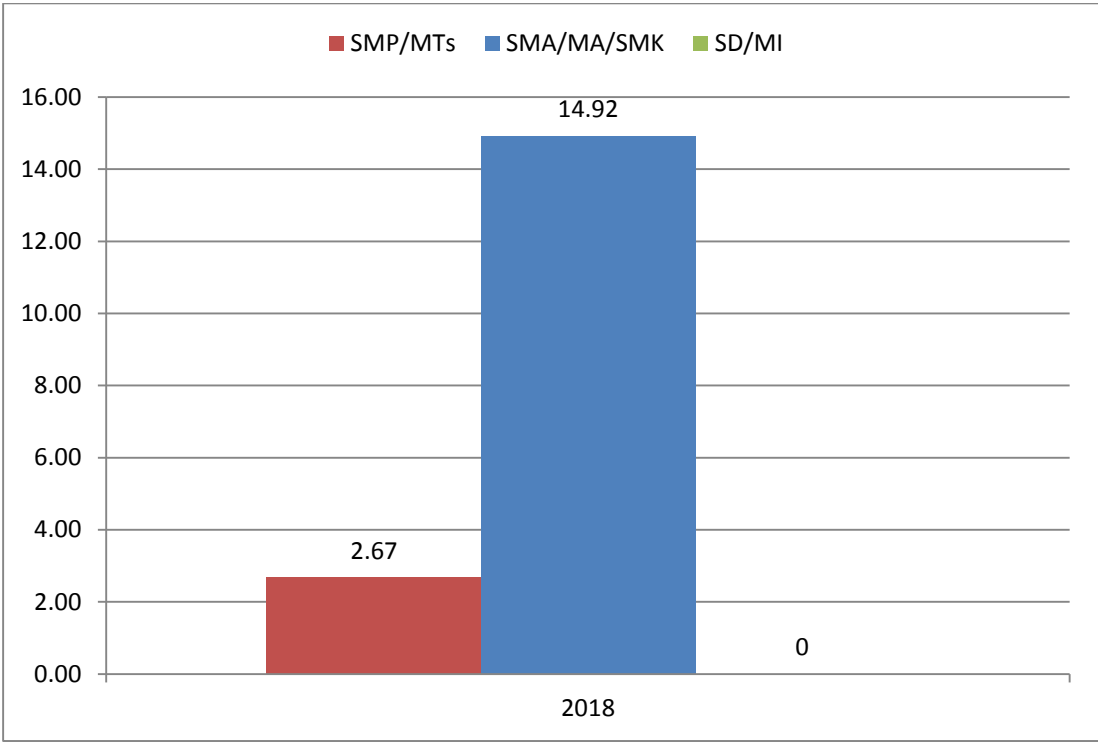
No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Murid TK/RA/Penitipan Anak	6.428	5.747	6.683	8.188	6.675
2.	Jumlah Penduduk Usia 4 - 6 Tahun	18.823	17.235	10.975	11.975	8.051
3.	Persentase PAUD	34,15	33,34	60,89	68,38	81,75

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

g. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan penduduk usia sekolah yang pernah menjadi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, tidak dapat melanjutkan sekolah karena suatu alasan, tidak termasuk penduduk yang tidak pernah sekolah. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu Tahun 2018 sebesar 18%. Sementara angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2018 sebesar 12% dan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar

13,76. Gambaran Angka Putus Sekolah (APS) di Kota Palu Tahun 2018 diuraikan dalam Gambar 2.19.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.19
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Palu Tahun 2018

h. Angka Kelulusan

Tabel 2.41
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Palu (persen) Tahun 2014-2018

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	5.939	6.319	6699	6498	6399
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	5939	6319	6699	6498	6399
Angka Kelulusan SD	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	6.823	8.212	9601	5577	5661
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	6.823	8.212	9601	5577	5661
Angka Kelulusan SMP	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambaran perkembangan angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Palu tahun 2014-2018 seperti diuraikan dalam Tabel 2.41. Angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 89,84% menurun pada Tahun 2018 sebesar 83,75%, sementara angka kelulusan pada jenjang pendidikan SMP/MTS Tahun 2018 sebesar 97,05%.

i. Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada tingkat pertama jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan lebih rendah tahun tersebut. Perkembangan angka melanjutkan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK di Kota Palu Tahun 2014 - 2018 diuraikan dalam Tabel 2.42.

Perkembangan angka melanjutkan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir di Kota Palu mengalami penurunan, dari 139,64% Tahun 2016 menurun mencapai 130,62% Tahun 2018. Besarnya angka kelulusan di Kota Palu yang mencapai di atas 100% disebabkan tingginya siswa baru pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu yang berasal dari Kabupaten lain di Sulawesi Tengah bahkan dari Provinsi lain seperti Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, dan lainnya.

Tabel 2.41
Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs dan
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2016-2018

Uraian	Tahun		
	2016	2017	2018
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SD/MI	6.699	6.498	6.399
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMP/MTs	8.265	5.634	5.284
Angka Melanjut SD/MI ke SMP/MTs	123,37%	87%	83%
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SMP/MTs	6.866	5.577	5.661
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	13.575	7.580	7.522
Angka Melanjut SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	197,71%	136%	133%

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Angka melanjutkan pendidikan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK di Kota Palu Tahun 2016 sebesar 104,06% menurun menjadi 102,91% Tahun 2016, kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 103,14. Besarnya angka melanjutkan pendidikan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK di Kota Palu yang mencapai di angka atas 100% disebabkan tingginya siswa baru pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Kota Palu yang berasal dari Kabupaten lain di Sulawesi Tengah bahkan dari Provinsi lain seperti Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, dan lainnya.

j. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Faktor utama penentu kualitas pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik. Indikator utama tercapainya kualitas tenaga pendidik adalah kualifikasi pendidikan tenaga pendidik. Perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kota Palu selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat. Pada Tahun 2014 rasio guru

yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu sebesar 77,48%, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 81,86% pada Tahun 2015. Uraian mengenai perkembangan guru memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2012 – 2015 disajikan dalam Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu
Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				2018
	2014	2015	2016	2017	
Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	5157	5370	5688	5964	6240
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	6352	6560	6819	7059	7360
Rasio	81,19	81,86	83,42	84,48	85,48

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2018

Kalau dilihat dari trend, rasio guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu 4 (empat) tahun terakhir selalu meningkat, namun besarnya rasio tersebut masih tergolong rendah. Rendahnya rasio guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu sebagian besar bersumber dari guru SD/MI dan SMP/MTs khususnya dari SD/MI swasta dan SMP/MTs swasta di Kota Palu yang jumlahnya cukup besar.

2) Kesehatan

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Jumlah Posyandu sangat ditentukan oleh jumlah balita di suatu wilayah. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 75–100 balita. Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu. Perkembangan rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2014 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.44.

Rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Tahun 2014 sebesar 7 per 1.000 balita, mengalami penurunan hingga mencapai 6 per 1.000 balita pada Tahun 2015. Berdasarkan rasio ideal bahwa untuk 1 unit Posyandu dapat melayani antara 75 – 100 balita, maka ketersediaan Posyandu di Kota Palu Tahun 2015 tidak memenuhi rasio ideal. Jika dilihat rasio ketersediaan Posyandu menurut Kecamatan di Kota Palu, terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang sudah memenuhi rasio ketersediaan Posyandu, bahkan 2 (dua) diantaranya sudah melebihi rasio ideal. Namun demikian terdapat 5 (lima) Kecamatan yang belum memenuhi rasio ideal ketersediaan Posyandu. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasio ideal perlu ada penambahan dan pemerataan jumlah Posyandu pada 5 Kecamatan yang belum memenuhi rasio yang ideal.

Tabel 2.44
Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu
Menurut Kecamatan Tahun 2014 - 2018

Kecamatan		Posyandu	Balita	Rasio
Palu Barat		28	5.618	5
Tatanga		24	3.595	6
Ujujadi		28	2.499	11
Palu selatan		32	6.357	5
Palu Timur		32	6.464	5
Mantikulore		37	5.745	6
Palu Utara		20	2.089	9
Tawaeli		23	1.848	12
Kota Palu	2018	224	29.698	7,5

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Satuan Penduduk

Ketersedian Puskesmas di Kota Palu Tahun 2014-2018 tidak mengalami perubahan, sehingga rasio puskesmas persatuan penduduk terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2014 rasio ketersediaan puskesmas di Kota Palu sebesar 3,5 per 100.000

penduduk, terus mengalami penurunan hingga mencapai 3,3 pada Tahun 2018. Perkembangan rasio ketersediaan Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Rasio Puskesmas,Poliklinik dan Pustu di Kota Palu
(per 100.000 penduduk) Tahun 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Puskesmas	12	13	13	13	13
Jumlah Poliklinik	16	32	38	52	50
Jumlah Pustu	30	30	30	30	29
Jumlah Penduduk	362.202	368.086	374.020	379.782	385.619
Rasio Puskesmas	3,31	3,53	3,48	3,42	3,37
Rasio Poliklinik	4,42	8,69	10,16	13,69	12,97
Rasio Pustu	8,28	8,15	8,02	7,89	7,52

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Perkembangan Rumah Sakit di Kota Palu 5 (lima) Tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Palu dari tahun 2014-2018 terus mengalami penurunan. Jumlah dan rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.46.

Pada Tahun 2014 rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Palu sebesar 3,8 per 100.000 penduduk, terus mengalami penurunan hingga mencapai 3,5 per 100.000 penduduk pada Tahun 2018. Dalam menyikapi penurunan rasio rumah sakit per satuan

penduduk di Kota Palu, kebijakan yang diambil belakangan ini adalah menambah kapasitas rumah sakit.

Tabel 2.46
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Di Kota Palu Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Rumah Sakit Umum Daerah	3	3	3	3	3
Provinsi	2	2	2	2	2
Kota Palu	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Swasta	8	5	5	6	6
RS Umum	3	3	3	4	4
Rs Bersalin / RS Ibu Anak	4	2	2	2	2
RS Khusus (Mata)	1	0	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	2	2	2	2	2
Jumlah Seluruh Rumah Sakit	13	10	10	11	11
Jumlah Penduduk	362.202	368.086	374.020	379.782	385.619
Rasio Rumah Sakit (per-100.000 Penduduk)	3,59	2,72	2,67	2,89	2,85

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Perkembangan Jumlah Dokter di Kota Palu 5 (lima) Tahun terakhir ada kecenderungan menurun, hal tersebut diikuti oleh menurunnya rasio dokter per satuan penduduk. Perkembangan Jumlah dan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di Kota Palu Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Dokter	237	231	218	304	380
Jumlah Penduduk	362.202	368.086	374.020	379.782	385.619
Rasio Dokter per-100.000 penduduk	65,43	64,15	58,28	80,04	98,54

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

Pada Tahun 2014 rasio dokter persatuan penduduk di Kota Palu sebesar 61,5 per 100.000 penduduk, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 64,24 per 100.000 penduduk pada Tahun 2015. Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti oleh adanya kecenderungan penurunan jumlah dokter memperburuk rasio ketersediaan dokter di Kota Palu 5 (lima) tahun terakhir. Menurunnya jumlah dokter di Kota Palu sebagian disebabkan oleh adanya distribusi dokter ke Kabupaten di Sulawesi Tengah yang tidak dibarengi oleh peningkatan jumlah dokter khususnya dokter spesialis. Sementara dalam rangka meningkatkan kualifikasi tipe rumah sakit diperlukan peningkatan rasio dokter khususnya dokter spesialis. Selama ini belum ada kebijakan yang strategis dilakukan oleh pemerintah Kota Palu dalam upaya peningkatan ketersediaan dokter, khususnya dokter spesialis.

e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis di Kota Palu selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan, namun peningkatan penduduk masih lebih tinggi dibanding dengan peningkatan jumlah tenaga medis. Hal tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis semakin menurun. Perkembangan jumlah tenaga medis dan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2016 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2,48. Pada Tahun 2016 rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 5,7 per 10.000 penduduk, menurun hingga mencapai 5,6 per 10.000 penduduk pada Tahun 2018.

Tabel 2.48
Jumlah dan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
di Kota Palu Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Tenaga Medis	1690	2247	2069
Jumlah Penduduk	374.020	379.782	385.619
Rasio Tenaga Paramedis per-100.000 penduduk	451,84	591,65	536,53

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

3) Pekerjaan Umum

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

a. Proporsi Jaringan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kota Palu selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan panjang jalan di Kota Palu diikuti oleh meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Sementara panjang jalan rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jalan dalam kondisi baik. Perkembangan proporsi jalan dalam kondisi baik di Kota Palu Tahun 2016 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.49.

Pada Tahun 2016 proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Palu sebesar 0,48%, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 0,68% pada Tahun 2018. Hal tersebut sejalan dengan

meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Pada Tahun 2017 panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Palu sepanjang 367,963 km, menurun menjadi 126,352 km pada Tahun 2018. Sementara panjang jaringan jalan yang mengalami rusak ringan pada Tahun 2016 sepanjang 157,04 km, menurun hingga mencapai 137,622 km pada Tahun 2017. Demikian pula dengan panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat pada Tahun 2016 sepanjang 104,17 km, meningkat hingga mencapai 217,785 pada Tahun 2018 akibat Bencana Alam.

Tabel 2.49
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam
Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2016-2018

Keterangan	2016	2017	2018
Jalan Kondisi Baik (km)	332,7	367,963	126,352
Jalan Kondisi Baik Sedang (km)	257,65	233,729	157,830
Jalan Kondisi Rusak (km)	157,04	137,622	349,596
Jalan Kondisi Rusak Berat (km)	104,17	112,244	217,785
Panjang jalan (km)	851,56	851,558	851,563
Proporsi	0,39	0,43	0,14

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

b. Panjang Jalan Yang Mempunyai Trotoar dan Drainase

Panjang Jalan Perkembangan proporsi panjang jalan yang mempunyai Trotoar dan drainase di Kota Palu Tahun sampai dengan 2014 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Panjang Ruas Jalan Bertrotoar dan Berdrainase (Km)
Tahun 2014-2018

No	Ruas jalan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Drainase (Km)	1.006,88	1.011,09	1.114,54	1.217,99	1.321,45
2	Panjang Trotoar (Km)	9.645	9.756	1.030	872	995
3	Panjang Jalan (Km)	828,7	851,26	851,56	851,56	851,56
4	Persentase Jalan yang Berdrainase (Km)	60,75%	59,38%	65,44%	71,51%	77,58%
5	Persentase Jalan yang Bertrotoar (Km)	58,17%	57,26%	57,26%	57,71%	58,41%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

c. Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Jaringan irigasi di Kota Palu selama tahun 2014-2018 mengalami perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh, tidak bertambahnya jaringan irigasi ataupun luas lahan budidaya. Kota Palu merupakan pusat perkantoran dan perdagangan serta industri, sehingga untuk penambahan luas lahan budidaya tidak mencukupi lagi. Perkembangan jaringan irigasi di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Jaringan Irigasi di Kota Palu (meter) Tahun 2014-2018

Saluran Irigasi	Panjang Saluran				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kondisi Baik	8.165,16	24.804,71	47.016,29	61.127,17	53.354,87
Kondisi Sedang	1.423,27	4.328,47	7.734,18	7.610,33	6.487,45
Kondisi Rusak Ringan	1.401,23	4.261,45	7.608,24	6.834,04	11.686,61
Kondisi Rusak Berat	548,91	1.669,36	2.867,99	3.502,59	8.386,38
Panjang Saluran Irigasi	11.538,57	35.063,99	65.226,70	79.074,13	79.915,31

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

d. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Perkembangan bangunan tempat ibadah di Kota Palu Tahun 2016 - 2018 mengalami Peningkatan. Perkembangan bangunan tempat ibadah diikuti oleh meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Gambaran mengenai perkembangan rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2016 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.52. Pada Tahun 2016 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu sebesar 1,42 per 1.000 penduduk, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1,64 per 1.000 penduduk pada Tahun 2018. Peningkatan rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu merupakan salah satu indikator adanya peningkatan kualitas kehidupan beragama (iman) bagi pemeluk agama di Kota Palu.

Tabel 2.52
Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per 1.000 Penduduk
di Kota Palu Tahun 2016 - 2018

Bangunan Tempat Ibadah	2016			2017			2018		
	Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
Mesjid	473	299.262	1,58	431	303.700	1,4	431	308.138	1,4
Gereja	108	52.930	2,04	71	53.715	1,3	71	54.504	1,3
Pura	2	13.550	0,15	2	17.378	0,1	2	21.206	0,1
Wihara	5	8.629	0,58	3	8.810	0,3	3	8.990	0,3
Jumlah									

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

e. Rasio Tempat Pemakaman Per Satuan Penduduk

Perkembangan rasio tempat pemakaman per satuan penduduk dari tahun 2016 -2018 mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 daya rasio tempat pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu sebesar 1,99 m² per penduduk, terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,93 m² per penduduk pada Tahun 2018. Menurunnya

rasio pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu akibat tidak bertambahnya luas pemakaman sementara jumlah penduduk setiap tahunnya selalu meningkat. Perkembangan rasio pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2016 – 2018 diuraikan dalam Tabel 2.53.

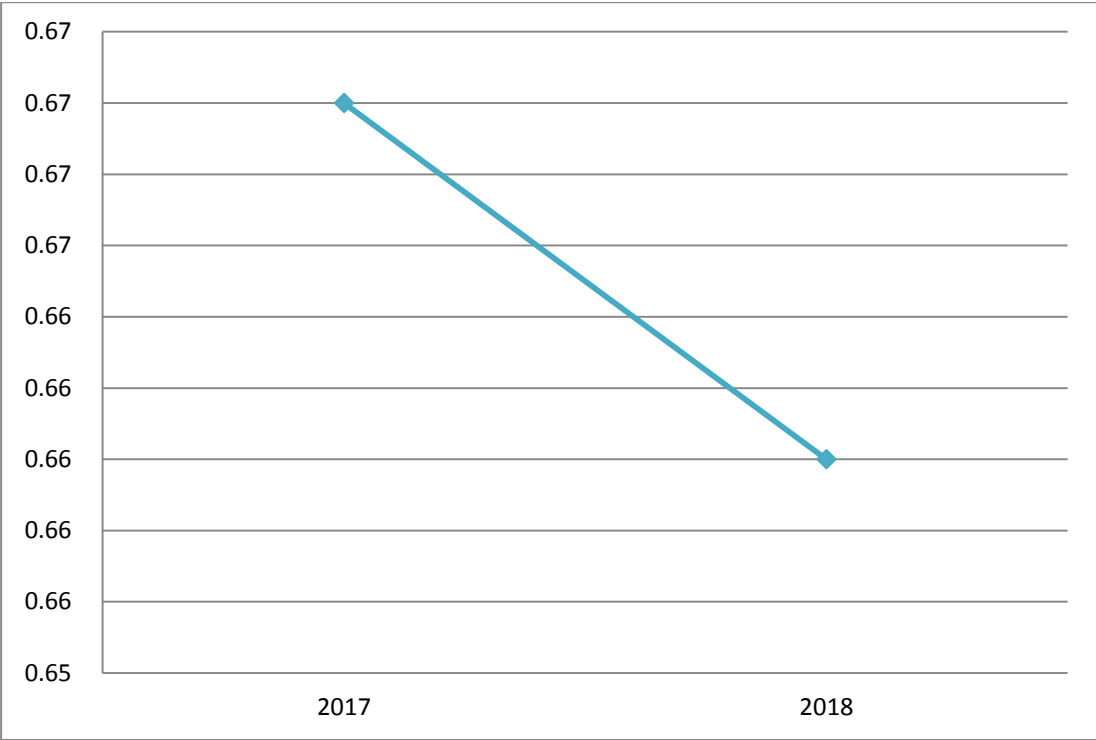
Tabel 2.53
Perkembangan Rasio Tempat Pemakaman Per Penduduk
di Kota Palu Tahun 2016 - 2018

Uraian	2016		2017		2018	
	Luas (m ²)	Daya Tampung	Luas (m ²)	Daya Tampung	Luas (m ²)	Daya Tampung
Tempat pemakaman umum (TPU)	330.000	8.256	330.000	8.256	330.000	8.256
Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	347.500	14.526	347.500	14.526	347.500	14.526
Tempat pemakaman khusus (TPK)	30.000	1.350	30.000	1.350	30.000	1.350
Jumlah	707.500	24.132	707.500	24.132	707.500	24.132
Jumlah penduduk (jiwa)	374.020	374.020	379.782	379.782	385.619	385.619
Rasio	1,99	0,07	1,95	0,07	1,93	0,07

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2018

f. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Perkembangan rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dari tahun 2017-2018 mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 . Hal ini disebabkan karena daya tampung sampah di TPS hanya mampu menampung 244 ton, sama dengan jumlah daya tampung pada tahun 2017.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Gambar 2.20
Rasio TPS Persatuan Penduduk di Kota Palu (Ton)
Tahun 2017 – 2018

4) Penataan Ruang

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- Didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam pemenuhan pengembangan ruang

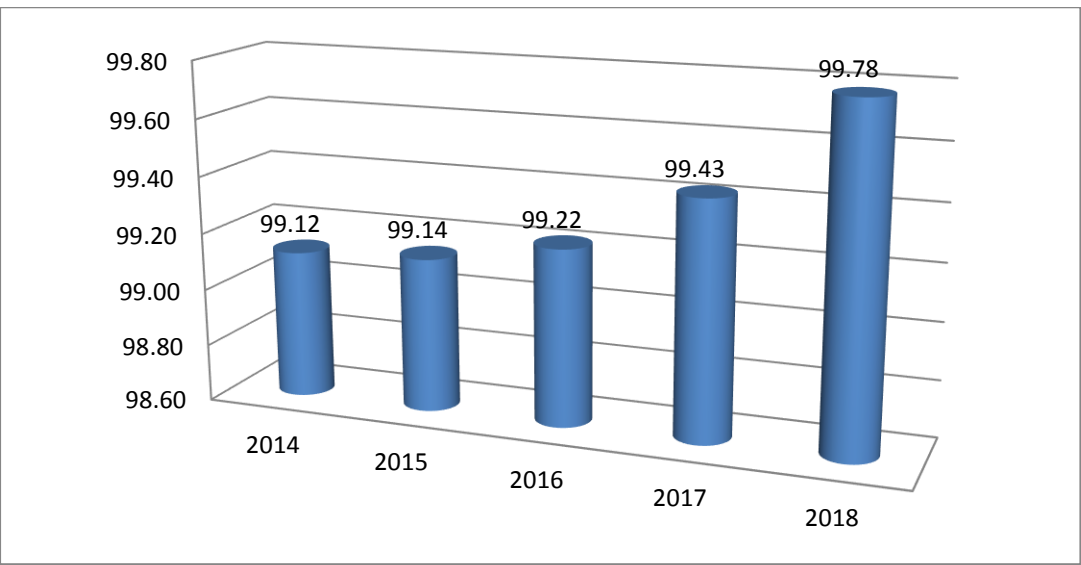
terbuka hijau untuk Kota Palu di tahun 2014 terdapat 14,65% yang telah dilakukan, dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

5) Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Keberadaan lingkungan perumahan kumuh di Kota Palu berdasarkan hasil identifikasi/survey program Kota tanpa kumuh Tahun 2017 diketahui bahwa luas lingkungan perumahan kumuh di Kota Palu Tahun 2017 seluas 812 ha.

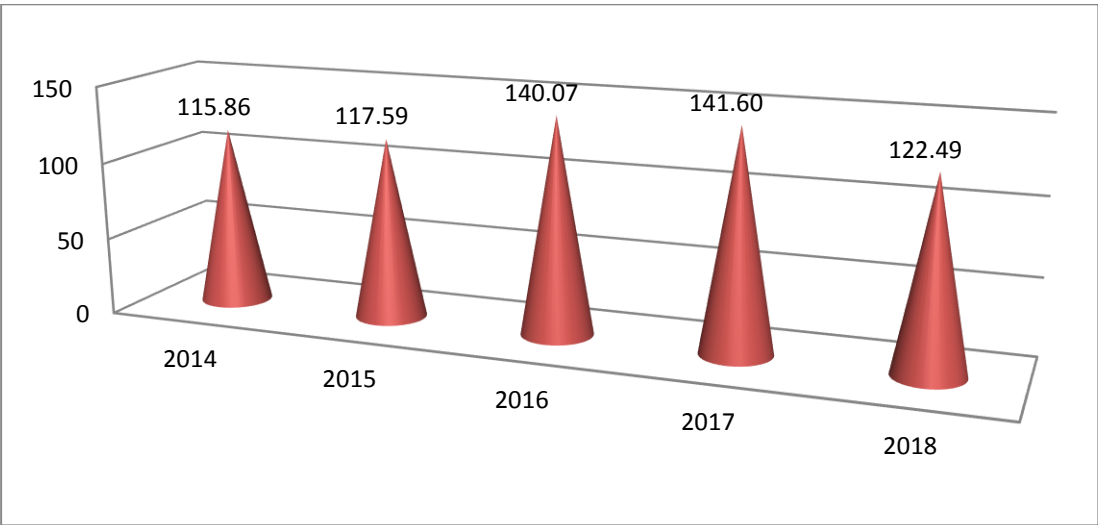
Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu selama tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2014 persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 16,29% menjadi 99,12% di tahun 2018.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.21
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kota Palu Tahun 2014– 2018

Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang di dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut PLN selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Secara umum dalam kurun waktu 2014 -2016 produksi listrik yang di dihasilkan oleh PLN mengalami kenaikan, meskipun pada Tahun 2015 produksi tersebut mengalami penurunan sekitar 7,84 persen atau hanya di produksi sekitar 499 juta kwh. Namun demikian di tahun 2014 produksi listrik PLN kembali meningkat menjadi 506 juta Kwh. Produksi listrik yang meningkat diiringi dengan nilai yang terjual akibat adanya kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi antara tahun 2015 sampai tahun 2018. Sementara itu nilai yang hilang/dipakai sendiri selama tahun 2018 menunjukkan trend negatif dengan kenaikan dari 3,07 juta Kwh menjadi 4,66 Juta Kwh. Adapun persentase pelanggan pengguna listrik terhadap jumlah rumah tangga di Kota Palu adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

Gambar 2.22
Persentase Pelanggan Pengguna Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga di Kota Palu Tahun 2014 - 2018

Persentase pelanggan pengguna listrik di Kota Palu melebihi jumlah rumah tangga, sehingga rasionya lebih besar dari 100%. Tahun 2018 pelanggan listrik di Kota Palu tercatat 131.479

pelanggan dan telah mampu menjangkau seluruh kelurahan (46 kelurahan) di seluruh wilayah Kota Palu.

6) Perencanaan Pembangunan

Diperhatikan dari aspek dokumen perencanaan Kota Palu telah memiliki RPJPD 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai payung hukum atas tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD 5 (lima) tahun untuk setiap periode kepemimpinan Kota Palu yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, yang disertai dengan tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.

7) Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Jumlah arus penumpang dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 arus penumpang sebesar 888.516 menjadi 490.030 tahun 2012 dan terus meningkat hingga tahun 2014. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena data tahun 2015 belum sampai pada 31 desember. Perkembangan rasio ijin trayek juga mengalami fluktuasi selama tahun 2014-2018.

Berikut jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel 2.54 berikut :

Tabel 2.54
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
di Kota Palu Tahun 2014– 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
1	Jumlah Penumpang Bis	N.A	93.243	93.557	112.838	108.547
2	Jumlah Penumpang Kapal Laut	N.A	439.667	N.A	59.450	548.055
3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	502.077	1.001.338	1.329.761	1.342.969	1.229.573
Total Jumlah Penumpang		502.077	15.534.248	1.423.318	1.515.257	1.886.175

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

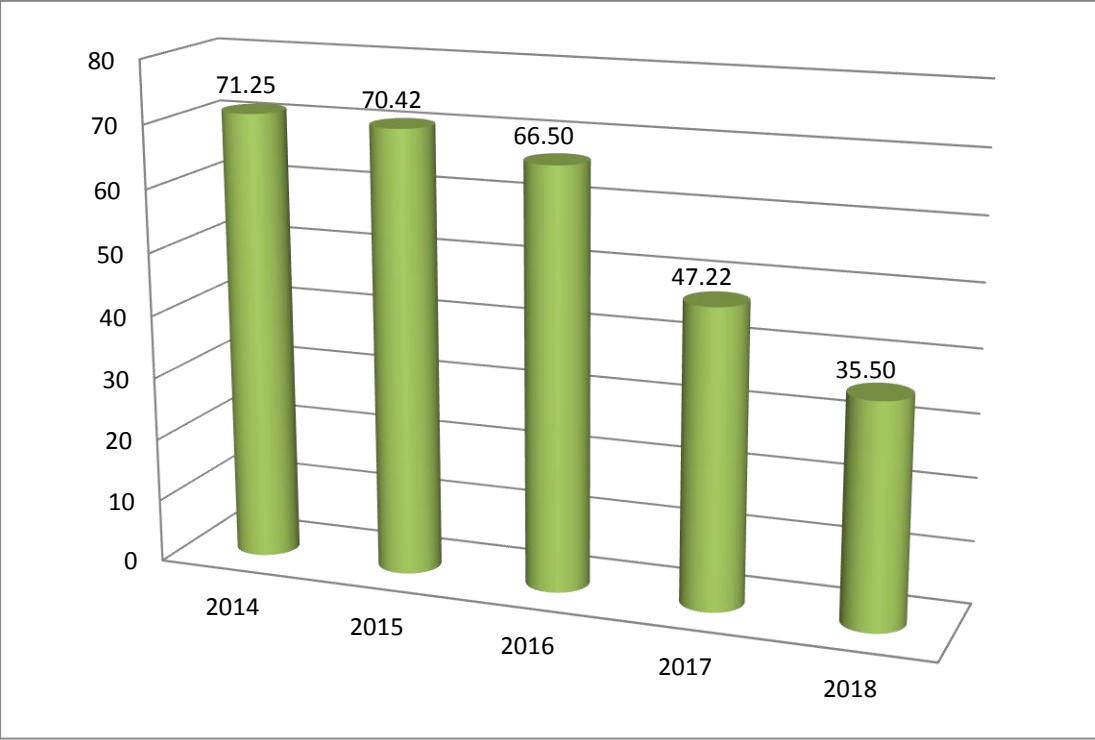
Rasio ijin trayek mengalami fluktuasi selama tahun 2014-2018 di Kota Palu. Pada tahun 2014 rasionya mencapai 0,0023 menjadi 0,0017 di tahun 2015, kemudian kembali meningkat di tahun 2016 menjadi 0,0019 dan pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 0,0013. Hal ini dipengaruhi oleh naik turunnya penumpang yang keluar dan masuk Kota Palu.

Tabel 2.52
Rasio Izin Trayek di Kota Palu Tahun 2014-2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Izin Trayek	156	156	156	156	156
2	Jumlah Penduduk	362.202	368.086	374.620	379.782	385.619
	Rasio ijin Trayek	0,00043	0,00042	0,00042	0,00041	0,00041

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2017

Persentase uji Kir di Kota Palu mengalami penurunan pada setiap tahunnya, selama tahun 2014-2017. Hal ini menunjukan kurangnya pemeriksaan uji berkala pada kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

Gambar 2.23
Persentase Uji Kir Angkutan Umum di Kota Palu
Tahun 2014 - 2018

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kota Palu tahun 2014-2018 tidak mengalami peningkatan. Hal ini juga terkait dengan berfluktuasinya jumlah penumpang dan masih terlayannya.

Tabel 2.56
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kota Palu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pelabuhan laut	2	2	2	2	2
2	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Bus	4	4	4	4	4
Jumlah		7	7	7	7	7

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

8) **Lingkungan Hidup**

Persentase penanganan sampah di Kota Palu selama tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan yang pada tahun 2014

sebesar 43% menjadi 65% di tahun 2015, 72% di Tahun 2016, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 82,29% pada Tahun 2018.

Tabel 2.57
Jumlah Volume Sampah dan Produksi
Sampah di Kota Palu Tahun 2014-2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
		(dalam satuan m³)				
1	Jumlah sampah yang ditangani	240.016	250.818	252.560	279.574	141.968
2	Jumlah volume produksi sampah	386.824	252.005	N.A	391.427	381.792
3	Persentase	69,47%	82,29%	N.A	71,42%	37,18%

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

9) Pertanian

Luas lahan bersertifikat cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 73.821,12 Ha menjadi 131.471,55 Ha pada tahun 2018. Hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya rasio luas lahan bersertifikat terhadap jumlah penduduk di Kota Palu. Adapun data luas lahan bersertifikat tahun 2016-2018 di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.58
Luas Lahan Bersertifikat di Kota Palu Tahun 2016-2018

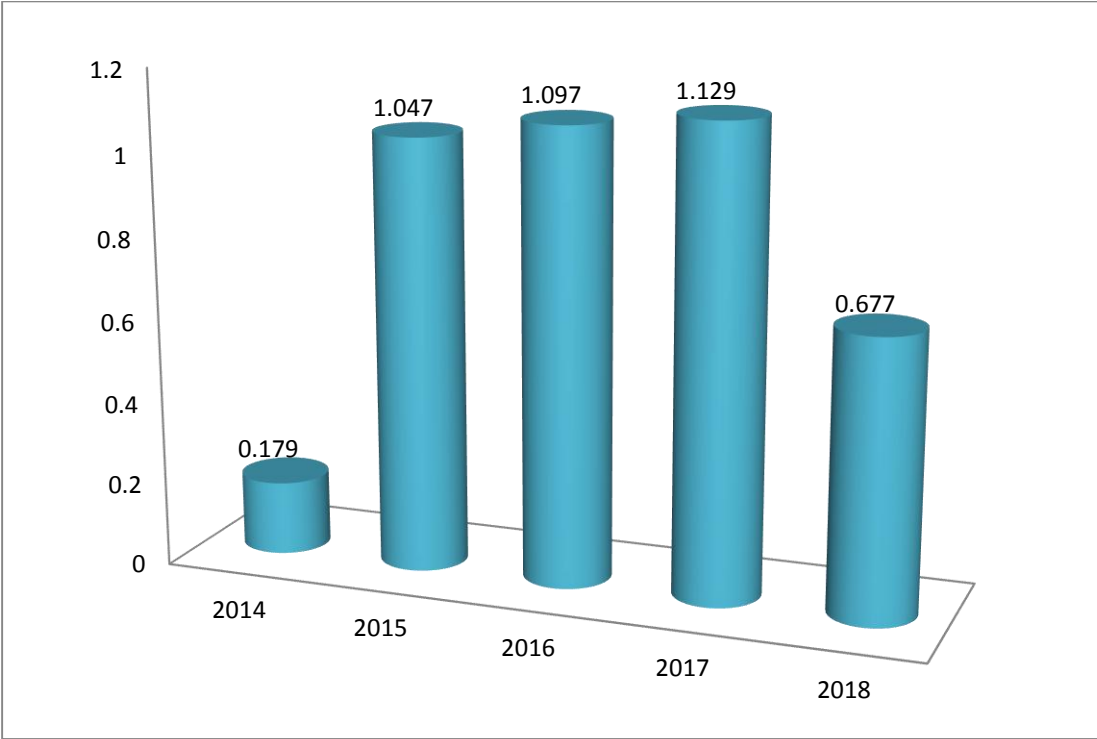
Luas Tanah Yang Bersertifikat	2016	2017	2018	Satuan
1). Hak Milik	341.097	301.027	297.091	Km ²
2). Hak Guna Bangunan	923.447	911.391	729.099	Km ²
3). Hak Guna Usaha	-	-	-	Km ²
4). Hak Pakai	-	-	-	Km ²
5). Girik	-	-	-	Km ²
Jumlah	1.264.544	1.212.418	1.026.190	Km ²
Luas Wilayah	3.950.600	3.950.600	3.950.600	Km ²

Luas Tanah Yang Bersertifikat	2016	2017	2018	Satuan
Rasio Luas Lahan Bersertifikat	32,01	30,69	25,96	Km ²

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

10) Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kota Palu tahun 2014-2018 dibandingkan dengan penduduk umur 17 tahun keatas. Rasio penduduk ber-KTP di Kota Palu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, yang pada tahun 2014 sebesar 0,178 menjadi 1,129 di tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,677.

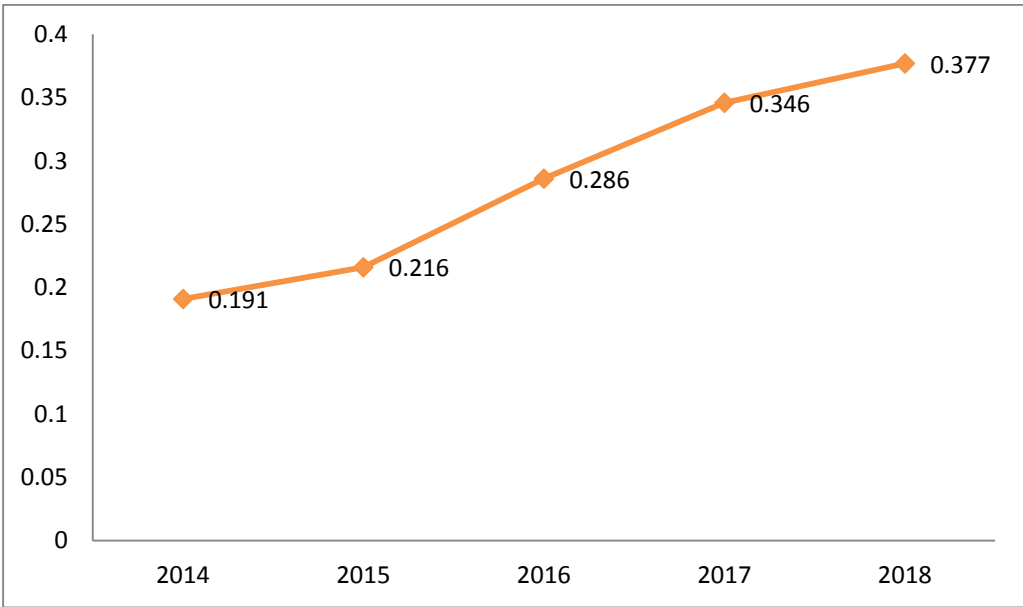


Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.24
Rasio Penduduk Ber KTP di Kota Palu Tahun 2014– 2018

Pada Tahun 2014 jumlah keluarga yang telah memiliki kartu keluarga di Kota Palu sebesar 32.828 keluarga, dan keluarga yang belum memiliki kartu keluarga berjumlah 65.939 keluarga. Sedangkan untuk rasio kepemilikan akte nikah di Kota Palu mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2014-2018.

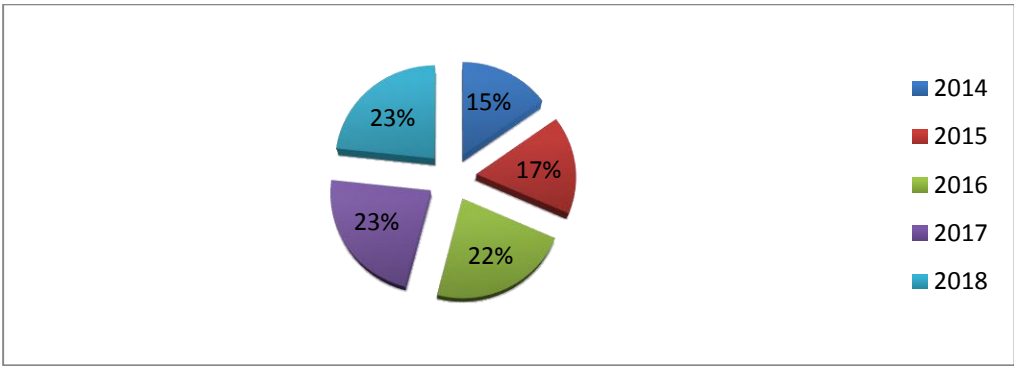
Semakin besar rasio pasangan berakta nikah menunjukan bahwa semakin banyak pasangan yang memiliki akta nikah di Kota Palu.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.25
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Palu Tahun 2014 - 2018

Rasio kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2014-2016. Pada tahun 2014 rasionya sebesar 19,585 menjadi 30,1 di tahun 2018. Semakin besar rasio kepemilikan akta kelahiran menunjukan bahwa semakin banyak penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kota Palu.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.26
Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Palu Tahun 2014 – 2016

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta sebesar 52,64% dari total pekerja perempuan, sedangkan untuk lembaga pemerintah sebesar 47,36%. Ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja perempuan lebih banyak bekerja di lembaga swasta dibandingkan lembaga pemerintah.

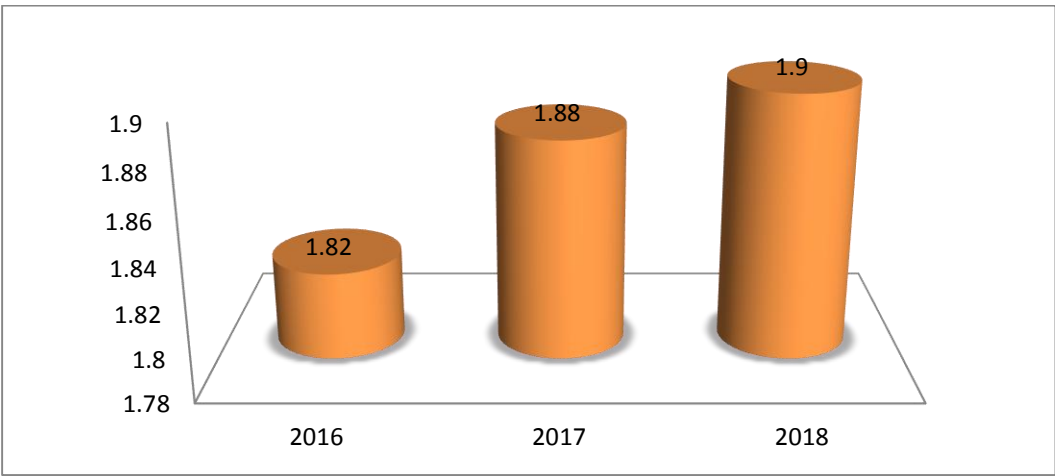
Tabel 2.59
Persentase Pekerja Perempuan di Kota Palu Tahun 2018

Keterangan	jumlah
Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	4.908
Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Pemerintah	4.416
Jumlah pekerja perempuan	9.324
Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	52,64%
Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	47,36%

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

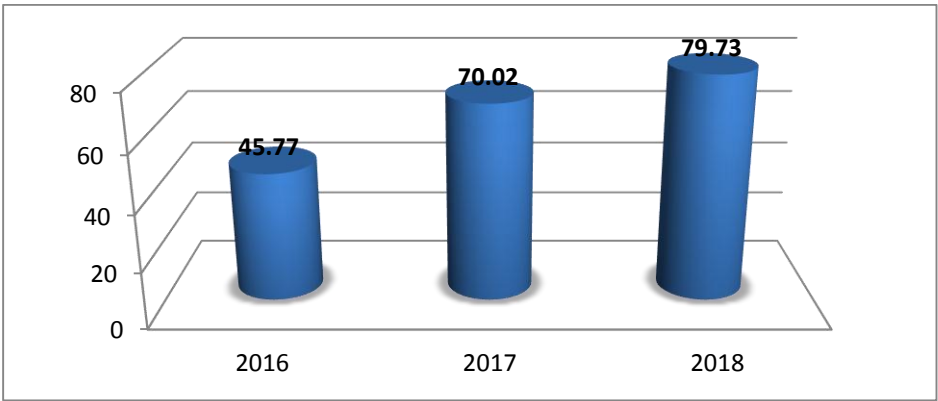
Rata-rata jumlah anak di Kota Palu tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, yang pada tahun 2016 sebesar 1,82 menjadi 1,9 di Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu keluarga rata-rata mempunyai anak 1 atau 2 orang perkeluarga.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.27
Rata-rata Anak Per Keluarga di Kota Palu Tahun 2016 - 2018

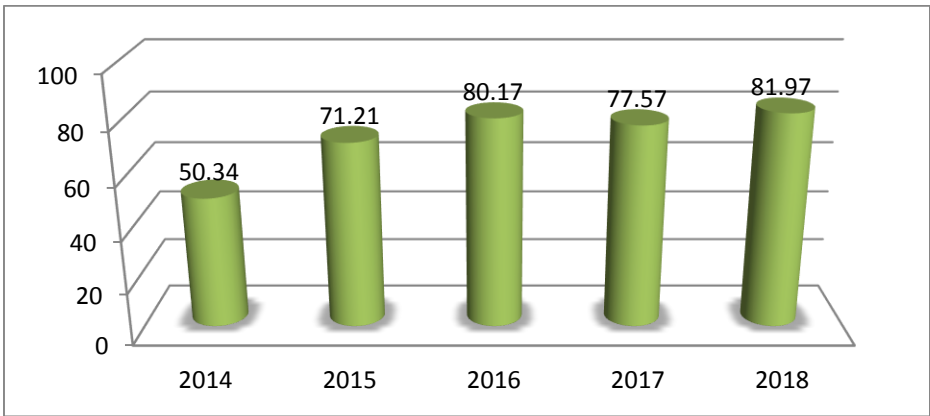
Rasio akseptor KB di Kota Palu dari tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 rasionya sebesar 45,77 menjadi 70,02 di tahun 2017. Kemudian secara signifikan meningkat hingga 79,73 di tahun 2018.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.28
Rasio Akseptor KB di Kota Palu Tahun 2016 - 2018

Cakupan peserta KB aktif di Kota Palu tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2014 cakupan peserta KB aktif sebesar 50,34 menjadi 71,21 pada tahun 2015 dan kembali meningkat ditahun 2016 sebesar 80,17. Pada tahun 2017 cakupan peserta KB aktif menurun menjadi 77,57 dan kembali meningkat menjadi 81,97 pada tahun 2018. Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.29
Cakupan Peserta KB di Kota Palu Tahun 2014 – 2018

13) Sosial

Jumlah sarana sosial di Kota Palu tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Sarana sosial pada tahun 2014 sebanyak 44 menjadi 50 di tahun 2018. Jumlah panti asuhan di Kota Palu mengalami peningkatan yang pada tahun 2014 sebesar 44 menjadi 49 di tahun 2018.

Tabel 2.60
Jumlah Sarana Sosial

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Panti Asuhan	36	36	36	53	59
Rumah singgah	1	1	1	1	1
Jumlah	37	37	37	54	60

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di tahun 2018 turun 26,68% dari tahun sebelumnya menjadi45,52% dari total PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.61
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu
Tahun 2016– 2018

Uraian	2016	2017	2018
PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan (jiwa)	131.608	61.308	54.314
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	52.710	44.277	24.726
% PMKS yang memperoleh bantuan sosial	40,05%	72,20%	45,52%

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

14) Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin laki-laki tahun 2018 mencapai 76,67% sedangkan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 51,45 %;dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palu tahun 2018 sebesar 64,06%.

Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,23% untuk jenis kelamin laki-laki dan 4,88% untuk jenis kelamin perempuan serta 5,69% untuk tingkat pengangguran terbuka di Kota Palu tahun 2018.

Tabel 2.62
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angkatan Kerja	174.308	177.951	-	190.455	192.243
	a. Bekerja	164.396	163.147	-	177.959	181.079
	b. Pengangguran	9.912	14.804	-	12.496	11.164
2	Bukan Angkatan Kerja	97.791	99.254	-	96.876	99.837
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	272.099	277.205		287.331	292.080
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kota Palu	64,06	64,19		66,28	65,82
4	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Sul-Teng	66,38	65,92	66,76	67,51	66,82
5	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Palu	5,69	8,32		6,56	5,81
6	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Sul-Teng	3,93	4,27	3,68	4,10	3,96

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

15) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif di Kota Palu tahun 2014 sebesar 51,45% terus meningkat sampai pada tahun 2016 yaitu sebesar 52,06% dan pada tahun 2017 tetap sebesar 52,06%. Persentase koperasi aktif tahun 2018 mengalami penurunan yang hanya sebesar 51,75%. Sedangkan untuk data jumlah UKM non BPR/LKM tidak tersedia.

Tabel 2.63
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2014 - 2018 Kota Palu

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
1	Jumlah koperasi aktif	164	163	172	174	182
2	Jumlah koperasi	315	265	272	209	216
3	Persentase koperasi aktif	52,06%	61,51%	63,24%	83,25%	84,26%

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

16) Penanaman Modal

Jumlah investor PMDN di Kota Palu tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 jumlah investor PMDN berjumlah 2 investor dan menjadi 1 investor pada tahun 2012-2013. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu berjumlah 60 investor dan kembali menurun di tahun 2018 yaitu berjumlah 38 investor.

Tabel 2.64
Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2014-2015

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2014	Jumlah Investor	64	10	74
2015	Jumlah Investor	75	1	76
2016	Jumlah Investor	71	8	79
2017	Jumlah Investor	49	7	56
2018*	Jumlah Investor	70	4	74

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Jumlah investor dalam asing maupun dalam negeri yang ingin melakukan rencana investasi di Kota Palu mengalami perkembangan, yang belum sejalan dengan realisasi nilai investasi. Untuk itu masih diperlukan upaya kerja keras dari instansi yang menangani penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.

Tabel 2.65
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Palu Tahun 2014–2018

Tahun	JumlahProyek	Nilai Investasi
2014	7	237.351.362.426
2015	5	209.047.730.276
2016	7	195.014.371.333
2017	60	526.220.162.000
2018	38	1.261.348.419.330

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) selama tahun 2014-2018 di Kota Palu mengalami fluktuasi, yang pada tahun 2014 terdapat 7 proyek menjadi 5 proyek di tahun 2015 dan pada tahun 2016 terdapat 7 proyek. Terdapat perkembangan yang signifikan pada tahun 2017 yang jumlah investor mencapai 60 proyek, tetapi pada tahun 2018 menjadi 38 proyek berskala nasional.

Jumlah nilai investasi juga mengalami fluktuasi selama periode 2014-2018. Terdapat 237,3 miliar nilai investasi di tahun 2014 meningkat menjadi 209,04 miliar di tahun 2015 dan kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 195,01 miliar. Pada tahun 2016-2018 terjadi peningkatan jumlah nilai investasi yang mencapai 1,066 triliun di tahun 2018 menjadi 1,261 T. Dalam kasus ini jumlah investor tidak mempengaruhi nilai investasi.

17) Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda di Kota palu tahun 2014-2018 memiliki jumlah yang sama. Organisasi Pemuda yang jumlahnya paling banyak yaitu pada Kecamatan Palu Selatan berjumlah 91 organisasi, Palu Barat dengan 65 organisasi dan Tawaeli dengan 63 organisasi. Sedangkan yang paling sedikit yaitu Kecamatan Tatanga dengan jumlah 25 organisasi, Palu Utara dengan 28 organisasi, dan Mantikulore dengan 29 organisasi.

Berikut adalah jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 seperti di bawah ini :

Tabel 2.66
Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu
Tahun 2014 s/d 2018

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kecamatan Palu Selatan	91	91	91	91	91
2	Kecamatan Palu Barat	65	65	65	65	65
3	Kecamatan Palu Timur	46	46	46	46	46
4	Kecamatan Palu Utara	28	28	28	28	28
5	Kecamatan Tawaeli	63	63	65	65	65
6	Kecamatan Mantikulore	29	29	29	29	30
7	Kecamatan Tatanga	25	25	25	25	25
8	Kecamatan Ulujadi	35	35	35	35	35
	Se-Kota Palu	382	382	384	384	385

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Jumlah organisasi olahraga dari tahun 2014-2018 tidak mengalami peningkatan yang hanya sebesar 203 organisasi olahraga pada tiap tahunnya. Jumlah Organisasi Olahraga yang paling banyak yaitu pada Kecamatan Palu Timur berjumlah 54 organisasi, Mantikulore dengan 36 organisasi dan Palu Selatan dengan 33 organisasi. Sedangkan yang paling sedikit yaitu Kecamatan Ulujadi dengan jumlah 13 organisasi, Tatanga dengan 18 organisasi, dan Palu Barat dengan 19 organisasi.

Berikut adalah jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 seperti di bawah ini :

Tabel 2.67
Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu
Tahun 2014 s/d 2018

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kecamatan Palu Selatan	33	33	33	33	33
2	Kecamatan Palu Barat	19	19	19	19	19
3	Kecamatan Palu Timur	54	54	54	54	54
4	Kecamatan Palu Utara	20	20	20	20	20
5	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	10
6	Kecamatan	36	36	36	36	36

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
	Mantikulore					
7	Kecamatan Tatanga	18	18	19	19	19
8	Kecamatan Ulujadi	13	13	13	13	14
	Jumlah	203	203	204	204	205

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Jumlah kegiatan kepemudaan selama tahun 2014-2018 sebanyak 25 kegiatan yang diantaranya terdapat 6 kegiatan di Tahun 2014 dan 2018, 4 kegiatan di Tahun 2015 dan 2017, dan 5 kegiatan di Tahun 2016. Sedangkan untuk jumlah kegiatan olahraga selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah kegiatan olahraga sebanyak 10 menjadi 12 di Tahun 2015, kemudian terdapat 13 kegiatan olahraga di Tahun 2016 dan terus meningkat hingga tahun 2018 menjadi 16 kegiatan olahraga.

Tabel 2.68
Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga
di Kota Palu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	6	4	6	5	5
2	Jumlah kegiatan olahraga	10	12	13	13	15

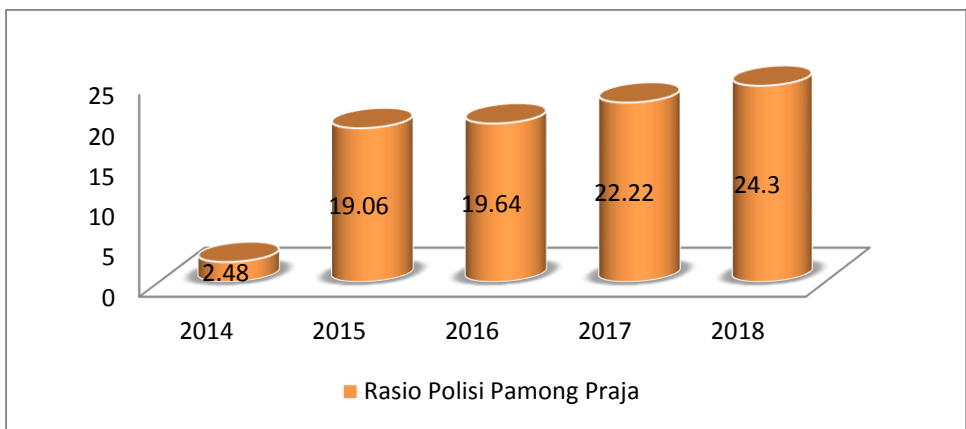
Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

18) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap Ormas di Kota Palu pada tahun 2017-2018 tidak mengalami perubahan yang tetap berjumlah 31 kegiatan pembinaan.

19) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

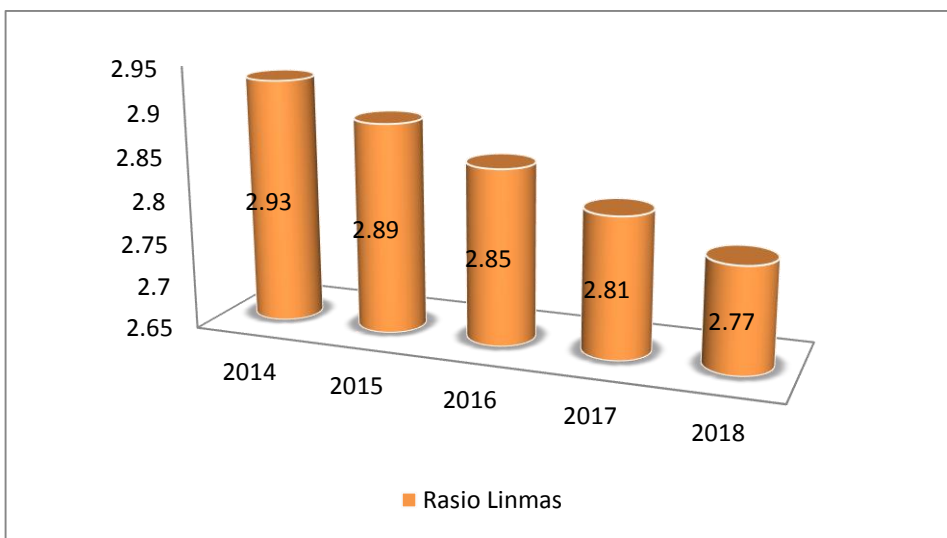
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk tahun 2016 sebesar 19,64 menjadi 22,22 di tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 meningkat lagi mencapai 24,3.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.30
Rasio Polisi Pamong Praja di Kota Palu Tahun 2014 - 2018

Rasio jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2014 yang sebesar 2,93 menjadi 2,89 di Tahun 2015. Pada Tahun 2016 rasionya sebesar 2,85 dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan yang rasionya menjadi 2,81. Dengan peningkatan jumlah penduduk, rasio linmas cenderung menurun hingga pada tahun 2018 sebesar 2,77.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.31
Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2014-2018

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan di Kota Palu mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan rasio sebesar 9,79 meningkat sebesar 13,5 pada tahun 2018



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.32
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Palu
Tahun 2014 – 2018

20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dari tahun 2014-2018 sebanyak 1 kelompok setiap tahunnya. Demikian pula, dengan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK yang setiap tahunnya tetap berjumlah 1 kelompok selama tahun 2014-2018. Jumlah LSM yang ada di Kota Palu selama tahun 2014-2018 sebanyak 22 LSM.

Kota Palu memiliki PKK aktif tahun 2011 dan 2012 berjumlah 21, kemudian pada tahun 2013 mengalami penambahan 17 PKK aktif menjadi 38 dan tetap sama pada tahun 2014. Posyandu aktif di Kota Palu mengalami peningkatan pada Tahun 2016 sebanyak 1 posyandu dari tahun sebelumnya yang berjumlah 222 posyandu menjadi padselama tahun 2011-2014.

21) Statistik

Buku Kota Palu Dalam Angka periode dari 2014-2018. Seringkali menyajikan jenis data meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Palu dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Ketersediaan Buku PDRB Kota Palu selama periode 2014-2018 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Palu.

22) Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di OPD Kota Palu sudah dilaksanakan oleh semua OPD, namun hanya terdapat satu OPD yang melakukan pengarsipan secara baku. Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan, telah dilakukan peningkatan kapasitas pengelola kearsipan untuk semua OPD di Kota Palu pada Tahun 2014.

23) Komunikasi dan Informatika

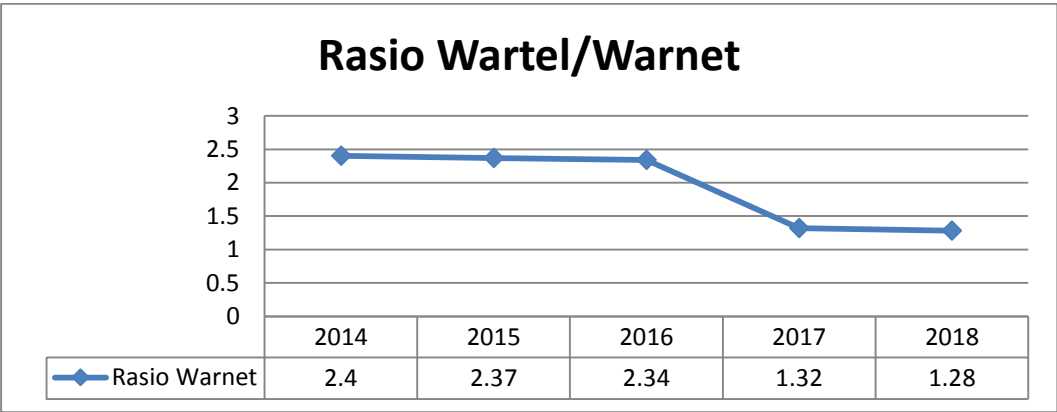
Jumlah jaringan komunikasi di Kota Palu tahun 2014-2018 berjumlah 4 jaringan telepon genggam sedangkan jaringan stasioner tidak tersedia.

Tabel 2.69
Jaringan Komunikasi Propinsi/Kota Palu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Jaringan Telepon Genggam	4	4	4	4	4
2	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	0	0	0	0	0
3	Jumlah jaringan Komunikasi (1+2)	4	4	4	4	4

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2015

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk mengalami penurunan selama tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 rasionya mencapai 2,4 menjadi 2,37 di tahun 2015, kemudian terus menurun sampai pada tahun 2018. Penurunan yang signifikan terjadi pada Tahun 2017 yang turun sebesar 1,02 dari rasio 2,34 di Tahun 2016 menjadi 1,32 di Tahun 2017. Penurunan rasio ini di pengaruhi oleh berkurangnya jumlah wartel/warnet di Kota Palu dan sebaliknya jumlah penduduk terus meningkat pada tiap tahunnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemasangan jaringan internet pada rumah-rumah masyarakat Kota Palu dan berkembangnya teknologi telepon genggam.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.33
Rasio Wartel/Warnet di Kota Palu Tahun 2014 - 2018

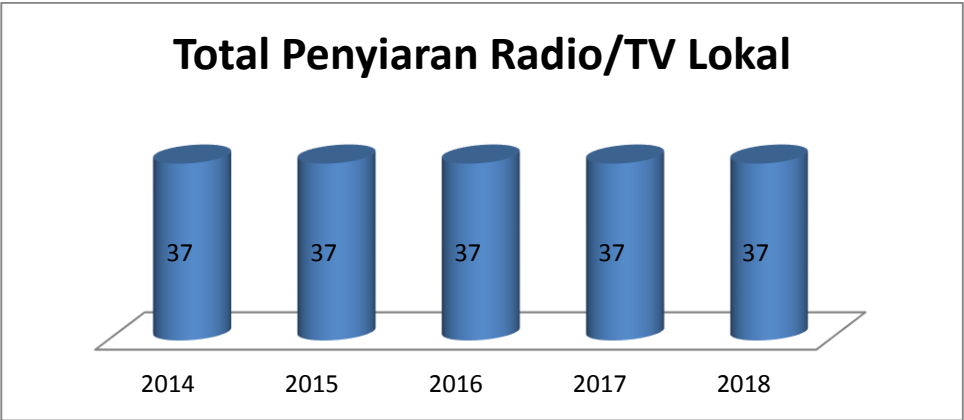
Jumlah jenis surat kabar nasional/lokal di Kota Palu selama tahun 2014-2015 berjumlah 9 pada tiap tahunnya, dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami rata-rata peningkatan sebanyak 7 jenis surat kabar pada Tahun 2016-2018, khususnya surat kabar terbitan lokal.

Tabel 2.70
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Palu Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	4	4	5	5	5
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan local	5	5	10	12	13
3	Total jenis surat kabar (1+2)	9	9	15	17	18

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Jumlah penyiaran radio/TV lokal tidak mengalami peningkatan selama tahun 2014-2018, yaitu berjumlah 37 total penyiaran.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.34
Total Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Palu
Tahun 2014 -2018

Website milik pemerintah Kota Palu adalah <http://palukota.go.id>, hal ini untuk mempermudah masyarakat Kota Palu untuk mengakses perkembangan Kota Palu.

24) Perpustakaan

Jumlah perpustakaan di Kota Palu tahun 2013 berjumlah 60 unit, pada tahun 2014 mengalami penambahan 1 unit yang berjumlah menjadi 61 unit sampai pada tahun 2018. Perpustakaan yang ada di Kota Palu merupakan perpustakaan milik Pemerintah Daerah.

Tabel. 2.71
Jumlah Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2013- 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	60	61	61	61	61	61
2	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	36	36	36	36	36	36
3	Total Perpustakaan (1+2)	96	97	97	97	97	97

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Jumlah total pengunjung perpustakaan di Kota Palu Tahun 2016–2018 terus mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 192 pengunjung, yang pada Tahun 2016 berjumlah 3.241 pengunjung menjadi 2.738 pengunjung di Tahun 2017, dan 2.431 pengunjung di Tahun 2018.

Berikut jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 pada table di bawah ini :

Tabel 2.72
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Palu
Tahun 2014–2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	2.634	2.454	2.306	2.138	2.081
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	-	-	935	600	350
3	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	2.634	2.454	3.241	2.738	2.431

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

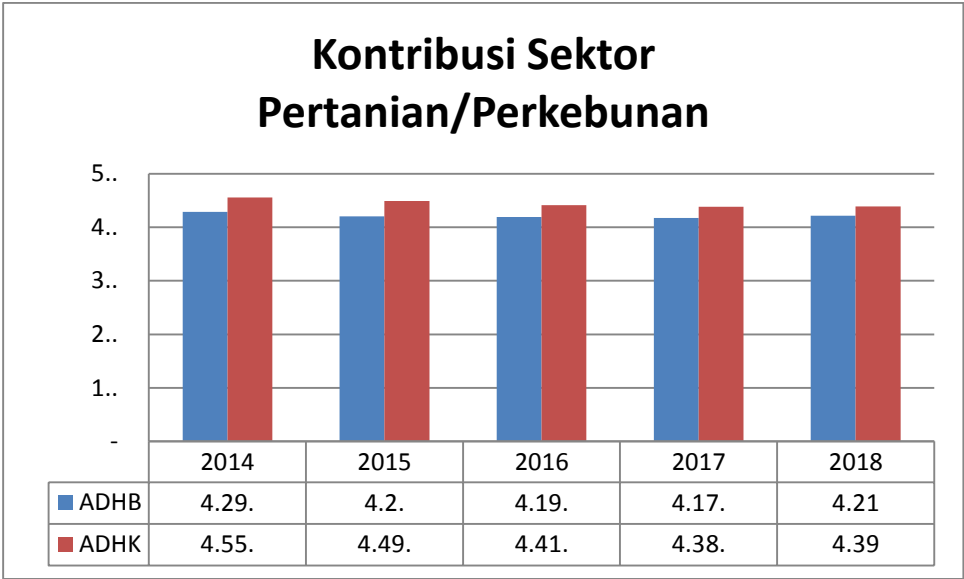
B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian

Produksi tanaman padi di Kota Palu semakin menurun. Hal ini dapat dilihat pada laporan BPS (2018) penurunan produksi sebagai akibat dari penurunan luas panen dan jumlah produktivitas padi Kota Palu. Pada tahun 2016, luas panen padi menurun sebesar 28,82 % dan jumlah produksi menurun sebesar 23,20 %.

Produksi kacang tanah juga mengalami hal yang sama dimana pada Tahun 2014-2017 rata-rata penurunan luas panen kacang tanah sebesar 18,85 % dan rata-rata jumlah produksi menurun sebesar 38,35 %.

Berikut ini gambaran kecenderungan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan yang terus menurun dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.35
**Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan
Terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2014-2018**

Luas panen jagung pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 17,93 persen, yaitu dari 700,1 Ha pada tahun 2016 menjadi 825,6 Ha pada tahun 2017. Kenaikan luas lahan ini tidak diiringi dengan kenaikan produksi jagung dimana pada Tahun 2016 produksi jagung dari 4.430 ton turun menjadi 4.121 ton pada tahun 2017 atau turun 6,98 persen. Komoditi sayuran yang dimonitor melalui survei pertanian dapat dikelompokkan kedalam 20 jenis, yakni antara lain bawang merah, petsai, tomat, bawang daun, ketimun, kacang-kacangan, terung, lombok, bayam dan kangkung.

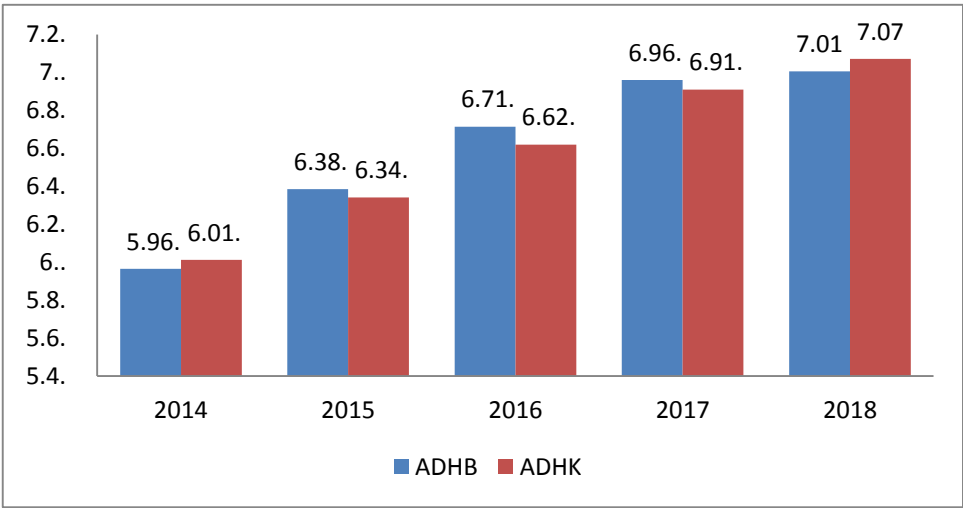
2) Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kota Palu tahun 2014 tercatat seluas 16.318 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 6,67 ribu Ha (41,26 persen), Hutan produksi terbatas seluas 4,42 ribu Ha (27,52 persen) dan Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata seluas 5,02 ribu Ha (31,12 persen).

3) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi di sektor Pertambangan dan Penggalian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ini

gambaran perkembangan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kota Palu.



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

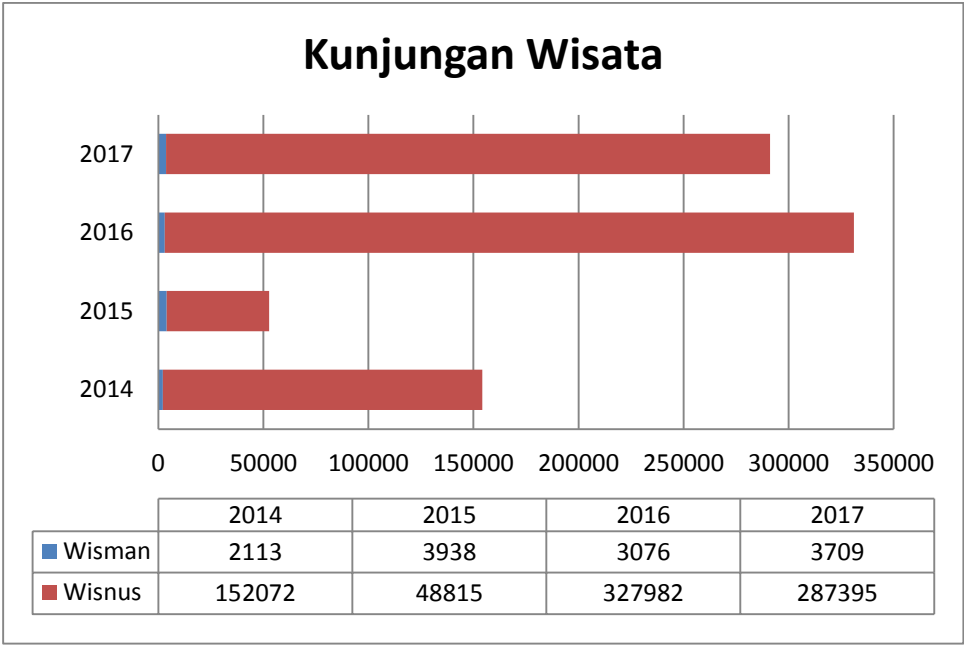
Gambar 2.36
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kota Palu (%) Tahun 2014 - 2018

Gambar diatas menunjukkan bahwa kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2014 – 2018 selalu mengalami peningkatan baik PDRB berdasarkan Harga Berlaku maupun PDRB berdasarkan Harga Konstan.

4) Pariwisata

Pelayanan terhadap wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Kota Palu, memerlukan ketersediaan sarana akomodasi (hotel) yang memadai. Jumlah hotel di Kota Palu pada tahun 2018 tercatat sebanyak 60 unit atau mengalami penurunan sebanyak 17 unit hotel dari keadaan tahun 2017.

Jumlah tamu yang menginap di hotel sebanyak 291.104 orang, terdiri dari 3.709 orang tamu asing dan 287.395 orang tamu dalam negeri. Jumlah ini turun 12,07% dibanding Tahun 2017.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.37
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)di Kota Palu
Tahun 2014 - 2017

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terkenal dengan keindahan wisata baharinya. Selain itu, ada pesona budaya dan peninggalan sejarah yang layak untuk dikunjungi. Beberapa obyek wisata di Kota Palu dengan pengelolanya disajikan di tabel berikut ini.

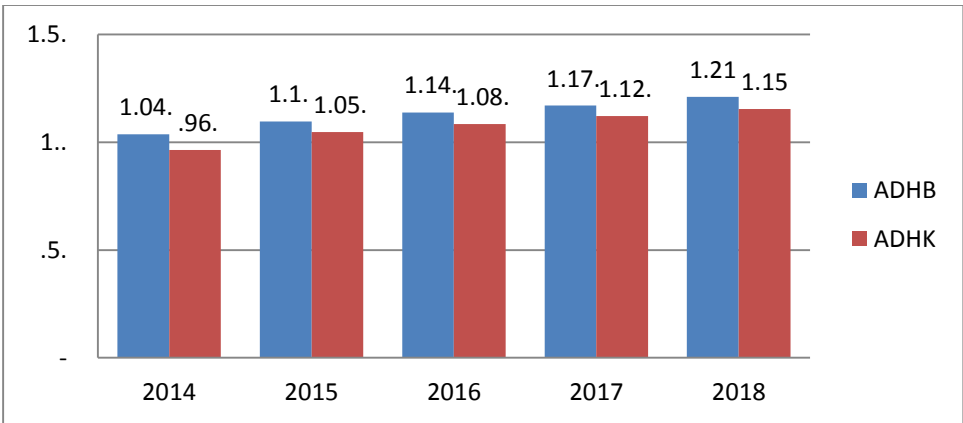
Tabel 2.73
Destinasi Wisata di Kota Palu

Jenis	Nama situs	Kelurahan	Pengelola
Gedung bersejarah	Gedung Juang	Lolu Utara	Pemerintah
	Banua Madika	Kabonena	Pemerintah
	Sou Raja	Lere	Pemerintah
Tempat Spiritual	Makam Datokarama	Lere	Pemerintah
	Makam Pue Paso	Watusampu	Pemerintah
	Makam Pue Ndjidi	Kabonena	Pemerintah
	Makam Pue Mpoloku	Lasoani	Pemerintah
	Vatu Posambaya	Donggala Kodi	Pemerintah
	Sumur Yoga	Donggala Kodi	Pemerintah
	Masjid Jami	Baru	Pemerintah
	Makam Gala	Bayaoge	Pemerintah

Jenis	Nama situs	Kelurahan	Pengelola
	Makam SIS Al-Jufri	Siranindi	Pemerintah
Taman Rekreasi	Pantai Taman Ria	Lere	Pemerintah
	Pantai Talise	Talise	Pemerintah
	Pantai Kampung Nelayan	Talise	Pemerintah
	Pantai Mamboro	Mamboro	Pemerintah
	Danau Sibili	Paantoloan	Pemerintah
Wisata Tirta	Taipa Beach	Taipa	Non Pemerintah
	Pantai Tombelaka	Tipo	Non Pemerintah
	Amazing Beach	Tipo	Non Pemerintah
	Graha Tirta	Birobuli Selatan	Non Pemerintah
	Milenium Water Park	Lolu Selatan	Non Pemerintah
	Winner	Silae	Non Pemerintah
	Mandi Sauna	Kabonena	Non Pemerintah

Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2007

Sektor pariwisata sangat didukung oleh sektor akomodasi, makanan dan minuman. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB terus meningkat setiap tahunnya. Berikut ini gambaran perkembangan kontribusi sektor akomodasi, makanan dan minuman bagi PDRB (ADHB) Kota Palu .

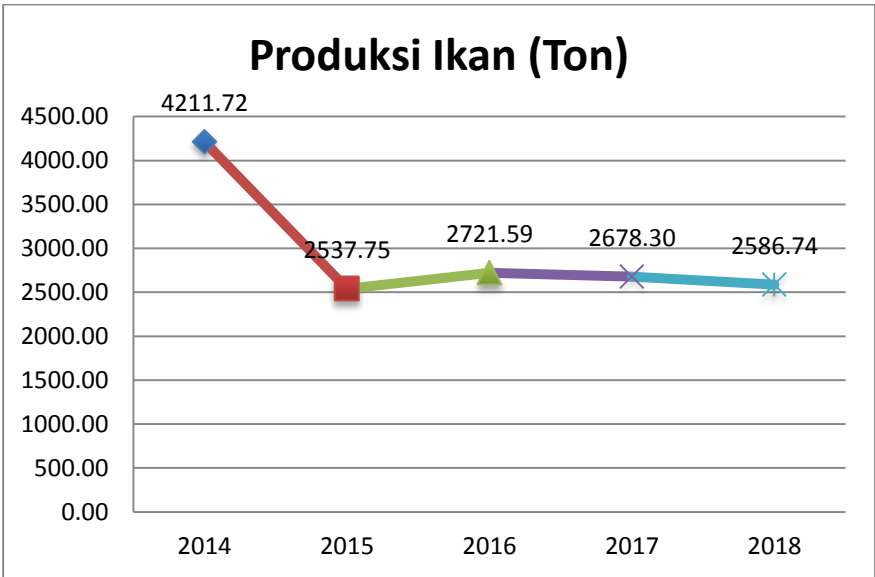


Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

Gambar 2.38
Kontribusi Sektor PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2014 – 2018

5) Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan di Kota Palu tahun 2018 tercatat sebesar 2586,74 ton, atau turun sekitar 0,97 persen dari tahun 2017 yaitu sebesar 2678,30 ton. Produksi tersebut terdiri dari produksi perikanan laut sebesar 2.624,6 ton, dan perikanan darat 53,70 ton. Sementara itu, nilai produksi perikanan laut juga mengalami penurunan 2,72 persen yaitu dari 47,2 juta pada tahun 2016 menjadi 45,9 juta pada tahun 2018. Sedangkan untuk nilai produksi perikanan darat hanya naik sekitar 0,65 persen. Selanjutnya perkembangan produksi perikanan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Gambar 2.39

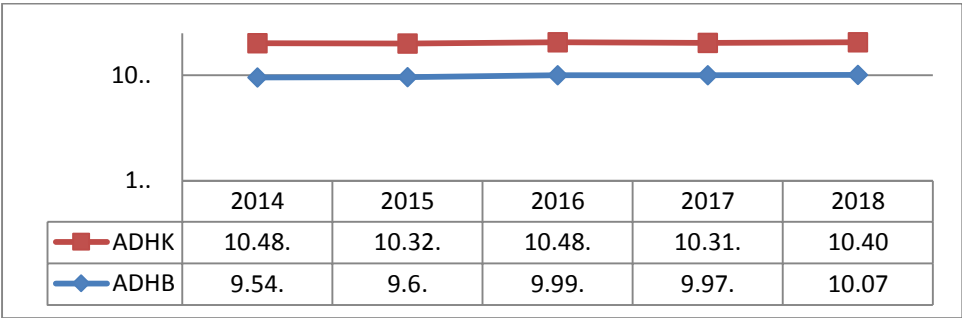
Produksi Ikan di Kota Palu (Ton) Tahun 2014 – 2018

6) Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi PDRB tertinggi ketiga setelah sektor konstruksi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Meskipun Nilai riil PDRB dari sektor perdagangan ADHK pada Tahun 2015 dan 2017 mengalami rata-rata penurunan 0.16 % dari tahun sebelumnya, namun pada Tahun 2016 dan 2018 mengalami rata-

rata peningkatan yang signifikan 0.9 %. ADHB sektor ini mengalami peningkatan 0.1 % pada Tahun 2018 meskipun turun 0.02 % pada Tahun 2017 dari tahun sebelumnya.

Berikut ini perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2014-2018 di bawah ini :

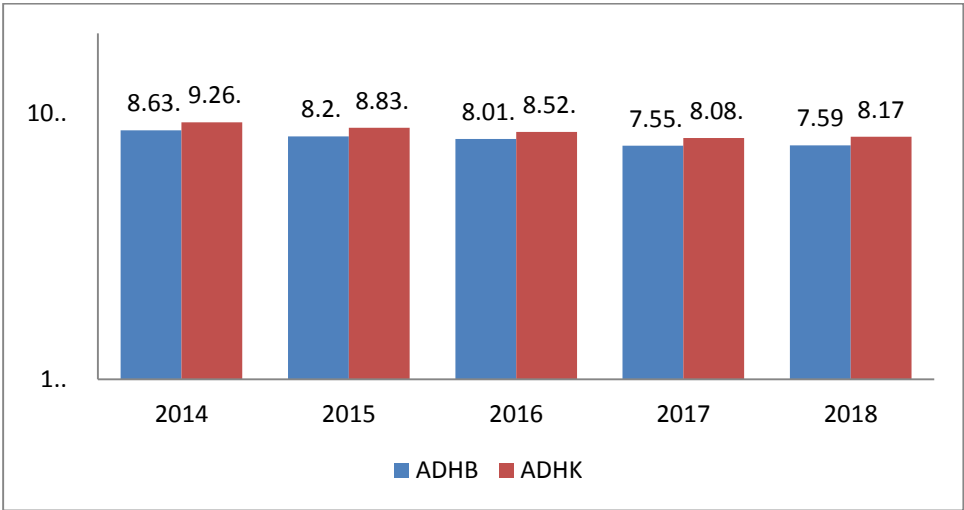


Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

Gambar 2.40
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Palu
Tahun 2014– 2018

7) Perindustrian

Sektor perindustrian memiliki nilai riil terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun kontribusinya terhadap PDRB Kota Palu terus menurun seiring dengan meningkatnya kontribusi sektor lain. Berikut ini gambaran perkembangan kontribusi sektor perindustrian dari tahun 2014 hingga tahun 2018.



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

Gambar 2.41
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Terhadap
PDRB Kota Palu Tahun 2014– 2018

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan satu diantara faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah yang berhubungan dengan Aspek Daya Saing Daerah meliputi capaian pembangunan daerah yang dapat dilihat dari capaian pemerintah daerah terhadap aspek-aspek antara lain; Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia yang dijelaskan lebih detail sebagaimana berikut:

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah, dimana kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada, dan akan masuk ke suatu daerah. Daya tarik investasi yang tinggi dan bergerak secara cepat aktivitas ekonomi daerah akan menciptakan terjadinya efek ganda (*multiflier effect*) dan efek menular (*contagious effect*) bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari: Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga Per Kapita Sebulan, dan Produktivitas Total Daerah.

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya

elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Sumber : BPS Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Gambar 2.42

Rerata Pengeluaran Perkapita (Rp/Tahun)

Gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran perkapita setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2014-2018. Tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat Kota Palu dari tahun 2014-2018 masing-masing sebesar 0,06%; 0,91%; 1,37% dan 0,91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Palu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya, secara rinci ditampilkan persentase

penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.74
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan Tahun 2018

Golongan Pengeluaran	Kota Palu	Sulawesi Tengah
< 150000	0.00	0.06
150.000-199.999	0.60	0.88
200.000-299.999	1.98	8.20
300.000-499.999	19.64	33.10
500.000-749.999	16.04	27.62
750.000-999.999	16.63	12.00
1.000.000-1.499.999	18.80	10.15
1.500.000+	26.33	7.98

Sumber : BPS (data diolah) tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Kota Palu didominasi oleh 3 (tiga) golongan pengeluaran, yaitu Rp.1.500.000 ke atas (26,33%), Rp.300.000-Rp.499.999 (19,64%) dan Rp.1.000.000-Rp.1.499.999 (18,80%). Khusus pada golongan pengeluaran tertinggi yaitu Rp.1.500.000 ke atas (26,33%), angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding angka provinsi yang hanya mencapai 7,98 persen. Selain pengeluaran golongan makanan, juga terdapat pengeluaran bukan makanan di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.75
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan
Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2018

Kelompok Bukan Makanan	Kota Palu	Sulawesi Tengah
Perumahan dan Fasilitas Rumah	363,453	193,812
Aneka Barang dan Jasa	193,716	79,950
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	40,132	22,542
Barang Yang Tahan Lama	156,318	55,336
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	39,206	12,169
Keperluan Pesta dan Upacara	27,178	13,257
Jumlah	820,003	377,066

Sumber : BPS (data diolah), 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita bukan makanan di Kota Palu relatif tinggi dibanding pengeluaran provinsi pada semua jenis kelompok bukan makanan. Tingginya golongan pengeluaran di daerah kota antara lain disebabkan karena meningkatnya penghasilan masyarakat perkotaan, dan tidak kalah pentingnya adalah muncul gaya hidup perkotaan yang cenderung pengeluaran yang sifatnya sekunder.

Selanjutnya produktivitas total daerah menggambarkan besarnya tingkat produktivitas setiap sektor dalam aktivitas perekonomian suatu daerah. Sektor/Lapangan Usaha di Kota Palu yang menunjang PDRB Kota Palu terdiri dari 17 (tujuh belas) Lapangan Usaha, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan,

pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Dari ke-17 lapangan usaha tersebut, yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Palu adalah lapangan usaha konstruksi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; jasa pendidikan; serta informasi dan komunikasi. Gambaran produktivitas total daerah per lapangan usaha (ADH berlaku) di Kota Palu tahun 2014-2018 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.76
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
(Persen) Tahun 2014 -2018

No	Lapangan Usaha	2014			2015			2016			2017			2018**		
		Rp (Juta)	HB	HK	Rp (Juta)	HB	HK	Rp (Juta)	HB	HK	Rp (Juta)	HB	HK	Rp (Juta)	HB	HK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-	11	12	13	14	15	16	17
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	553.802	6,86,	2,39,	588.382	11,13,	6,24,	613.055	8,54,	4,19,	645.000	9,7,	5,21,	680.000	9,96	5,31
B	Pertambangan dan Penggalian	731.002	20,24,	11,53,	830.598	21,4,	13,62,	920.314	14,4,	10,8,	1.016.861	14,31,	10,49,	1.111.861	14,59	10,61
C	Industri Pengolahan	1.125.374	9,33,	4,17,	1.156.561	7,76,	2,77,	1.184.466	6,28,	2,41,	1.189.785	3,9,	,45,	1.214.885	4,82	1,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.813	16,69,	16,65,	25.546	(8,68,)	17,11,	27.134	11,66,	6,22,	28.672	15,85,	5,67,	31.872	16,08	6,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.359	9,32,	5,5,	44.790	8,93,	5,74,	47.055	7,13,	5,06,	48.942	7,79,	4,01,	51.442	8,29	4,68
F	Konstruksi	1.850.215	18,14,	9,18,	1.996.665	15,82,	7,92,	1.996.354	3,,	(02,)	2.052.119	9,22,	2,79,	2.107.119	9,84	3,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Motor dan Sepeda Motor	1.273.901	12,54,	7,82,	1.351.650	14,04,	6,1,	1.456.662	13,28,	7,77,	1.517.812	9,99,	4,2,	1.578.812	10,56	4,87
H	Transportasi dan Pergudangan	1.100.814	13,53,	8,1,	1.170.300	11,87,	6,31,	1.260.913	8,8,	7,74,	1.369.657	14,32,	8,62,	1.392.157	14,93	8,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117.161	28,13,	14,56,	137.159	19,88,	17,07,	150.737	12,9,	9,9,	165.033	13,34,	9,48,	180.533	13,96	10,25
J	Informasi dan Komunikasi	1.123.090	12,63,	11,03,	1.263.010	15,36,	12,46,	1.367.158	8,7,	8,25,	1.481.344	12,08,	8,35,	1.596.444	12,59	8,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	739.276	8,03,	2,92,	765.450	6,12,	3,54,	892.031	17,51,	16,54,	969.429	11,34,	8,68,	1.046.147	11,95	9,12
L	Real Estate	335.005	16,23,	7,61,	358.500	11,74,	7,01,	373.269	8,2,	4,12,	395.423	11,09,	5,94,	410.623	11,82	6,17
M	Jasa Perusahaan	143.095	16,18,	7,79,	153.044	11,24,	6,95,	164.144	11,81,	7,25,	175.244	10,01,	6,76,	185.944	10,91	7,19
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.570.695	16,93,	10,35,	1.713.490	12,9,	9,09,	1.819.330	8,7,	6,18,	1.912.531	8,15,	5,12,	2.006.531	8,97	5,79
O	Jasa Pendidikan	982.478	12,97,	7,53,	1.056.714	14,76,	7,56,	1.098.493	6,12,	3,95,	1.161.360	9,95,	5,72,	1.216.360	10,45	6,09
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	325.974	18,12,	9,88,	355.394	15,77,	9,03,	389.093	11,43,	9,48,	435.083	14,3,	11,82,	469.583	14,91	10,05
Q	Jasa lainnya	123.065	15,8,	8,99,	132.999	14,62,	8,07,	141.860	12,08,	6,66,	152.935	11,96,	7,81,	161.835	12,62	8,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			14,22,	8,06,		13,41,	7,74,		8,79,	6,12,		10,27,	5,86,		10,98	6,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS			14,22,	8,06,		13,41,	7,74,		8,79,	6,12,		10,27,	5,86,		10,98	6,44
Sumber : Kota Palu Dalam Angka 2018																

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara total produktivitas total daerah Kota Palu mengalami masa fluktuatif selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014-2018 masing-masing sebesar 14,22; 13,41; 8,79; 10,27; dan 10,98. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas angkatan kerja dalam pengembangan lapangan usaha di Kota Palu berbeda dari tahun ke tahun.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin tinggi tingkat ketersediaan fasilitas wilayah/ infrastruktur, maka semakin tinggi pula daya saing daerah dalam menghadapi persaingan (*competitiveness*).

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari: aspek perhubungan, penataan ruang, perbankan, rumah makan, hotel, lingkungan hidup, serta komunikasi dan informatika.

1) Perhubungan

Transportasi sangat penting peranannya dalam perkembangan suatu daerah karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Pemerintah Kota Palu sampai dengan Tahun 2015 telah membangun jalan sepanjang 851,26 km, sementara jumlah kendaraan yang wajib uji mencapai 4.388 unit. Berikut data panjang jalan dan jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu:

Tabel 2.77
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2015-2018

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Panjang jalan (km)	851,26	851,56	851,558	851,563
2	Kendaraan wajib uji (unit)	40,22	44,94	49,66	54,38
3	Rasio Panjang Jalan/kendaraan	0,69	0,28	0,22	0,19

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu mengalami peningkatan yang signifikan selama empat tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan kendaraan pada tahun 2018 sebesar 15 persen dan pertumbuhan panjang jalan hanya mencapai 2,72 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan peningkatan jumlah kendaraan dibanding panjang jalan yang dibangun oleh pemerintah sehingga menyebabkan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan wajib uji mengalami penurunan setiap tahunnya. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatkan jumlah kemacetan di wilayah Kota Palu.

Selanjutnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2016 mengalami peningkatan di tahun 2017. Namun demikian, peningkatan angka tersebut terbilang cukup rendah karena tingkat pertumbuhannya hanya mencapai 9,47 persen selama kurun waktu empat tahun. Rendahnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum disebabkan oleh tidak beraturannya trayek angkutan umum di Kota Palu, sehingga masyarakat (penumpang) lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. Berikut data jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kota Palu.



Sumber : Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan informatika Kota Palu, 2018

Gambar 2.43
Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum

Selain transportasi darat, juga terdapat transportasi udara di Kota Palu yaitu Bandara Udara Mutiara Sis Aljufriyang mempunyai luas 12.511 meter persegi dengan daya tampung 800 penumpang dalam dua terminal. Bandara inilah yang menjadi pintu gerbang angkutan udara dari dan ke Kota Palu. Jumlah penumpang datang dan berangkat dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 29,2 persen dan 26,6 persen. Adapun jumlah penumpang yang datang, berangkat dan transit di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78
Jumlah Penumpang Bandara Tahun 2014-2018

Tahun	Penumpang (Orang)		
	Datang	Berangkat	Transit
2014	498.198	505.621	6.486
2015	500.668	500.670	6.349
2016	661.940	667.821	16.284
2017	663.206	679.763	26.251

2018	745.077	760.863	31.150

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

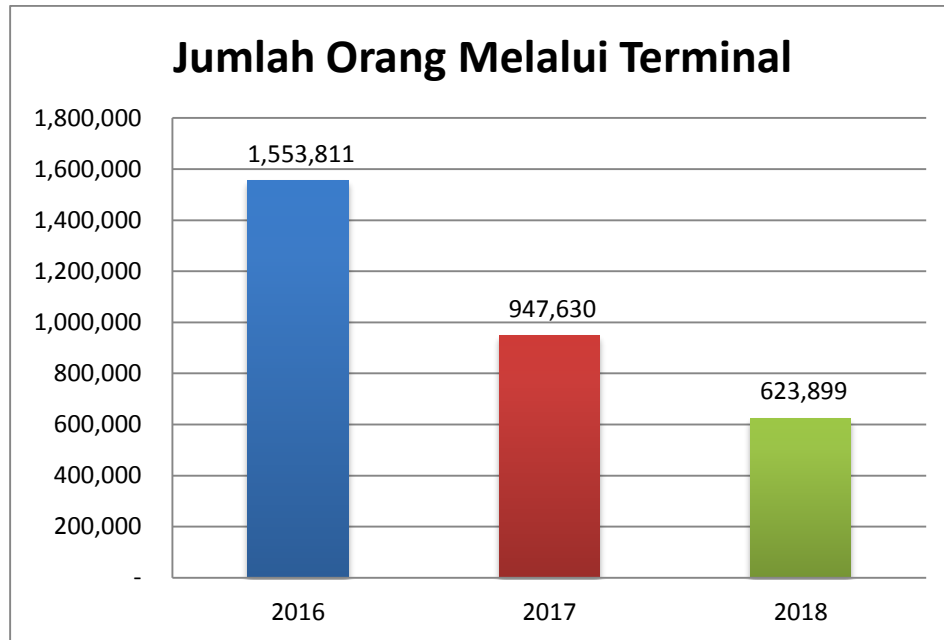
Pada transportasi laut, Kota Palu memiliki dua 2 pelabuhan yaitu Pantoloan dan Taipa. Pelabuhan Pantoloan melayani kapal yang memiliki kapasitas besar dengan rute antar pelabuhan dan antar pulau dan bahkan antar negara, sedangkan Pelabuhan Taipa melayani kapal yang berkapasitas kecil (kapal feri) dengan rute penyeberangan antar pulau. Jumlah penumpang pelabuhan cenderung mengalami penurunan, baik penumpang orang maupun barang selama kurun waktu Tahun 2014 hingga Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung memilih menggunakan transportasi darat dan udara. Gambaran mengenai jumlah penumpang baik orang maupun barang yang melalui Pelabuhan di Kota Palu diuraikan dalam Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Jumlah Penumpang Pelabuhan Tahun 2014-2018

Tahun	Penumpang (Org)		Barang (Ton)	
	Datang	Berangkat	Dibongkar	Dimuat
2014	20.926	30.383	303.551	36.938
2015	22.491	17.755	417.617	55.658
2016	13.675	27.220	486.936	19.803
2017	10.293	25.125	307.498	4.952
2018	6.668	23.419	399.191	3.615

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

Sedangkan untuk transportasi darat, Kota Palu memiliki beberapa terminal angkutan umum yakni Terminal Mamboro, Terminal Tipo, Terminal Manonda dan Terminal Petobo. Adapun jumlah orang/penumpang yang melalui terminal adalah sebagai berikut:



Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2018

Gambar 2.44
Jumlah Orang Yang Melalui Terminal

Berdasarkan gambar di atas, terjadi penurunan jumlah orang/penumpang yang melalui terminal selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 39,01 persen dan tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar 34,16 persen. Kondisi ini disebabkan oleh belum adanya penetapan sistem trayek/jalur angkutan oleh Pemerintah Kota Palu.

Upaya menciptakan kelancaran dan ketertiban berlalu-lintas di Kota Palu, diperlukan ketersediaan rambu jalan. Perkembangan rambu jalan di Kota Palu diuraikan dalam Tabel 2.80. Selama 2 (dua) tahun terakhir perkembangan rambu dan marka jalan di Kota Palu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 jumlah rambu lalu lintas di Kota Palu sebanyak 75 unit meningkat menjadi 250 unit pada Tahun 2018.

Tabel 2.80
Jumlah Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan di Kota Palu
Tahun 2017 – 2018

Tahun	Fasilitas Lalu Lintas	Jumlah	Ket
2017	I. Rambu Lalu Lintas : Rambu Lalu Lintas	75	Unit
2018	Rambu Lalu Lintas	250	Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palu 2018

Sementara perkembangan jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir diuraikan dalam Tabel 2.81. Seiring dengan meningkatnya ketersediaan rambu lalu lintas dan marka jalan di Kota Palu, perkembangan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Palu sebanyak 1.474 kasus terus menurun hingga menjadi 425 kasus pada Tahun 2018.

Tabel 2.81
Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
di Kota Palu Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah Kasus
2014	1474 Kasus
2015	1552 Kasus
2016	629 Kasus
2017	523 Kasus
2018	425 Kasus

Sumber : Data POLRES Kota Palu 2018

2) Penataan Ruang

Penataan ruang sangat penting untuk dapat menjamin stabilitas dan keberlanjutan pembangunan Kota Palu yang berwawasan lingkungan. Data luas kawasan lindung, pemukiman, kawasan industri, hutan rakyat, ruang terbuka hijau, wilayah budidaya dan wilayah perkotaan secara rinci dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
Luas Wilayah Industri dan Perkotaan di Kota Palu Tahun 2016-2018

Uraian	Tahun (ha)		
	2016	2017	2018
1. Luas Kawasan Industri	1,534,123	1,534,123	1,534,123
2. Luas seluruh wilayah budidaya	27.838.49	27.676	17.246
3. Luas wilayah perkotaan	39.506	39.506	39.506
Rasio Wil. Industri/Wil. Budidaya	5,510.80	5,543.15	8,895.53
Rasio Wil. perkotaan/Wil. Budidaya	141.91	142.74	229.07

Sumber: SIPD Kota Palu, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio wilayah industri terhadap wilayah budidaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu pula dengan rasio wilayah perkotaan terhadap wilayah budidaya yang juga meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan perluasan wilayah industri dan perkotaan selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

3) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Selain hal tersebut di atas, daya saing daerah juga ditunjang oleh fasilitas perbankan, rumah makan, dan perhotelan. Ketiga jenis fasilitas tersebut mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Perkembangan jumlah bank di Kota Palu tidak mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018 sebanyak 29 Bank, yakni Bank umum sebanyak 25 buah sedangkan BPR berjumlah 4 Bank. Data perkembangan perbankan di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.83
Jumlah Bank di Kota Palu Tahun 2014-2018

NO	Sektor	Jumlah				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	BankUmum	25	25	25	25	25
2.	BPR	4	4	4	4	4
Total		29	29	29	29	29

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

Selain fasilitas perbankan, fasilitas rumah makan dan restoran juga mengalami peningkatan. Jumlah rumah makan dan restoran di Kota Palu sebanyak 87unit pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 98 atau tumbuh 5 persen pada tahun 2015. Rumah makan tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Palu, dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang ada di Kota Palu merupakan salah satu potensi dan daya tarik tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya. Adapun perkembangan jumlah rumah makan dan restoran di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.84
Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kota Palu Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Rumah Makan	Jumlah Restoran	Total
2014	87	9	96
2015	98	14	112
2016	108	21	129
2017	122	21	143
2018	146	43	189

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan asing maupun domestik yang datang ke Kota Palu, diperlukan tersedianya hotel yang memadai. Fasilitas perhotelan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir, baik jenis hotel berbintang maupun non berbintang. Selama kurun waktu lima tahun, terjadi pertumbuhan hotel sebesar 34,43 persen atau bertambah sebanyak 21 buah hotel. Bertambahnya jumlah hotel, maka terjadi peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur hotel. Fasilitas kamar dan tempat tidur pada tahun 2015 sebanyak 2.155 buah kamar dan 3.355 tempat tidur. Jumlah tenaga kerja perhotelan pada tahun 2015 sebanyak 1.067 orang. Tingkat hunian kamar pada hotel berbintang mengalami penurunan yaitu dari 61,80 persen pada tahun 2014 menjadi 61,45 persen pada tahun 2015. Sementara itu, tingkat hunian pada hotel non bintang mengalami peningkatan yaitu sebesar 30,65 persen. Secara rinci jumlah hotel di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.85
Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2014-2018

No.	Jenis	2014		2015		2016		2017		2018	
1	Hotel berbintang	6	8%	6	8%	9	7%	10	8%	11	7%
2	Hotel non berbintang	73	92%	76	92%	38	93%	38	92%	20	93%
Total		79	100%	82	100%	47	100%	48	100%	31	100%

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka, 2018

4) Lingkungan Hidup

Salah satu aspek daya saing untuk lingkungan hidup adalah ketersediaan air minum bagi masyarakat. Untuk fasilitas air minum terdapat sebanyak 61,48 persen rumah tangga di Kota Palu telah menggunakan air kemasan sebagai air minum utama. Sementara itu persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas mata air tak terlindungi sebanyak 0,23 persen. Secara rinci data persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.86
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di
Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2018

Kabupaten	Air Dalam Kemasan	Leding	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindungi	Sumur Tak Terlindungi	Mata Air Terlindungi	Mata Air Tak Terlindungi	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Total
Banggai Kepulauan	10.62	19.96	1.14	1.59	3.57	52.59	6.25	0.65	3.63	-	100
Banggai	20.23	11.13	11.89	29.87	7.17	14.37	3.39	1.95	-	-	100
Morowali	29.15	0.82	3.91	19.34	5.15	28.53	1.08	10.12	1.9	-	100
Poso	16.53	14.29	2.83	10.87	0.55	41.54	1.74	11.24	0.41	-	100
Donggala	7.2	7.8	29.7	10.61	2.22	26.94	4.14	11.39	-	-	100
Toli-toli	13.05	27.32	4.17	9.29	1.85	28.7	1.11	14.51	-	-	100
Buol	25.26	4.7	3.93	17.07	17.93	21.23	3.36	6.52	-	-	100
Parigi Moutong	13.49	2.75	27.71	18.04	7.18	12.41	7.67	10.75	-	-	100
Tojo Una-una	14.65	17.71	1.7	12.28	2.11	35	3.72	12.83	-	-	100
Sigi	4.87	0.52	35.81	5.65	1.08	31.83	7.35	12.36	0.53	-	100
Banggai Laut	3.46	19.22	-	0.68	9.48	67.16	-	-	-	-	100
Morowali Utara	14.62	5.65	1.05	25.77	12.95	23.64	9.42	6.9	-	-	100
Kota Palu	61.48	4.83	22.71	0.84	-	8.75	0.23	1.17	-	-	100
Sulawesi Tengah	20.15	9.30	15.65	13.27	4.66	24.73	3.97	7.97	0.30	0.00	100

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas (61,48%) rumah tangga di Kota Palu menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Jumlah tersebut tertinggi diantara daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber air minum bagi rumah tangga di Kota Palu sudah terbilang layak konsumsi. Walaupun demikian, masih terdapat sekitar 0,23 persen yang menggunakan mata air tak terlindungi.

5) Komunikasi dan Informatika

Daya saing daerah pada aspek komunikasi dan informatika didasarkan pada penggunaan energi listrik dan alat komunikasi telepon. Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain.

Secara umum dalam kurun waktu dua tahun (2014-2015) produksi listrik yang di hasilkan oleh PLN mengalami kenaikan, meskipun pada Tahun 2016 produksi tersebut mengalami penurunan sekitar 7,84 persen atau hanya diproduksi sekitar 498 juta kwh. Namun demikian di tahun 2017 produksi listrik PLN kembali meningkat menjadi 506 juta Kwh. Sedangkan pada tahun 2018 produksi mengalami penurunan menjadi 474 juta Kwh. Produksi listrik yang meningkat diiringi dengan nilai yang terjual akibat adanya kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi antara tahun 2014 sampai tahun 2018. Sementara itu nilai yang hilang/dipakai sendiri selama tahun 2016 menunjukkan trend negatif dari 4,66 Juta Kwh menjadi 2,94 juta Kwh.

Tabel 2.87
Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik
Tahun 2014-2018

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWH)	Listrik Terjual (KWH)	Dipakai Sendiri/Susut/Hilang (KWH)
2014	125,240	498,641,256	347,550,192	3,072,331
2015	125,240	506,200,216	390,037,611	4,662,878
2016	131,410	540,976,091	314,975,784	3,319,381
2017	136,694	474,766,516	423,812,578	2,944,800
2018	139,335	463,920,367	264,209,830	5,490,056

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

Pengguna listrik di Kota Palu didominasi oleh rumah tangga sekitar 91,87 persen, bisnis 5,67 persen, sosial 1,92 persen serta sisanya adalah industri dan Instansi. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN di Kota Palu tahun 2014-2018 adalah 100 persen.

Tabel 2.88
Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN)
Tahun 2014-2018

Tahun	Rumah Tangga	Rumah Tangga Pengguna Listrik	Rasio (%)
2014	120.786	120.786	100
2015	131.348	131.348	100
2016	138.929	138.929	100
2017	148.710	148.710	100
2018	159.821	159.821	100

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2018

Selain listrik, kebutuhan masyarakat akan Telepon juga sangat penting sebagai alat komunikasi. Adapun prosentase penduduk yang menggunakan telepon di Kota Palu pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.89
Penduduk yang Menggunakan Telepon
Tahun 2014-2018

Tahun	Pengguna Telepon	Penduduk	Rasio (%)
2014	15500	362.202	43.44
2015	21689	368.086	25.75
2016	5365	374.020	21.19
2017	4782	379.782	17.12
2018	2673	385.691	13.62

Sumber : BPS (data diolah) tahun 2018

Rasio penduduk yang menggunakan telepon cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan rasio pengguna telepon terhadap penduduk disebabkan oleh peralihan pengguna telepon pelanggan menjadi pengguna telepon bergerak.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan mesin pertumbuhan yang dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Makin tinggi tingkat investasi yang masuk ke suatu daerah, makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Investasi daerah yang tinggi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan kesempatan yang tinggi bagi daerah. Investasi yang masuk dapat menghasilkan output, pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah.

Pemerintah Kota Palu harus dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bersahabat dengan investor. Tanpa terciptanya iklim investasi yang baik, maka akan sangat sulit untuk menarik investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Berbagai faktor penting terkait dengan investasi di daerah harus dibenahi dan ditata dengan baik. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja; Angka Kriminalitas, Jumlah Demonstrasi, Kemudahan Perizinan, Pengenaan Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Investasi.

1) Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan angka kriminalitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan iklim investasi. Stabilitas suatu daerah dapat meningkatkan jumlah investor yang akan berusaha di daerah tersebut. Angka kriminalitas di Kota Palu cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2014-2018), hal ini dapat mengundang kalangan investor untuk berinvestasi di Kota Palu. Adapun perkembangan angka kriminalitas di Kota Palu selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.90
Angka Kriminalitas di Kota Palu Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Tindak Kriminal	Penduduk	Rasio (%)
2014	2.315	362,202	63,92
2015	2.111	368,086	57,35
2016	1.932	374.620	51,57
2017	2.819	379.782	74,23
2018	1.623	385.619	42,09

Sumber: Kepolisian Resort Palu 2018

2) Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa di Kota Palu tahun 2014-2018 cenderung menurun, khususnya pada bidang politik dan bidang ekonomi. Pada tahun 2014 jumlah demonstrasi sebanyak 62 kali dan menurun menjadi 54 kali atau berkurang 8 kali pada tahun 2018, hal ini menunjukkan kondisi keadaan kota palu yang relative baik dan stabil untuk berinvestasi. Adapun jumlah demonstrasi di Kota Palu dijabarkan secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 2.91
Jumlah Demonstrasi di Kota Palu Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bidang Politik	3	1	2	3	2
2	Bidang Ekonomi	9	6	12	7	5
3	Bidang lainnya	8	7	6	9	8
Jumlah		20	14	20	19	15

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018

3) Standar Waktu Pelayanan Perizinan

Waktu pelayanan perijinan sangat penting karena berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang akan dilayani dalam mengurus suatu ijin dokumen. Semakin cepat waktu pelayanan perijinan, maka akan semakin baik kualitas layanan publik, demikian pula dengan biaya yang akan dikeluarkan dalam rangka pengurusan perizinan tersebut. Adapun lama proses pengurusan perijinan dan biaya pengurusan perizinan di Kota Palu diuraikan dalam Tabel 2.87. Pada Tahun 2018 lama pengurusan perizinan di Kota Palu selama 3-14 hari untuk semua jenis perijinan dengan jumlah persyaratan sebanyak 5-13 dokumen untuk semua jenis perijinaan. Terdapat 3 (tiga) jenis perizinan yang bebas biaya yaitu; SIUP, TDP dan IUI, sementara 3 (tiga) lainnya masih dikenakan biaya sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.92
Lama Proses Perizinan, Jumlah Persyaratan dan Biaya Perizinan di Kota Palu Tahun 2018

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi
				(rata-rata maks Rph)
1	SIUP	2 Hari Kerja	9	Rp. 0.,-
2	TDP	3 Hari Kerja	8	Rp. 0.,-
3	IUI	5 Hari Kerja	9	Rp. 0.,-
4	SIUP - MB	3 Hari Kerja	8	Gol. A Kadar Etanol 0 % s/d 5 % Rp. 8.000.000.,-
				Gol. B Kadar Etanol di atas 5 % s/d 20 % Rp. 10.000.000.,-
				Gol. C Kadar Etanol di atas 20 % s/d 55 % Rp. 12.000.000.,-
5	TDI	-	-	-
6	IMB	14 Hari Kerja	Syarat ADM : 7	Peninjauan, Pengukuran Lokasi, Penetapan Retribusi
			Syarat Teknis: 6	
7	HO	7 Hari Kerja	13	Peninjauan, Pengukuran Lokasi, Penetapan Retribusi

Sumber: BPPT Kota Palu Tahun 2018

Upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif, dengan memberikan kemudahan proses perizinan, dalam bentuk lamanya

waktu dan besarnya biaya yang dibutuhkan akan menarik lebih banyak investor yang menanamkan modalnya di Kota Palu.

4) Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama kurun waktu lima tahun, jenis pajak di Kota Palu masih tetap sebanyak 11 objek. Sedangkan untuk jenis retribusi mengalami penurunan dari 54 jenis pada tahun 2014 menjadi 23 jenis pada tahun 2018.

Tabel 2.93
Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2014-2018

Tahun	Objek Pajak	Objek Retribusi
2014	11	54
2015	11	20
2016	11	25
2017	11	20
2018	11	23

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu 2018

Penerimaan pajak daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu No. 1 Tahun 2011, yang terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Bawah Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Penerimaan pajak daerah Kota Palu ditopang oleh 5 (lima jenis) obyek pajak daerah yang memiliki potensi dan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak pengambilan bahan galian C, PBBP2 dan pajak parkir. Penerimaan pajak daerah Kota Palu Tahun 2018 mencapai Rp. 10.792.587.731.

Sedangkan retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jumlah penerimaan retribusi daerah Kota Palu tahun 2018 mencapai Rp.13.684.905.354. Jenis Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palu yaitu :

- a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi ini terdiri dari 8 jenis objek yang dipungut oleh daerah.
- b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;

- dan/atau (b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi ini terdiri dari 8 jenis objek yang dipungut oleh daerah.
- c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi ini terdiri dari 6 jenis objek yang dipungut oleh daerah.

5) Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Dalam mendukung iklim usaha di Kota Palu, terdapat beberapa Perda yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha/badan usaha dalam melakukan investasi, baik yang berbentuk perijinan, lalu lintas barang dan jasa serta peraturan daerah yang terkait dengan ketenagakerjaan. Adapun jenis perda yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.94
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Palu
Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perda terkait perijinan	1	0	1	0
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	4	2	1	0
3	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	3	3	2	1
Jumlah Perda		8	5	4	1

Sumber : BPS (data diolah) tahun 2018

D. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus menjadi fokus dan tujuan dalam

pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang handal dicirikan dengan kemampuan dan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, mampu memanfaatkan dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Kota Palu. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari rasio lulusan S1/S2/S3 dan tingkat ketergantungan penduduk.

1) Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2014-2015 di Kota Palu cenderung mengalami penurunan. Tahun 2015 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu sebesar 9,20 persen.

Tabel 2.95
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2014-2018

Tahun	Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio (%)
2014	3.831	362202	12.65
2015	6.006	368086	9.63
2016	3.319	374020	9.70
2017	6.662	379782	9.02
2018	6.411	385691	9.20

Sumber: BPS (data diolah) tahun 2018

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Adapun

rasio ketergantungan di Kota Palu selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.96
Rasio Ketergantungan Kota Palu

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Provinsi (2018)
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	80.413	90.363	83.174	87.677	89.058	845,003
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	12638	13.255	15.667	14.700	16.215	126,823
3	Jumlah Pduduk Usia Tdk Produktif (1) &(2)	12.638	7.300	8.667	8.057	6.072	971,826
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	252.287	256.553	262.502	264.273	269.381	1,904,863
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)*(%)	36,88	40,39	37,65	38,74	39,125	51.02

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2011-2016, BPS Prov Sulteng 2018

Rasio ketergantungan Kota Palu selama tahun 2014-2018 mengalami penurunan dari 45,04 persen menjadi 39,29 persen. Artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Palu menanggung sebanyak 39 orang belum dan tidak produktif. Rasio ketergantungan di Kota Palu tahun 2018 masih lebih rendah dibanding rasio ketergantungan Propinsi Sulawesi Tengah (51,02).

TABEL 2.97
HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA PALU TAHUN 2014 - 2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
2.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
	Karakteristik Lokasi dan Wilayah					
	Luas Wilayah (KM ²)	395,06	395,06	395,06	395,06	395,06
	-Palu Barat	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
	-Tatanga	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95
	-Ulujadi	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25
	-Palu Selatan	27,38	27,38	27,38	27,38	27,38
	-Palu Timur	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
	-Mantikulore	206,8	206,8	206,8	206,8	206,8
	-Palu Utara	29,94	29,94	29,94	29,94	29,94
	-Tawaeli	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Kedadaan Iklim					
	-Suhu	27,28	28,37	28,29	27,5	27,86
	-Tekanan Udara	1.011,10	1.011,74	1011,44	1.008,24	1010,63
	-Kelembaban Udara	77,88	72,51	75,4	79,31	76,275
	-Penyinaran Matahari	63,06	73,43	67,49	59,08	65,765
	-Curah Hujan	58,76	41,06	54,84	71,83	56,6225
	-Kecepatan Angin	3,83	4,53	4,6	4,5	4,365
	-Arah Angin Terbanyak	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut
	Kejadian Bencana					
	Banjir	10	1	14	8	6
	Kebakaran	114	49	108	-	-
	Angin Topan	-	1	-	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3	Angin Puting Beliung	-	-	5	-	1
	Tanah Longsor	-	-	-	-	1
	Gempa Bumi	-	-	34	61	105
	Demografi					
	Perkembangan Jumlah Penduduk					
	-Kelurahan	45	46	46	46	46
	-Rumah Tangga	85.301	87.016	88.418	89.781	91.013
	-Jumlah Penduduk	362.202	368.086	374.620	379.782	385.619
	Rasio Ketergantungan	36,88	40,39	37,65	38,74	39,12
2.2	Kepadatan Penduduk	916	930	947	961	975
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
2.2.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu	8,06	7,74	6,12	5,86	5,99
	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (juta)	15.135.980,91	17.166.195,92	18.675.742,22	20.593.578,74	17.892.874,45
	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (juta)	15.135.980,91	17.166.195,92	18.675.742,22	20.593.578,74	17.892.874,45
	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (juta)	12.159.120,09	13.100.251,05	13.902.069,21	14.717.229,95	13.469.667,58
	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (juta)	12.159.120,09	13.100.251,05	13.902.069,21	14.717.229,95	13.469.667,58
B	Kontribusi Sektor PDRB-ADH Berlaku (persen)					
	- Pertanian	4,29	4,20	4,19	4,17	4,12
	- Pertambangan dan Penggalian	5,96	6,38	6,71	6,96	7,33
	- Industri Pengolahan	8,63	8,20	8,01	7,55	7,24
	- Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,11	0,12	0,12	0,11
	- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28
	-Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,54	9,60	9,99	9,97	10,19
	- Transportasi Dan Pergudangan	9,33	9,21	9,21	9,55	9,48
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,04	1,10	1,14	1,17	1,22

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	- Informasi dan Komunikasi	8,30	8,44	8,43	8,57	8,64
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	6,04	5,66	6,11	6,17	6,2
	-Real Estate	2,60	2,56	2,55	2,57	2,54
	-Jasa Perusahaan	1,18	1,15	1,19	1,18	1,19
	-Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	13,80	13,74	13,73	13,46	13,43
	-Jasa Pendidikan	8,47	8,57	8,35	8,33	8,28
	-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,79	2,85	2,91	3,02	3,08
	-Jasa Lainnya	0,95	0,96	0,98	1,00	1,02
	-konstruksi	16,63	16,99	16,08	15,93	15,65
	Kontribusi Sektor PDRB-ADH Konstan					
	- Pertanian	4,55	4,49	4,41	4,38	4,31
	- Pertambangan dan Penggalian	6,01	6,34	6,62	6,91	7,21
	- Industri Pengolahan	9,26	8,83	8,52	8,08	7,72
	- Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,20	0,20	0,19	0,2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
	-Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,48	10,32	10,48	10,31	10,31
	- Transportasi Dan Pergudangan	9,05	8,93	9,07	9,31	9,31
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96	1,05	1,08	1,12	1,18
	- Informasi dan Komunikasi	9,24	9,64	9,83	10,07	10,36
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	6,08	5,84	6,42	6,59	6,76
	-Real Estate	2,76	2,74	2,68	2,69	2,65
	-Jasa Perusahaan	1,18	1,17	1,18	1,19	1,19
	-Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	12,92	13,08	13,09	13,00	13,08
	-Jasa Pendidikan	8,08	8,07	7,90	7,89	7,8
	-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,68	2,71	2,80	2,96	3,02
	-Jasa Lainnya	1,01	1,02	1,02	1,04	1,04
	-konstruksi	15,22	15,24	14,36	13,94	13,52
	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas	14,22	13,41	8,79	10,27	10,98

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
C	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas	14,22	13,41	8,79	10,27	10,98
	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan dengan Migas	8,06	7,74	6,12	5,86	6,44
	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan tanpa Migas	8,06	7,74	6,12	5,86	6,44
	Perkembangan PDRB Per Kapita ADH Berlaku (Pertumbuhan %)	14,22	13,41	8,79	10,27	6,73
	Perkembangan PDRB Per Kapita ADH Konstan (Pertumbuhan %)	8,06	7,74	6,12	4,26	3,37
	Rata-Rata Pertumbuhan Inflasi	8,85	4,17	1,49	4,33	6,46
	-Bahan Makanan	8,96	8,06	-0,46	3,79	6,37
	-Makan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	9,82	6	3,53	2,96	8,12
	-Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	7,6	3,76	0,42	9,51	4,68
	-Sandang	2,82	0,16	3,41	2,09	2,12
	-Kesehatan	6,83	2,93	3,38	3,63	6,21
	-Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	5,53	7,15	4,62	-1,56	8,01
	-Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	12,61	-0,98	0,62	3,08	7,69

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
D	PDRB Per Kapita					
	Nilai PDRB Per Kapita ADH Berlaku	41.788.783	46.636.373	49.932.469	54.224.736	58.296.579
	Nilai PDRB Per Kapita ADH Konstan	33.569.997	35.590.191	37.169.320	38.751.784	40.551.445
E	Indeks Gini	0,38	0,41	0,43	0,50	0,52
F	Indeks Pembangunan Manusia	79.12	79,63	79,73	80,24	80,54
G	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia					
	-40% Bawah	15,58	16,05	16,32	16,6	16,87
	-40% Menengah	47,08	38,4	38,67	38,9	39,21
	-20% Atas	45,87	45,53	44,98	44,42	43,87
H	Kemiskinan	7,05	7,42	7,06	6,74	6,58
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial					
A	Aspek Pendidikan					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	AMH	88,52	99,59	99,7	99,69	99,68
2	Rata-rata Lama Sekolah	11,11	12,25	12,89	13,78	14,67
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	-APK SD/MI	100	99,42	101,4	98,44	103,61
	-APK SMP/MTs	99,8	104,09	87,53	101,46	94,9
	-APK SMA/SMK/MA	85,58	96,95	103,37	96,9	109,28
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	-APM SD/MI	99	91,43	88,44	90,43	91,92
	-APM SMP/MTs	99,9	80,74	68,25	74,17	75,32
	-APM SMA/MA	99,89	77,58	75,23	73,26	75,13
B	Kesehatan					
1	Jumlah Kematian Bayi (<1 tahun)	37	22	29	10	19
	Jumlah Kelahiran Hidup	7.233	6.739	6.959	7.056	7.106

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
2	AKB/1.000 KH	5,12	3,26	4,17	1,42	2,67
	AKHB/1.000 KH	994,88	996,74	995,83	998,58	997,33
	Jumlah Kematian Balita (<1-5 Tahun)	44	24	34	12	19
	Jumlah Kelahiran Hidup	7.233	6.739	6.959	7.056	7.106
	AKABA/1.000 KH	6,08	3,56	4,89	1,7	2,67
3	AKAHBA/1.000 KH	993,92	996,44	995,11	998,3	997,33
	Jumlah Kasus Gizi Buruk	53	52	54	53	30
	Jumlah Balita ditimbang	31741	33516	33384	34713	29698
	Prevalensi Gizi Buruk	0,167	0,155	0,162	0,153	0,101
4	Ketenagakerjaan			tidak dilaksanakan survei sakernas karena penghematan anggaran di tahun 2016		
	-Angkatan Kerja	174.308	177.951		190.455	192.243
	-Bekerja	164.396	163.147		177.959	181.079
	-Pengangguran	9.912	14.804		12.496	11.164

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3	Bukan Angkatan Kerja	97.791	99.254		98.354	99,327
	-Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64.06	64.19		66,28	65,82
	-Tingkat Pengangguran Terbuka	5,69	8,32		6,56	5,81
	-Rasio Penduduk Yang Bekerja	0,93	0,91		0,92	0,93
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
	-Jumlah Organisasi Pemuda	382	382	384	384	385
	-Jumlah Organisasi Olahraga	203	203	204	204	205
	Kepemudaan dan Olahraga					
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	6	4	6	5	5
	Jumlah Kegiatan Olahraga	10	12	13	13	15
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM					
2.3.1	Fokus Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
A	Pendidikan					
1	Angka Partisipasi Sekolah					
	APS SD/MI	99	99,13	98,28	99,08	98,22
	APS SMP/MTs	90	97,33	94,05	95,87	95,2
	APS SMA/SMK/MA	63	85,08	83,3	86,38	84,55
2	Rasio Ketersediaan Sekolah					
	Jumlah Sekolah SD	182	184	184	162	165
	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	38.213	32.611	33.218	34.526	33.830
	Jumlah Sekolah SMP	73	69	54	46	47
	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.398	20.712	18.832	13.078	13.645
	Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA	56	56	56	56	56
	Jumlah Penduduk Kelompok usia 16-18 tahun	22.278	25.650	29.022	32.394	35.766
	Rasio SMA/SMK/MA	25,14	21,83	18,52	15,21	11,9
3	Rasio Ketersediaan Guru					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	SD/MI:					
	-Jumlah Guru	2.393	2.610	2.390	2.150	1.910
	-Jumlah Murid	39.465	43.036	39.485	38.618	37.751
	-Jumlah Kelas	1.410	1.232	1.334	13.65	13.96
	-Rasio Guru/Murid	60,64	60,65	60,75	55,67	50,59
	-Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	35,73	31,17	33,72	35,35	36,98
	SMP/MTs:					
	-Jumlah Guru	1.165	1.443	1.231	1.192	1.153
	-Jumlah Murid	19.654	21.056	16.668	16.982	17.296
	-Jumlah Kelas	425	880	672	660	648
	-Rasio Guru/Murid	59,28	87,07	73,72	70,19	66,66
	-Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	21,62	53,1	40,25	38,86	37,47
	SMA/SMK/MA:					
	-Jumlah Guru	885	942	999	1.056	1.113

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	-Jumlah Murid	10.161	10.407	10.653	10.899	11.145
	-Jumlah Kelas	316	466	616	766	916
	-Rasio Guru/Murid	87,1	90,52	93,94	97,36	98,78
	-Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	31,1	44,78	58,47	72,14	85,82
4	Perkembangan Angka Melek Huruf	99,52	99,72	99,76	99,79	99,81
5	Kondisi Bangunan Sekolah					
	Kondisi Bangunan SD					
	-Jumlah Sekolah Kondisi Baik	182	184	176	162	148
	-Jumlah Sekolah	182	184	186	162	165
	-Kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	90%
	Kondisi Bangunan SMP/MTs					
	-Jumlah Sekolah Kondisi Baik	73	73	73	46	46
	-Jumlah Sekolah	73	73	73	46	47
	-Kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	98%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
6	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	Jumlah Murid TK/RA/Penitipan Anak	6.428	5.747	6.683	8.188	6.675
	Jumlah Penduduk Usia 4 - 6 Tahun	18.823	17.235	10.975	11975	8.051
	Rasio	34,15	33,34	60,89	68,38	
7	Angka Putus Sekolah					
	Angka Putus Sekolah SD	39,67	12,67	16,72	20	18
	Angka Putus Sekolah SMP	4	14,92	19,57	21	12
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	12,42	14.92	17,42	18,92	13,76
8	Angka Kelulusan					
	Angka Kelulusan SD					
	Jumlah lulusan pada jenjang SD	5.939	6.319	6.699	6.498	6.878
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya	5.939	6.319	6.699	6498	6.878
	Angka Kelulusan SMP					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP	6.823	8.212	9.601	5.432	6.789

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
9	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya	6.823	8.212	9.601	5.432	6.789
	Angka Melanjutkan SD ke SMP					
	Jumlah siswa baru pada tingkat 1 jenjang SMP	8.243	8.254	8.265	5914	5.925
	Jumlah lulusan pada jenjang SD tahun ajaran sebelumnya	5.939	6.319	6.699	7.079	7.459
10	-Angka melanjutkan	141,56	145,06	148,56	152,06	155,56
	Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK/MA					
	Jumlah siswa baru pada tingkat 1 jenjang SMA/SMK/MA	12.513	15.831	13.575	7.319	1.063
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP tahun ajaran sebelumnya	6.780	6.823	6.866	6.909	6.952
	Angka melanjutkan	184,56	185,05	187,53	187,97	188,62
	Angka Melanjutkan Pendidikan					
	Guru dengan Kualifikasi S1/D-IV	5.157	4.565	3.665	2.765	1.865
	Jumlah guru	5.374	8.049	6.029	3.342	5.783
	Guru yang memenuhi kualifikasi	95,96%	85,76%	88,64%	83%	84,35%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
B	Kesehatan					
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	3	3	3	3	3
	Propinsi	2	2	2	2	2
	Kota Palu	1	1	1	1	1
	Jumlah Rumah Sakit Swasta	8	5	5	6	6
	RS Umum	3	3	3	4	4
	Rs Bersalin / RS Ibu Anak	4	2	2	2	2
	Rs Khusus (Mata)	1	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	2	2	2	2	2
	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	13	10	10	11	11
	Jumlah Penduduk	362.202	368.086	374.020	379.782	366.650
	Rasio Rumah Sakit (per-100.000 Penduduk)	3,37	2,78	3	3	3
	Jumlah Puskesmas	12	13	13	13	13
	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	30	30	30	30	29

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
C	Jumlah Puskesmas Keliling (Pusling)	14	14	18	18	13
	Jumlah Poskesdes	49	52	50	50	47
	Jumlah Posyandu	222	222	223	223	223
	Jumlah Klinik / Balai Kesehatan	16	32	38	52	50
	Jumlah Polindes	4	3	3	3	4
	Jumlah Dokter	237	231	218	304	380
	Jumlah Dokter Umum/Sp	237	201	191	253	333
	Jumlah Dokter Gigi	31	30	27	51	47
	Jumlah Tenaga Paramedis (Perawat)	1.608	1.749	1.690	2.247	2.069
	Rasio Dokter per-100.000 penduduk	61,5	64,24	60,53	84,13	103,64
	Rasio Tenaga Paramedis per-100.000 penduduk	417,25	486,38	469,22	621,85	564,3
	Pekerjaan Umum					
	Kondisi Jalan					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Jalan Baik (Km)	422,98	303,96	332,7	367,963	126,352
	Jalan Baik Sedang (Km)	152,24	275,08	257,65	233,729	157,83
	Jalan Rusak (Km)	86,48	168,46	157,04	137,622	349,596
	Jalan Rusak Berat (Km)	167	103,76	104,17	112,244	217,785
	Panjang Jalan Yang Mempunyai Trotoar dan Drainase					
	- Panjang Drainase (Km)	1.006,88	1.011,09	1.114,54	1.217,99	1.321,45
	- Panjang Trotoar (Km)	9.645	9.756	1.030	872	995
	Panjang Saluran Irigasi (m)	11.538,57	35.063,99	65.226,70	79.074,13	79.915,31
	Saluran Kondisi Baik (m)	8.165,16	24.804,71	47.016,29	61.127,17	53.354,87
	Saluran Kondisi Sedang (m)	1.423,27	4.328,47	7.734,18	7.610,33	6.487,45
	Saluran Kondisi Rusak Ringan (m)	1.401,23	4.261,45	7.608,24	6.834,04	11.686,61
	Saluran Kondisi Rusak Berat (m)	548,91	1.669,36	2.867,99	3.502,59	8.386,38
	Jumlah Tempat Ibadah	474	601	589	507	507
	Masjid	308	435	384	356	356

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
D	Surau	71	65	89	75	75
	Gereja Kristen	86	92	107	69	69
	Gereja Khatolik	2	2	2	2	2
	Pura	2	2	2	2	2
	Wihara	5	5	5	3	3
	Jumlah Penduduk	362.202	368.086	374.020	379.782	385.619
	Rasio Tempat Pemakaman Umum Penduduk	2,21	2,03	1,99	1,95	1,93
	Rasio Tempat Pembuangan Sampah	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66
	Perumahan					
	Rumah Tangga Pelanggan Air Bersih	4.045	4.977	19.769	26.575	29.763
E	Rumah Tangga Pengguna Listrik	120.786	131.348	138.929	148.710	159.821
	Perhubungan					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Penumpang Bis (AKDP)	0	93.243	93.557	112.838	108.547
	Jumlah Penumpang Kereta api	0	0	0	0	0
	Jumlah Penumpang Kapal Laut (Naik/Turun)		213.310/226.357		33.784/25.666	277.086/270.969
	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	502.077	1.001.338	1.329.761	1.342.969	1.229.573
	Total Jumlah Penumpang	502.077	15.534.248	1.423.318	1.515.257	1.886.175
	Izin Trayek Perkotaan	156	156	156	156	156
	Izin Trayek Pedesaan	-	-	-	-	-
	Jumlah Izin Trayek	156	156	156	156	156
	Jumlah Penduduk	362.202	368.086	374.620	379.782	385.619
	Rasio izin Trayek	0,00043	0,00042	0,00042	0,00041	0,00040
	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	40,22	44,94	49,66	54,38	54,38
	Mobil Penumpang Umum	122	79	63	406	377
	Mobil Bus Umum	768	674	432	95	73
	Mobil Bus Bukan Umum	0	0	0	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Mobil Barang Umum	1.892	2.339	1.431	1.493	1.263
	Mobil Barang Bukan Umum	988	1220	558	399	184
	Kendaraan Khusus Umum	0	0	0	0	0
	Kendaraan Khusus Bukan Umum	0	0	0	0	0
	Kereta Gandeng/Kereta Tempel Umum	0	0	0	0	0
	Kereta Gandeng/Kereta Tempel Bukan Umum	52	53	1	5	21
	Kendaraan Bermotor (Tiga Roda) Bukam Umum	0	0	0	0	0
	Sepeda Motor	0	23	46	3	26
	Jumlah Pelabuhan laut	2	2	2	2	2
	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
	Jumlah Terminal Bus	4	4	44	4	4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
F	Lingkungan Hidup					
	Persentase Sampah Yang Dittangani	69,47%	82,29%	-	71,42	37,18
	Jumlah sampah yang ditangani (terangkut) m3	240.016	250.818	252.560	279.574	141.968
	Jumlah volume produksi sampah	386.824	252.005	-	391.427	381.792
G	Pertanahan					
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	3,33%	3,33%	32,01	30,69%	25,98%
	1). Hak Milik	1.251,05	1.251,05	341.097	301.027	297.091
	2). Hak Guna Bangunan	119.378,50	119.378,50	923.447	911.391	729.099
	3). Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
	4). Hak Pakai	10.842	10.842	-	-	-
	5). Girik	-	-	-	-	-
	Jumlah	131.471,55	131.471,55	1.264.544	1.212.418	1.026.190
	Luas Wilayah (Km2)	3.950.600	3.950.600	3.950.600	3.950.600	3.950.600

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
H	Kependudukan dan Catata Sipil					
	Jumlah Penduduk Wajib KTP	255.114	255.492	259.841	259.641	262.005
	Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP	196.591	77.311	100.568	215.457	167.446
	Jumlah Penduduk Yang Tidak Memiliki KTP	-	116.847	159.273	50.308	129.945
	Jumlah Penduduk Yang Telah Memiliki Akta Kelahiran	104.269	243.324	83.682	119.594	109.301
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran	-	30.021	277.661	247.056	385.887
	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Kartu Keluarga	32.828	76.974	59.106	78.117	91.256
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Kartu Keluarga	-	28.618	45.892	29.754	52.700
	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Nikah	27.768	125.955	33.194	37.484	40.197
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Nikah	-	1.101	124.485	124.311	186.554
	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Perceraian	-	2.107	96	424	472
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Perceraian	-	282	3.630	3.583	5.398
	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Kematian	-	-	381	837	1.028

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
I	Pemberdayaan Perempuan					
	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	6149	6.116	5349	5265	4908
	Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Pemerintah	5053	5.357	4456	4350	4416
	Jumlah pekerja perempuan	11.202	11.272	9805	9615	9324
	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	54,89	54,26	54,55	54,76	52,64
J	Persentase pekerja perempuan di lembaga Pemerintah	45,11	45,74	45,45	45,24	47,36
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
	Rata-rata Anak Per Keluarga	1,6	1,8	1,82	1,88	1,9
	Rasio Akseptor KB	26,35	79,68	45,77	70,02	79,73
	Cakupan Peserta KB	50,34	71,21	80,17	77,57	81,97
K	Jumlah Akseptor KB	16.542	17.911	13.143	12.962	11,262
	Sosial					
	Jumlah Sarana Sosial					
	-Jumlah Panti Asuhan	36	36	36	53	59

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
L	-Rumah singgah	1	1	1	1	1
	PMKS yang memperoleh bantuan social	N.A	N.A	52.710	44.277	24.726
	PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	N.A	N.A	131.608	61.308	54.314
	% PMKS Yang Diberikan Bantuan	N.A	N.A	40,05%	72,20%	45,52%
	Ketenagakerjaan					
	Angkatan Kerja	174 308	177 951	tidak ada survey	190.455	192.243
	a. Bekerja	164 396	163 147		177.959	181.079
	b. Pengangguran	9 912	14 804		12.496	11.164
	Bukan Angkatan Kerja	97 791	99 254		96.876	99.837
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	272 099	277 205		287.331	292.080
M	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	64,06	64,19		66,28	65,82
	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	5,69	8,32		6,56	5,81
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
	Persentase koperasi aktif	52,06%	61,51%	63,24%	83,25%	84,26%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
N	-Jumlah koperasi aktif	164	163	172	174	182
	-Jumlah koperasi tidak aktif	151	102	100	35	34
	-Jumlah koperasi	315	265	272	209	216
	Penanaman Modal					
	Total Jumlah Investor	74	76	79	56	74
	PMDN	64	75	71	49	70
	PMA	10	1	8	7	4
	Jumlah Investasi PMDN/PMA (Persetujuan)	237.351.362.426	209.047.730.276	195.014.371.333	526.220.162.000	1.261.348.419.330
	O					
	Kepemudaan dan Olahraga					
	Jumlah Organisasi Pemuda	382	382	384	384	385
	Kecamatan Palu Selatan	91	91	91	91	
	Kecamatan Palu Barat	65	65	65	65	65
	Kecamatan Palu Timur	46	46	46	46	46
	Kecamatan Palu Utara	28	28	28	28	28

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
19	Kecamatan Tawaeli	63	63	65	65	65
	Kecamatan Mantikulore	29	29	29	29	30
	Kecamatan Tatanga	25	25	25	25	25
	Kecamatan Ulujadi	35	35	35	35	35
	Jumlah Organisasi Olahraga	203	203	204	204	205
	Kecamatan Palu Selatan	33	33	33	33	33
	Kecamatan Palu Barat	19	19	19	19	19
	Kecamatan Palu Timur	54	54	54	54	54
	Kecamatan Palu Utara	20	20	20	20	20
	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	10
	Kecamatan Mantikulore	36	36	36	36	36
	Kecamatan Tatanga	18	18	19	19	19
	Kecamatan Ulujadi	13	13	14	14	14

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
P	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	6	4	6	5	5
	Jumlah Kegiatan Olahraga	10	12	13	13	15
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
	Rasio Polisi Pamong Praja	2,48	19,06	19,64	22,22	24,3
	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	2,93	2,89	2,85	2,81	2,77
	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan	0,13	5,35	7,57	9,79	13,51
Q	Komunikasi dan Informatika					
	-Jumlah Jaringan Telepon Genggam	4	4	4	4	4
	-Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	0	0	0	0	0
	Jumlah jaringan Komunikasi (1+2)	4	4	4	4	4
	Rasio Wartel/Warnet	2,4	2,37	2,34	1,32	1,28
	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	4	4	5	5	5
	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	5	5	10	12	13

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
R	Total jenis surat kabar (1+2)	9	9	15	17	18
	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	37	37	37	37	37
	Perpustakaan					
	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	61	61	61	61	61
	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	36	36	36	36	36
	Total Perpustakaan (1+2)	97	97	97	97	97
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	2.634	2454	2306	2138	2081
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	-	-	935	600	350
	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	2.634	2454	3241	2738	2431
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan					
1	Pertanian					
	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB (ADHK)	2,39	6,24	4,19	5,21	5,31
2	Kehutanan					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Luas Wilayah Kehutanan	16.318 Ha	16.318 Ha	16.318 Ha	16.318 Ha	16.318 Ha
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral					
4	Pariwisata					
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	2.113	48.815	3.076	3.709	2
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	152.072	3.938	327.982	287.395	250
	Perkembangan Kontribusi Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman Terhadap PDRB (ADHB)	1,04	1,1	1,14	1,17	1,21
	Perkembangan Kontribusi Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman Terhadap PDRB (ADHK)	0,96	1,05	1,08	1,12	1,15
5	Kelautan dan Perikanan					
	Produksi Ikan (Ton)	4211,72	2537,75	2721,59	2678,3	2586,74
6	Perdagangan					
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB)	9,54	9,6	9,99	9,97	10,07
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHK)	10,48	10,32	10,48	10,31	10,41
7	Perindustrian					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB (ADHB)	8,63	8,2	8,01	7,55	7,59
	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB (ADHK)	9,26	8,83	8,52	8,08	8,17
2.4	DAYA SAING DAERAH					
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah					
2.4.1.1	Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan					
	- < 150.000	0,91	0,92	0,92	0,91	0,91
	- 150.000-199.999	6,2	0,6	5	5,7	5,1
	- 200.000-299.999	18,98	1,98	15	8	6,1
	- 300.000-499.999	37,37	19,64	19,1	17,1	8
	- 500.000-749.999	20,91	16,04	11,2	14,3	9,4
	- 750.000-999.999	7,93	16,63	17,3	23,4	28,1
	- 1.000.000-1.499.999	7,7	18,8	29,9	32	38,1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	- 1.500.000+		26,33	27	31,6	35,2
2.4.1.2	Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan					
	- Perumahan dan Fasilitas Rumah	-	243.453	265.098	276.072	281.034
	- Aneka Barang dan Jasa	-	193.716	198.076	190.856	201.826
	- Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	-	40.132	43.025	44.637	45.679
	- Barang Yang Tahan Lama	-	156.318	157.208	158.932	159.371
	- Pajak, Pungutan, dan Asuransi	-	39.206	40.63	41,29	42,36
	- Keperluan Pesta dan Upacara	-	27.178	28,09	28,68	29,05
2.4.1.3	Produktivitas Total Daerah					
	- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,72	4,05	4,38	4,71	5,04
	- Pertambangan dan Penggalian	5,34	6,15	6,96	7,77	8,58

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	- Industri Pengolahan	7,49	7,91	8,33	8,75	9,17
	- Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14
	- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35
	- Konstruksi	15,02	16,89	18,76	20,63	22,5
	- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,21	9,33	10,45	11,57	12,69
	- Transportasi dan Pergudangan	7,87	8,94	10,01	11,08	12,15
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,95	1,12	1,29	1,46
	- Informasi dan Komunikasi	7,16	8,14	9,12	10,1	11,08
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	5,08	5,46	5,84	6,22	6,6
	- Real Estate	2,26	2,47	2,68	2,89	3,1
	- Jasa Perusahaan	1,02	1,11	1,2	1,29	1,38
	- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,99	13,25	14,51	15,77	17,03
	- Jasa Pendidikan	7,42	8,26	9,1	9,94	10,78
	- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,42	2,76	3,1	3,44	3,78

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	- Jasa lainnya	0,82	0,92	1,02	1,12	1,22
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
2.4.2.1.	Aksesibilitas daerah					
2.4.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,22	0,19	0,19	0,17	0,16
	- Panjang Jalan	829	851,26	851,56	851,558	851,563
	- Jumlah Kendaraan	3.822	4.388	4.522	4.966	5.438
2.4.2.1.2	Arus Lalulintas Pelabuhan					
	Jumlah Penumpang Datang (Org)	20.926	22491	13.675	10.293	6.668
	Jumlah Penumpang Berangkat (Org)	30.383	17755	27.220	25.000	23.419
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	303.551	417.617	486.936	307.498	399.191
	Jumlah Barang Muat (Ton)	36.938	55.658	19.803	4.952	3.615
2.4.2.1.3	Arus Lalulintas Bandara					
	- Jumlah Penumpang Datang	498.198	500.668	661.940	663.206	745.077
	- Jumlah Penumpang Berangkat	505.621	500.670	667.821	679.763	760.863

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2.2	- Jumlah Penumpang Transit	6.486	6.349	16.284	26.251	31.150
	Fasilitas Daerah					
	Jumlah Bank	29	29	29	29	29
	Jumlah Hotel Berbintang	6	6	9	10	11
2.4.2.3	Jumlah Hotel Non Bintang	73	76	38	38	20
	Lingkungan Hidup					
	Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih					
	Air Dalam Kemasan	-	20	N.A	N.A	N.A
2.4.2.3.1	Leding	-	973	N.A	N.A	N.A
	Sumur Bor/Pompa	-	6624	N.A	N.A	N.A
	Sumur Terlindungi	-	929	N.A	N.A	N.A
	Mata Air Terlindungi	-	85	85	85	80
	Mata Air Tak Terlindungi	-	218	N.A	N.A	N.A
	Lainnya	-	155	N.A	N.A	N.A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2.3.2	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga melalui PDAM	4.045	4.977	19.769	26.575	28.492
	Produksi, Daya Terpasang dan Penggunaan Listrik PLN					
	- Daya Terpasang	125.240	125.240	131.410	136.694	139.335
	- Produksi (Kwh)	498.641.256	506.200.216	540.976.091	474.766.516	463.920.367
	- Terjual (Kwh)	347.550.192	390.037.611	314.975.784	423.812.578	264.209.830
2.4.2.3.3	- Dipakai Sendiri/Susut/Hilang (KWH)	3.072.331	4.662.878	3.319.381	2.944.800	5.490.056
	Jumlah Pelanggan Menurut Pengguna Listrik					
	Rumah Tangga	120.786	131.348	137.929	17.148.710	17.157.282
	Indutri	140	141	139	142	142
	Instansi	847	887	946	985	1.035
2.4.2.3.4	Bisnis	7.450	8.172	8.525	8.957	9.495
	Sosial	2.256	2.357	2.481	2.633	2.746
	Jumlah Pelanggan dan Sarana Telekomunikasi Menurut STO dan Jenis Pengguna					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	(1P) Berlangganan Layanan Telepon Saja atau Internet Saja	15.500	21.689	5.365	4.782	1.986
	(2P) Berlangganan Layanan Telepon dan Internet atau Telepon dan TV Kabel (Use TV) atau Internet dan TV Kabel (Use TV)	-	-	4.556	5.876	6.354
	(3P) Berlangganan Layanan Telepon, Internet dan Use TV	-	-	5.148	8.022	8.237
2.4.3	Iklim Berinvestasi					
2.4.3.1	Angka Kriminalitas					
	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor Kota Palu	2.315	2.111	1.932	2.819	1.623
	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor Kota Palu	799	695	566	645	674
2.4.3.2	Jumlah Demonstrasi	44	54			
	- Bidang Politik	3	1	2	3	2
	- Bidang Ekonomi	9	6	12	7	5
	- Bidang Lainnya	8	7	6	9	8
2.4.3.3	Lama Proses Perizinan	-	28			
	- SIUP	2	2	2	2	2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
2.4.3.4	- TDP	3	3	3	3	3
	- IUI	5	5	5	5	5
	- TDI	3	3	3	3	3
	- IMB	14	14	14	14	14
	- HO	7	7	7	7	7
	Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah					
	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Sektor Pajak					
	Perkotaan (Rp)	10.886.578.131,77	13.221.721.221,31	14.114.780.667,71	12.328.070.351,48	10.792.587.731,44
	Pertambangan (Rp)	91771	89436	53098	352120	
	Jumlah Wajib PBB dan Luas Tanah yang dikenakan PBB menurut Sektor Pajak					
	Perkotaan - Wajib Pajak	125258	118588	123189	127357	
	Perkotaan - Luas Tanah (Ha)	140103921	143357,98	14481600	15069364	
	Pertambangan Non Migas-Wajib Pajak	0	0	8	11	
	Pertambangan Non Migas-Luas Tanah	0	0	10727	366534	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
2.4.3.5	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Investasi	8	8	5	4	1
	- Jumlah Perda Yang Terkait Perizinan	5	1	0	1	0
	- Jumlah Perda Yang Terkait Lalu Lintas Barang	2	4	2	1	0
	- Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	1	3	3	2	1
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia					
2.4.4.1	Rasio Lulusan S1/S2/S3					
	Lulusan S1/S2	3.822	5.951	3.311	6.648	6.401
	Lulusan S3	0	55	8	14	10
	Jumlah Penduduk	362.202	368.086	374.020	379.782	395.619
2.4.4.2	Tingkat Ketergantungan					
	- Jumlah penduduk Usia < 15 tahun	80.413	90.363	83.174	87.677	89.058
	- Jumlah penduduk Usia > 64 tahun	12.638	13.255	15.667	14.700	16.215
	- Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	12.638	7.300	8.667	8.057	6.072
	- Jumlah penduduk Usia 15-64 Tahun	252.287	256.553	262.502	264.273	269.381

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	- Rasio Ketergantungan	36,88	40,39	37,65	38,74	39,125

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun 2019 dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.98
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TAHUN 2017 S.D TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2019

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DINAS PENDIDIKAN									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00%	97.47%	100.00%	95.45%	95.45%	24.46%	217.38%	43.48%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	2.50%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100.00%	67.70%	100.00%	98.31%	98.31%	0.00%	166.01%	33.20%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0.00%	67.70%	100.00%	90.71%	90.71%	21.00%	179.41%	35.88%

RKPD KOTA PALU

II - 196

TAHUN 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	100.00%	251.21%	100.00%	89.19%	89.19%	64.38%	404.77%	80.95%
6	Program Pendidikan anak usia dini	Terwujudnya Pendidikan anak usia dini	100.00%	92.74%	100.00%	83.35%	83.35%	23.52%	199.62%	39.92%
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100.00%	98.65%	100.00%	95.20%	95.20%	43.69%	237.54%	47.51%
8	Program Perencanaan Manajemen Pelayanan Pendidikan		0.00%	95.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.12%	19.02%
9	Program Pengembangan Pendidikan Non Formal/Dikmas	Terwujudnya Pengembangan Pendidikan Non Formal/Dikmas	100.00%	81.99%	100.00%	73.71%	73.71%	13.58%	169.28%	33.86%
10	Program Pendidikan Luar Biasa		0.00%	6.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.35%	1.27%
11	Program Palu Kana Mapande	Terwujudnya pendidikan untuk seluruh masyarakat kota palu	100.00%	98.26%	98.74%	93.00%	93.00%	29.46%	220.72%	44.14%
12	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terwujudnya pendidikan untuk seluruh masyarakat kota palu	100.00%	99.35%	100.00%	91.72%	91.72%	0.00%	191.07%	38.21%
13	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwujudnya pendidikan untuk seluruh masyarakat kota palu	100.00%	99.27%	100.00%	89.89%	89.89%	0.00%	189.16%	37.83%
2	DINAS KESEHATAN									
1	Program Pelayanan	Meningkatnya pelayanan	100.00%	94.88%	100.00%	95.57%	95.57%	28.67%	219.12%	43.82%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Perkantoran	administrasi perkantoran								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100.00%	50.00%	100.00%	92.00%	92.00%	37.65%	179.65%	35.93%
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	59.82%	259.82%	51.96%
5	Program Obat & Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100.00%	100.00%	100.00%	98.41%	98.41%	2.56%	200.97%	40.19%
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100.00%	95.67%	100.00%	66.26%	66.26%	39.59%	201.51%	40.30%
7	Program Pengawasan Obat & Makanan	Persentase Industri P-IRT yang dibina	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	4.66%	204.66%	40.93%
8	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga ber-PHBS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	28.53%	228.53%	45.71%
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100.00%	100.00%	100.00%	94.44%	94.44%	54.16%	248.60%	49.72%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Program Pencegahan & Pengulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit :	100.00%	99.10%	100.00%	100.00%	100.00%	36.11%	235.21%	47.04%
12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase kepuasan masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	5.75%	205.75%	41.15%
13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan operasi katarak dan sunatan massal gratis	100.00%	100.00%	100.00%	10.42%	10.42%	0.00%	110.42%	22.08%
14	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu Dan Jaringannya	Peningkatan sarana pelayanan kesehatan (Pembangunan/Rehabilitasi) di Puskesmas, Pustu & Poskesdes	100.00%	100.00%	100.00%	77.43%	77.43%	54.85%	232.28%	46.46%
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	AKB (Angka Kematian Bayi) per - 1.000 Kelahiran Hidup	100.00%	100.00%		0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	6.25%	206.25%	41.25%
17	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	AKI (Angka Kematian Ibu) per - 100.000 Kelahiran Hidup	100.00%	100.00%	100.00%	57.37%	57.37%	11.33%	168.70%	33.74%
3	BRSU ANUTAPURA									
1	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada :	100.00%	98.43%	100.00%	87.08%	87.08%	52.32%	237.83%	47.57%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS / RS Jiwa/ RS PARU-PARU / RS MATA		100.00%	98.43%	100.00%	36.40%	36.40%	13.00%	147.83%	29.57%
4	DINAS PEKERJAAN UMUM									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	93.12%	100.00%	84.68%	84.68%	22.12%	199.91%	39.98%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	86.91%	100.00%	76.08%	76.08%	41.42%	204.41%	40.88%
3	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100.00%	86.86%	86.86%	16.81%	103.67%	20.73%
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota, Persentase wilayah yang terhubung prasarana jembatan, 'persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang.	100.00%	96.47%	100.00%	43.28%	43.28%	19.32%	159.07%	31.81%
5	Program	Persentase penduduk ygng	100.00%	99.99%	100.00%	92.42%	92.42%	16.84%	209.25%	41.85%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun								
6	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang, Persentase Median/Trotoar dalam kondisi baik, Persentase plat duiker dalam kondisi baik	100.00%	98.02%	100.00%	47.72%	47.72%	11.36%	157.10%	31.42%
7	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan	Persentase alat berat yang diadakan, Persentase alat alat dalam kondisi baik, Persentase alat ukur yang diadakan, Persentase alat laboratorium yang terpelihara	100.00%	98.05%	100.00%	51.74%	51.74%	117.31%	267.10%	53.42%
8	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, 'persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan	100.00%	96.03%	100.00%	16.96%	16.96%	19.46%	132.45%	26.49%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kewenangannya, Persentase panjang sungai yang ternormalisasi								
9	Program Pengendalian Banjir	Persentase luas kawasan yang aman dan terlindungi dari bahaya banjir, 'Persentase kawasan yang aman dan terlindungi dari bahaya abrasi pantai	100.00%	44.50%	100.00%	67.31%	67.31%	1.52%	113.32%	22.66%
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pesentase hasil kegiatan perencanaan teknis PSDK, Persentase hasil kegiatan penyusunan data base dan studi kelayakan, Persentase hasil kegiatan pengawasan teknis	100.00%	78.76%	100.00%	97.28%	97.28%	7.00%	183.03%	36.61%
11	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI), Persentase tersedianya layanan izin usaha jasa kondtruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100.00%	91.80%	100.00%	92.37%	92.37%	16.63%	200.80%	40.16%
12	Pengendalian Pencemaran dan		0.00%	20.46%	100.00%	63.04%	63.04%	10.41%	93.91%	18.78%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perusakan Lingkungan Hidup									
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100.00%	100.00%	100.00%	91.29%	91.29%	37.85%	229.14%	45.83%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	18.57%	218.57%	43.71%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100.00%	100.00%	100.00%	79.08%	79.08%	31.70%	210.78%	42.16%
4	Program Pengembangan Perumahan		100.00%	100.00%	100.00%	47.72%	47.72%	9.74%	157.47%	31.49%
5	Program Lingkungan Sehat Perumahan		100.00%	100.00%	100.00%	87.48%	87.48%	36.94%	224.42%	44.88%
6	Program Pengelolaan RUSUNAWA		100.00%	100.00%	100.00%	85.72%	85.72%	49.49%	235.21%	47.04%
7	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		0.00%	100.00%	100.00%	69.38%	69.38%	47.52%	216.90%	43.38%
6	KANTOR PEMADAM KEBAKARAN									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	11.60%	111.60%	39.38%
2	Program Peningkatan Sarana & Parasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	93.75%	100.00%	64.32%	64.32%	14.45%	172.51%	34.50%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100.00%	68.59%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	168.59%	33.72%
5	Program Peningkatan kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran		0.00%	100.00%	100.00%	93.89%	93.89%	4.20%	198.09%	39.62%
7	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100.00%	95.40%	100.00%	93.38%	93.38%	21.80%	210.58%	42.12%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.95%	125.95%	25.19%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100.00%	93.38%	100.00%	98.36%	98.36%	29.28%	221.02%	44.20%
5	Program Perencanaan Tata Ruang		100.00%	84.54%	100.00%	80.94%	80.94%	12.43%	177.92%	35.58%
6	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		100.00%	98.89%	100.00%	79.12%	79.12%	26.87%	204.88%	40.98%
7	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		100.00%	88.90%	100.00%	88.76%	88.76%	-2.79%	174.87%	34.97%
8	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang		0.00%	0.00%	100.00%	98.91%	98.91%	37.30%	136.20%	27.24%
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%	93.26%	93.26%	31.03%	224.29%	44.86%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	87.77%	87.77%	61.05%	248.82%	49.76%
3	Program Peningkatan	Meningkatnya sistem	100.00%	100.00%	100.00%	98.90%	98.90%	36.85%	235.75%	20.26%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
4	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	100.00%	100.00%	100.00%	61.28%	61.28%	5.99%	167.27%	33.45%
5	Program Pengembangan data/informasi	Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	43.75%	143.75%	28.75%
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00%	90.00%	100.00%	99.44%	99.44%	30.77%	220.21%	44.04%
9	DINAS PERHUBUNGAN									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100.00%	98.43%	100.00%	84.70%	84.70%	36.96%	220.09%	44.02%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100.00%	100.00%	100.00%	99.10%	99.10%	21.35%	220.45%	44.09%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.00%	33.33%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	133.33%	26.67%
5	Program Peningkatan		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	250.00%	50.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
6	Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan		100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	37.50%	217.50%	43.50%
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		100.00%	175.00%	100.00%	91.50%	91.50%	50.00%	316.50%	63.30%
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		100.00%	91.13%	100.00%	94.45%	94.45%	39.66%	225.24%	45.05%
9	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran	100.00%	84.13%	100.00%	92.94%	92.94%	33.45%	210.52%	42.10%
2	Program Peningkatan	Terwujudnya Sarana dan	100.00%	96.22%	100.00%	100.00%	100.00%	19.88%	216.10%	43.22%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sarana dan Prasarana Aparatur	Prasarana Aparatur								
3	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.00%	46.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.51%	1.86%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	98.65%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.65%	19.73%
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	100.00%	70.21%	100.00%	100.00%	100.00%	31.64%	201.86%	40.37%
6	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Cakupan Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	100.00%	72.14%	100.00%	80.00%	80.00%	2.87%	155.01%	31.00%
7	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100.00%	98.80%	100.00%	100.00%	100.00%	29.80%	228.60%	45.72%
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Penyediaan Data dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	100.00%	77.98%	100.00%	100.00%	100.00%	77.21%	255.19%	51.04%
9	Program Peningkatan									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian Polusi									
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpenuhinya kebutuhan Penataan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau.	100.00%	98.91%	100.00%	100.00%	100.00%	55.59%	254.50%	50.90%
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran	100.00%	99.44%	100.00%	99.96%	99.96%	38.81%	238.21%	47.64%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	54.41%	254.41%	50.88%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.00%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	16.00%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	33.33%	233.33%	46.67%
5	Program Penerimaan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Efektif dan Efisien	100.00%	98.72%	100.00%	94.30%	94.30%	8.73%	201.75%	40.35%
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERLINDUNGAN ANAK									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	92.18%	100.00%	98.83%	98.83%	23.97%	214.98%	43.00%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pemeliharaan sarana & prasarana aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	94.74%	94.74%	72.28%	267.01%	53.40%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	280.00%	56.00%
4	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah peningkatan kualitas anak dan perempuan serta terbentuknya Kelurahan ramah anak	100.00%	100.00%	100.00%	96.15%	96.15%	33.33%	229.48%	45.90%
5	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah organisasi yang terbina, serta jumlah Kel. Maju mandiri	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	15.06%	215.06%	43.01%
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak	Jumlah forum anak serta rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	100.00%	99.98%	100.00%	97.99%	97.99%	28.60%	226.56%	45.31%
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah korban kekerasan yang mendapat pendampingan serta jumlah petugas yang terlatih	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Program Peningkatan Peran Perempuan		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak		0.00%	100.00%	100.00%	88.51%	88.51%	100.00%	288.51%	57.70%
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0.00%	84.79%	100.00%	98.87%	98.87%	28.85%	212.51%	42.50%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0.00%	84.80%	100.00%	92.44%	92.44%	28.63%	205.88%	41.18%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	40.00%	240.00%	48.00%
5	Program Keluarga Berencana	Cakupan pelayanan, pembinaan serta pertemuan dalam program KKBPK	100.00%	100.00%	100.00%	89.90%	89.90%	54.89%	244.79%	48.96%
6	Program Kesehatan	Jumlah siswa/ Mahasiswa	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reproduksi Remaja	yang mendapatkan advokasi KIE								
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah PUS yang mendapatkan pelayanan KB gratis	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	59.29%	259.29%	51.86%
8	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	Jumlah fasilitasi, orientasi serta pertemuan dalam pembinaan peran serta masyarakat	100.00%	91.67%	100.00%	100.00%	100.00%	46.93%	238.60%	47.72%
9	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR							33.32%	33.32%	6.66%
10	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping kel. Bina keluarga yang mendapatkan orientasi dan keterampilan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	225.00%	45.00%
14	DINAS SOSIAL									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	43.49%	243.49%	48.70%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	18.71%	218.71%	43.74%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnyan Kapasitas SDM Aparatur	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan Teptra,Capaian Kinerja ,Renja,Renstra,Lakip dan RKA- Outcomes Meningkatnya Pelayanan Adm.Perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	42.86%	242.86%	48.57%
5	Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Cakupan keluarga miskin yang mendapatkan fasilitas bantuan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	41.67%	241.66%	48.33%
7	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
8	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)							25.00%	25.00%	5.00%
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		0.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	30.22%	180.22%	36.04%
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam proses pendampingan bagi	100.00%	93.75%	100.00%	100.00%	100.00%	20.01%	213.76%	42.75%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)								
11	Program Pembinaan Anak Terlantar	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi anak terlantar	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
13	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pedesaan		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA									
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran	100.00%	92.61%	100.00%	97.70%	97.70%	33.86%	224.17%	44.83%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	94.44%	100.00%	98.90%	98.90%	36.77%	230.11%	46.02%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	41.68%	241.68%	48.34%
4	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil		0.00%	0.00%	100.00%	99.99%	99.99%	0.00%	99.99%	20.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Menengah yang Kondusif									
5	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peningkatan Kemitraan antar lembaga keuangan dan pelaku UMKM	100.00%	100.00%	100.00%	97.09%	97.09%	10.16%	207.25%	41.45%
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		0.00%	0.00%	100.00%	95.27%	95.27%	1.33%	96.60%	19.32%
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	100.00%	87.50%	100.00%	99.65%	99.65%	4.18%	191.33%	38.27%
8	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pelayanan bursa kerja dan Job fair	100.00%	62.50%	100.00%	100.00%	100.00%	10.50%	173.00%	34.60%
9	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tercapainya penanganan penyelesaian kasus PHI/PHK di luar pengadilan	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	50.13%	216.79%	43.36%
10	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja							0.56%	0.56%	0.11%
16	DINAS PENENMAN MODAL DAN									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	99.85%	100.00%	86.96%	86.96%	46.71%	233.52%	46.70%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	98.52%	98.52%	30.60%	229.12%	45.82%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	45.56%	245.56%	49.11%
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kota Palu	100.00%	99.88%	100.00%	35.85%	35.85%	41.31%	177.04%	35.41%
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	100.00%	99.24%	100.00%	78.38%	78.38%	23.42%	201.04%	40.21%
8	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan	100.00%	100.00%	100.00%	98.54%	98.54%	43.89%	242.43%	48.49%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran	100.00%	99.13%	100.00%	61.92%	61.92%	42.29%	203.34%	40.67%
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	99.91%	100.00%	99.76%	99.76%	79.73%	279.40%	55.88%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	57.59%	100.00%	16.49%	16.49%	45.61%	119.69%	23.94%
4	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Cakupan Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda	100.00%	85.72%	100.00%	82.49%	82.49%	0.00%	168.21%	33.64%
5	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	100.00%	98.96%	100.00%	41.25%	41.25%	7.32%	147.52%	29.50%
6	Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Cakupan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
7	Pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga	Cakupan Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga	100.00%	74.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	74.28%	14.86%
8	Program Pembinaan dan pemsayarakatan	Cakupan Pembinaan dan Pemsayarakatan Olahraga	100.00%	96.24%	100.00%	93.68%	93.68%	55.64%	245.55%	49.11%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Olahraga									
9	Program Permasalahan Olahraga Pelajar,		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		0.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	96.75%	246.75%	49.35%
18	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran	100.00%	99.58%	100.00%	72.08%	72.08%	31.65%	203.31%	40.66%
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	28.00%	28.00%	24.00%	152.00%	30.40%
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		0.00%	100.00%	100.00%	92.00%	92.00%	32.72%	224.72%	44.94%
4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	21.48%	196.48%	39.30%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kota Palu								
5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	225.00%	45.00%
6	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terwujudnya Penanganan Konflik Sosial	100.00%	100.00%	100.00%	77.67%	77.67%	25.00%	202.67%	40.53%
7	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat serta terselenggaranya demokrasi yang lebih baik	100.00%	89.58%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	239.58%	47.92%
19	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	99.90%	100.00%	86.63%	86.63%	39.22%	225.76%	45.15%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	91.07%	100.00%	92.87%	92.87%	29.04%	212.98%	42.60%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	300.00%	60.00%
5	Program Peningkatan	Meningkatnya sistem	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	20.00%	220.00%	44.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100.00%	100.00%	100.00%	97.22%	97.22%	44.44%	241.67%	48.33%
7	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.96%	150.96%	30.19%
8	Program Penigkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.15%	116.15%	23.23%
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	96.51%	100.00%	92.42%	92.42%	25.61%	214.54%	42.91%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	33.33%	233.33%	46.67%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	280.00%	56.00%
6	Program Pencegahan dan pengurangan risiko Bencana	Persentase Tingkat Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	100%	100.00%	100.00%	79.00%	79.00%	34.09%	213.09%	42.62%
7	Program Kesiapsiagaan Bencana	Tingkat kesiapsiagaan bencana	100.00%	100.00%	100.00%	88.89%	88.89%	16.67%	205.56%	41.11%
8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	250.00%	50.00%
9	Program Penyiapan Logistik Bencana	Meningkatnya logistik dan peralatan penanggulangan bencana	100.00%	99.26%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	249.26%	49.85%
10	Program Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Optimalnya penanganan tanggap darurat	100%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	50.00%	225.00%	45.00%
11	Program Rehabilitasi Korban Bencana	Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	225.00%	45.00%
12	Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
21	SEKRETARIAT									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DAERAH									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	91.07%	100.00%	86.67%	86.67%	42.81%	220.55%	44.11%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	75.00%	100.00%	84.38%	84.38%	43.14%	202.52%	40.50%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	31.00%	231.00%	46.20%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	250.00%	50.00%
5	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Tersedianya Teknologi Informasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	250.00%	50.00%
6	Program Pengembangan Kebijakan Keprotokolan	terlaksananya pengembangan kebijakan keprotokoan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	250.00%	50.00%
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	tertatanya daerah otonomi baru	100.00%	91.67%	100.00%	100.00%	100.00%	61.67%	253.33%	50.67%
8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	39.60%	239.60%	47.92%
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	tertatanya peraturan perundang-undangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	250.00%	50.00%
11	Program Pengembangan dan Penataan Perekonomian	Terlaksananya pengembangan dan penataan perekonomian	100.00%	91.67%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	241.67%	48.33%
12	Program Pelayanan Administrasi Pembangunan	tersedianya pelayanan administrasi pembangunan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	250.00%	50.00%
13	Program Bina Kemasyarakatan	terlaksananya bina kemasyarakatan	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	60.00%	210.00%	42.00%
14	Program Bina Sosial	terlaksananya bina sosial	100.00%	100.00%	100.00%	45.19%	45.19%	33.33%	178.52%	35.70%
15	Program Bina Keagamaan	terlaksananya pembinaan nilai-nilai keagamaan	100.00%	97.57%	100.00%	68.96%	68.96%	30.36%	196.89%	39.38%
16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Negara	Terlaksananya pengembangan aparatur negara	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
17	Program Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Reformasi birokrasi	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	25.00%	125.00%	25.00%
18	Program Pengembangan Aparatur Negara							0.00%	0.00%	0.00%
22	SEKRETARIAT DPRD									
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	96.50%	100.00%	88.58%	88.58%	39.45%	224.53%	44.91%
2	Program Peningkatan	Terwujudnya Sarana dan	100.00%	92.70%	100.00%	87.47%	87.47%	36.06%	216.23%	43.25%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sarana dan Prasarana Aparatur	Prasarana Aparatur								
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	97.37%	97.37%	0.00%	197.37%	39.47%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.06%	287.06%	57.41%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	85.98%	85.98%	36.13%	222.11%	44.42%
6	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100.00%	90.60%	100.00%	93.67%	93.67%	13.21%	197.49%	39.50%
23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	98.94%	100.00%	90.23%	90.23%	51.10%	240.27%	48.05%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	92.63%	100.00%	65.33%	65.33%	52.01%	209.97%	41.99%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	37.63%	237.63%	47.53%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keuangan									
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100.00%	100.00%	100.00%	96.40%	96.40%	47.44%	243.84%	48.77%
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	97.68%	100.00%	95.40%	95.40%	0.00%	193.08%	38.62%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	85.24%	100.00%	100.61%	100.61%	0.00%	185.84%	37.17%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
4	Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah				100.00%	93.33%	93.33%	0.00%	93.33%	18.67%
5	Program Penerapan dan Pengoperasian Teknologi				100.00%	90.55%	90.55%	0.00%	90.55%	18.11%
6	Program Studi dan Penelitian	Meningkatnya presentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan	100.00%	89.88%		0.00%	0.00%		89.88%	17.98%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	INSPEKTORAT									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	94.83%	100.00%	100.00%	100.00%	57.85%	252.68%	50.54%
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	95.73%	100.00%	87.50%	87.50%	57.12%	240.35%	48.07%
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	97.58%	100.00%	91.67%	91.67%	106.05%	295.30%	59.06%
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				100.00%	91.67%	91.67%	0.00%	91.67%	18.33%
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan dan kinerja Aparatur.	100.00%	94.72%	100.00%	95.84%	95.84%	42.28%	232.83%	46.57%
6	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan	100.00%	98.06%	100.00%	91.67%	91.67%	12.50%	202.23%	40.45%
26	KECAMATAN PALU UTARA									
1	Program Pelayanan Administrasi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	98.71%	100.00%	100.00%	100.00%	45.71%	244.42%	48.88%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perkantoran									
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	19.19%	219.19%	43.84%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	250.00%	50.00%
4	Program Pemantapan Dan Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya Presentase Data Base Pelayanan Optimal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	26.41%	193.08%	38.62%
5	Program Bina Keagamaan		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
27	KECAMATAN PALU TIMUR									
1	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya peran dan fungsi pelayanan administrasi di Kantor Camat Palu Timur secara efektif dan efisien.	100.00%	100.00%	100.00%	98.13%	98.13%	44.11%	242.24%	48.45%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	99.33%	99.33%	47.31%	246.64%	49.33%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.83%	166.83%	33.37%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Capaian Kinerja dan Keuangan									
4	Program Bina Keagamaan	Terlaksananya kegiatan keagamaan	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
5	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya Presentase Data Base Pelayanan Optimal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100.00%	100.00%	100.00%	74.40%	74.40%	33.09%	207.49%	41.50%
28	KECAMATAN PALU SELATAN									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	46.58%	246.58%	49.32%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	39.22%	239.22%	47.84%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	83.05%	83.05%	84.46%	267.51%	53.50%
4	Program Pelayanan Administrasi pembangunan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pembangunan	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
5	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya Presentase Data Base Pelayanan Optimal dan Partisipasi Masyarakat dalam	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	49.78%	229.78%	45.96%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembangunan								
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN PEREKONOMIAN		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
29	KECAMATAN PALU BARAT									
1	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	99.66%	100.00%	76.39%	76.39%	38.73%	214.78%	42.96%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	45.84%	45.84%	46.31%	192.15%	38.43%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	16.45%	166.45%	33.29%
4	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan	Terwujudnya rumusan kebijakan publik dan Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	100.00%	100.00%	100.00%	51.95%	51.95%	0.00%	151.95%	30.39%
30	KECAMATAN MANTIKULORE									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	39.17%	239.17%	47.83%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	58.12%	258.12%	51.62%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Prasarana Aparatur									
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	19.80%	219.80%	43.96%
4	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan	Terlaksananya pemantapan dan penguatan kelembagaan	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	83.33%	35.70%	219.04%	43.81%
31	KECAMATAN TATANGA									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	95.59%	100.00%	86.17%	86.17%	42.09%	223.84%	44.77%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	97.90%	100.00%	100.00%	100.00%	19.29%	217.18%	43.44%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	64.47%	64.47%	78.95%	243.42%	48.68%
4	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan	Terwujudnya Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan	100.00%	97.53%	100.00%	63.17%	63.17%	31.06%	191.76%	38.35%
5	Program Bina Keagamaan	Meningkatnya Bina Keagamaan	100.00%	90.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.68%	18.14%
32	KECAMATAN ULUJADI									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	34.34%	234.34%	46.87%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-57.31%	142.69%	28.54%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	225.00%	45.00%
4	Program Pelayanan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya pelayanan administrasi pembangunan	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
5	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan	Terwujudnya Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan	100.00%	100.00%	100.00%	79.43%	79.43%	6.97%	186.40%	37.28%
33	KECAMATAN TAWAELI									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	97.14%	100.00%	97.48%	97.48%	41.20%	235.82%	47.16%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	82.00%	100.00%	91.07%	91.07%	38.30%	211.37%	42.27%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keuangan									
4	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan	Data Base Pelayanan Optimal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	83.33%	44.67%	228.00%	45.60%
34	BADAN ADMINISTRATOR KEK									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	94.31%	100.00%	88.20%	88.20%	30.12%	212.63%	42.53%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur						5.61%	5.61%	0.00%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							0.00%	0.00%	0.00%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						0.00%	0.00%	0.00%
5	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	17.00%	217.00%	43.40%
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Teknologi Informasi	Perizinan dan Non Perizinan								
7	Program Mengintegrasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	0.00%
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	91.24%	100.00%	73.89%	73.89%	53.38%	218.50%	43.70%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	98.75%	100.00%	83.26%	83.26%	39.17%	221.18%	44.24%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.00%	0.00%	100.00%	92.72%	92.72%	0.00%	92.72%	18.54%
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	88.45%	88.45%	16.58%	205.03%	41.01%
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100.00%	92.53%	100.00%	91.38%	91.38%	29.56%	213.47%	42.69%
36	BADAN									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	96.07%	100.00%	94.43%	94.43%	54.10%	244.60%	48.92%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	96.47%	100.00%	94.75%	94.75%	18.12%	209.34%	41.87%
3	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pensiun	Terlaksananya Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pensiun	100.00%	89.8%	100.00%	99.61%	99.61%	26.47%	215.89%	43.18%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	32.51%	32.51%	57.59%	190.10%	38.02%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan	100.00%	100.00%	100.00%	81.50%	81.50%	34.29%	215.79%	43.16%
6	Program Peningkatan Kesejahteraan KORPRI	Meningkatnya kesejahteraan korpri	100.00%	100.00%	100.00%	60.54%	60.54%	25.18%	185.72%	37.14%
7	Program Pembinaan Organisasi KORPRI	Terbinanya organisasi korpri	100.00%	100.00%	100.00%	42.93%	42.93%	4.12%	147.05%	29.41%
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Negara	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Negara	100.00%	97.58%	100.00%	89.69%	89.69%	19.97%	207.25%	41.45%
37	DINAS KEARSIPAN									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DAN PERPUSTAKAAN									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran	100.00%	98.83%	100.00%	98.99%	98.99%	46.42%	244.24%	48.85%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	99.36%	100.00%	72.54%	72.54%	68.02%	239.91%	47.98%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	32.14%	232.14%	46.43%
6	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terlaksananya pembangunan data base informasi kearsipan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
7	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Tersedianya Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip/Dokumen demi keamanan dan kerapian Arsip/Dokumen	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	95.38%	270.38%	54.08%
8	Program pemeliharaan Rutin/berkala sarana	Tersedianya Sarana Layanan Informasi Arsip	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	150.00%	30.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Prasarana									
9	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tersedianya Sarana Layanan Informasi Arsip	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	75.00%	49.43%	224.43%	44.89%
10	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terwujudnya masyarakat pembelajar dari penerapan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca	100.00%	91.78%	100.00%	87.86%	87.86%	44.26%	223.90%	44.78%
38	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	99.11%	100.00%	82.53%	82.53%	45.93%	227.56%	45.51%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	83.34%	83.34%	41.63%	224.97%	44.99%
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	96.11%	100.00%	100.00%	100.00%	56.52%	252.63%	50.53%
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100.00%	100.00%	100.00%	74.99%	74.99%	26.52%	201.51%	40.30%
5	Program Fasilitasi Peningkatan SDM	Jumlah Aparat Pemerintah Pengguna IT yang Terlatih	0.00%	97.14%	100.00%	85.92%	85.92%	25.00%	208.06%	41.61%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bidang Komunikasi dan Informasi									
6	Program Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi dan Persandian		0.00%	100.02%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%	175.02%	35.00%
7	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
8	Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Data/Informasi / Statistik daerah	100.00%	100.00%	100.00%	73.27%	73.27%	16.67%	189.94%	37.99%
39	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	98.63%	100.00%	95.11%	95.11%	31.58%	225.32%	45.06%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Saranan dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	63.91%	263.91%	52.78%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	45.63%	245.63%	49.13%
4	Program Peningkatan	Cakupan Peningkatan	100.00%	92.97%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	192.97%	38.59%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kesejahteraan Petani	Kesejahteraan Petani								
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	cakupan Peningkatan Ketahanan Pangan	100.00%	99.21%	100.00%	97.84%	97.84%	9.92%	206.97%	41.39%
6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya Produksi hasil olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton) dan Perkebunan (Kg)	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
7	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya Produksi / Produktivitas Pertanian / Perkebunan	100.00%	96.96%	100.00%	89.24%	89.24%	11.92%	198.12%	39.62%
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya pematangan ternak yang Aman, Sehat dan Halal (ASUH) %	100.00%	99.88%	100.00%	100.00%	100.00%	34.45%	234.33%	46.87%
9	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap (ikan pelagis dan demersial) (Ton)	100.00%	100.00%	100.00%	86.47%	86.47%	0.00%	186.47%	37.29%
10	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ikan konsumsi)(Ton)	100.00%	99.07%	100.00%	99.29%	99.29%	27.05%	225.41%	45.08%
11	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%
12	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Produksi Ternak (Ton)	100.00%	100.00%	100.00%	85.00%	85.00%	11.28%	196.28%	39.26%
13	Program	Cakupan Pemberdayaan	100.00%	93.37%	100.00%	97.62%	97.62%	17.16%	208.14%	41.63%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberdayaan Penyuluhan, Pertanian / Perkebunan Lapangan	Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan								
14	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIAKAMAN TANGKAP							0.00%	0.00%	0.00%
40	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	96.67%	100.00%	97.92%	97.92%	50.68%	245.27%	49.05%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Saranan dan Prasarana Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	47.64%	247.64%	49.53%
5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan Promosi Pariwisata didalam dan diluar negeri	100.00%	75.00%	100.00%	92.05%	92.05%	33.41%	200.46%	40.09%
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	20.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Program Pengelolaan keragaman Budaya	Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya	100.00%	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00%	19.00%
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung objek wisata	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
9	Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan Pengembangan tradisional unggulan di kota palu	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	66.67%	0.00%	166.67%	33.33%
10	Program Palu Nobudaya Ante Noda		100.00%	95.83%	100.00%	97.90%	97.90%	16.67%	210.40%	42.08%
41	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administarsi perkantoran	100.00%	97.28%	100.00%	96.85%	96.85%	38.02%	232.15%	46.43%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00%	97.85%	100.00%	96.19%	96.19%	28.99%	223.03%	44.61%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							0.00%	0.00%	0.00%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	200.00%	40.00%
5	Program Perlindungan Konsumen dan	Jumlah Pengaduan konsumen yang diselesaikan	100.00%	100.00%	100.00%	91.67%	91.67%	9.85%	201.51%	40.30%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan (2019)		
					Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi RKPD Tahun 2019 s.d Triwulan II (dua)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengamanan Perdagangan									
6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar rakyat yang di bangun/ direvitalisasi	100.00%	92.86%	100.00%	65.28%	65.28%	24.61%	182.75%	36.55%
7	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Jumlah IKM yang Menerapkan SOP Rotan	100.00%	100.00%	100.00%	95.74%	95.74%	20.10%	215.85%	43.17%
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM Pengolahan Komoditas Unggulan Yang terbina	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	13.41%	213.41%	42.68%
9	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah Sentra Industri yang Terbina	100.00%	100.00%	100.00%	84.53%	84.53%	10.61%	195.14%	39.03%

TABEL 2. REKAPAN HASIL EVALUASI RKPD TERHADAP RPJMD S/D TAHUN 2016					
	SKPD	Tingkat Capaian Realisasi RKPD Tahun 2015	Status Capaian Kinerja RKPD Tahun 2015	Tingkat Capaian realisasi RKPD Terhadap RPJMD s/d Tahun 2016	Status Kinerja RPJMD s/d Tahun 2016
	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	105.77	Melampaui Target	105.77	Melampaui Target
2	DINAS KESEHATAN	106.33	Melampaui Target	106.33	Melampaui Target
3	BADAN RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA	58.85	Rendah	51.70	Rendah
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	100.50	Melampaui Target	100.50	Melampaui Target
5	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN	107.71	Melampaui Target	149.89	Melampaui Target
6	KANTOR PEMADAM KEBAKARAN	102.63	Melampaui Target	102.63	Melampaui Target
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANMAN MODAL	71.83	Sedang	80.71	Tinggi
8	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	88.22	Tinggi	88.22	Tinggi
9	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	121.64	Melampaui Target	121.64	Melampaui Target
10	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	130.78	Melampaui Target	130.78	Melampaui Target
11	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	100.80	Melampaui Target	100.80	Melampaui Target
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	115.21	Melampaui Target	115.21	Melampaui Target
13	BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	89.76	Tinggi	89.76	Tinggi
14	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	74.00	Sedang	74.00	Sedang
15	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	70.05	Sedang	79.42	Sedang
16	BADAN SATUAN POL. PAMONG PRAJA	111.10	Melampaui Target	111.10	Melampaui Target
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	127.83	Melampaui Target	127.83	Melampaui Target
18	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU	80.07	Tinggi	80.07	Tinggi
19	SEKRETARIAT DPRD	88.77	Tinggi	88.77	Tinggi
20	INSPEKTORAT	95.29	Sangat Tinggi	95.29	Sangat Tinggi
21	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	102.15	Melampaui Target	102.15	Melampaui Target
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	77.36	Sedang	77.36	Sedang
23	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	91.56	Sangat Tinggi	91.56	Sangat Tinggi
24	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	82.49	Tinggi	82.49	Tinggi
25	BADAN PELAKSANA PENYULUH DAN KETAHAN PANGAN	87.60	Tinggi	87.60	Tinggi
26	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KELURAHAN	85.85	Tinggi	85.85	Tinggi
27	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	98.68	Sangat Tinggi	98.68	Sangat Tinggi
28	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN	55.73	Rendah	57.22	Rendah
29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINIRAL	83.88	Tinggi	83.88	Tinggi
30	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	79.01	Tinggi	79.01	Tinggi
31	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	207.45	Melampaui Target	207.45	Melampaui Target

Terkait dengan hasil evaluasi capaian kinerja perangkat daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 dan Triwulan I Tahun 2019, maka dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Daerah

Berkaitan dengan capaian kinerja beberapa PD dalam melaksanakan Sistem informasi daerah, maka diharapkan kepada PD terkait untuk mewujudkan *smart city* melalui penyediaan sistem informasi yang berkualitas.

2. Pembangunan Pendidikan berkualitas dan Terjangkau

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan, yang salah satunya dicerminkan oleh kemudahan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan pendidikan dasar. Berdasarkan hal tersebut, kepada Satuan Kerja pemerintah daerah terkait untuk mengembangkan pembangunan pendidikan berkualitas dan terjangkau.

3. Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

Kualitas kesehatan masyarakat dapat di ukur dari kemampuan masyarakat menjangkau layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Upaya pemerintah dalam mempermudah aksesibilitas masyarakat pada layanan kesehatan adalah mengupayakan ketersediaan jumlah sarana kesehatan, meringankan biaya pelayanan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Selain ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Semakin besar *universal health coverage* akan memungkinkan semakin banyak masyarakat miskin kota yang akan menerima layanan kesehatan berkualitas.

4. Penanggulangan Kemiskinan Kota

Terkait dengan program penanggulangan kemiskinan perlu menjadi perhatian serius bagi satuan kerja pemerintah daerah terkait, untuk meningkatkan pertumbuhan penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

II-250

5. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perkotaan

Diharapkan kepada dinas perindustrian dan perdagangan akan mendorong peningkatan dan pengembangan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis *home industry*. Peningkatan keanekaragaman usaha akan diupayakan melalui perbaikan iklim investasi, kemudahan serta kepastian usaha.

6. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan Rasionalisasi Birokrasi pemerintah daerah, diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat daerah terkait, untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pengelolaan tata pemerintah juga harus mengadopsi nilai budaya dan adat daerah dalam kerangka kearifan lokal. Diharapkan adat dan budaya daerah akan mewarnai aspek pelayanan dan perilaku birokrat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

7. Pengembangan Sistem Transportasi Umum

Berkaitan dengan transportasi umum di Kota Palu tersebut, diharapkan kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan langkah strategis mengembangkan transportasi umum untuk mengurai kemacetan, mengembangkan moda transportasi umum yang dapat menjangkau masyarakat miskin yang tidak memiliki sarana transportasi pribadi dan pengelolaan trayek kota dan penyiapan armada angkutan umum.

8. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Berbasis Budaya

Berkaitan dengan pengembangan infrastruktur di Kota Palu, diharapkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kualitas Infrastruktur di kota Palu.

9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Pemukiman Kota

Diharapkan kepada dinas Perumahan dan Pemukiman untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

10. Pembangunan Berbudaya dan Beradat

Diharapkan Kepada satuan Kerja pemerintah daerah terkait, untuk melakukan penerapan nilai-nilai berbudaya dan beradat di tengah masyarakat Kota Palu. Dengan membentuk dewan adat, majelis adat dan lembaga adat. Serta melakukan pembentukan K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, Keindahan dan Kekeluargaan) akan menjadi motor penggerak bagi penerapan nilai-nilai budaya dan adat daerah.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1) Kualitas Sistem Informasi Daerah

Sistem informasi sudah menjadi isu nasional maupun internasional sebagai salah satu pendukung keputusan dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan valid akan menghasilkan keputusan strategis yang tepat sasaran dan efisien dalam pengalokasian sumberdaya. Selain ketepatan dalam proses perencanaan, sistem informasi daerah yang terintegrasi antar bagian dalam organisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kondisi saat ini, pemerintah daerah Kota Palu masih termasuk lemah dalam penyiapan informasi berkaitan dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Tidak terintegrasinya sistem informasi pemerintah ditingkat bawah dalam hal ini kelurahan dan kecamatan hingga koordinasi antar instansi pemerintah, menyebabkan lemahnya perencanaan pembangunan dalam hal efektifitas target dan sasaran serta efisiensi anggaran yang akan digunakan. Selain itu, hal ini akan berdampak pada mekanisme efektivitas evaluasi dan monitoring kegiatan pemerintah yang diharapkan akan menjadi kontrol pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya pemerintah Kota Palu untuk mewujudkan *smart city* melalui penyediaan sistem informasi yang berkualitas. Peningkatan kualitas sistem informasi

II-252

daerah dimaksudkan untuk dapat menyiapkan data yang terintegrasi pada seluruh bagian pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah terkecil yaitu kelurahan, kecamatan serta satuan kerja perangkat daerah Kota Palu.

Ketersediaan data harus didukung oleh teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Upaya peningkatan sistem informasi daerah Kota Palu, selain menyediakan data juga menyediakan sistem informasi berbasis GIS yang dapat melacak data pada tingkatan satuan terkecil. Pemanfaatan GIS sebagai basis data akan menghasilkan data *by name, by address* pada tiap potensi sumberdaya yang dimiliki daerah.

Pemerintah Kota Palu dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem informasi daerah, perlu membangun sinergitas antar bagian pemerintahan melalui data terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembentukan pusat data dan informasi menjadi bagian penting untuk segera diwujudkan. Pusat data yang dibangun akan berperan dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan data yang ada di masing sub sistem informasi pada tiap kelurahan, kecamatan, dan PD.

Capaian akhir yang diharapkan dalam isu strategis ini adalah menciptakan sistem informasi yang terintegrasi antara seluruh bagian tata kelola pemerintahan dari tingkat PD, Kecamatan hingga kelurahan. Dengan terintegrasinya sistem informasi potensi sumberdaya daerah maka pengambilan keputusan pimpinan dalam perencanaan pembangunan yang di lakukan akan lebih tepat target dan sasarannya. Hasil akhirnya adalah efesiensi dan efektifitas pengalokasian dana pembangunan yang tepat sasaran.

2) Pembangunan Pendidikan berkualitas dan Terjangkau

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan, yang salah satunya dicerminkan oleh kemudahan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan pendidikan dasar. Selain ketersediaan sarana

dan prasarana pendidikan dasar juga harus melihat pemerataan pada masing-masing wilayah. Kondisi saat ini tingkat pemerataan yang masing kurang berimbang khususnya pada wilayah Kecamatan Ulujadi, Tawaeli, Palu Utara, dan Kecamatan Palu Barat. Upaya pemerintah Kota Palu dalam menyediakan sarana dan prasarana akan di arahkan pada empat wilayah kecamatan tersebut.

Selain sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan juga masih banyak terkendala dari sisi jumlah maupun kualitas. Sama halnya dengan pemerataan sarana prasarana pendidikan di atas, penguatan layanan pendidikan di Kota Palu juga di arahkan melalui pemerataan sumberdaya aparatur pendidikan. Upaya peningkatan kapasitas pendidik perlu diupayakan, khususnya bagi pendidikan menengah pertama yang berbasis kejuruan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menciptakan anak didik yang mampu melakukan pengolahan sumberdaya potensi lokal, karena saat ini sumberdaya potensi lokal belum optimal di kelola dikarenakan keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan sumberdaya manusia yang mengelola.

Isu strategis yang dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan pendidikan adalah meningkatkan aksesibilitas seluruh masyarakat Kota Palu pada layanan pendidikan. Pemerintah Kota Palu harus mampu menciptakan layanan pendidikan murah, mudah dan berkualitas, sehingga akan meningkat partisipasi masyarakat pada pendidikan di Kota Palu.

Peningkatan pendidikan masyarakat tidak boleh lepas dari peningkatan pemahaman akan budaya dan adat. Nilai-nilai luhur budaya saat ini harus tercermin dalam pola pendidikan Kota Palu. Dalam konsep pengembangan pendidikan, seorang pengajar tidak hanya melakukan tugas pengajaran namun juga terdapat tugas mendidik siswa melalui penanaman norma-norma budaya dan adat yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, program penguatan adat dan budaya di lingkungan pendidikan dasar

harus dilakukan melalui, pemberdayaan sanggar seni pada tiap-tiap sekolah

3) Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

Memberikan pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat ditujukan untuk dapat meningkatkan cakupan layanan masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kota Palu yang merupakan tugas utama pemerintah untuk dapat mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang tinggi.

Kualitas kesehatan masyarakat dapat di ukur dari kemampuan masyarakat menjangkau layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Upaya pemerintah dalam mempermudah aksesibilitas masyarakat pada layanan kesehatan adalah mengupayakan ketersediaan jumlah sarana kesehatan, meringankan biaya pelayanan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Selain ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Semakin besar *universal coverage* jaminan kesehatan akan memungkinkan semakin banyak masyarakat miskin kota yang akan menerima layanan kesehatan berkualitas.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat selain meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman kesehatan kepada masyarakat melalui program-program promosi kesehatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan didorong dengan upaya masyarakat menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga. Ketersediaan sanitasi yang memadai, jaringan air bersih yang digunakan, pengolahan limbah keluarga serta pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga.

4) Kemiskinan Kota

Seperti yang di amanahkan dalam pembangunan nasional bahwa penanganan kemiskinan merupakan tugas yang harus dilakukan lintas sektor dalam pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kota Palu telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan beberapa sektor terkait dalam sebuah rancangan penanggulangan kemiskinan, telah mampu menurunkan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan Kota Palu paling rendah dibandingkan seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah. Tahun 2014 angka kemiskinan Kota Palu sebesar 7,05 persen, pada Tahun 2014 – 2018 pertumbuhan angka kemiskinan menurun 0,84 persen menjadi 6,58 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan mulai efektif dalam menanggulangi kemiskinan Kota. Tentunya ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Peningkatan kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan yang merupakan pilar dalam memotong rantai kemiskinan perlu menjadi perhatian lebih untuk menurunkan kemiskinan daerah.

5) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perkotaan

Isu strategi pembangunan Kota Palu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di arahkan melalui kemandirian ekonomi masyarakat kota. Pemerintah Kota Palu berupaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan dan pengembangan UMKM di tiap perwilayah kelurahan. Menjadikan kelurahan yang inovatif yang mampu menciptakan daya saing bagi UMKM melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi lokal.

Pemerintah di tingkat kelurahan di arahkan untuk mampu mengembangkan usaha ekonomi yang ada di wilayahnya dengan dukungan instansi terkait. Langkah awal dalam isu strategis ini adalah pemetaan potensi pada 8 kelurahan di Kota Palu, untuk mengidentifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan dengan

melihat lima aspek yaitu bahan baku, jumlah usaha dalam industri, keunikan produk dibandingkan daerah lain, nilai tambah produk dan kontribusinya ekonomi daerah. Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi, pemerintah melalui dinas terkait akan melakukan penguatan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan pada masing masing industri di tiap wilayah kelurahan.

Dalam upaya menunjang sektor pariwisata, pemerintah Kota Palu akan mendorong tumbuh kembangnya industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat. Penguatan industri kreatif seperti industri kerajinan, musik, desain, seni pertunjukan, periklanan serta beberapa subsektor yang telah tumbuh di masyarakat, akan di dorong untuk menjadi usaha yang memiliki daya saing di tingkat nasional dengan mengandalkan *comparative advantage* sumber bahan baku lokal.

Penguatan usaha mikro dan kecil akan diupayakan melalui peningkatan ketrampilan usaha seperti pemagangan, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Diharapkan nantinya akan menciptakan penguasa mikro dan kecil yang mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, keunikan potensi lokal dan penguasaan pasar lokal.

Pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan akan mendorong peningkatan dan pengembangan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis *home industry*. Peningkatan keanekaragaman usaha akan diupayakan melalui perbaikan iklim investasi, kemudahan serta kepastian usaha.

6) Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Peningkatan kualitas tata birokrasi atau sering disebut reformasi birokrasi, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan

(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Melalui rasionalisasi birokrasi pemerintah Kota Palu, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pengelolaan tata pemerintah juga harus mengadopsi nilai budaya dan adat daerah dalam kerangka kearifan lokal. Diharapkan adat dan budaya daerah akan mewarnai aspek pelayanan dan perilaku birokrat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

7) Pengembangan Sistem Transportasi Umum

Salah satu ciri kota yang mulai berkembang adalah, munculnya permasalahan di bidang transportasi yang menjadi sarana mobilisasi masyarakatnya. Pertumbuhan jumlah populasi penduduk dan kendaraan yang tidak diiringi oleh peningkatan luasan dan panjang jalan akan menimbulkan masalah kemacetan yang mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat.

Kondisi ini mulai dirasakan oleh penduduk Kota Palu dalam kurun 3 tahun terakhir, pada berapa ruas jalan yang sering terjadi kemacetan khususnya pada beberapa wilayah yang pertumbuhan ekonomi dan perumahan meningkat. Secara umum rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu sejak Tahun 2014– 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 rasio panjang jalan dan terhadap jumlah kendaraan wajib uji sebesar 0,31, pada tahun 2014 menurun menjadi 0,22, dan pada Tahun 2018 menjadi 0,19. Penurunan rasio ini merupakan dampak dari peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang tidak diiringi oleh peningkatan panjang jalan.

Ketidak sesuaian antara pertumbuhan panjang jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang menyebabkan semakin menurunnya rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Dari data Tahun 2016, pertumbuhan panjang jalan Tahun 2014 -2015 sebesar 2,26 persen, sedangkan pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Palu tumbuh sebesar 12,9 persen. Hal inilah yang menyebabkan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan semakin kecil.

Upaya untuk meningkatkan rasio panjang jalan terhadap jumlah jalan dapat ditingkatkan melalui penambahan panjang jalan atau menurunkan jumlah kendaraan pribadi. Penurunan jumlah kendaraan yang melintas dapat diturunkan dengan menyiapkan sarana transportasi umum bagi masyarakat. keberadaan angkutan umum di Kota Palu saat ini semakin menurun, hal ini terlihat dari pertumbuhan rasio izin trayek dari Tahun 2014 – 2018 yang menurun cukup drastis yaitu 32,54 persen. Pertumbuhan penurunan rasio izin trayek ini mengindikasikan semakin berkurangnya angkutan umum yang ada di kota.

Pertumbuhan jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum di Kota Palu juga masih tergolong rendah. Sejak kurun waktu 4 tahun yaitu Tahun 2011 hingga Tahun 2015 hanya mencapai 9,47 persen. hal ini mengindikasikan bahwa semakin berkurangnya penduduk Kota Palu yang memanfaatkan angkutan umum. Selain itu juga dapat disebabkan oleh jumlah angkutan umum yang semakin menghilang.

Terminal yang menjadi sarana angkutan umum untuk menurunkan dan mengangkut penumpang juga merasakan dampak penurunan yang cukup besar. Pada Tahun 2015 jumlah penumpang yang masuk di terminal mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 35 persen. Penurunan jumlah penumpang yang turun dan naik angkutan umum di terminal selain menunjukkan berkurangnya jumlah angkutan umum, juga berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi terminal.

Berdasarkan masalah berkaitan dengan transportasi umum di Kota Palu tersebut, pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk mengembangkan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan yang akan terjadi manakala tidak terkontrolnya pertumbuhan kendaraan pribadi. Infrastruktur berkaitan dengan transportasi di arahkan untuk mengembangkan moda transportasi umum yang dapat menjangkau masyarakat miskin yang tidak memiliki sarana transportasi pribadi. Pengelolaan trayek kota dan penyiapan armada angkutan umum menjadi target untuk mengurangi jumlah kendaraan yang sesuai dengan rasio kecukupan kendaraan dengan badan jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat dengan keterbatasan luasan badan jalan akan menjadi bom waktu di kemudian hari apabila tidak diantisipasi dengan penyediaan layanan transportasi umum yang memadai, terjangkau dan mudah bagi masyarakat.

8) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Berbasis Budaya

Salah satu wujud kota dicerminkan dari ketersediaan infrastruktur pendukung layanan kepada masyarakat. Ketersediaan jalan, jembatan, transportasi jaringan irigasi, air bersih, penerangan jalan serta beberapa infrastruktur lainnya menjadikan salah satu tolak ukur layanan pemerintah kepada masyarakat.

Kondisi infrastruktur jalan Kota Palu masih lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah ketersediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi sebuah keharusan, mengingat Palu menjadi cerminan Provinsi Sulawesi Tengah.

Beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan salah satunya drainase, kondisi drainase yang kurang memadai dan tidak terkelola dengan baik, mengakibatkan banjir ketika hujan turun. Di beberapa ruas jalan sering terjadi genangan air akibat meluapnya air dari drainase yang tidak mampu menampung air ketika hujan.

Pengembangan infrastruktur berupa bangunan pemerintah dan sarana publik akan di arahkan untuk berorientasi pada ornamen budaya lokal yang dapat mencirikan identitas Kota. Infrastruktur yang akan dikembangkan diharapkan akan dapat mendukung pariwisata yang berbasis pada budaya lokal. Infrastruktur publik akan mencerminkan maskot Kota Palu dan menjadi bahan promosi pariwisata budaya Kota Palu.

9) Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pemukiman Kota

Pengelolaan tata kota yang ramah lingkungan diarahkan untuk meningkatkan persentase Ruang Terbuka Hijau di dalam Kota. Ketersediaan ruang terbuka hijau akan memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat serta menumbuhkan lingkungan yang sehat. Pemerintah akan mendorong penataan kota yang konsisten yang berpedoman pada RTRW, yang juga memberikan ruang yang cukup besar bagi keberadaan UMKM pengelola potensi lokal.

Pengelolaan sampah di arahkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah mandiri oleh keluarga sebelum di buang di TPA. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah sampah akan menurunkan persentase sampah yang terbang ke TPA, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan pengolahan daur ulang limbah masyarakat. Selain pengelolaan sampah mandiri masyarakat upaya peningkatan kebersihan Kota juga dilakukan melalui ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah masyarakat.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Palu. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru.

10) Pembangunan Berbudaya dan Beradat

Pembangunan berbudaya dan beradat dimaksudkan untuk menciptakan kondisi sosial yang mengacu pada nilai-nilai budaya dan adat daerah yang selama ini mulai ditinggalkan. Pembinaan, Penguatan dan Pengembangan Peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam tata kehidupan sosial akan menjadi prioritas utama untuk membangun kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Penerapan nilai-nilai berbudaya dan beradat di tengah masyarakat akan dikawal oleh lembaga adat dan perangkatnya, sehingga pembentukan dewan adat, dewan suro, dan pembentukan K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, Keindahan dan Kekeluargaan) akan menjadi motor penggerak bagi penerapan nilai-nilai budaya dan adat daerah.

Penguatan nilai-nilai berbudaya dan beradat juga akan dibangun sejak kecil melalui pendidikan budaya pada pendidikan dasar Kota Palu. Pengenalan situs sejarah Kota Palu, budaya dan adat yang ada di Kota palu, serta pembentukan sanggar seni di tiap sekolah dasar dan menengah akan meningkatkan pemahaman dan kecintaan murid pada budaya dan adat daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan yang tercapai. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Palu tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, lingkungan hidup serta infrastruktur daerah yang merupakan gambaran permasalahan daerah dalam skala makro.

Permasalahan daerah juga dapat di tinjau dalam skala mikro, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan

seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengenai pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Terkait hal ini, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut gambaran permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Palu

2.3.2.1 Identifikasi Permasalahan Terkait dengan Urusan Wajib Pemerintahan di Kota Palu

Urusan pemerintahan wajib, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu Tahun 2018 :

Tabel 2.100
Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan
Urusan Pemerintahan Wajib

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
1	Pendidikan	APS untuk SD/MI dan SMP/MTs seharusnya mencapai 100%	Tahun 2018 : masih terdapat 3,2 persen penduduk usia 7 tahun hingga 16 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs	Bagaimana meningkatkan APS SD/MI, dan SMP/MTs agar tidak ada lagi penduduk usia sekolah (7-16 tahun) yang tidak bersekolah.	Kebijakan terkait dengan kemudahan dalam penerimaan murid/siswapada sekolah SD/MI, dan SMP/MTs (material dan spiritual)
		SD/MI dapat melayani pendidikan dengan jumlah murid s.d 1.600 murid, dan SMP 4.800 murid	Tahun 2018 : Rasio ketersediaan sekolah SD/MI yaitu 48,77 dan SMP/MTs yaitu 26,03. SD/MI melayani 205 murid, dan SMP 290 murid.	Jika dilihat dari rasio ini, ketersediaan jumlah sekolah melebihi standar per 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI, dan SMP/MTs. Namun demikian,	Karena ketersediaan yang tidak merata itu, maka dibutuhkan pengaturan pendistribusian murid usia sekolah secara lebih baik agar dirasakan bisa merata.

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
				ketersediaan sekolah tersebut dalam wilayah kecamatan tidak merata.	
		1 (satu) orang Guru dapat mengajar murid sejumlah 30 orang murid dalam 1 (satu) ruang kelas belajar.	Tahun 2018 : Rasio Guru/Murid SD/MI turun 5,08 dari tahun sebelumnya menjadi 50,59, SMP/MTs juga turun 3,53 menjadi 66,66. Berdasarkan data itu maka dapat diartikan untuk SD/MI, 1 guru mengajar 19-20 murid, sedangkan SMP/MTs 1 guru mengajar 15 murid	Jumlah murid yang diajar oleh guru dalam 1 kelas belajar melampaui standar Diduga ada sekolah yang masih kekurangan guru. Bagaimana pendistribusian guru agar seluruh sekolah memenuhi standar kebutuhan guru.	Pengaturan pendistribusian guru secara lebih baik agar bisa merata pada sekolah sekolah yang kekurangan guru.
		Ngka melek huruf diharapkan mencapai 100% (Tidak ada lagi penduduk yang buta huruf)	Tahun 2018 : angka melek huruf naik 0,02% dari tahun sebelumnya menjadi 99,81%, angka buta huruf 0,19%	Masih terdapat penduduk usia diatas 15 tahun yang tidak ingin lagi bersekolah (minat bersekolah tdk ada)	Menumbuhkan minat bersekolah atau minat belajar bagi penduduk usia 15 tahun keatas (memberikan rangsangan/motivasi, dan kesadaran)
			Tahun 2018 : Kondisi Bangunan Baik untuk SD/MI turun 14 gedung dari tahun sebelumnya menjadi 148 bangunan	Kondisi Bangunan Sekolah banyak yang mengalami kerusakan.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah yang rusak
		Angka Putus Sekolah seharusnya 0%	Tahun 2018 : Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 18 % dan SMP/MTs sebesar 12%	Angka putus sekolah pada SD/MI dan SMP/MTs cukup tinggi. Bagaimana mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan motivasi belajar murid?	Peningkatan pendidikan yang terjangkau dengan kualitas yg baik Perlu strategi yang baik dalam menumbuhkan motivasi belajar.
		Angka melanjutkan	Tahun 2018 : Angka	Murid SD/MI yang tidak melanjutkan	Pemberian kemudahan/akses

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		sekolah 100%	Melanjutkan Sekolah pada SD/MI 83 %, SMP/MTs 133%	sekolah masih tinggi yaitu sebesar 17%. Bagaimana meningkatkan angka melanjutkan sekolah SD/MI.	(bantuan materi dan spiritual) kepada murid agar dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang berikutnya
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebaiknya 100%	Tahun 2018 : Persentase guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 85,48%	Bagaimana meningkatkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Peningkatan Kapasitas Aparatur Guru dengan kemudahan/bantuan pendidikan, keuntungan sertifikasi.
2	Kesehatan	Posyandu dapat melayani sampai dengan 1.250 balita (Lutfi Muta'ali, 197)	Tahun 2018 : Rasio Posyandu yaitu 7,5 yang artinya bahwa 1 Posyandu melayani 133-134 balita.	Kondisi ini terbilang masih ideal	Tidak perlu menyediakan posyandu lagi tapi ketersediaan fasilitas posyandu perlu dimantapkan dan jumlah tenaga medis yang terampil perlu disiapkan
		Puskesmas dapat melayani s.d 120.000 penduduk, Poliklinik 5.000 penduduk, dan Pustu 30.000 penduduk	Tahun 2018 : Rasio Puskesmas turun 0,05 dari tahun sebelumnya menjadi 3,37, Poliklinik turun 0,72 menjadi 12,97, dan Pustu juga turun 0,37 menjadi 7,52. Puskesmas melayani 29.674 penduduk, Poliklinik 7.710, dan Pustu 13.298.	Jumlah penduduk yang dilayani oleh Poliklinik di Kota Palu melampaui standar. Kota Palu kekurangan jumlah poliklinik di Rumah Sakit untuk memenuhi pelayanan yang optimal.	Perlu penambahan/ peningkatan jumlah poliklinik serta memelihara poliklinik yang ada.
				Bagaimana meningkatkan jumlah poliklinik agar dapat melayani seluruh jumlah pasien sehingga tidak membludak.	
		Rumah Sakit melayani s.d 240.000 penduduk.	Tahun 2018 : Rasio Rumah Sakit turun 0,04 dari tahun sebelumnya menjadi 2,85. RS melayani 35.088 penduduk.	Jumlah Pasien RS yang dilayani relatif banyak sementara kemampuan RS untuk melayani dari ketersediaan Poliklinik itu kurang.	Peningkatan Sarpras RS yang siap melayani jumlah pasien yang besar
			Tahun 2018 : Rasio Dokter naik 18,50 dari tahun sebelumnya menjadi 98,54	Satu dokter melayani 10 orang pasien RS. Dengan jumlah RS yang tersedia, Kondisi ini masih kurang karena faktanya	Distribusi dokter ke RS perlu diatur secara lebih baik. Kebijakan pengaturannya perlu dipertimbangkan dengan azas manfaat

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
				untuk beberapa RS swasta juga masih menggunakan jasa dokter dari RS Pemerintah.	bersama.
			Tahun 2018 : Rasio Tenaga Medis turun 55,12 dari tahun sebelumnya menjadi 536,53	Satu tenaga medis melayani perawatan terhadap 2 orang pasien RS. Kondisi ini juga masih kurang. Pasien mendapatkan waktu tunggu perawatan	Pengaturan pendistribusian tenaga medis secara lebih baik
3	Pekerjaan Umum	Panjang jalan dengan kondisi baik seharusnya 100%	Tahun 2018 : Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik Turun 29% dari tahun sebelumnya menjadi 14%.	Proporsi kondisi jalan baik masih rendah. Bagaimana meningkatkan persentase/proporsi kondisi baik pada jalan-jalan di Kota Palu	Perlu melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan secara terpadu.
		Kondisi area jalan yang baik didukung oleh trotoar dan saluran drainase yang baik pd kedua sisinya sepanjang jalan tersebut.	Tahun 2018 : Persentase jalan yang berdrainase 77,58%, dan yang bertrotoar 58,41%	Persentase jalan yang bertrotoar dan berdrainase belum optimal. Bagaimana meningkatkan kondisi area jalan yang baik dilengkapi dengan trotoar dan drainase	Perlu peningkatan dan pemeliharaan (pembangunan dan rehabilitasi) trotoar dan drainase secara Kontinyu dan terpadu
		Jaringan Irigasi yang baik berfungsi untuk mengairi areal persawahan	Tahun 2018 : Persentase Jaringan Irigasi Rusak Berat adalah 10,49%, dan Rusak Ringan 14,62%	Persentase jaringan irigasi yang rusak cukup tinggi. Bagaimana mengurangi kondisi rusak berat dan ringan yang terjadi pada jaringan irigasi.	Perlu melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi.
4	Penataan ruang dan pertanahan		Tahun 2016 : bangunan ber-IMB : 21.416	Masih adanya Pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu	
				Ketidakjelasan peruntukkan ruang di Kota Palu menurut Kelurahan	
			Tahun 2016 : Rumah tidak layak huni : 3.258 unit	Masih banyak rumah tidak layak huni di pinggir Kota Palu	

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
			Tahun 2016 : luas tanah bersertifikat hak milik : 1.251 Ha, Hak Pakai : 10.842 Ha	Belum optimalnya pendataan pertanahan	
				Adanya konflik batas wilayah dalam Kota Palu	
				Minimnya pemahaman masyarakat tentang Perencanaan berbasis bencana Gempa	
				Belum adanya regulasi penjabaran RTRW	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	Keamanan, ketertiban dan penanggulangan angka kriminalitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan iklim investasi.	Tahun 2016: Kasus pertikaian antar warga (2 Kasus) Tahun 2018: Jumlah kriminalitas turun 1.196 kasus dari tahun sebelumnya menjadi 1.623 kasus.	Jumlah Kasus pertikaian dan kriminalitas masih relatif tinggi. Bagaimana menurunkan jumlah kasus pertikaian dan kriminalitas sampai pada angka terendah.	Perlu strategi peningkatan kesadaran masyarakat secara lebih baik.
6	Sosial		Tahun 2018: Jumlah penduduk miskin turun 237 orang dari tahun sebelumnya menjadi 25.263	Penanganan kemiskinan, masih dilakukan secara parsial, yakni belum dalam satu alur rencana dan tindak yang terpadu	Perlu strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih baik dan efektif.
			Tahun 2016: Penduduk korban penyalahgunaan NAPZA yang ditemukan 62 Orang Pecandu, Kasus Narkoba yang ditemukan: 24 kasus	Pembinaan kepada masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran kurang efektif.	Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kepada pengguna NAPZA
			Tahun 2015: Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja 26 Kasus, jumlah mogok kerja: 1	Minimnya Perlindungan para pekerja migran (<i>Fair Migran</i>)	Merumuskan kebijakan perlindungan terhadap para pekerja migran secara lebih baik

No	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
			Tahun 2016: Jumlah kasus wabah HIV: 79 kasus, AIDS: 33 kasus, pecandu: 62 kasus	Kurangnya pembinaan terhadap eks trauma (narkoba, HIV/AIDS)	Melakukan pembinaan eks trauma (narkoba, HIV/AIDS)
					Melakukan koordinasi dan kerjasama kepada pihak kepolisian dan instansi terkait dalam penanggulangan dan penyebaran kasus.
			Tahun 2016: Penyandang Tuna Netra: 39 jiwa, Tuna Rungu: 53 jiwa, Tuna Wicara 53 jiwa, Tuna Wicara Rungu: 53 jiwa, Tuna Daksa 165 jiwa, tuna grahita 77 jiwa, penyandang cacat ganda 133 jiwa	Minimnya Pemberdayaan terhadap penyandang Disabilitas	Perlu upaya peningkatan pemberdayaan melalui program pemberdayaan khusus penyandang Disabilitas secara berkelanjutan dan lebih baik
			Tahun 2016: Penduduk rawan sosial dan sarana, berupa gembel dan pengemis 74 jiwa, bekas narapidana 75 jiwa, tuna susila 217 jiwa	Minimnya Pemberdayaan masyarakat korban konflik sosial	Strategi penanganan dan pembinaan yang lebih baik dan menyiapkan program pemberdayaan masyarakat yang efektif
			Tahun 2016: anak jalanan: 365 jiwa, bayi terlantar 315 jiwa, anak terlantar 1.675 jiwa, usia lanjut terlantar 322 jiwa,	Minimnya pelayanan anak dan Pemberian Bantuan UEP terhadap lansia	

2.3.2.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat di Kota Palu dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.101
Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan
Dasar

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
1	Tenaga Kerja	Berbicara mengenai tenaga kerja, sangat erat kaitannya dengan angkatan kerja dan juga kesempatan kerja. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, tenaga kerja adalah semua orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan untuk bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun mau dan mampu untuk bekerja, akan tetapi terpaksa menganggur karena tidak adanya kesempatan kerja	Tahun 2016: Dari 177.951 jiwa angkatan kerja tersebut, terdapat 14.804 pengangguran terbuka atau sekitar 8,3% dari seluruh angkatan kerja.	Banyaknya pengangguran dan kurangnya tenaga professional	Strategi penanganan pengangguran yang lebih baik dan menyiapkan program pelatihan peningkatan keterampilan /keahlian sampai menghasilkan pekerja professional.
			Tahun 2016: Dari 177.951 jiwa angkatan kerja tersebut, terdapat 14.804 pengangguran terbuka atau sekitar 8,3% dari seluruh angkatan kerja.	Belum optimalnya peran swasta dan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan (jika ada) terkait peran swasta dan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja. Perlu strategi yang lebih baik untuk menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja yang lebih banyak
			Tahun 2016: Terdapat 33 Kasus PHK, dengan 198 Orang yang di-PHK. UMR 1.900.000	Regulasi tenaga kerja yang dilatar belakangi oleh kurangnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja	Melakukan evaluasi atau revisi terhadap kebijakan dan regulasi untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan dalam pelaksanaan pekerjaan (rencana, pelaksanaan, dan hasil)

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Setiap warga negara berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak. Pemerintah wajib melindungi para pekerja yang bekerja di lembaga pemerintah dan swasta.	Tahun 2018 : Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta 52,64%, dan pemerintah 47,36%	Perlindungan terhadap pekerja perempuan di lembaga swasta agar terus mendapat perhatian.	Melakukan pengawasan terhadap lembaga swasta terkait dengan pelaksanaan program K3 untuk menciptakan perlindungan pekerja khususnya perempuan
				Akses perempuan pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masih rendah	Peningkatan kualitas dan kesempatan kerja pada lembaga pemerintah.
			Tahun 2016: Terdapat 217 wanita Tuna Susila	Meningkatnya prostitusi dan trafficking di kota palu	Strategi penanganan Wanita Tuna Susila yang lebih baik. Menyiapkan program khusus pemberdayaan WTS secara efektif
			Tahun 2016: anak jalanan: 365 jiwa, bayi terlantar 315 jiwa, anak terlantar 1.675 jiwa	Mulai munculnya anak jalanan dan pekerja anak	Menyiapkan program pemberdayaan khusus anak jalanan dan pekerja anak secara efektif (Berbasis Keberpihakan terhadap Anak)
			Tahun 2016: Terdapat 1 rumah singgah.	Sarana dan prasarana pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) belum memadai	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan P2TP2A. Menyiapkan tahapan dan strategi pelaksanaan program yang lebih baik.
3	Pangan	Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah	Tahun 2015-2016: Padi sawah memiliki luas panen 490 Ha pada Tahun 2015 menjadi 350,9 Ha pada tahun 2016 atau turun	Minimnya ketersediaan pangan dan distribusi pangan	Perlu Peningkatan hasil produksi pertanian/perkebunan serta pengaturan pendistribusian nya

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.	sebesar 28,39 %. Luas panen tanaman palawija pada tahun 2016 sebesar 795,6 Ha atau mengalami penurunan sebesar 6,65 % dibanding tahun 2015		
4	Pertanahan		Tahun 2018 : Persentase luas lahan bersertifikat turun 4,73% dari tahun sebelumnya menjadi 25,96%	Jumlah luas lahan bersertifikat masih sangat rendah	Pengawasan terhadap lahan-lahan yang belum bersertifikat
					Kemudahan layanan dan biaya pengurusan sertifikat tanah
5	Lingkungan Hidup dan kehutanan	Menurut UU No 32 Tahun 2009, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.	Tahun 2018 : Persentase penanganan sampah 37,18	Penanganan sampah masih belum optimal	Optimalisasi penanganan persampahan mulai dari TPS sampai dengan TPA
				Belum terzonafikasi pengelolaan sampah dengan baik	Pengaturan zona pengelolaan persampahan per wilayah
			Tahun 2017: Terdapat 44 unit RTH dengan luas 51.899 m3	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang	Peningkatan jumlah RTH yang dapat dikelola dengan baik
				Masih kurangnya fasilitas dalam kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau	Peningkatan jumlah fasilitas yang mendukung pemeliharaan RTH
			Tahun 2016: Jumlah tempat pembuangan sampah: 61 Unit, kapasitas daya tampung 244 ton, tempat pengolahan	Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah	Peningkatan keterampilan pengolahan sampah kepada masyarakat

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
			akhir (TPA) 1 unit, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) 7 unit		Pengawasan terhadap dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah
			2015: sistem pembuangan air limbah domestik secara terpusat: 1 unit, sistem pembuangan air limbah rumah tangga/setempat 1373 unit.	Belum ditanganinya secara baik limbah industri, manusia, hewan	
				Isu energi dan isu industri, tataruang, lahan Kritis yang tidak dimanfaatkan	
			Tahun 2016: Luas hutan rakyat 5.789 ha	Belum optimalnya pengelolaan hutan kota	Optimalisasi pengelolaan hutan kota
				Belum maksimalnya rehabilitasi lahan bekas pertambangan	
			Tahun 2016: terdapat kawasan lindung berupa: hutan suaka alam = 5 buah, hutan lindung = 11 buah, cagar budaya = 8 buah, taman hutan raya = 4 buah	Pelanggaran pemanfaatan hutan konservasi untuk pertambangan	Penindakan pelanggaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
				Adanya pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan dan penggalian dalam Kota Palu,	
			Tahun 2016: terdapat 2 ha hutan bakau, 1 ha dalam kondisi sedang, 1 ha dalam kondisi rusak. terdapat hutan padang lamun seluas 0,5 ha yang dalam keadaan rusak	Adanya sedimentasi pesisir pantai, adanya reklamasi pantai, rusaknya Biota pantai, serta adanya efek rumah kaca	
6	Kependudukan dan catatan sipil	Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan,	Tahun 2018 : Rasio Penduduk Ber KTP turun 0,452 dari tahun	Jumlah penduduk yang ber KTP masih kurang.	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi,
				Administrasi kependudukan yang belum efektif	

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (uu No. 23 Th 2006).	sebelumnya menjadi 0,677	Kurangnya Validitas data monografi kependudukan	serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan yang lebih baik.
				Rendahnya integritas pelayanan	
		Tiga variable penting yang perlu didaftarkan dalam catatan sipil yaitu kelahiran, kematian dan pernikahan	Rasio pasangan berakte nikah adalah 0,377	Masih banyak pasangan nikah yang belum berakte nikah	Optimalisasi Sosialisasi pentingnya akte nikah dan akte lahir untuk dimiliki setiap penduduk, dan kemudahan akses layanan.
			Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah 23%	Masih banyak penduduk yang belum berakta kelahiran	
7	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014)	Tahun 2018 : Rata-rata kelompok binaan LPM sebanyak 1 kelompok	LPM belum berfungsi secara mandiri sebagai wadah untuk menampung aspirasi, ide maupun gagasan masyarakat utamanya dalam membantu perencanaan pembangunan baik secara partisipatif maupun penetapan prioritas kebutuhan pembangunan kelurahan. Semuanya masih bergantung pada siklus perencanaan Pemda	Pelaksanaan Rembug Rutin Warga (mis. 2 bulan sekali) Perlu adanya Bank Data perencanaan Pembangunan kelurahan sebagai out put Kinerja LPM
			Tahun 2018 : Rata-rata kelompok binaan PKK sebanyak 1 kelompok	Masih ditemukan beberapa permasalahan bidang kesehatan dan social di tingkat kelurahan. Mis. adanya balita gizi buruk, Narkoba, Perkelahian, penelantaran Lansia dan	Diperlukan pendekatan kader PKK yang bersinergi dengan Pemda, instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, birokrat, LSm dan organisasi perempuan.

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
				Pernikahan usia dini	Adanya jalinan pola kerjasama yang baik, dipastikan akan mengatasi permasalahan yang ada.
			Tahun 2018 : Persentase PKK aktif 100%	PKK belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja. Mis. ATK, Komputer, Kantor dll.	Perlu dukungan pemda, baik tambahan anggaran dan sekretariat dalam menunjang kinerja PKK
			Tahun 2018 : Persentase LPM aktif 100%	LPM belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kinerja LPM. Mis. ATK, Komputer, kantor untuk beraktfitas	Perlu dukungan pemda, baik tambahan anggaran dan sekretariat dalam menunjang kinerja LPM
			Tahun 2018 : Persentase posyandu aktif	Masih Kurangnya pemahaman ilmu kesehatan beberapa Kader Posyandu dalam penanganan balita	Peningkatan kapasitas kader posyandu dengan melaksanakan pelatihan/bimt ek.
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Tahun 2018 : Rasio Akseptor KB naik 53,15 dari tahun sebelumnya menjadi 79,68	Meskipun rasio akseptor naik namun masih terdapat sejumlah pasangan usia subur yang belum menjadi akseptor KB	Optimalisasi pelaksanaan program KB kepada pasangan usia subur.
			Tahun 2018 : Cakupan Peserta KB naik 4,4% dari tahun sebelumnya menjadi 81,97%	Meskipun cakupan ini juga naik namun masih terdapat pasangan usia subur yang tidak masuk dalam kepesertaan KB Aktif	
9	Perhubungan	Transportasi sangat penting peranannya dalam perkembangan suatu daerah karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi	Tahun 2018 : Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan turun 0,03 km/unit dari tahun sebelumnya menjadi 0,19 km/unit	Setiap kendaraan melintasi jalan menjadi lebih panjang (akses kendaraan semakin jauh). Waktu habis terbuang dalam angkutan umum (waktu tempuh relative lama).	Perlu dukungan penetapan rute/trayek kendaraan yang jelas serta pelaksanaan kebijakan yang tegas.

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		kebutuhan barang dan jasa sehari-hari , serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi	Tahun 2018: Jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum naik 44.167 org/thn dari tahun sebelumnya menjadi 510.778 orang/tahun.	Tingkat pertumbuhan penumpang yang terangkut oleh angkutan umum cukup rendah.	
				Tidak teraturnya trayek angkutan umum sehingga masyarakat memilih untuk berkendara dengan kendaraan pribadi.	
			Tahun 2018: Jumlah orang melalui terminal turun sebesar 323.731 org/tahun dari tahun sebelumnya menjadi 623.899 org/thn	Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan barang	Optimalisasi pengawasan dan penertiban penumpang dan angkutan pada terminal angkutan umum.
				Belum tersedianya sarana dan prasarana transportasi massal berupa bus trans Palu-Donggala-Sigi (Pagidong)	Penyediaan Sarpras transportasi ke daerah – daerah <i>hinterland</i> yang memadai.
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Fungsi Koperasi mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 diantaranya adalah Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat.	Tahun 2018 : Persentase Koperasi Aktif mencapai 84,26%	Persentase koperasi tidak aktif cukup tinggi mencapai 15,74%	Optimalisasi pembinaan terhadap koperasi (aktif dan tidak aktif) secara berkesinambungan
				Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi secara berkesinambungan	
		Pengertian Usaha Kecil Menengah (Kepres RI No. 99 Tahun 1998) adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas	Tahun 2018 : Persentase Usaha Mikro yang diintervensi menjadi mandiri mencapai 76%, dan Usaha Ekonomi kreatif sebesar 52%	Persentase Usaha Mikro, dan Usaha Ekonomi Kreatif yang belum diintervensi menjadi mandiri masih cukup tinggi	Peningkatan strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung UMKM berbasis kemandirian.
				Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan intervensi pemerintah untuk menjadikan UKM	

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat		menjadi mandiri	
11	Penanaman Modal dan Perizinan	Penanaman Modal (“UUPM”), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMDN dengan menggunakan modal dalam negeri.	Tahun 2018 : Jumlah investor PMDN adalah 70 investor, PMA yaitu 4 investor. Nilai Investasi mencapai 20,678 Triliun Rupiah.	Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu berbasis Teknologi Informasi belum optimal	Optimalisasi peran PTSP dengan dukungan Sarpras yang memadai untuk memberikan kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.
				Kualitas dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan masih sangat minim	
				Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor antar Penyelenggara PTSP dan OPD Teknis belum optimal	Perlu Sinergitas dan sinkronisasi prinsip dan mekanisme pelayanan perizinan
12	Pemudadan Olah Raga	Pembangunan pemuda dan olahragamempunyai peranstrategis dalam mendukung peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.	Tahun 2018: jumlah organisasi pemuda sebanyak 378 organisasi	Belum optimalnya Pembinaan terhadap organisasi pemuda dalam peningkatan peran pemuda di masyarakat.	1. Optimalisasi peran pemuda dan olahraga secara menyeluruh baik yang terorganisir ataupun perseorangan 2. Peningkatan fasilitas pendukung (Sarpras) dan pembinaan yg lebih baik bagi pemuda dan olahraga agar melahirkan semangat mencapai prestasi. 3. Apresiasi terhadap
			Tahun 2018 : Jumlah organisasi olahraga sebanyak 205 organisasi. Tahun 2016: jumlah klub olah raga: 19 klub, jumlah gedung olahraga: 3 unit.	Belum optimalnya Pembinaan yang dilakukan oleh organisasi olahraga dalam menciptakan prestasi olahraga	
				Minimnya pembinaan dan pelatihan secara kontinyu terhadap atlet	
				Minimnya penghargaan terhadap olahragawan yang berprestasi	

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
				Belum ada penetapan cabang olahraga unggulan.	prestasi perlu terus dilakukan sebagai kebutuhan penghargaan.
13	Komunikasi dan Informatika	Informatika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Adalah Sistem Informasi yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu system untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada.	Tahun 2018 : Jumlah jaringan komunikasi sejumlah 4 jaringan; Rasio Warnet/Wartel yaitu 1,28 per 1000 penduduk; Total jenis surat kabar adalah 18 jenis; dan Total penyiaran Radio/TV local sebanyak 37 stasioner penyiaran.	Belum semua akses informasi tersedia secara <i>realtime</i>	Peningkatan dan pengembangan aksesibilitas informasi secara terbuka dan <i>updating</i> .
				Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mencapai <i>Good Governance</i>	Optimalisasi pemanfaatan TIK.
				Belum berjalannya pelayanan publik yang berkualitas berbasis IT	Penyiapan fasilitas pendukung (Sarpras) dan SDM yang berkualitas, terampil dan ahli.
				Masih kurangnya sumber daya manusia bidang TIK yang handal dan profesional	
14	Statistik	Buku Kota Palu Dalam Angka periode dari 2014-2018, Seringkali menyajikan jenis data meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan	Data yang bersumber dari OPD belum sepenuhnya tersedia sesuai dengan kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan.	Belum terintegrasinya data seluruh OPD	Sistem dan Managemen data perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung oleh teknologi informatika yang memadai (perangkat dan SDMnya)
				Belum adanya sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pendataan	
				Kurangnya komitmen pemilik data dalam upaya mengintegrasikan data sektoral	
				Sumber daya aparatur pengelola data masih sangat kurang	
15	Persandian	Persandian merupakan seni tentang tulisan yang bersifat rahasia atau diartikan sebagai perahasiaan berita	Belum terbentuknya kelembagaan persandian di Kota Palu	Belum ada kebijakan untuk pembentukan lembaga	Mempelajari dan mempertimbangkan urgensinya

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
16	Perpustakaan	Perpustakaan merupakan sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh institusi serta dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format tertentu. Jumlah kunjungan pertahun sekurang-kurangnya 0,10 dari jumlah penduduk	Tahun 2018 : Jumlah perpustakaan di Kota Palu sebanyak 97 Perpustakaan	Sarana dan prasarana perpustakaan yang tersedia belum memadai sebagai akses informasi dalam format apapun.	Melakukan koordinasi pengembangan dan pembinaan perpustakaan termasuk pengelolaan data profil perpustakaan.
			Tahun 2018 : Jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 2.984 pengunjung atau 0,008	Jumlah kunjungan sangat rendah. Minat masyarakat berkunjung sangat kurang	Meningkatkan penyelenggaraan perluasan layanan perpustakaan proaktif.
			Tahun 2016: jumlah buku perpustakaan kota 1500 judul, jumlah buku perpustakaan umum kelurahan : 9791 eksemplar	Kurang koleksi bahan pustaka	Melengkapi fasilitas (Sarpras) yang baik dan memadai untuk memberikan kepuasan terhadap layanan/pengunjung.
17	Kearsipan	Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan	Tahun 2014 : Terdapat 1 OPD (2,44%) yang melakukan pengarsipan secara baku	Belum optimalnya kebijakan pengelolaan kearsipan ke seluruh OPD. Rendahnya kesadaran OPD dalam pengelolaan kearsipan secara baku	Perlunya pengawasan kebijakan yang mewajibkan seluruh OPD mengelola kersipannya secara baku
			Tahun 2016: Jumlah tenaga teknis pengelola kearsipan 8 orang	Rendahnya jumlah tenaga pengelola kearsipan yang terampil.	Perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan kearsipan ke seluruh OPD secara efektif

2.3.2.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait
Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan
 Pemerintah Kota Palu teridentifikasi sebagai berikut.

Tabel 2.102
Permasalahan Kota Palu
Berkaitan Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
1	Perikanan dan Kelautan	Potensi perikanan yang sangat besar dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia, bila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. sesuai amanat UU RI Nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan	Tahun 2018 produksi perikanan sebesar 2.586,74 Ton	Daya saing produk perikanan tangkap masih rendah	Peningkatan Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap
			Produksi perikanan menurun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir	Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat pada budidaya perikanan
				Tingkat pemahaman untuk pengamanan	

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
				kualitas ikan pada nelayan/pembudi daya ikan masih kurang	
				Kurang berkembangnya pasar domestik untuk produk perikanan tangkap dan pengamanan kualitas ikan	Kemudahan Prosedur perbankan bagi nelayan skala kecil dengan tingkat suku bunga kredit yang relatif rendah
2	Kebudayaan dan Pariwisata	Sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara	Tahun 2018 : terdapat 31 Unit Hotel (berbintang + non Berbintang)	Diduga sebagian besar jumlah hotel yang ada mengalami kerusakan akibat bencana Gempa Bumi.	Peningkatan pengawasan struktur bangunan sesuai SNI, sesuai kondisi lingkungan yang berpotensi bencana, demi kenyamanan pengunjung
			Tahun 2018 : terdapat 24 Objek Wisata (3 Gedung bersejarah, 9 Tempat spiritual, 5 Taman Rekreasi, 7 Wisata Tirta)	Belum adanya koordinasi yang baik pembangunan objek wisata dengan lembaga dunia usaha	Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang memiliki objek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
					pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan. Studi kelayakandilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun suatu objek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara regional, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dapat meningkatkan devisa dan sebagainya
				Belum ada rencana induk pariwisata (RIPDA) Kota Palu	Melakukan penyusunan Rencana induk pariwisata daerah Kota Palu yang memilikipotensi untukpengembanganpariwisata nasionalyang mempunyaipengaruhpentingdalam beberapa aspek,seperti pertumbuhanekonomi, sosialdanbudaya,pemberdayaansumber dayaalam, dayadukunglingkunganhidup, sertapertahanan dan keamanan

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
3	Pertanian	Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional	Tahun 2018 : Terjadi kenaikan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB ADHK sebesar 0,1 % dari Tahun sebelumnya, menjadi 5,31 %.	Meskipun terjadi peningkatan kontribusi, akan tetapi masih dianggap rendah karena Terjadi bencana gempa bumi, yang menyebabkan sebagian sarana dan prasarana sektor pertanian mengalami kerusakan.	Diperlukan rehabilitasi dan rekonstruksi dari segi sarana dan prasarana dengan mempertimbangan komoditi / varian unggulan dari sektor pertanian
				Adanya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan Permukiman menyebabkan target kontribusi dari sektor ini menjadi lebih rendah.	Diperlukan review, pengawasan dan kajian ulang terkait peruntukan lahan yang tertuang dalam dokumen RTRW
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional, peran utama sektor ESDM adalah merwujudkan ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral	Tahun 2018 : terjadi penurunan sebanyak 5 titik dari tahun sebelumnya (tahun 2017 sebanyak 85, 2018 : 80), penggunaan air bersih yang bersumber dari mata air terlindungi	Belum optimalnya penanganan air tanah	Diperlukan perancangan sistem pengolahan air bersih terpadu yang ekonomis dan tepat guna.
			Tahun 2018 : jumlah rumah tangga pengguna listrik mencapai 100 %	Kurangnya pasokan listrik bagi masyarakat	Diperlukan peningkatan penyediaan daya listrik yang lebih besar.

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
5	Perdagangan dan Perindustrian	Sektor perdagangan dan perindustrian berperan secara aktif dalam memperkuat daya dukung bagi pembangunan industri sebagai salah satu basis penguatan ekonomi lokal yang handal	Tahun 2018 : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB -ADHB sebesar 10,07 % (naik dari tahun sebelumnya) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB -ADHK sebesar 10,41 % (naik dari tahun sebelumnya) Tahun 2018 : Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB -ADHB sebesar 7,59 % (naik dari tahun sebelumnya) Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB -ADHK sebesar 8,17 % (naik dari tahun sebelumnya)	Meskipun terjadi peningkatan kontribusi, akan tetapi masih dianggap rendah karena Terjadi bencana gempa bumi, yang menyebabkan sebagian sarana dan prasarana sektor perdagangan dan perindustrian mengalami kerusakan. Sehingga Target capaian yang direncanakan tidak terpenuhi. Bahkan setelah bencana terjadi, diprediksi capaian kontribusi dari sektor ini ditahun kedepannya akan menurun.	Diperlukan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perdagangan dan perindustrian dari segi sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan komoditi unggul.

2.3.2.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu

Urusan penunjang berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut beberapa permasalahan berkaitan urusan penunjang Pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut.

Tabel 2.103
Permasalahan Kota Palu
Berkaitan Urusan Pemerintahan Penunjang

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
1	Perencanaan	Setiap daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus memiliki dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman perencanaan/ pelaksanaan pembangunan daerah.	Tahun 2018 : Tersedia dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW Kota Palu yg ditetapkan dengan Perda/Perkada	RPJMD : Pemenuhan dari segi kuantitas terpenuhi namun kualitas masih kurang	Perlu Review dan Revisi dokumen RPJMD
				RPJMD : Perumusan tujuan, sasaran, serta indikator masih berskala kecil	Perlu perumusan yang lebih baik dan menggambarkan skala yang lebih luas atau bersifat makro
				RPJMD : Perumusan/ penentuan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur masih belum tepat (belum terukur)	Perlu ketepatan dalam menentukan IKU yang terukur
				Masih kurang berorientasi pada Perencanaan Berbasis Kinerja	
				RKPD : Masih belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyarakat	Sinkronisasi program dan kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat
					Pengawasan Program/ kegiatan prioritas dari masyarakat
				RKPD : Indikator program dan kegiatan masih berorientasi sasaran (tidak terukur).	Ketepatan alat ukur yang jelas, dan terukur.
		Idealnya Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD mencapai 100%	Rata-Rata % Konsistensi Program RPJMD ke RKPD adalah 90,23%	Konsistensi program belum optimal	Penguatan di tahap penyusunan dokumen RKPD dimantapkan
		Idealnya Konsistensi program RKPD	Rata-Rata % Konsistensi Program RKPD ke APBD adalah 90,21%	Konsistensi program belum optimal	Penguatan di tahap asistensi oleh TAPD dicermatkan

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
		kedalam APBD mencapai 100%			
		Idealnya kesesuaian rencana pembangunan terhadap RTRW adalah 100%	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW belum tersedia hasil evaluasinya	Belum dilakukannya evaluasi kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang.	Lakukan kegiatan evaluasi kesesuaian program/kegiatan dengan pola dan struktur ruang.
2	Keuangan	Fungsi BPK diantaranya adalah pemberian asistensi penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Tahun 2018 : Tidak tersedia data mengenai hasil opini BPK terhadap laporan keuangan	BPK telah melaksanakan asistensi penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan Kota Palu namun pelaporan hasil evaluasi OPD tentang hasil opini BPK belum tersedia sehingga Permintaan/ penginputan data belum dilakukan.	Koordinasi mengenai opini BPK pada BKAD Kota Palu
		Silpa atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan bagian dari komponen APBD dari sisi pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan. Besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan.	Tahun 2018 : Tidak tersedia data mengenai Persentase Silpa terhadap total APBD	BKAD telah menyusun dokumen Penjabaran APBD Tahun 2019 yang memuat Silpa APBD Tahun 2018 namun pelaporan hasil evaluasi tentang persentase Silpa belum dilakukan.	Dari sisi perencanaan : (1). Peningkatan akurasi perencanaan penerimaan APBD dan kordinasi transfer dari APBD (2). Menghindari penambahan alokasi TKDD yang bersifat spesifik dipertengahan tahun anggaran berjalan (3). Mempertimbangkan perubahan kriteria penilaian kinerja penerimaan APBD yang saat ini berdasarkan pada capaian realisasi PAD yang lebih tinggi dari target menjadi berdasarkan deviasi antara target dan
				Diduga karena adanya bencana sehingga sebagian program/kegiatan batal dilanjutkan karena pertimbangan teknis dan keamanan	
				Terjadinya kenaikan harga	

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
					realisasi PAD. • Dar sisi pelaksanaan APBD, mendorong penyerapan anggaran sesuai rencana melalui peningkatan monitoring dan evaluasi • Menyalurkan TKDD berdasarkan kebutuhan daerah
		Persentase Belanja Pendidikan 20% dari APBD	Tahun 2018 : Persentase belanja pendidikan 7,94%	Pengalokasian dana pendidikan masih sangat kurang. Pemerintah belum komitmen dengan pengalokasian dana 20% APBD untuk urusan pendidikan	Perlu komitmen dengan kebijakan pusat. Kebutuhan pendidikan masih perlu ditingkatkan bukan hanya saprasnya saja tetapi jumlah pendidik serta kualitas pendidikannya juga perlu ditingkatkan
		Persentase Belanja kesehatan 10% dari APBD	Tahun 2018 : Persentase belanja kesehatan 25,59% Dengan rincian pembagian untuk Dinkes 7,83% dan RSUD 17,75%	Pemerintah belum komitmen dengan pengalokasian dana 10% APBD untuk urusan kesehatan karena ada kebijakan khusus untuk RS yang menerima dana belanja sebesar pendapatan yang diperolehnya.	
3	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Salah satu fungsi kepegawaian adalah perencanaan ASN, yaitu merupakan hal yang sangat penting untuk membantu OPD dalam menentukan sumber yang dibutuhkan, serta apa saja yang bisa dicapai dari sumber yang tersedia	Tahun 2017: persentase PNS yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional adalah 5.52%.	Masih rendahnya persentase PNS yang mengikuti diklat.	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur daerah melalui diklat, dan bimbingan teknis dan non teknis
			Tahun 2017: Jumlah pegawai yang mendapat bantuan biaya pendidikan, Tahun 2015: 12 orang, Tahun 2016: 20 orang, Tahun 2017: 6 orang.	Masih relatif kecilnya proporsi pendanaan untuk pendidikan aparatur daerah	Perlu kebijakan daerah untuk meningkatkan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dari sisi biaya.

No.	Urusan	Data		Permasalahan	Rekomendasi
		Ideal	Fakta		
4	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan biasanya merujuk pada aktivitas yang berorientasi ke masa yang akan datang, dan untuk jangka panjang (rencana) baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang teknologi untuk mendapatkan prakiraan hasil yang mempunyai nilai komersial dalam waktu dekat	Tidak tersedia data mengenai persentase implementasi rencana dan pemanfaatan hasil kelitbangan	Belum terkoordinasinya kebutuhan hasil penelitian pada masing-masing dinas	Implementasi hasil penelitian secara optimal
				Banyaknya hasil penelitian yang kurang terimplementasi	
				Masih sedikit kebijakan pemerintah yang di <i>back-up</i> oleh hasil penelitian	Perlu koordinasi yang baik agar dilakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan kebijakan
				Sumberdaya aparatur dalam bidang penelitian masih sangat minim	Peningkatan kapasitas aparatur bidang penelitian melalui Diklat dan bimtek atau perekrutan.
5	Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	Tahun 2017 : Persentase tindak lanjut temuan adalah 76%	Masih adanya temuan dari beberapa OPD mengenai laporan keuangan dan asset daerah	Penerapan <i>Reward and Punishment</i> akan memotivasi kinerja OPD
				<i>Reward and punishment</i> kurang diterapkan pada proses pengawasan	
6.	Sekretariat Dewan	Rencana Kerja Tahunan, Integritas program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMD, dan RKPD	Tahun 2018 : Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Dari sisi anggaran dan kebutuhan rencana program perlu dipertimbangkan dengan berbasis kinerja	Perencanaan berbasis kinerja
			Tahun 2018 : Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro Kota Palu merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kota Palu, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

a. Struktur Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada 2018 tetap berdaya tahan di tengah kondisi perekonomian global yang masih belum kuat dan penuh ketidakpastian. Perkembangan tersebut dipengaruhi struktur permintaan domestik yang dominan serta ditopang respons kebijakan yang memadai. Kombinasi kedua hal tersebut pada gilirannya mampu memitigasi risiko dampak pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat, harga komoditas global yang masih rendah, dan ketidakpastian pasar keuangan dunia yang tetap tinggi.

Pada tahun 2019 ekonomi Indonesia masih akan tumbuh di kisaran 5-5,4 persen, dipayungi oleh inflasi yang bergerak di seputaran 2,5-4,5 persen, sementara defisit transaksi berjalan diharapkan lebih rendah dari 2018 dan akan berada di level 2,5 persen terhadap produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh kenaikan kredit di kisaran 10-12 persen dan kenaikan pengumpulan dana pihak ketiga oleh perbankan sebesar 8-10 persen. BI mencoba membangun prospek ekonomi dan optimisme industri perbankan dengan menjaga daya tarik pasar keuangan tetap baik sehingga bisa mendukung pembiayaan.

Prospek ekonomi yang cukup baik tersebut dibayang-bayangi oleh tantangan lokal maupun global yang tidak ringan. Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera adalah menurunkan defisit, bahkan harus menjadikan neraca transaksi berjalan surplus pada tahun 2019. Defisit yang terjadi sepanjang 2018 menimbulkan persoalan depresiasi rupiah yang memerlukan respons kebijakan yang tepat.

Rata-rata kurs rupiah pada 2019 diperkirakan berada di level Rp15.250 per dolar AS. Secara umum fluktuasi nilai tukar rupiah akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pelemahan rupiah akan relatif tinggi karena faktor melebarnya defisit transaksi berjalan. Sementara itu, melandainya pertumbuhan

konsumsi rumah tangga menjadi tantangan besar untuk menggapai pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan. Investasi yang melambat, turunnya peringkat kemudahan berusaha, dan pelaksanaan pilpres menambah dinamika ekonomi 2019.

Indonesia juga harus menghadapi kondisi keseimbangan baru dunia akibat kebijakan Bank Sentral AS menormalisasi sektor moneternya dengan menaikkan suku bunga acuan, memicu pelarian modal ke luar Tanah Air. Pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan melemah, menyusul pelambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akibat ekspansi fiskal yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Dampaknya akan terlihat pada harga komoditas yang diperkirakan tidak akan tumbuh seperti tahun sebelumnya.

Indonesia juga masih akan terkena dampak perang dagang yang dilancarkan AS kepada sejumlah mitra dagang terutama China yang akan semakin dirasakan sektor riil. Perang dagang itu berdampak pada memburuknya kinerja ekspor kedua negara tersebut. Indonesia bukan negara yang terlibat langsung di dalamnya, namun keduanya merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Tahun 2017 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.20.593,7 milyar. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,27%. Demikian pula pada PDRB menurut harga konstan berdasarkan tahun dasar 2010 menunjukkan peningkatan sebesar 5,86% dengan total PDRB sebesar Rp.14.717,2 milyar Tahun 2017. Kondisi ini mengalami perlambatan ekonomi dibanding tahun 2016 yang mencapai 6,1%. Berdasarkan Metode penghitungan terbaru, struktur perekonomian terbagi ke dalam 17 sektor pembentuk PDRB. 4 sektor yang paling besar peranannya dalam PDRB Kota Palu tahun 2017 berasal dari sektor Konstruksi (15,93%), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (13,46%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (9,97%) dan Transportasi dan pergudangan (9,55%).

Sedangkan 13 sektor lainnya peranannya di bawah 9%. Sementara itu, 3 sektor dengan peranan paling kecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas (0,12%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,29%), dan jasa lainnya (1,00%).

Struktur ekonomi menunjukkan tren positif dari masing-masing lapangan usaha terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjang ekonomi Kota Palu. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palu secara berturut-turut yaitu konstruksi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalan, jasa keuangan dan asuransi, pertanian, kehutanan dan perkebunan. Secara keseluruhan tujuh belas lapangan usaha terjadi peningkatan kontribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017
(Jutaan Rupiah)

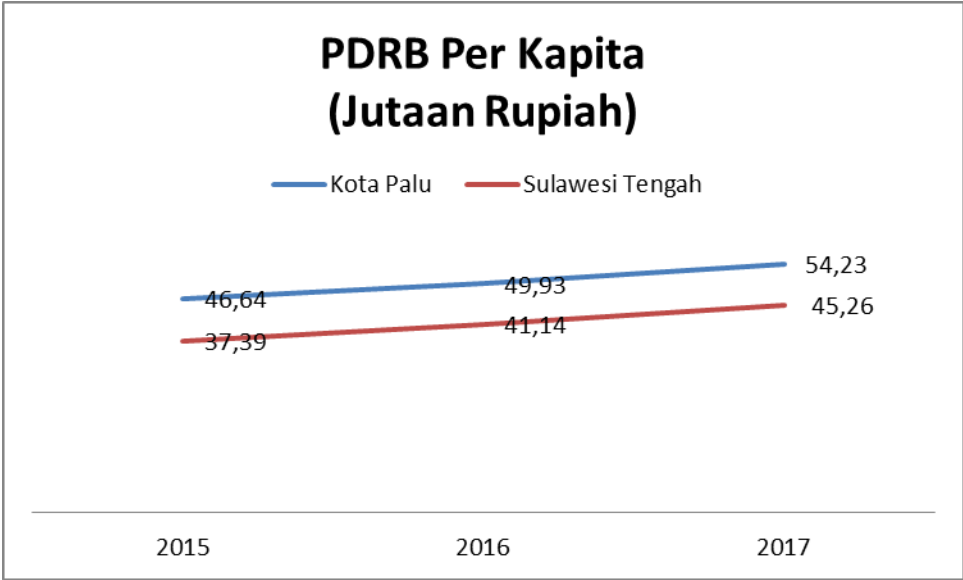
No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Pekebunan	553.802,00	588.382,37	613.054,62	645.000,01
		649.005,00	721.258,06	782.851,59	858.767,69
2	Pertambangan dan Penggalian	725.172,00	830.597,82	920.313,56	1.016.861,47
		902.807,00	95.986,97	125.844,43	1.433.270,54
3	Industri Pengolahan	1.125.374,00	1.156.560,85	1.184.465,50	1.189.784,68
		1.305.515,00	1.407.896,82	1.496.279,69	1.554.609,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	20.635,00	25.545,52	27.134,22	28.671,65
		20.190,00	19.492,89	21.766,73	25.216,63
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.359,00	44.789,84	47.054,85	48.941,69
		47.026,00	51.224,13	54.878,63	59.152,79
6	Konstruksi	1.890.215,00	1.996.665,29	1.996.354,14	2.052.119,03
		2.557.483,00	2.915.694,04	3.003.054,08	3.279.799,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.272.969,00	1.351.650,21	1.456.662,15	1.517.812,13
		1.444.476,00	1.647.260,47	1.866.046,40	2.052.547,60
8	Transportasi dan Pergudangan	1.100.814,00	1.170.299,50	1.260.913,47	1.369.656,60
		1.412.917,00	1.580.694,32	1.719.790,62	1.966.075,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minu	113.348,00	137.159,29	150.736,99	165.032,71
		141.984,00	188.310,14	212.606,84	240.970,61
10	Informasi dan Komunikasi	1.123.090,00	1.263.009,60	1.367.158,35	1.481.344,40
		1.255.561,00	1.448.432,14	1.574.482,07	1.764.635,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	739.276,00	765.450,42	892.030,84	969.428,98
		914.892,00	970.850,10	1.140.827,60	1.270.214,30
12	Real Estate	335.005,00	358.499,71	373.269,40	395.423,34
		393.345,00	439.542,96	475.582,19	528.325,00
13	Jasa Perusahaan	143.095,00	153.043,57	164.143,90	175.244,23
		178.084,00	198.098,24	221.493,70	243.655,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.570.695,00	1.713.489,59	1.819.330,12	1.912.530,53
		2.089.157,00	2.358.576,28	2.563.798,36	2.772.792,15
15	Jasa Pendidikan	982.478,00	1.056.714,33	1.098.493,12	1.161.360,01
		1.281.282,00	1.470.391,07	1.560.313,88	1.715.595,14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	325.974,00	355.393,86	389.093,25	435.083,21
		421.885,00	488.435,98	544.263,63	622.096,53
17	Jasa lainnya	123.065,00	132.999,27	141.859,72	152.935,30
		143.122,00	164.051,33	183.861,76	205.853,21
PDRB	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	12.187.366,00	13.100.251,04	13.902.068,20	14.717.229,97
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	15.158.731,00	16.166.195,94	17.547.742,20	20.593.578,77

Sumber : BPS Kota Palu, 2018

Catatan : Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB perkapita Kota Palu tahun 2015 sebesar 46,64 juta dan mengalami peningkatan 3,29 juta pada tahun 2016 atau setara dengan 7,06 %. Selanjutnya, pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,29 juta atau 8,6 %. PDRB perkapita Kota Palu tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan dengan rata pertumbuhan 7,83 % atau setara 3,79 juta. Perkembangan PDRB perkapita Kota Palu dan Sulawesi Tengah secara terinci dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini :



Sumber: BPS, 2018

Gambar 3.1
PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah
(Jutaan rupiah) Tahun 2015 – 2017

Apabila PDRB perkapita Kota Palu dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu tiga tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Laju Inflasi

Inflasi Kota Palu selama delapan tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2014 sebesar 8,85% dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2016 sebesar 1,49 %. Namun, kembali naik di Tahun 2017 yakni sebesar 4,33 %. Hal yang menarik tingkat inflasi Tahun 2016 sebesar 1,49 % merupakan inflasi terendah selama satu dekade terakhir. Tahun 2017 terjadi kenaikan inflasi sebesar 4,33% kemudian kembali terjadi kenaikan inflasi pada tahun 2018 sebesar 6,46%, hal itu dipicu karena dampak yang ditimbulkan akibat gempa yang melanda wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Rata-rata laju pertumbuhan inflasi Kota Palu dari Tahun 2011 hingga Tahun 2018 sebesar 5,40 %, lebih tinggi dari rata-rata inflasi

nasional sebesar 4,74%. Secara lengkap inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2011 – 2018 ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)
Tahun 2011-2018

Inflasi	Tahun								Rata-rata Pertumbuhan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kota Palu	4,47	5,87	7,57	8,85	4,17	1,49	4,33	6,46	5,40
Indonesia	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13	4,74

Sumber: BPS Kota Palu, 2018

Secara umum, penyumbang terbesar inflasi dalam delapan tahun terakhir di Kota Palu adalah makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 7,35 %, sementara sektor sandang berkontribusi paling kecil sebesar 2,34 %. Perkembangan inflasi Kota Palu selama enam tahun terakhir diuraikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2011 - 2017

No.	Sumber Inflasi	Tahun							Rata-Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Umum	4,47	5,87	7,57	8,85	4,17	1,49	4,33	5,25
2.	Bahan Makan	0,72	4,87	7,58	8,96	8,06	-0,46	7,38	5,30
3.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	9,29	11,56	11,01	9,82	6,00	3,53	0,22	7,35
4.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	6,38	5,21	3,94	7,60	3,76	0,42	1,11	4,06
5.	Sandang	5,90	2,71	1,48	2,82	0,16	3,41	-0,10	2,34
6.	Kesehatan	2,81	7,35	1,48	6,83	2,93	3,38	0,00	3,54
7.	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	3,35	3,16	6,10	5,53	7,15	4,62	0,02	4,28
8.	Tansportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	2,62	2,96	12,14	12,61	-0,98	0,62	0,70	4,38

Sumber: BPS Kota Palu, 2018

Pada Tahun 2011 penyumbang inflasi terbesar adalah makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 9,29% sementara

penyumbang inflasi terkecil adalah bahan makan sebesar 0,72%. Pada Tahun 2012 sumber inflasi tertinggi adalah makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yakni 11,56% sementara terendah adalah sandang sebesar 2,71%. Kenaikan inflasi pada Tahun 2013 tertinggi bersumber dari transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 12,14% sementara terendah sandang dan kesehatan masing-masing sebesar 1,48 %. Tingginya inflasi yang terjadi pada Tahun 2014 diakibatkan oleh transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 12,61%, sementara pada Tahun 2015 penurunan inflasi diakibatkan oleh turunnya harga pada semua kebutuhan pokok, bahkan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan hingga mencapai angka negatif sebesar -0,98%. Inflasi Tahun 2016 ditopang oleh sektor pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 4,62 %, meskipun secara kenyataan Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2015 telah terjadi penurunan kontribusi terhadap inflasi dari 7,15 % menjadi 4,62 %.

Selanjutnya, selama Maret 2017 Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,25 % yang dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,69%, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,32%, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,16%, serta sandang sebesar 0,13%. Kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan serta pendidikan, rekreasi, dan olahraga selama Maret 2017 mengalami penurunan indeks harga masing-masing sebesar 0,05% dan 0,02%, sementara periode yang sama kelompok pengeluaran kesehatan relatif tidak mengalami perubahan.

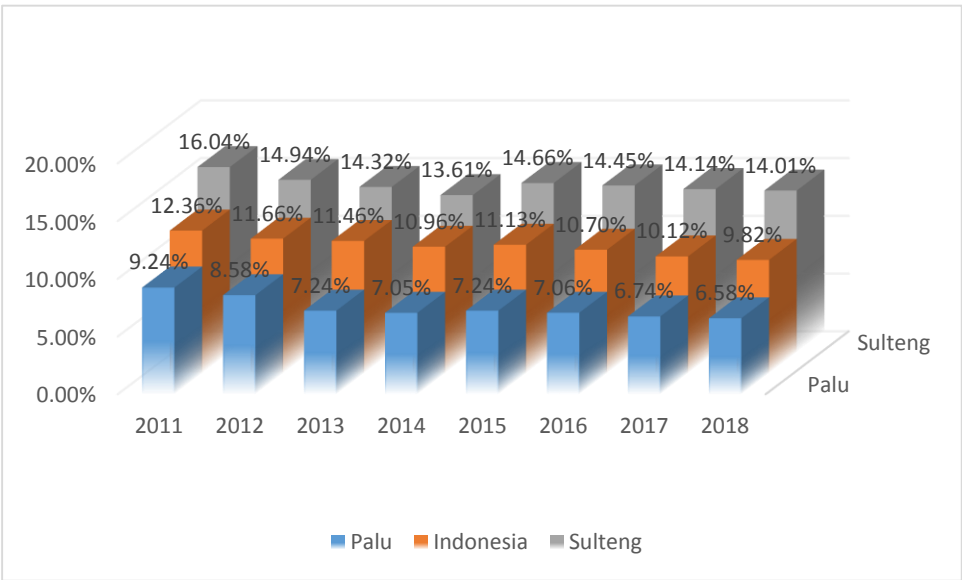
Pada bulan yang sama, inflasi *year on year* Kota Palu sebesar 4,05%. Kenaikan indeks *year on year* tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 6,36%, sedangkan yang terendah terjadi pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 2,79%. Inflasi Kota Palu sebesar 0,25% berasal dari andil kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,142%, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,076%, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,036%, serta sandang sebesar 0,007%.

Sementara andil negatif terhadap inflasi disumbangkan oleh kelompok pengeluaran transpor, komunikasi, dan jasa keuangan serta pendidikan, rekreasi, dan olahraga masing-masing sebesar -0,010% dan -0,001%. Pada periode yang sama, kelompok pengeluaran bahan makanan relatif tidak mengalami perubahan (BPS Provinsi Sulteng, 2018).

d. Kemiskinan

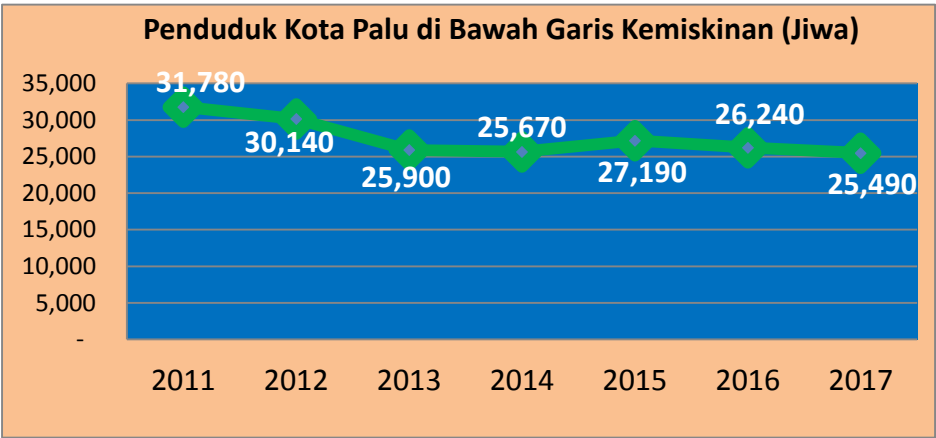
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun 2018 jumlah penduduk miskin 25.260 jiwa atau 6,58% menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 sebanyak 25.490 jiwa juga turun dibandingkan tahun 2016 sebesar 7,06 % atau sebanyak 26.240 jiwa. Menurunnya angka kemiskinan merupakan angka kemiskinan terendah selama delapan tahun terakhir. Pada Tahun 2011 tingkat kemiskinan Kota Palu sebesar 9,24%. Terus mengalami penurunan hingga Tahun 2014 sebesar 7,05 %. Namun, pada Tahun 2015 terjadi kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,37 % dari tahun sebelumnya yakni 7,05 % menjadi 7,42 %.

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan baik nasional maupun Provinsi Sulawesi Tengah, maka tingkat kemiskinan Kota Palu lebih rendah. Secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini :



Gambar 3.2
Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah,
Dan Kota Palu

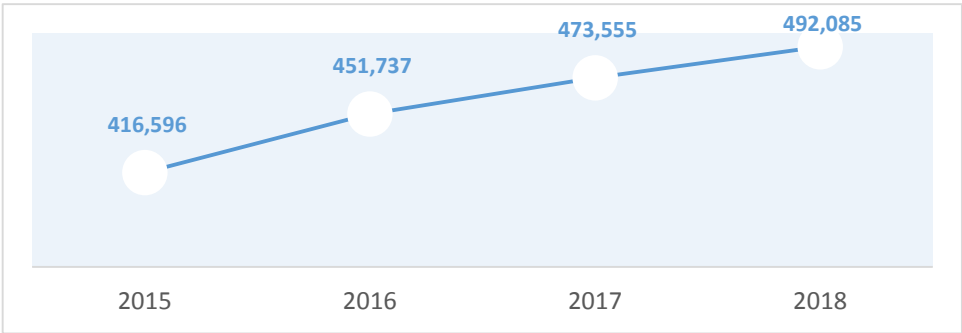
Selanjutnya, secara nominal angka kemiskinan dari Tahun 2011 hingga Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini :



Gambar 3.3
Penduduk Miskin Kota Palu

e. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan baik dari aspek makanan yang disetarakan 2.100 kkalori per jiwa per hari maupun pengeluaran non makanan. Sehingga ketika pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, maka dinyatakan masuk kategori miskin. Garis kemiskinan Kota Palu terus mengalami kenaikan. Tahun 2015 sebesar Rp.416.596 per jiwa, sementara Tahun 2017 sudah mencapai Rp.473.555 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp.492.085 per jiwa. Secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.4 di bawah ini :



Gambar 3.4
Garis Kemiskinan Kota Palu

Selanjutnya, perbandingan garis kemiskinan antara Kota Palu dan Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Kota Palu	Rp.416.596,-	Rp.451.737,-	Rp.473.555,-	Rp.492.085,-
Sulawesi Tengah	Rp.338.443,-	Rp.375.659,-	Rp.391.763,-	Rp.413.785,-

Sumber : BPS Sulteng, 2018

f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai rasio Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 3.5
Gini Ratio Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

<i>Gini Ratio</i>	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	Sept.2017
Kota Palu	0,369	0,410	0,397	0,430	0,430	0,367
Sulawesi Tengah	0,374	0,389	0,362	0,374	0,374	0,345

Sumber : BPS Sulteng, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini di atas angka 0,3 dan di bawah 0,5, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Indeks gini Kota Palu lebih tinggi dari indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka gini *ratio* yang cenderung meningkat di Kota Palu pada Tahun 2013 dan terjadi penurunan pada Tahun 2014 yang relatif kecil dibandingkan dengan penurunan indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu kurang didukung dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

g. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan juga dapat diukur dengan kriteria Bank Dunia. Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk ke dalam tiga kelompok, yaitu 40 % kelompok masyarakat berpendapatan terendah, 40 % kelompok masyarakat berpendapatan menengah, dan 20 % kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi. Kelompok yang 20 % tertinggi umumnya dikatakan sebagai kelompok terkaya, sedangkan kelompok yang 40 % terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukkan

dalam kelompok menengah. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia secara rinci disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia untuk Kota Palu

Tahun	Kriteria Bank Dunia (%)		
	40% Bawah	40% Menengah	20% Atas
2012	15,03	38,00	46,98
2013	15,88	37,04	47,08
2014	15,58	38,54	45,87

Sumber: BPS,Kota Palu Dalam Angka Tahun 2015

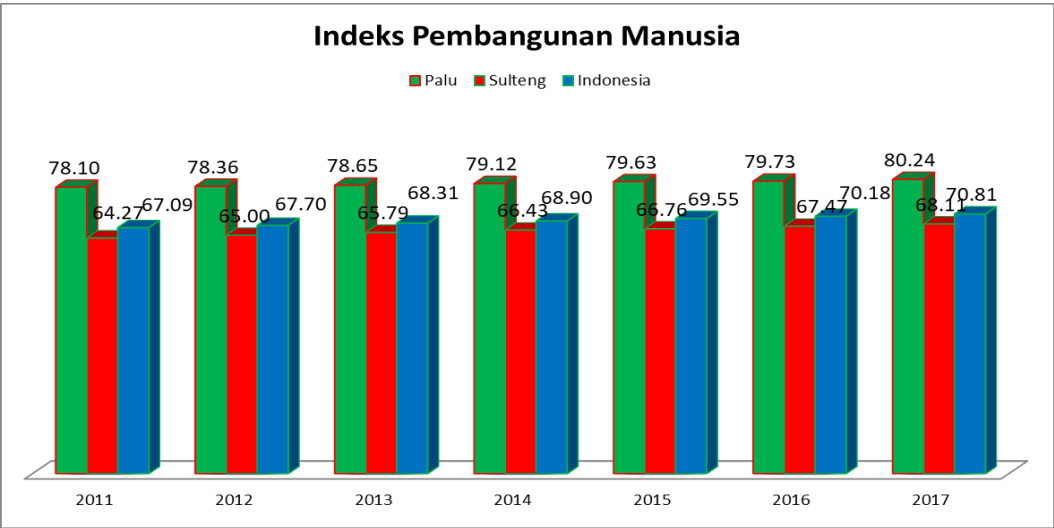
Tabel 3.6 menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, 40% penduduk kalangan bawah menikmati pendapatan sebesar lebih dari 15 % dari total pendapatan. Dengan demikian, Kota Palu berada pada ketimpangan sedang.

h. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun sumber daya manusia digambarkan oleh pencapaian perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang mencerminkan capaian kemajuan kinerja pembangunan manusia di bidang pendidikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, dan ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Capaian IPM Kota Palu Tahun 2016 tercatat sebesar 79,73 mengalami peningkatan dibanding IPM Tahun 2015 yaitu 79,63. Sementara Tahun 2017 terus meningkat menjadi 80,24. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Palu berada dalam skala sangat tinggi.

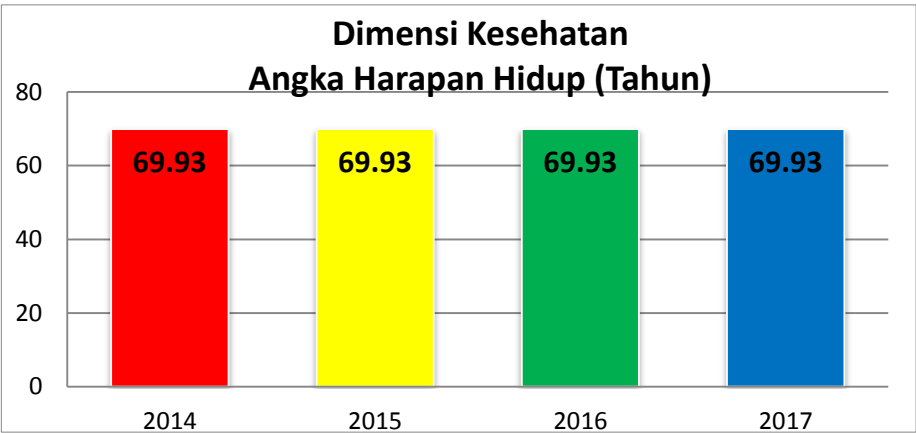
Peningkatan tersebut, menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Palu dari tahun ke tahun semakin baik. Capaian IPM tersebut, menempatkan Kota Palu di peringkat 1 IPM di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan komponennya, secara

umum terlihat bahwa Tahun 2017 komposit penyusun IPM meningkat dibandingkan tahun sebelumnya hanya saja angka harapan hidup stagnan di angka 69,93 Tahun. Perbandingan antara IPM Nasional, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 3.5 di bawah ini :



Gambar 3.5
Indeks Pembangunan Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu

Terkait dengan komposit pembentuk IPM yang terdiri dari angka harapan hidup, masa lama sekolah, harapan lama sekolah, dan daya beli masyarakat diuraikan dalam Gambar 3.6, Gambar 3.7, dan Gambar 3.8 :

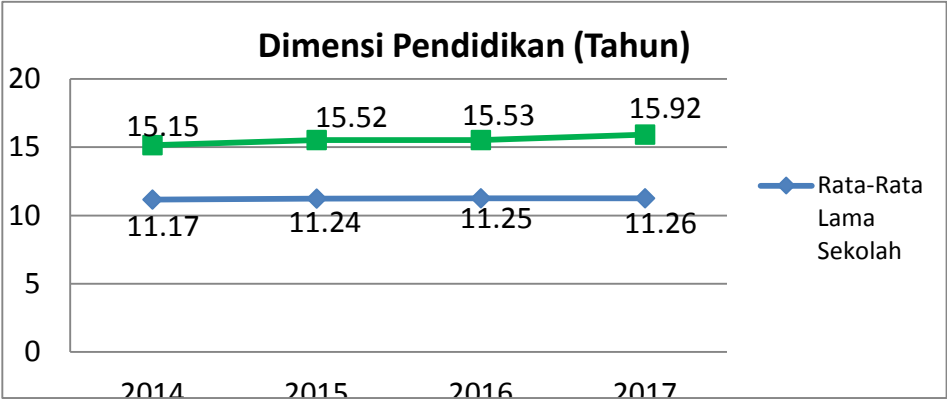


Gambar 3.6
Angka Harapan Hidup

Komposit dimensi kesehatan dengan indikator angka harapan hidup terlihat mengalami stagnasi dari Tahun 2014 hingga Tahun 2017 yakni sebesar 69,93 tahun. Hal ini diharapkan perlu upaya

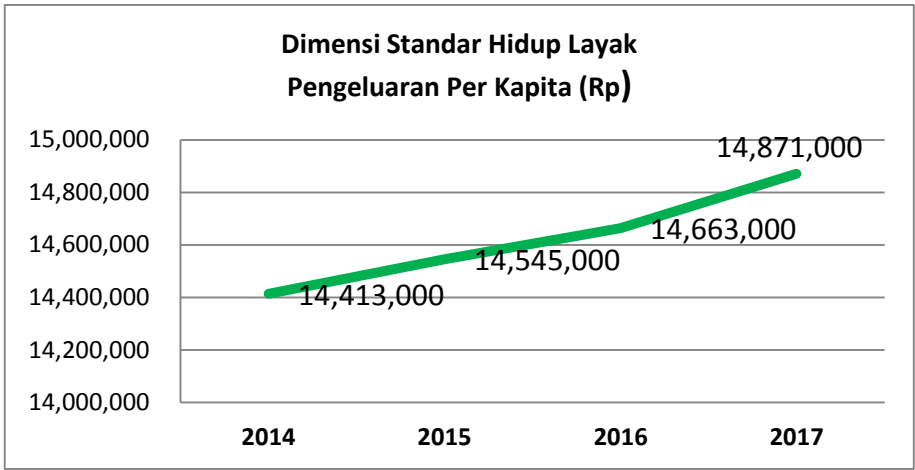
kreatif dan inovatif dalam menyusun program dan intervensi kegiatan.

Selanjutnya, dimensi pendidikan menunjukkan adanya eskalasi positif. Baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Tahun 2014 menunjukkan 11,17 tahun terus mengalami kenaikan hingga 11,26 tahun di Tahun 2017. Begitupun dengan harapan lama sekolah pada Tahun 2014 sebesar 15,15 tahun terus mengalami trend positif hingga pada Tahun 2017 sebesar 15,92 Tahun.



Gambar 3.7
Dimensi Pendidikan

Dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Tahun 2017 terlihat rata-rata pengeluaran tahunan per jiwa penduduk Kota Palu sebesar Rp.14.871.000,- atau setara dengan pengeluaran harian sebesar Rp.40.742,-. Pengeluaran per kapita penduduk Kota Palu lebih besar dibandingkan pengeluaran per kapita Sulawesi Tengah sebesar Rp.9.034.000,- dan nasional sebesar Rp.10.420.000,-



Gambar 3.8
Dimensi Daya Beli Masyarakat

i. **Tingkat Pengangguran**

Tingkat pengangguran terbuka Kota Palu diuraikan pada Tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Palu	7,03 %	Tidak Tersedia	5,69 %	8,32 %	Tidak Tersedia	5,81 %
Sulawesi Tengah	3,95 %	4,19 %	3,68 %	4,10 %	3,29 %	3,81%

Sumber : BPS Sulteng, 2018

Data tingkat pengangguran terbuka Tahun 2012 dan Tahun 2016 di Kota Palu tidak tersedia. Ketidaktersediaan data tersebut, disebabkan tidak dilakukannya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Tahun 2013 dan 2016 di Kota Palu. Tabel 3.9 menunjukkan tingkat pengangguran di Kota Palu Tahun 2012 sebesar 7,03 % mengalami penurunan hingga 5,69 % pada Tahun 2014, namun kembali naik di Tahun 2015 menjadi 8,32 %. Selanjutnya kembali terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,81%. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah, penyebabnya adalah Kota Palu sebagai pusat

pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana lulusan SMA sederajat dari kabupaten lain berbondong-bondong melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya. Alasan lain yakni bencana alam yang terjadi, sektor jasa yang merupakan tumpuan PDRB Kota Palu sangat terdampak dengan bencana tersebut yang telah merusak hotel, pusat perbelanjaan, dan pelayanan jasa-jasa lainnya.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Pada tahun 2020 tantangan pemerintah adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang fokus menjalankan pemulihan investasi dan ekspor, serta tetap mendorong semaksimal mungkin pertumbuhan konsumsi melalui perbaikan daya beli, stabilitas harga, dan perkuatan kepercayaan konsumen. Berangkat dari kondisi tersebut, dengan melihat berbagai potensi, kesempatan, dan risiko yang diprediksi bakal berlangsung tahun depan, pemerintah pun mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2020. Adapun asumsi makro yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPR meliputi pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3% - 5,6%, laju inflasi berada di level 2% sampai 4%, tingkat bunga surat berharga negara (SBN) untuk tiga bulan pada kisaran 5-5,6%. Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia ditetapkan USD60-70 per barel, adapun lifting minyak bumi sebanyak 695.000 sampai 840.000 barel per hari, lifting gas bumi 1,19 juta hingga 1,3 juta barel setara minyak per hari. Dan, nilai tukar rupiah dipatok Rp14.000-15.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berada pada kisaran 5 % sesuai dengan pernyataan yang disampaikan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa potensi rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan dalam periode 2020-2024 berada dalam rentang 5,4 % - 5,7

%. Namun, struktur perekonomian yang masih bersandar pada sektor pertanian, sumber daya alam (SDA), serta manufaktur dan jasa sederhana dinilai tak memungkinkan untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. Bappenas memetakan kebijakan untuk mendukung pembangunan sektor manufaktur Indonesia untuk 2020-2024, sektor ini memiliki setidaknya empat keunggulan yang menjadikannya sebagai "mesin pertumbuhan ekonomi

Pertama, manufaktur menjadi sarana untuk mengalihkan tenaga kerja tradisional yang produktivitasnya rendah menjadi tenaga kerja profesional dengan produktivitas tinggi.

Kedua, manufaktur dapat menaikkan produktivitas ekonomi Indonesia lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Pertumbuhan produktivitas paling signifikan akan terlihat pada tenaga kerja, terlepas dari kondisi kebijakan domestik, sumber daya manusia, geografi, maupun kualitas institusi yang melingkupi industri manufaktur itu sendiri. Di tengah permintaan terhadap produk manufaktur yang meningkat secara global, biaya produksinya justru dalam tren menurun sehingga berpotensi lebih menguntungkan.

Ketiga, produk manufaktur memiliki elastilitas permintaan yang lebih tinggi dibandingkan produk pertanian. Negara yang spesialisasinya pada produk pertanian maupun produk primer lainnya sudah tentu tak akan menikmati keuntungan dari pasar manufaktur dunia yang kian berkembang ini.

Keempat, perlu dicatat bahwa dalam kaitannya dengan neraca pembayaran, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara maka semakin tinggi pula permintaan terhadap produk manufakturnya.

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global

Krisis keuangan global (*Global Financial Crisis/GFC*) di Tahun 2008-2009 memberikan dampak yang cukup mendalam pada perekonomian dunia. Secara umum, tingkat pertumbuhan berada dalam tren pelemahan, yang diikuti oleh perlambatan perdagangan internasional serta investasi yang menjadi faktor rendahnya produktivitas. Dalam rangka mengatasi dampak GFC, perekonomian

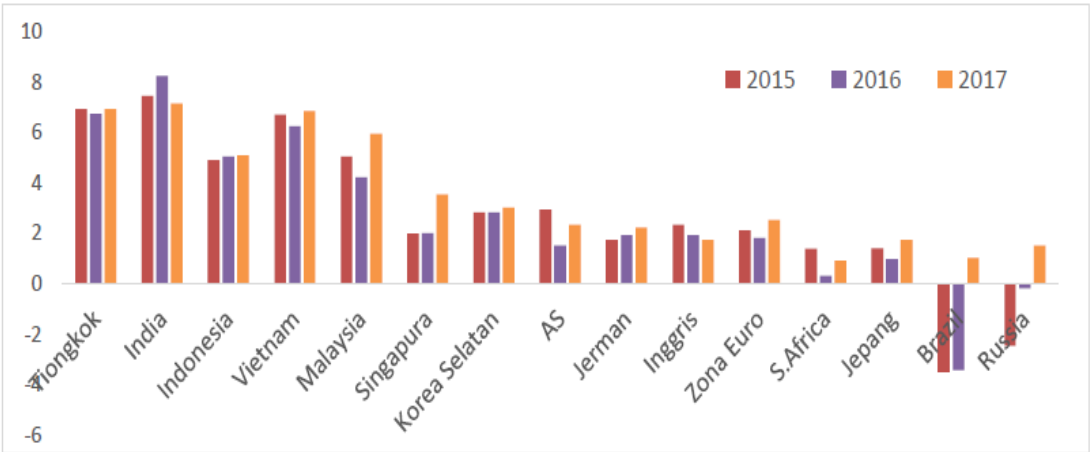
besar seperti Amerika Serikat (AS), Jepang dan Zona Euro mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi longgar seperti stimulus fiskal, penurunan suku bunga acuan, hingga penerapan program pembelian aset oleh bank sentral. Meskipun berbagai langkah kebijakan ekspansif telah ditempuh, namun proses pemulihan terhitung berjalan lambat karena dampak GFC yang dalam pada investasi dan perdagangan, serta hadirnya berbagai tantangan lain seperti krisis utang di kawasan Eropa, perubahan struktur ekonomi Tiongkok (*economic rebalancing*), berakhirnya era boom komoditas, dan ketegangan geopolitik.

Memasuki satu dekade pasca GFC, sinyal perbaikan sudah mulai terasa, meski tantangan masih tetap ada. Pertumbuhan perdagangan internasional dan harga komoditas mulai bergerak pada tren positif sejak pertengahan 2016 dan berlanjut di Tahun 2017. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 terjadi secara luas di banyak negara. Pertumbuhan ekonomi global sendiri berada pada tingkat 3,8 %, tertinggi sejak Tahun 2012. Indikasi lain dari pemulihan global tampak pada aktivitas manufaktur yang meningkat, khususnya di negara-negara besar seperti AS, Zona Euro, Jepang, dan Tiongkok. Perbaikan tingkat permintaan negara-negara maju di Tahun 2017 mendukung akselerasi pertumbuhan volume perdagangan dunia pada tingkat 4,9 %, setelah di periode sebelumnya hanya mampu tumbuh 2,3 %.

Pemulihan ekonomi global yang terjadi dipimpin oleh kelompok negara maju, terutama AS. Pertumbuhan ekonomi AS di Tahun 2017 telah mencapai 2,3 % setelah pada periode sebelumnya hanya tumbuh 1,5 %. Pemulihan ekonomi AS juga ditandai oleh tingkat inflasi yang sudah mencapai target 2,0 % serta tingkat pengangguran yang terus menurun. Sebagai konsekuensi atas perkembangan tersebut, otoritas moneter AS, The Fed, sedang dalam proses melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali dengan total kenaikan 75 basis poin. Langkah ini melanjutkan kenaikan suku bunga sebelumnya di Tahun 2016 dan penghentian program pembelian aset oleh The Fed

(*quantitative easing*). Langkah normalisasi semakin diperkuat dengan pengurangan neraca keuangan The Fed secara bertahap.

Berbeda dengan AS yang sudah mulai melakukan normalisasi, Zona Euro dan Jepang masih mempertahankan kebijakan moneter longgar. Suku bunga acuan *European Central Bank* (ECB) masih berada pada kisaran nol % (*zero-bound*), sedangkan Jepang masih mempertahankan suku bunga negatif. Selain itu, program *quantitative easing* melalui pembelian surat berharga milik Pemerintah di kedua kawasan masih tetap berjalan, meskipun di Eropa jumlah pembelian telah dikurangi dari EUR60-85 miliar menjadi EUR30 miliar per bulan, terhitung mulai Januari 2018. Masih diterapkannya kebijakan moneter longgar di kedua kawasan tersebut disebabkan oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang belum solid, isu penuaan populasi, serta tingkat inflasi yang belum mencapai sasaran.



Sumber: Bloomberg

Gambar 3.9
Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Negara (% , YoY)

Kebijakan ekonomi yang akomodatif di Eropa dan Jepang menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kedua kawasan tersebut pada Tahun 2017. Zona Euro mencatatkan pertumbuhan 2,3 %, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1,8 %. Pemulihan Zona Euro didukung oleh peningkatan pertumbuhan negara-negara utamanya seperti Jerman, Perancis, dan Italia. Ditinjau dari sumber pertumbuhan, ekspor dan investasi pada mesin dan peralatan menjadi kontributor utama

pertumbuhan kawasan tersebut. Sementara itu, Jepang juga memanfaatkan stimulus fiskal dalam bentuk penambahan anggaran (mencapai US\$18 miliar di 2017), yang antara lain dialokasikan untuk infrastruktur. Dengan dukungan stimulus fiskal, Jepang mencatatkan pertumbuhan ekonomi 1,6 %, meningkat signifikan dibanding pertumbuhan 2016 di angka 0,9 %. Selain itu, pertumbuhan Jepang juga didukung oleh peningkatan ekspor, investasi, dan konsumsi rumah tangga.

Peningkatan permintaan negara-negara maju telah memberi daya dorong pada pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang lebih baik dari perkiraan juga telah memberikan dorongan positif pada negara berkembang lain yang memiliki hubungan dagang tinggi dengan Tiongkok, seperti negara-negara ASEAN. Selain karena perbaikan tingkat permintaan, kenaikan harga komoditas di Tahun 2017 turut memberi keuntungan, terutama pada negara pengekspor komoditas seperti Brazil dan Rusia. Kedua negara tersebut telah kembali pada tingkat pertumbuhan ekonomi positif setelah pada dua tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi India melambat terdampak dari kebijakan penarikan uang kartal pecahan tertentu dari peredaran (demonetisasi) dan penerapan *good and service tax* (GST) yang kurang berjalan lancar. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi India masih yang tertinggi di antara kelompok negara G-20.

a. Prospek Perekonomian Global 2019 dan Proyeksi 2020

International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,5 % pada Tahun 2019 dan 3,6 % pada Tahun 2020. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di China, Eropa dan sejumlah negara berkembang. Untuk Eropa, IMF memperkirakan pada 2019 ini ekonomi akan tumbuh 1,6 %, atau 0,3 % lebih rendah jika dibandingkan proyeksi yang dibuat pada Oktober 2018.

Untuk ekonomi negara berkembang, IMF memperkirakan pada 2019 ini hanya akan tumbuh 4,5 %, turun 0,2 % dibandingkan dengan proyeksi mereka tiga bulan lalu dan turun dari pertumbuhan 2018 yang masih bisa mencapai 4,7 %. Selain itu, pemangkasan proyeksi juga dilakukan dengan mempertimbangkan dampak dari perang dunia. Walaupun memangkas proyeksi pertumbuhan global, IMF memutuskan tetap mempertahankan ramalan mereka atas ekonomi AS. Pada 2019 ini, mereka memperkirakan ekonomi AS masih akan bisa tumbuh 2,5 %. Sementara itu, pada 2020, IMF memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh 1,8 %. Mereka juga tetap mempertahankan proyeksi yang mereka telah buat atas pertumbuhan ekonomi China. Mereka tetap memperkirakan ekonomi China pada 2019 dan 2020 akan tumbuh 6,2 %.

Pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan didukung oleh akselerasi pertumbuhan baik kelompok negara maju maupun berkembang. AS akan menjadi motor pertumbuhan negara maju dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 2,9 %, atau meningkat 0,6 percentage point dibanding periode sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan ekonomi AS yang cukup signifikan tahun ini didukung oleh kebijakan penurunan tarif pajak secara signifikan (dari 35 % menjadi 21 %). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kelompok Zona Euro juga diperkirakan naik tipis dari 2,3 % di Tahun 2017 menjadi 2,4 % di Tahun 2018, didorong oleh investasi dan perdagangan yang membaik.

Sejalan dengan proyeksi untuk negara maju, pertumbuhan negara berkembang juga diperkirakan masih meningkat, terdorong oleh konsumsi yang tinggi, pertumbuhan ekspor, dan perbaikan harga komoditas. Namun demikian, negara-negara berkembang tetap harus mewaspadaai risiko kebijakan pemotongan pajak oleh AS. Pemotongan pajak akan mendorong peningkatan defisit anggaran AS yang perlu didanai dengan obligasi sehingga menyebabkan peningkatan suku bunga obligasi. Kebijakan pemotongan pajak dan peningkatan suku bunga obligasi AS akan menjadi daya tarik bagi investor dan berpotensi menarik aliran modal kembali ke AS. Faktor-

faktor tersebut perlu disikapi oleh negara berkembang dengan terus memperkuat fundamental ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang baik.

Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan stagnan di tengah laju pertumbuhan ekonomi negara maju yang melambat. Perekonomian AS diperkirakan melemah antara lain disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Seiring dengan hal tersebut, laju pertumbuhan volume perdagangan dunia juga diperkirakan melambat, dari 5,1 % di Tahun 2018 menjadi 4,7 % di Tahun 2019. Selain akibat tingkat permintaan global yang relatif stagnan, proyeksi perlambatan tersebut juga memperhitungkan langkah proteksionisme yang diambil oleh AS.

Sejalan dengan AS, Zona Euro dan Jepang juga diperkirakan mengalami perlambatan ekonomi di Tahun 2019 akibat berkurangnya stimulus, populasi penduduk yang menua, dan tren produktivitas yang lemah di tengah penurunan jumlah tenaga kerja usia produktif. Pertumbuhan ekonomi Zona Euro dan Jepang di Tahun 2019 masing-masing diperkirakan sebesar 2,0 % dan 0,9 %, lebih rendah dari perkiraan untuk Tahun 2018, masing-masing sebesar 2,4 % dan 1,2 %. Dengan proyeksi pertumbuhan yang melambat, kebijakan moneter longgar diperkirakan masih akan diimplementasikan di kedua kawasan tersebut.

Sementara itu, kelompok negara berkembang di Tahun 2019 diproyeksikan tumbuh 4,9 %, sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,8 %. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh kinerja ekonomi India yang diperkirakan kembali berakselerasi di Tahun 2018 dan 2019 ke angka 7,4 % dan 7,8 %. Hal ini semakin menegaskan posisi India sebagai negara berkembang dengan prospek pertumbuhan ekonomi tertinggi. Perekonomian India masih ditopang oleh konsumsi yang tinggi serta investasi yang meningkat sejalan dengan program akselerasi pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, moderasi perekonomian Tiongkok masih akan berlanjut dan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan

kelompok negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan sebesar 6,4 % di Tahun 2019, melambat dibandingkan angka perkiraan 2018 sebesar 6,6 %.

ASEAN akan menjadi salah satu kawasan yang menopang pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang. Untuk prospek hingga Tahun 2019, Indonesia diprediksi menjadi negara yang secara konsisten akan mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, negara besar ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, diperkirakan mengalami konsolidasi pertumbuhan meskipun secara umum tingkat pertumbuhannya cukup tinggi. Kekuatan ekonomi negara ASEAN semakin ditopang oleh pertumbuhan sektor nonprimer yang meningkat, serta basis konsumsi yang cukup besar. Selanjutnya, prospek pertumbuhan ekonomi beberapa negara berkembang di kawasan lain, seperti Brazil dan Rusia diperkirakan terus meningkat seiring dengan membaiknya harga komoditas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019).

3.14. Perkembangan Perekonomian Indonesia

a. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi yang terjaga tentu akan mampu menciptakan kepastian dan kepercayaan dunia usaha sehingga mendorong peningkatan investasi yang berujung pada percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Secara umum, faktor stabilitas ekonomi terutama akan tercermin pada tingkat harga dan inflasi serta tingkat nilai tukar yang stabil. Fluktuasi tingkat harga dan nilai tukar yang tinggi tentu akan menciptakan ketidakpastian mengenai perkembangan pasar dan ekonomi, meningkatkan risiko bagi aktivitas ekonomi dan dunia usaha, termasuk pemenuhan target yang telah direncanakan dan tingkat profitabilitas dunia usaha. Bagi Pemerintah, gangguan stabilitas ekonomi tersebut akan meningkatkan risiko tidak terlaksananya implementasi program-program kerja dan pengelolaan

fiskal serta APBN yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan memahami hal-hal tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil guna menjamin iklim usaha yang baik dan terlaksananya program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Laju inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, laju inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat serta tingkat pendapatan riil dan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi juga akan mempengaruhi baik garis batas angka kemiskinan maupun jumlah masyarakat miskin. Dalam kaitannya dengan penyusunan APBN, tingkat inflasi akan menjadi faktor penting dalam perhitungan dan penyusunan penerimaan dan belanja negara. Dengan memperhatikan pentingnya tingkat inflasi tersebut, Pemerintah akan menyusun program-program kerja yang mampu menjaga inflasi di tingkat yang rendah dan stabil.

Selama periode Tahun 2015 hingga 2017, laju inflasi berhasil dijaga sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan. Secara umum, rendahnya inflasi ini dipengaruhi oleh keberhasilan Pemerintah dalam menjaga dan memenuhi pasokan barang kebutuhan masyarakat sehingga stabilitas harga relatif terjaga. Kondisi perekonomian global seperti penurunan harga minyak mentah dunia dan pelemahan ekonomi global, serta ekspektasi inflasi di dalam negeri yang terjaga dan stabilitas nilai tukar menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya tekanan inflasi komponen harga diatur Pemerintah dan komponen inti. Di saat yang sama, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi melalui pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperlancar sistem distribusi dan logistik, kebijakan stabilisasi harga seperti operasi pasar, serta program-program

kesejahteraan dan jaminan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi stabilitas perekonomian adalah nilai tukar. Gejolak pada variabel ini juga akan mengganggu pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi yang telah direncanakan. Nilai tukar Rupiah sempat mengalami tekanan selama periode Tahun 2012-2015 terutama disebabkan oleh tekanan global. Namun, sejak pertengahan Tahun 2016, nilai tukar Rupiah dapat dijaga stabil di tengah tekanan penghentian kebijakan quantitative easing (tapering off) dan normalisasi kebijakan suku bunga acuan (*Fed Fund Rate* – FFR) oleh The Fed sejak Tahun 2015.

Dari sisi domestik, Rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh kuatnya fundamental perekonomian Indonesia, seperti membaiknya perekonomian nasional, akselerasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur, terjaganya tingkat inflasi, kuatnya cadangan devisa, surplusnya neraca perdagangan, peningkatan surplus transaksi modal dan finansial, dan membaiknya defisit transaksi berjalan. Hal ini juga tercermin dari indikator daya saing Rupiah (real effective exchange rate) serta tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah 10 tahun yang menurun hampir 200 basis poin pada periode Tahun 2012-2016.

Rendahnya inflasi yang disertai dengan stabilnya nilai tukar ini telah memberi ruang kepada Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pelonggaran arah kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga acuan BI serta pelonggaran kebijakan makroprudensial tanpa menyebabkan arus modal keluar. Perbaikan peringkat (rating) utang Indonesia juga menjadi salah satu indikator mulai membaiknya perekonomian nasional, termasuk pada Desember 2017 dimana *Fitch Ratings* menaikkan peringkat *Long Term Foreign* dan *Local Currency Issuer Default Rating* Indonesia menjadi BBB dari sebelumnya BBB- dengan *outlook* stabil menyusul peningkatan *sovereign rating ke investment grade* (BBB-) oleh S&P. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah secara terukur di antaranya melalui intervensi di pasar keuangan serta dukungan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan

makroprudensial, serta peningkatan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia.

Stabilitas ekonomi dalam mendukung momentum pertumbuhan perekonomian nasional perlu ditopang oleh stabilitas sistem keuangan. Sepanjang Tahun 2017, fundamental stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di level normal-stabil didukung oleh persepsi investor yang positif terhadap prospek perekonomian Indonesia serta tingkat kepercayaan terhadap resiliensi sistem keuangan Indonesia. Hal tersebut salah satunya nampak dari hasil *Financial System Assessment Program* (FSAP) dimana Indonesia dinilai telah berhasil dalam melaksanakan reformasi di sektor jasa keuangan, diantaranya penguatan pengawasan sektor keuangan, jaring pengaman keuangan dan protokol manajemen krisis, serta pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan. Penguatan pengawasan dan pengaturan pada sektor keuangan dilakukan melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial agar dapat mencegah dan memitigasi perilaku sistem keuangan yang pro terhadap siklus ekonomi (prosiklikalitas) dan risiko sistemik.

Kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan, dimana fokus kebijakan tidak hanya pada lembaga keuangan saja, namun juga mencakup elemen sistem keuangan lainnya seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga dan infrastruktur keuangan. Sementara itu, kebijakan mikroprudensial dapat memitigasi risiko yang dihadapi dari institusi keuangan dengan mengukur tingkat kesehatan dan kinerja dari institusi keuangan. Koordinasi yang kuat antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dapat menjaga terciptanya stabilitas dan ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh.

b. Perkembangan Ekonomi Indonesia

Secara umum, pertumbuhan ekonomi sejak Tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan kinerja yang relatif baik meskipun sempat mengalami penurunan di Tahun 2014 dan 2015 yang merupakan periode konsolidasi berakhirnya masa *commodity boom*. Namun demikian, sejak akhir Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi

menunjukkan perbaikan yang didorong membaiknya permintaan domestik (domestic demand) dan pertumbuhan perdagangan internasional yang sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi global. Sinyal perbaikan ekonomi terlihat dari kinerja investasi dan ekspor serta impor yang tumbuh tinggi di akhir Tahun 2016 dan berlanjut hingga sepanjang Tahun 2017. Penguatan kinerja ekonomi di Tahun 2017 terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi. Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi global mendukung kinerja perdagangan internasional yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian domestik. Sementara kontribusi konsumsi masyarakat masih cukup tinggi meskipun sedikit mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian dengan rata-rata sumbangan sebesar 57,3 % dan tumbuh rata-rata 5,1 % pada periode 2013-2017. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPR sempat mengalami penurunan hingga Tahun 2015 dan kemudian meningkat pada Tahun 2016 dan 2017. Kinerja tersebut antara lain didukung oleh tingkat inflasi yang relatif rendah dan terkendali. Meski demikian, pertumbuhan konsumsi 2016-2017 tersebut masih di bawah rata-rata tingkat pertumbuhannya pada periode 2013-2017. Hal ini diperkirakan adanya faktor pergeseran preferensi konsumsi masyarakat ke investasi, khususnya di kalangan menengah ke atas. Kondisi ini diindikasikan oleh beberapa hal seperti peningkatan kepemilikan domestik di dalam pasar saham, SBN, serta peningkatan DPK, terutama tabungan dan simpanan berjangka.

Pada periode yang sama, pertumbuhan konsumsi Pemerintah bergerak relatif dinamis sejalan dengan program-program Pemerintah. Dengan kontribusi rata-rata sekitar 9,5 % terhadap ekonomi, konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh cukup tinggi pada Tahun 2013 dan 2015, namun mengalami kontraksi pada Tahun 2016. Pelemahan pertumbuhan ini terkait adanya penyesuaian belanja nonproduktif guna meningkatkan kualitas belanja tidak

hanya dalam jangka pendek namun juga dalam jangka panjang. Di samping itu, alokasi belanja produktif dan pola penyerapan anggaran yang lebih baik memberikan stimulasi terhadap kinerja perekonomian domestik di tengah tekanan ekonomi global.

PMTB memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian nasional. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi PMTB terhadap perekonomian mencapai 32,4 %. Pada Tahun 2017, PMTB mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan dan tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi sejak Tahun 2013. Kondisi ini terutama didorong oleh keberlanjutan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur Pemerintah dan BUMN serta masih tingginya ekspansi belanja modal korporasi swasta untuk investasi proyek fisik. Pada gilirannya, masifnya pembangunan infrastruktur dan proyek fisik swasta menjadi faktor pemicu dalam penguatan impor barang modal baik untuk mendukung keperluan bangunan maupun dalam bentuk mesin-mesin, perlengkapan serta peralatan lainnya. Perbaikan iklim investasi dan peningkatan tata kelola Pemerintahan yang terus diupayakan Pemerintah melalui deregulasi, simplifikasi maupun harmonisasi turut memberikan andil dalam penguatan PMTB yang berasal dari investasi langsung PMA dan PMDN. Peningkatan sovereign credit rating dan perbaikan peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)* secara konsisten juga turut memberikan dampak positif dalam peningkatan PMTB.

Sementara itu, kinerja ekspor dan impor mengalami tekanan yang cukup berat pada periode 2013-2016, yang mana pertumbuhan kedua komponen tersebut terus menurun bahkan mengalami kontraksi pada Tahun 2015 dan 2016. Faktor utama yang mendorong pelemahan tersebut adalah penurunan permintaan global. Namun, sejak kuartal akhir 2016 hingga 2017, kenaikan permintaan barang dari negara mitra dagang utama (major trading partner/MTP) mendorong perbaikan kinerja perdagangan internasional. Sementara itu, peningkatan impor didukung oleh peningkatan permintaan domestik akan barang modal dan bahan

baku, khususnya untuk menopang kinerja pertumbuhan sektor sekunder.

Dari sisi produksi, pada periode 2013-2015 kinerja perekonomian secara umum mengalami perlambatan, kemudian mulai mengalami titik balik perbaikan di Tahun 2016 dan 2017. Sepanjang periode tersebut kinerja sektor primer tumbuh relatif rendah, Sektor Industri Pengolahan tumbuh relatif stabil, dan Sektor Jasa-jasa tumbuh cukup tinggi.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian dengan rata-rata sebesar 13,4 % dalam lima tahun terakhir, meskipun secara umum mengalami tren pertumbuhan yang melambat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,9 %. Tren perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor cuaca yang kurang menguntungkan termasuk adanya fenomena alam seperti el nino dan la nina yang mengganggu siklus produksi, khususnya untuk tanaman pangan dan hortikultura. Meskipun demikian, Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan, melakukan perbaikan tata niaga, serta menjamin kelancaran distribusi sehingga harga pangan relatif terjangkau.

Selain itu kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga dipengaruhi oleh subsektor tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao yang sempat mengalami perlambatan akibat penurunan ekspor sebagai dampak pelemahan permintaan global. Sementara itu, subsektor Perikanan kinerjanya masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan sektor Pertanian secara keseluruhan didukung oleh peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya serta upaya penegakan hukum di bidang perikanan.

Sementara itu, Sektor Pertambangan dan Penggalan masih dalam tingkat pertumbuhan yang relatif rendah dengan tumbuh rata-rata sebesar 0,2 % dalam lima tahun terakhir, bahkan sempat mengalami pertumbuhan negatif pada 2015, sebelum kembali tumbuh positif di dua tahun berikutnya seiring dengan membaiknya permintaan global. Fluktuasi harga komoditas tambang seperti

batubara, minyak, dan logam menjadi faktor dominan lemahnya kinerja sektor ini. Selain itu, implementasi kebijakan hilirisasi produk mineral tambang pada jangka pendek sempat berdampak pada menurunnya tingkat produksi mineral dan logam pada Tahun 2014. Namun pada periode selanjutnya berdampak pada hilirisasi produk mineral tambang melalui pembangunan beberapa smelter logam.

Perlambatan di Sektor Pertambangan juga disebabkan oleh penurunan kinerja di sektor hulu migas. Dalam periode 2013-2017, produksi dan lifting minyak dan gas bumi menunjukkan tren penurunan. Secara umum tren penurunan ini disebabkan oleh turunnya produksi alamiah akibat kondisi sumursumur produksi dan fasilitas operasi yang telah mature dan menua, sementara kegiatan eksplorasi yang dilakukan kurang menghasilkan cadangan baru yang memadai. Rendahnya harga minyak dalam beberapa tahun terakhir juga menyebabkan penurunan aktivitas investasi di hulu migas akibat banyaknya proyek yang tidak dapat memenuhi tingkat keekonomian. Di samping itu, beberapa blok/wilayah kerja akan memasuki masa terminasi dan belum mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak kerjasama menjadi disinsentif dalam melakukan investasi dan aktivitas pengeboran.

Dalam periode 2013-2017, Sektor Industri Pengolahan tumbuh rata-rata sebesar 4,4 % dan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian, yakni mencapai 20,8 %. Kinerja dimaksud relatif rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan industri pengilangan migas. Kondisi tersebut sejalan dengan penurunan produktivitas kilang-kilang migas yang ada. Di sisi lain, kinerja industri nonmigas masih tumbuh positif ditopang oleh industri dengan basis pasar domestik yang besar antara lain industri makanan, kimia, mesin dan industri logam dasar. Meskipun demikian, perkembangan industri nonmigas juga dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi global dan harga komoditas. Hal ini tercermin dari kinerja industri berbasis komoditas seperti industri karet, kayu,

furnitur, serta tekstil yang tumbuh relatif rendah sejalan dengan kinerja ekspor nasional.

Pemerintah terus berupaya mendorong penguatan Sektor Industri Pengolahan antara lain melalui berbagai paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan sejak awal Tahun 2015. Hal ini mencakup upaya kemudahan investasi, perbaikan infrastruktur khususnya logistik pelabuhan, dan pengaturan harga gas untuk mendukung pertumbuhan industri hilir. Selain itu dari sisi insentif fiskal, Pemerintah juga menyempurnakan kerangka insentif penanaman modal seperti *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, insentif bea keluar, serta pemberian fasilitas fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri. Berbagai upaya tersebut telah mendorong proses peningkatan nilai tambah serta jumlah ragam produk, misalnya pada industri hilir kelapa sawit.

Lebih jauh, kinerja pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yang masih berada di bawah level nasional menyebabkan kontribusinya terhadap perekonomian dalam tren menurun. Meski demikian, kondisi tersebut relatif sejalan dengan tren penurunan kontribusi manufaktur secara global. Fenomena global dimaksud didukung oleh data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa 100 dari 124 negara mengalami penurunan kontribusi manufaktur.² Salah satu penyebab utama terjadinya kondisi tersebut adalah rantai nilai (*value chain*) produksi yang lebih terfragmentasi dan membesarnya nilai tambah jasa dalam input dan output manufaktur atau sering disebut dengan istilah *servicification*. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas jasa yang terkait manufaktur seperti kegiatan desain, riset dan pengembangan, serta purnajual. Dengan demikian, meskipun kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan, namun kondisi tersebut belum membuktikan adanya gejala deindustrialisasi prematur.

Sejalan dengan fenomena tersebut, kondisi sektor-sektor jasa di Indonesia juga menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional, khususnya pada Sektor Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Keuangan.

Sektor Informasi dan Telekomunikasi tumbuh rata-rata 9,8 % yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi digital. Sementara itu, Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh rata-rata sebesar 7,4 % didukung oleh perbaikan konektivitas nasional dan penambahan jumlah layanan rute angkutan serta layanan pengiriman barang. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh rata-rata sebesar 7,3 % didorong oleh penyaluran kredit perbankan dalam mendukung aktivitas perekonomian.

Sektor jasa lain yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Sektor Perdagangan dengan sumbangan rata-rata sebesar 13,2 %. Namun demikian, kinerja sektor tersebut tumbuh relatif lambat searah dengan kinerja industri domestik. Selain itu, perkembangan sektor ini sejalan dengan dinamika perdagangan global yang tercermin dari kinerja ekspor dan impor nasional.

Memasuki Tahun 2018, kinerja perekonomian nasional pada triwulan I tumbuh sebesar 5,1 % atau meningkat dibandingkan periode yang sama Tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,0 %. Dari sisi pengeluaran, konsumsi dan investasi masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga tumbuh stabil dengan dukungan tingkat inflasi yang terjaga (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019).

c. Prospek Perekonomian Daerah Sulawesi Tengah

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro di tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 diperkirakan akan mengalami kontraksi pada kisaran 6 sampai dengan 6,5 persen sebagai konsekuensi akibat dampak bencana gempa, tsunami dan liquifaksi dengan asumsi-asumsi, sebagai berikut :

1. Kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran akan menunjukkan trend negatif seiring dengan batalnya beberapa even internasional dan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah pasca bencana. Diantaranya even internasional yang batal

dilaksanakan yaitu Tour De Central Celebes (TDCC) ke-2 Tahun 2018 yang sebenarnya telah mendapat pengakuan dari Union Cyclisle Internationale (UCI) untuk masuk dalam agenda tahunan. Even TDCC Tahun 2018 direncanakan mengundang ribuan pesepeda mancanegara untuk menyusuri 5 etape melewati enam kabupaten dan Kota Palu. Selain itu, even-even nasional yang bertopik wisata budaya dan pesisir seperti Festival Pesona Palu Nomoni (FPPN) Kota Palu batal juga dilaksanakan karena bertepatan dengan persitiwa gempa, tsunami liquifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigimoutong pada tanggal 28 September 2018. Peningkatan jumlah wisatawan yang menggerakkan sektor perdagangan, hotel dan restoran berasal dari destinasi wisata kabupaten yang tidak terkena dampak bencana seperti Kepulauan Togean, Danau Poso, cagar budaya Lore Lindu serta wisata alam dan bahari di Kabupaten Banggai sekitarnya.

Di tahun 2019, Sulawesi Tengah akan bangkit dengan melakukan pemulihan cepat dan rekonstruksi untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai persiapan menyambut wisatawan mancanegara dan domestik dengan destinasi edukasi wisata bencana di wilayah terdampak dan destinasi wisata wilayah Sulawesi Tengah lainnya.

2. Walaupun mendapatkan dampak bencana yang menimbulkan kerugian dan kerusakan Sektor Ekonomi Sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terus digenjot produktivitasnya melalui program Upaya Khusus (UPSUS) terdiri atas UPSUS PAJALA (Padi, Jagung dan Kedelai) dan UPSUS BABE (Bawang Merah dan Cabe) yang dilakukan untuk mendukung Program Swasembada Pangan Indonesia dan Sulawesi Tengah sebagai salah satu Lumbung Pangan Nasional serta UPSUS SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) dan Program Unggulan Sulteng Sejuta Sapi (S3) yang dilakukan sebagai

dukungan Sulawesi Tengah merealisasikan komitmen pemerintah mengejar swasembada sapi pada tahun 2026 serta mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, akan diperhatikan pembangunan dan pemantapan infrastruktur jalan dan irigasi yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perlu juga diperhatikan jadwal tanam, benih berkualitas, pupuk, pestisida dan lahan penggembalaan.

3. Subsektor perikanan dan kelautan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif mengingat besarnya dukungan pemerintah terhadap sektor kemaritiman serta besarnya potensi sektor perikanan dan kelautan Sulawesi Tengah. Di dukung dengan penetapan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah percontohan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengembangan SLIN yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Donggala dan Ogotua diharapkan menciptakan stabilitas harga di tingkat nelayan maupun konsumen dan sekaligus dapat menekan laju inflasi, membuka peluang pengembangan industri olahan, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah sangat besar mengingat Sulawesi Tengah sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP-RI 713 di Selat Makassar, WPP-RI 714 di Teluk Tolo, WPP-RI 715 di teluk Tomini serta WPP 716 di Laut Sulawesi.
4. Sektor konstruksi akan terus tumbuh terpacu karena Sulawesi Tengah memiliki Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pasca Bencana yang ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana kota/kabupaten yang menjadi acuan rehabilitasi dan

pembangunan kembali kerusakan fasilitas umum, diantaranya seperti jembatan Palu V, jalan arteri dan rehabilitasi Prasarana Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Pelabuhan Pantoloan, serta rehabilitasi rukan di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Doonggala. Disamping itu, untuk wilayah tidak terdampak akan dilakukan pembangunan lanjutan yang bersifat tahunan (multiyears), seperti pembangunan Bandara di Banggai Laut, Bandara Maleo di Morowali, Bandara Tanjung Api di Tojo Una Una, Bandara Kasiguncu di Poso, Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, Bandara Sultan Bantilan Tolitoli. Pada tahun 2019, pembangunan Bandara di Kabupaten Banggai Laut akan dilaksanakan dan dengan demikian Provinsi Sulawesi Tengah sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki 7 bandara. Sedangkan Bandara Tanjung Api di Tojo Una Una terus dibenahi sebagai pintu utama masuknya wisatawan yang akan ke Kepulauan Togean dan sekitarnya serta Bandara Kasiguncu di Poso telah membuka rute penerbangan domestik untuk Poso-Makasar-Jakarta PP dengan jenis pesawat Wings ATR 72-500.

5. Investasi diperkirakan meningkat terutama dalam sektor pertambangan, minyak dan gas bumi yang ditunjukkan dengan berlangsungnya operasi smelter feronikel di Morowali dan Morowali Utara yang telah beroperasi semenjak tahun 2017, telah beroperasinya PT Dongi-Sinoro LNG di Kabupaten Banggai serta industri pengolahan berbasis agro di Palu seperti Pusat Inovasi Rotan Nasional (Pirnas) dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pada tahun 2019 akan dilakukan pembenahan kembali pasca bencana. Meningkatnya investasi juga dipengaruhi oleh masuknya listrik yang berasal dari PLTA Sulewana. Momentum peningkatan investasi tersebut harus terus dijaga dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan efisiensi perizinan dan pelayanan investasi dengan sistem *on-line* serta penyelesaian *bottleneck* infrastruktur.

d. Proyeksi Kebijakan Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2020

Berdasarkan kondisi makro global, nasional, regional Sulawesi Tengah, dan Kota Palu ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada 2020 adalah 5,0 – 5,5 % lebih rendah jika dibandingkan dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar sebesar 6,5 %. Penurunan proyeksi tersebut merupakan dampak dari bencana alam yang terjadi pada tahun 2018. Laju inflasi 3 - 4 %. PDRB per kapita riil sebesar Rp.52.000.000,- dan penduduk miskin sebesar 5% - 6,5 % dari penduduk Kota Palu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5-5,5%, indeks pembangunan manusia sebesar 80,5, dan rasio gini diproyeksi berada di interval 0,355 - 0,36.

e. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu

Berdasarkan pada kondisi perekonomian global, nasional, dan Sulawesi Tengah tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa selain beberapa hambatan yang akan dihadapi, terdapat banyak peluang yang akan menjadi daya dorong bagi perekonomian Kota Palu dalam tahun mendatang. Ekspor impor Sulawesi Tengah yang selama ini lewat pelabuhan Pantoloan dan bandara Mutiara membuka berbagai peluang usaha di Kota Palu, demikian pula dengan investasi di Sulawesi Tengah, walaupun lokus investasi bukan di wilayah Palu, namun tingginya laju investasi memberikan banyak peluang berusaha di Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Berbagai peluang ini perlu untuk segera disikapi dengan cermat.

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Langkah-langkah pengamanan yang perlu dilakukan untuk meredam laju inflasi di daerah antara lain dengan menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat serta dengan

menjaga harga berbagai komoditas vital agar tetap stabil, terutama menghadapi *shock* musiman seperti bulan Juni sebagai tahun ajaran baru, bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha demikian juga dengan Natal, dan Tahun Baru.

Seiring dengan perkembangan kondisi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi, (3) mengatur laju pertumbuhan penduduk, (4). Pengurangan angka kemiskinan, (4). Menurunkan tingkat pengangguran, (5) Peningkatan PDRB per kapita riil, dan (6). Penurunan indeks gini ratio. Sebagai upaya agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

Perekonomian Kota Palu yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada 2017 mencapai 20,6 triliun Rupiah. PDRB ADHB tersebut menggambarkan pendapatan regional sebagai nilai produksi barang dan jasa yang diciptakan selama satu tahun. Atau dengan kata lain, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Total PDRB dihitung dengan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk itu belanja pemerintah daerah pada APBD harus benar-benar dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian di Kota Palu. APBD harus tepat sasaran agar efektif menstimulasi peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, mendorong investasi masuk, terbukanya lapangan kerja.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJMD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan program prioritas dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019 Kota Palu sebagai pelaksanaan agenda di tahun ketiga P-RPJMD Tahun 2016 - 2021, merupakan anggaran kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dibiayai melalui APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dibiayai melalui APBN.

Kontribusi pendapatan daerah berdasarkan data realisasi pendapatan Tahun 2017-2019 serta proyeksi pendapatan Tahun 2020-2021, disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Palu Tahun 2017 s.d Tahun 2021

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
[1]	[2]	[4]	[6]	[7]		
1,1	Pendapatan asli daerah	284.380.010.205,58	289.143.528.286,00	181.248.113.850,05	199.080.761.531,00	297.286.349.598
1.1.1	Pajak daerah	114.598.205.203,05	120.960.000.000,00	67.481.339.452,00	96.255.000.000,00	
1.1.2	Retribusi daerah	14.316.839.150,00	17.684.650.285,00	13.751.205.217,05	12.439.651.400,00	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	152.928.855.721,53	147.962.767.870,00	97.479.459.050,00	87.850.000.000,00	
1,2	Dana Perimbangan	1.005.531.456.956,00	980.717.351.083,65	974.440.359.000,00	974.440.359.000,00	1.009.002.390.087,67
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	33.148.908.973,00	46.875.233.600,00	41.694.519.000,00	41.694.519.000,00	50.625.252.288,00
1.2.1.1	Dana alokasi umum	671.600.535.000,00	671.600.535.000,00	706.850.885.000,00	706.850.885.000,00	678.316.540.350,00
1.2.1.2	Dana alokasi khusus	223.267.702.235,00	196.628.553.202,00	225.894.955.000,00	225.894.955.000,00	207.553.596.360,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi					
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Lainnya	77.514.310.748,00	65.613.029.281,65			72.507.001.089,67
1,3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	50.735.815.472,00	63.771.280.000,00	146.817.597.433,20	137.817.597.433,20	22.192.500.000,00
1.3.1	Hibah	42.885.815.472,00	43.066.280.000,00	38.720.722.082,00	38.720.722.082,00	
1.3.2	Dana darurat	-	-			
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya			56.316.117.351,20	56.316.117.351,20	
1.3.4	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	350.000.000,00	1.955.000.000,00			3.255.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			51.780.758.000,00	42.780.758.000,00	
	Dana Penyesuaian	7.500.000.000,00	18.750.000.000,00			18.937.500.000,00
	Dana Insentif Daerah					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	1.340.647.282.633,58	1.333.632.159.369,65	1.302.506.070.283,25	1.328.481.239.686,02	1.328.481.239.686,02

Sumber : BPKAD Kota Palu dan P-RPJMD Kota Palu 2016-2021

Berdasarkan Tabel 3.8, realisasi pendapatan daerah Kota Palu pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.340.647.282.633,58 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2018 yang mengalami penurunan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.333.632.159,64. Pada tahun 2019 diproyeksi penurunan pendapatan sebesar -2,33% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp. 1.302.506.070.283,25. Sementara, Tahun 2020 diasumsikan naik sebesar 1,99% atau menjadi Rp.1.328.481.239.686,02 dimana asumsi tersebut sama dengan Tahun 2021.

Kondisi realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 284.380.010.205,58 dengan kontribusi sebesar 21,21% terhadap total pendapatan daerah. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp.4.763.518.083,65 dari Tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 21,68% terhadap total pendapatan daerah. Tahun 2019 proyeksi pendapatan asli daerah turun 37,32% menjadi Rp. 181.248.113.850,05 akibat dari bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang telah mengakibatkan kerusakan pada objek-objek potensial penerimaan asli daerah seperti hotel, restoran, dll. Selanjutnya, asumsi pendapatan asli daerah Tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 199.080.761.531,00.

Untuk dana perimbangan yang merupakan transfer pemerintah pusat, menunjukkan penurunan pertumbuhan dalam kurun waktu 2017 – 2019. Hal ini terlihat dari jumlah dana perimbangan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.005.531.456.956,00 berkontribusi sebesar 75% terhadap total pendapatan daerah di Tahun 2017. Tahun 2018 terjadi penurunan sebesar -1,46 menjadi Rp. 980.717.351.083,65. Tahun 2019 kontribusi dana perimbangan sebesar 74,81%, secara %tase terjadi peningkatan kontribusi dana perimbangan dibandingkan jumlah pendapatan namun jumlah dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp. 6.276.992.083,00 dari Tahun 2018. Rata – rata kontribusi dana perimbangan dari Tahun 2017 - 2019 sebesar 74,45%. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan selama tiga tahun terakhir dominasi dana perimbangan relatif masih besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kota Palu.

Lain-Lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya serta dana insentif daerah. Melihat perkembangan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Tabel 3.8 cenderung mengalami fluktuasi kontribusi dalam total pendapatan. Tahun 2017, total lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 50.735.815.472,00 berkontribusi sebesar 3,78% terhadap total pendapatan. Sementara Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 20,44% menjadi Rp. 63.771.280.000,00 atau berkontribusi pada pendapatan daerah sebesar 4,78%. Selanjutnya, Tahun 2019 total lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 146.817.597.433,00 atau berkontribusi sebesar 11,27% terhadap total pendapatan.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Isu-isu strategis tentang penerimaan daerah (pendapatan daerah) dan pengeluaran daerah (belanja daerah) adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapabilitas penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, dari sisi pengeluaran adalah bagaimana meningkatkan kondisi pengeluaran daerah (belanja daerah) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya.

Pengalokasian ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan sebagai berikut :

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan

sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.

3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatan peran OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja

pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka arah kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah Tahun 2020 diarahkan pada:

- a. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- c. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.
- d. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian objek penerimaan melalui penyempurnaan serta peningkatan (i) proses perhitungan, (ii) penetapan regulasi dan besaran, (iii) peningkatan akurasi data, (iv) efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.
- e. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
- f. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

dalam rangka mengeleminir sanksi dari pemerintah serta untuk lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

Untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Palu melakukan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
2. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan demi terciptanya efektifitas dan efisiensi.
3. Perbaiki pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Meningkatkan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
6. Memutakhirkan data potensi.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
8. Melakukan Evaluasi secara periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, melalui pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah (i) Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; (iii) Peningkatan efektivitas pengawasan PDRD.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 sesuai dengan kewenangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah Tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Alokasi belanja tidak langsung pada Tahun 2017 sebesar 43,03% sementara belanja langsung sebesar 56,97%. Selanjutnya, Tahun 2018 pemanfaatan pendapatan daerah untuk belanja tidak langsung turun sebesar -1,98% menjadi 41,06% sedangkan belanja langsung terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 58,94%. *Trend* penurunan belanja tidak langsung berlanjut hingga tahun 2019 dimana diproyeksikan terjadi penurunan sebesar 0,22% menjadi Rp. 574.051.316.489,00.

Proyeksi belanja Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta realisasi belanja daerah pada Tahun 2017 s.d 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Palu
Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2020	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2021
[1]	[2]	[4]	[6]	[7]		
2,1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	522.746.643.500,00	565.975.086.943,03	561.284.151.589,00	561.284.151.589,00	584.660.524.219,75
2.1.2	Belanja bunga	2.854.856.395,00	1.000.000.000,00			3.092.314.273,56
2.1.3	Belanja subsidi	-	-			-
2.1.4	Belanja hibah	5.580.834.500,00	7.468.950.500,00	10.029.436.000,00	10.029.436.000,00	6.513.751.286,04
2.1.5	Belanja bantuan sosial	4.062.756.000,00	48.747.500,00			4.248.674.888,44
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	619.470.000,00	737.728.900,00	737.728.900,00	737.728.900,00	686.401.927,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.668.482,00	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.649.234.279,23
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	535.867.228.877,00	576.830.513.843,03	574.051.316.489,00	574.051.316.489,00	600.850.900.874,02
2,2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	56.910.254.209,00	78.040.351.948,91	70.190.087.000,00	65.001.142.912,73	65.001.142.912,73
2.2.2	Belanja barang dan jasa	401.311.517.073,68	449.958.199.281,70	405.073.031.061,00	408.513.065.223,32	408.513.065.223,32
2.2.3	Belanja modal	251.100.514.011,00	300.039.161.312,29	356.187.854.830,06	291.205.120.249,05	291.205.120.249,05
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	709.322.285.293,68	828.037.712.542,90	831.450.972.891,06	764.719.328.385,10	764.719.328.385,10
C	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.245.189.514.170,68	1.404.868.226.385,93	1.405.502.289.380,06	1.338.770.644.874,10	1.365.570.229.259,12

Sumber : BPKAD Kota Palu, 2019 dan P-RPJMD Kota Palu 2016-2021 (Diolah)

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif, dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

1. Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; Sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
2. Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional, realistis, dan proporsional.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas sumber penerimaan dan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dan optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2020 adalah bersumber dari Silpa tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya harus secara selektif dan merupakan pilihan akhir apabila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD atau Perubahan APBD tidak mencukupi.

Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran, dioptimalkan melalui kekuatan APBD sendiri sebagaimana arahan pengelolaan keuangan daerah, diimplementasikan melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu. Proyeksi keuangan daerah pada Tahun 2020 bagi kebutuhan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran sangat memungkinkan berasal dari kekuatan APBD sendiri. Sumber sisa lebih anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100 %; dan
2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari anggaran pendapatan daerah, dalam konteks proyeksi keuangan daerah/proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi sebagaimana di atas (kebijakan pendapatan daerah) memberikan peluang terlampauinya target pendapatan daerah tersebut.

Hasil analisis proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun terakhir, proyeksi, dan target tahun rencana serta satu tahun setelah tahun rencana 2020 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Pembiayaan dan Proyeksi Target Pembiayaan
Daerah Kota Palu

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2019	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2020	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2020
[1]	[2]	[4]	[5]	[7]		
3,1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	32.536.677.560,38	25.592.233.854,58	102.996.219.096,81	10.289.405.188,08	30.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.536.677.560,38	25.592.233.854,58	102.996.219.096,81	10.289.405.188,08	30.000.000.000,00
3,2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3.187.500.000,00	6.000.000.000,00	-	-	6.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	26.800.000.000,00	19.500.000.000,00	-	-	-
3.2.4	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	970.181.489,00	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.957.681.489,00	25.500.000.000,00	-	-	6.500.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	1.578.996.071,38	92.233.854,58	102.996.219.096,81	10.289.405.188,08	23.500.000.000,00

Sumber : BPKAD Kota Palu, 2019 dan P-RPJMD Kota Palu 2016-2021

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Palu

Pembangunan pada hakikatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat. Sehingga pembangunan harus direncanakan secara matang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Oleh karena itu, pembangunan sesungguhnya menyelesaikan masalah bukan memperbanyak masalah. Berdasarkan masalah yang terjadi melahirkan isu strategis pembangunan di Kota Palu.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa isu strategis yang akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan Kota Palu selama periode P-RPJMD antara lain. Selanjutnya isu strategis Kota Palu sebagai berikut :

1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

Pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 dengan magnitudo 7,4 SR berdampak pada kerusakan 66.169 unit rumah, korban jiwa baik yang hilang maupun ditemukan meninggal dunia berjumlah 4.198 jiwa, puluhan ribu masyarakat mengungsi, kerusakan gedung pemerintahan, infrastruktur, asset privat, serta

fasilitas publik sempat melumpuhkan semua sektor termasuk perekonomian.

Secara umum, total penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu sebesar Rp. 6.982.073.629.477,- terdiri atas 5 (lima) sektor, yakni: Permukiman, Infrastruktur, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor. Nilai kerusakan sektor perumahan sebesar Rp. 2.903.250.000.000,- yang merupakan nilai atas kerusakan 12.854 unit rumah baik rusak ringan, sedang, dan berat, serta nilai kerugian atas kerusakan tersebut Rp. 469.175.030.000,-. Sektor infrastruktur mengalami kerusakan sebesar Rp. 282.311.175.204,- dan Rp. 50.611.920.000,- untuk nilai kerugian. Sektor sosial yang termasuk didalamnya subsektor kesehatan, pendidikan, agama, dan perlindungan sosial Rp. 544.674.256.250,- untuk nilai kerusakan dan Rp. 43.838.753.084,- kerugian. Jumlah kerusakan sektor ekonomi dan lintas sektor masing-masing Rp. 1.954.793.627.000,- dan Rp. 233.639.156.250,- serta kerugian sebesar Rp. 489.856.739.689,- dan Rp. 10.073.722.000,- (Jitupasna Kota Palu, 2018).

Berdasarkan penilaian akibat serta analisis dampak pascabencana diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu sektor permukiman 4.775.787.889.120, sektor infrastruktur Rp. 9.052.938.399.993, sektor sosial Rp. 1.489.719.675.330, sektor ekonomi Rp. 3.109.292.026.559, dan lintas sektor Rp. 503.559.343.250 yang secara keseluruhan mencapai Rp. 18.931.297.334.252,- (Jitupasna Kota Palu, 2018).

Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, telah disusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020. Termuat didalamnya pengkajian kebutuhan pemulihan wilayah pascabencana hingga penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

2. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Daerah

Sistem informasi sudah menjadi isu nasional maupun internasional sebagai salah satu pendukung keputusan dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan valid akan menghasilkan keputusan strategis yang tepat sasaran dan efisien dalam pengalokasian sumberdaya. Selain ketepatan dalam proses perencanaan, sistem informasi daerah yang terintegrasi antar bagian dalam organisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kondisi saat ini, pemerintah daerah Kota Palu masih termasuk lemah dalam penyiapan informasi berkaitan dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Tidak terintegrasinya sistem informasi pemerintah ditingkat bawah dalam hal ini kelurahan dan kecamatan hingga koordinasi antar instansi pemerintah, menyebabkan lemahnya perencanaan pembangunan dalam hal efektifitas target dan sasaran serta efisiensi anggaran yang akan digunakan. Selain itu, hal ini akan berdampak pada mekanisme efektivitas evaluasi dan monitoring kegiatan pemerintah yang diharapkan akan menjadi kontrol pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya pemerintah Kota Palu untuk mewujudkan *smart city* melalui penyediaan sistem informasi yang berkualitas. Peningkatan kualitas sistem informasi daerah dimaksudkan untuk dapat menyiapkan data yang terintegrasi pada seluruh bagian pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah terkecil yaitu kelurahan, kecamatan serta satuan kerja perangkat daerah Kota Palu.

Ketersediaan data harus didukung oleh teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Upaya peningkatan sistem informasi daerah Kota Palu, selain menyediakan data juga menyediakan sistem informasi berbasis GIS yang dapat melacak data pada tingkatan satuan terkecil. Pemanfaatan GIS sebagai basis data akan menghasilkan data *by name, by address* pada tiap potensi sumberdaya yang dimiliki daerah.

Pemerintah Kota Palu dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem informasi daerah, perlu membangun sinergitas antar bagian pemerintahan melalui data terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembentukan pusat data dan informasi menjadi bagian penting untuk segera diwujudkan. Pusat data yang dibangun akan berperan dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan data yang ada di masing sub sistem informasi pada tiap kelurahan, kecamatan, dan PD.

Capaian akhir yang diharapkan dalam isu strategis ini adalah menciptakan sistem informasi yang terintegrasi antara seluruh bagian tata kelola pemerintahan dari tingkat PD, Kecamatan hingga kelurahan. Dengan terintegrasinya sistem informasi potensi sumberdaya daerah maka pengambilan keputusan pimpinan dalam perencanaan pembangunan yang di lakukan akan lebih tepat target dan sasarannya. Hasil akhirnya adalah efesiensi dan efektifitas pengalokasian dana pembangunan yang tepat sasaran.

3. Pembangunan Pendidikan berkualitas dan Terjangkau

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan, yang salah satunya dicerminkan oleh kemudahan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan pendidikan dasar. Selain ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar juga harus melihat pemerataan pada masing-masing wilayah. Kondisi saat ini tingkat pemerataan yang masing kurang berimbang khususnya pada wilayah Kecamatan Ulujadi, Tawaeli, Palu Utara, dan Kecamatan Palu Barat. Upaya pemerintah Kota Palu dalam menyediakan sarana dan prasarana akan di arahkan pada empat wilayah kecamatan tersebut.

Selain sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan juga masih banyak terkendala dari sisi jumlah maupun kualitas. Sama halnya dengan pemerataan sarana prasarana pendidikan di atas, penguatan layanan pendidikan di Kota Palu juga di arahkan melalui pemerataan sumberdaya aparatur pendidikan. Upaya peningkatan kapasitas pendidik perlu diupayakan, khususnya bagi pendidikan menengah pertama yang

berbasis kejuruan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menciptakan anak didik yang mampu melakukan pengolahan sumberdaya potensi lokal, karena saat ini sumberdaya potensi lokal belum optimal di kelola dikarenakan keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan sumberdaya manusia yang mengelola.

Isu strtagis yang dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan pendidikan adalah meningkatkan aksesibilitas seluruh masyarakat Kota Palu pada layanan pendidikan. Pemerintah Kota Palu harus mampu menciptakan layanan pendidikan murah, mudah dan berkualitas, sehingga akan meningkat partisipasi masyarakat pada pendidikan di Kota Palu.

Peningkatan pendidikan masyarakat tidak boleh lepas dari peningkatan pemahaman akan budaya dan adat. Nilai-nilai luhur budaya saat ini harus tercermin dalam pola pendidikan Kota Palu. Dalam konsep pengembangan pendidikan, seorang pengajar tidak hanya melakukan tugas pengajaran namun juga terdapat tugas mendidik siswa melalui penanaman norma-norma budaya dan adat yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, program penguatan adat dan budaya di lingkungan pendidikan dasar harus dilakukan melalui, pemberdayaan sanggar seni pada tiap-tiap sekolah

4. Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

Memberikan pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat ditujukan untuk dapat meningkatkan cakupan layanan masyarkat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kota Palu yang merupakan tugas utama pemerintah untuk dapat mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang tinggi.

Kualitas kesehatan masyarakat dapat di ukur dari kemampuan masyarakat menjangkau layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Upaya pemerintah dalam mempermudah aksesibilitas masyarakat pada layanan kesehatan adalah mengupayakan ketersediaan jumlah sarana kesehatan, meringankan biaya pelayanan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Selain ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Semakin besar *universal coverage* jaminan kesehatan akan memungkinkan semakin banyak masyarakat miskin kota yang akan menerima layanan kesehatan berkualitas.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat selain meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman kesehatan kepada masyarakat melalui program-program promosi kesehatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan didorong dengan upaya masyarakat menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga. Ketersediaan sanitasi yang memadai, jaringan air bersih yang digunakan, pengolahan limbah keluarga serta pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga.

5. Kemiskinan Kota

Seperti yang di amanahkan dalam pembangunan nasional bahwa penanganan kemiskinan merupakan tugas yang harus dilakukan lintas sektor dalam pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kota Palu telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan beberapa sektor terkait dalam sebuah rancangan penanggulangan kemiskinan, telah mampu menurunkan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan Kota Palu paling rendah dibandingkan seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah. Tahun 2011 angka kemiskinan Kota Palu sebesar 9,24 %, pada Tahun 2011 – 2012 pertumbuhan angka kemiskinan menurun 7,1 % menjadi 8,58 %. Pertumbuhan penurunan angka kemiskinan Tahun 2012 – 2013 menurun sangat signifikan yaitu sebesar 15,6 %. Namun pada Tahun 2013 – 2014 pertumbuhan penurunan angka kemiskinan menjadi lebih kecil atau sedikit mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 2,6 %. Selanjutnya

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari

Tahun 2016 sebesar 7,06 % atau sebanyak 26.240 jiwa menjadi 6,74 % atau setara dengan 25.490 jiwa. Menurunnya angka kemiskinan merupakan angka kemiskinan terendah selama delapan tahun terakhir. Pada Tahun 2011 tingkat kemiskinan Kota Palu sebesar 9,24 %. Terus mengalami penurunan hingga Tahun 2014 sebesar 7,05 %. Namun, pada Tahun 2015 terjadi kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,37 % dari tahun sebelumnya yakni 7,05 % menjadi 7,42 %.

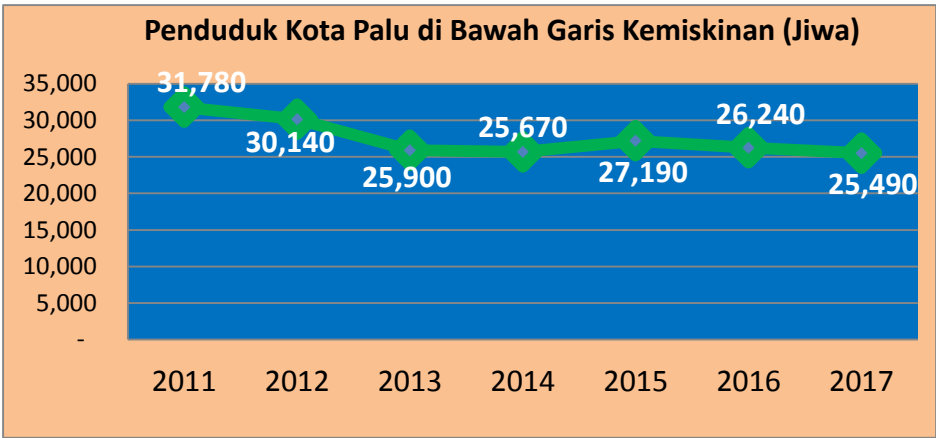
Jika dibandingkan tingkat kemiskinan baik nasional maupun Provinsi Sulawesi Tengah, maka tingkat kemiskinan Kota Palu lebih rendah. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Perbandingan Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Palu	9,24%	8,58%	7,24%	7,05%	7,42%	7,06%	6,74%
Sulawesi Tengah	16,04%	14,94%	14,32%	13,61%	14,66%	14,45%	14,14%
Indonesia	12,36%	11,66%	11,46%	10,96%	11,13%	10,70%	10,12%

Sumber: BPS Sulteng, 2018

Selanjutnya, secara nominal angka kemiskinan di Kota Palu Tahun 2011 hingga Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini:



Gambar 4.1
Penduduk Miskin Kota Palu

Kondisi ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan mulai efektif dalam menanggulangi kemiskinan Kota.

Tentunya ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Peningkatan kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan yang merupakan pilar dalam memotong rantai kemiskinan perlu menjadi perhatian lebih untuk menurunkan kemiskinan daerah.

6. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perkotaan

Isu strategi pembangunan Kota Palu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di arahkan melalui kemandirian ekonomi masyarakat kota. Pemerintah Kota Palu berupaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan dan pengembangan UMKM di tiap perwilayah kelurahan. Menjadikan kelurahan yang inovatif yang mampu menciptakan daya saing bagi UMKM melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi lokal.

Pemerintah di tingkat kelurahan di arahkan untuk mampu mengembangkan usaha ekonomi yang ada di wilayahnya dengan dukungan instansi terkait. Langkah awal dalam isu strategis ini adalah pemetaan potensi pada 8 kelurahan di Kota Palu, untuk mengidentifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan dengan melihat lima aspek yaitu bahan baku, jumlah usaha dalam industri, keunikan produk dibandingkan daerah lain, nilai tambah produk dan kontribusinya ekonomi daerah. Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi, pemerintah melalui dinas terkait akan melakukan penguatan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan pada masing masing industri di tiap wilayah kelurahan.

Dalam upaya menunjang sektor pariwisata, pemerintah Kota Palu akan mendorong tumbuh kembangnya industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat. Penguatan industri kreatif seperti industri kerajinan, musik, desain, seni pertunjukan, periklanan serta beberapa subsektor yang telah tumbuh di masyarakat, akan di dorong untuk menjadi usaha yang memiliki daya saing di tingkat nasional dengan mengandalkan *comparative advantage* sumber bahan baku lokal.

Penguatan usaha mikro dan kecil akan diupayakan melalui peningkatan ketrampilan usaha seperti pemagangan, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Diharapkan nantinya akan menciptakan penguasa mikro dan kecil yang mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, keunikan potensi lokal dan penguasaan pasar lokal.

Pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan akan mendorong peningkatan dan pengembangan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis industri rumah tangga. Peningkatan keanekaragaman usaha akan diupayakan melalui perbaikan iklim investasi, kemudahan serta kepastian usaha.

7. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Peningkatan kualitas tata birokrasi atau sering disebut reformasi birokrasi, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

8. Pengembangan Sistem Transportasi Umum

Salah satu ciri kota yang mulai berkembang adalah, munculnya permasalahan di bidang transportasi yang menjadi sarana mobilisasi masyarakatnya. Pertumbuhan jumlah populasi penduduk dan kendaraan yang tidak diiringi oleh peningkatan luasan dan panjang jalan akan menimbulkan masalah kemacetan yang mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat.

Kondisi ini mulai dirasakan oleh penduduk Kota Palu dalam kurun 3 tahun terakhir, pada beberapa ruas jalan yang sering terjadi

kemacetan khususnya pada beberapa wilayah yang pertumbuhan ekonomi dan perumahan meningkat. Secara umum rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu sejak Tahun 2013 – 2015 mengalami penurunan. Pada Tahun 2013 rasio panjang jalan dan terhadap jumlah kendaraan wajib uji sebesar 0,31, pada Tahun 2014 menurun menjadi 0,22, dan pada Tahun 2015 menjadi 0,19. Penurunan rasio ini merupakan dampak dari peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang tidak diiringi oleh peningkatan panjang jalan.

Ketidaksesuaian antara pertumbuhan panjang jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang menyebabkan semakin menurunnya rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Dari data Tahun 2016, pertumbuhan panjang jalan Tahun 2014 -2015 sebesar 2,26 %, sedangkan pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Palu tumbuh sebesar 12,9 %. Hal inilah yang menyebabkan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan semakin kecil.

Upaya untuk meningkatkan rasio panjang jalan terhadap jumlah jalan dapat ditingkatkan melalui penambahan panjang jalan atau menurunkan jumlah kendaraan pribadi. Penurunan jumlah kendaraan yang melintas dapat diturunkan dengan menyiapkan sarana transportasi umum bagi masyarakat. keberadaan angkutan umum di Kota Palu saat ini semakin menurun, hal ini terlihat dari pertumbuhan rasio izin trayek dari Tahun 2013–2014 yang menurun cukup drastis yaitu 32,54 %. Pertumbuhan penurunan rasio izin trayek ini mengindikasikan semakin berkurangnya angkutan umum yang ada di Kota.

Pertumbuhan jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum di Kota Palu juga masih tergolong rendah. Sejak kurun waktu 4 tahun yaitu Tahun 2011 hingga Tahun 2015 hanya mencapai 9,47 %. hal ini mengindikasikan bahwa semakin berkurangnya penduduk Kota Palu yang memanfaatkan angkutan umum. Selain itu juga dapat disebabkan oleh jumlah angkutan umum yang semakin menghilang.

Terminal yang menjadi sarana angkutan umum untuk menurunkan dan mengangkut penumpang juga merasakan dampak

penurunan yang cukup besar. Pada Tahun 2015 jumlah penumpang yang masuk di terminal mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 35 %. Penurunan jumlah penumpang yang turun dan naik angkutan umum di terminal selain menunjukkan berkurangnya jumlah angkutan umum, juga berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi terminal.

9. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Berbasis Budaya

Salah satu wujud kota dicerminkan dari ketersediaan infrastruktur pendukung layanan kepada masyarakat. Ketersediaan jalan, jembatan, transportasi jaringan irigasi, air bersih, penerangan jalan serta beberapa infrastruktur lainnya menjadikan salah satu tolak ukur layanan pemerintah kepada masyarakat.

Kondisi infrastruktur jalan Kota Palu masih lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah ketersediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi sebuah keharusan, mengingat Palu menjadi cerminan Provinsi Sulawesi Tengah.

Beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan salah satunya drainase, kondisi drainase yang kurang memadai dan tidak terkelola dengan baik, mengakibatkan banjir ketika hujan turun. Di beberapa ruas jalan sering terjadi genangan air akibat meluapnya air dari drainase yang tidak mampu menampung air ketika hujan.

Pengembangan infrastruktur berupa bangunan pemerintah dan sarana publik akan di arahkan untuk berorientasi pada ornamen budaya lokal yang dapat mencirikan identitas Kota. Infrastruktur yang akan dikembangkan diharapkan akan dapat mendukung pariwisata yang berbasis pada budaya lokal. Infrastruktur publik akan mencerminkan maskot Kota Palu dan menjadi bahan promosi pariwisata budaya Kota Palu.

10. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pemukiman Kota

Pengelolaan tata kota yang ramah lingkungan diarahkan untuk meningkatkan persentase Ruang Terbuka Hijau di dalam

Kota. Ketersediaan ruang terbuka hijau akan memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat serta menumbuhkan lingkungan yang sehat. Pemerintah akan mendorong penataan kota yang konsisten yang berpedoman pada RTRW, yang juga memberikan ruang yang cukup besar bagi keberadaan UMKM pengelola potensi lokal.

Pengelolaan sampah di arahkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah mandiri oleh keluarga sebelum di buang di TPA. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah sampah akan menurunkan persentase sampah yang terbuang ke TPA, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan pengolahan daur ulang limbah masyarakat. Selain pengelolaan sampah mandiri masyarakat upaya peningkatan kebersihan Kota juga dilakukan melalui ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah masyarakat.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Palu. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru.

11. Pembangunan Berbudaya dan Beradat

Pembangunan berbudaya dan beradat dimaksudkan untuk menciptakan kondisi sosial yang mengacu pada nilai-nilai budaya dan adat daerah yang selama ini mulai ditinggalkan. Pembinaan, Penguatan dan Pengembangan Peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam tata kehidupan sosial akan menjadi prioritas utama untuk membangun kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Penerapan nilai-nilai berbudaya dan beradat di tengah masyarakat akan dikawal oleh lembaga adat dan perangkatnya, sehingga pembentukan dewan adat, dewan suro, dan pembentukan K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, Keindahan,

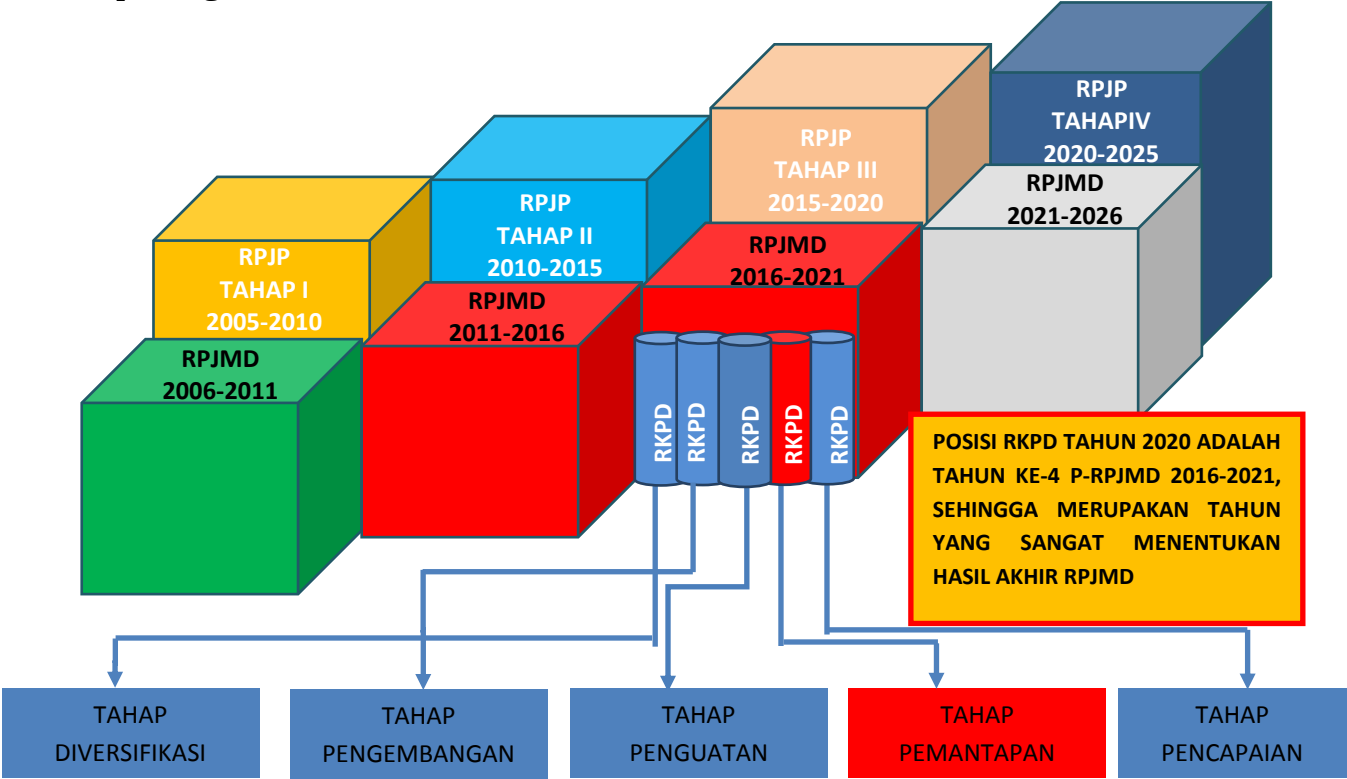
dan Kekeluargaan) akan menjadi motor penggerak bagi penerapan nilai-nilai budaya dan adat daerah.

Penguatan nilai-nilai berbudaya dan beradat juga akan dibangun sejak kecil melalui pendidikan budaya pada pendidikan dasar Kota Palu. Pengenalan situs sejarah Kota Palu, budaya dan adat yang ada di Kota palu, serta pembentukan sanggar seni di tiap sekolah dasar dan menengah akan meningkatkan pemahaman dan kecintaan murid pada budaya dan adat daerah.

4.1.2 Tema Pembangunan

Berdasarkan tema pembangunan daerah Tahun 2020 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 yaitu Membangun kembali Kota Palu yang lebih baik untuk kemandirian ekonomi yang berdaya saing.

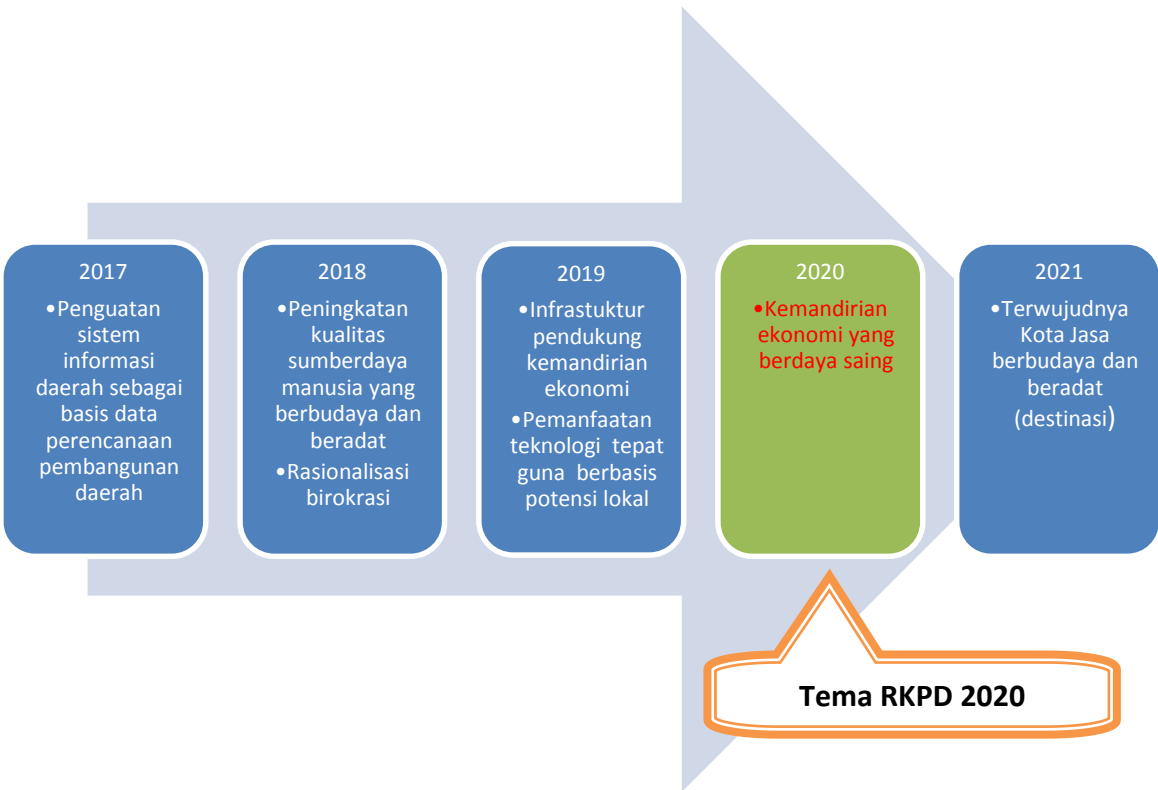
Rencana Kerja Pembangunan Dearah (RKPD) Kota Palu Tahun 2020 adalah bagian dari tahapan ke empat tahun ke empat pembanguna jangka panjang Kota Palu. Secara jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.2
Posisi RKPD Tahun 2020 Dalam Tahapan P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021

Saat ini Kota Palu telah memasuki tahap ketiga sasaran pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Palu 2005-2025, yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap ketiga pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu meningkatnya kualitas Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Pencapaian visi tahapan ketiga perlu didukung oleh arah dan sasaran pembangunan jangka menengah dan sasaran pembangunan tahunan Kota Palu. Sehingga setiap tahapan pembangunan jangka panjang harus memiliki tema agar lebih fokus dan pedoman untuk mencapainya.

Tema pembangunan Kota Palu dalam lima tahun merupakan gambaran pencapaian arah pembangunan berdasarkan arah pembangunan prioritas yang ingin di capai oleh pemerintah Kota Palu. Tema dapat juga dipandang sebagai tahap pembangunan, sesungguhnya memberikan pedoman pelaksanaan misi, tujuan, sasaran berdasarkan prioritas pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Berikut tema dan tahapan pembangunan Kota Palu Tahun 2016–2021.



Gambar 4.3
Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu
Tahun 2016-2021

Secara substansi dalam konteks perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Kota Palu indikasi tema pembangunan Tahun 2020 yang tertuang dalam P-RPJMD Tahun 2016-2021, adalah Membangun kembali Kota Palu yang lebih baik untuk kemandirian ekonomi yang berdaya saing.

Penjelasan tema pembangunan untuk Tahun 2020 adalah capaian pembangunan tahun keempat diharapkan telah tercipta kemandirian ekonomi yang berdaya saing. Melalui proses yang panjang dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi Kota Palu akan semakin meningkat yang ditopang oleh berkembangnya usaha

masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga diiringi oleh pemerataan pendapatan masyarakat.

Prioritas pembangunan Kota Palu secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada akhir P-RPJMD Tahun 2021. Prioritas pembangunan didasarkan isu strategis di Kota Palu. Dalam pelaksanaannya, penentuan proritas pembangunan di Kota Palu juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, demi terlaksananya keserasian dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi tercapainya harmonisasi dan sinkronisasi capaian dan sasaran pembangunan untuk semua dan dapat memberikan dampak *outcome* bagi perekonomian daerah, regional bahkan nasional.

Adapun keterkaitan tema pembangunan pada RKPD Tahun 2020, dari tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Relasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, dan RKPD Kota Palu Tahun 2020

Tema RKP Nasional	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah	Tema RKPD Kota Palu
Peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas	Membangun kembali Sulawesi Tengah melalui penguatan mutu modal manusia dan infrastruktur	Membangun kembali Kota Palu yang lebih baik untuk kemandirian ekonomi yang berdaya saing

Sumber: Permendagri 31 Tahun 2019 dan Rancangan RKPD Provinsi Sulteng Tahun 2020

Untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian target dan sasaran program prioritas dimaksud, maka disusun suatu rencana kegiatan atau rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan keluaran yang spesifik, terukur, dapat dilakukan serta realistis. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan rumusan visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Palu pada masa lima tahun mendatang yang tertuang dalam Dokumen P-RPJMD Kota Palu 2016-2021.

Upaya mencapai berbagai target dan indikator dari sasaran pokok yang telah ditetapkan sangatlah bergantung pada fokus perhatian yang menjadi prioritas utama pembangunan. Visi Kota Palu disusun untuk menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu –isu strategis, maka Visi Kota Palu Tahun 2016-2021, yaitu Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Takwa.

Dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT;
2. Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumber daya manusia;
3. Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan;
4. Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya;
5. Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya; dan
6. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa.

4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam P-RPJMD Kota Palu 2016–2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki poin kritis dalam penyusunan P-RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2020 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu 2016-2021 periode ke dua. RKPD Tahun 2020 disandarkan pada pedoman RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025, yang dirancang berdasarkan penyelarasan antara arah kebijakan umum nasional yang terdapat

dalam RPJMN nasional Tahun 2015-2019 dan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Berikut ini merupakan penyelarasan arah kebijakan yang menjadi landasan dalam merencanakan pembangunan Kota Palu Tahun 2020.

Tabel. 4.3
 Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2019

Arah Kebijakan Umum Nasional RPJMN 2015-2019	Arah Kebijakan Umum RPJMD Provinsi Sulteng 2016-2021	Sasaran Pokok RPJP Kota Palu 2005-2025	Arah Pembangunan RPJP Kota Palu, Tahap III (2015-2020)
Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh	Reformasi birokrasi dan penegakan supremasi hukum dan HAM	Persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum	Perwujudan kondisi yang aman dan damai dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi dan non diskriminasi
		Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien dan trasnparan	
		Penyediaan pelayanan publik yang layak dan terjangkau	
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk menunjang aktifivas perekonomian masyarakat	Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat	Peningkatan kualitas infastruktur perdanganan , industri serta pelayan publik yang berkualitas dan menjaga keseimbangan lingkungan
Peningkatan pengelolaan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan			
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketaqwaan	Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang bertumpu pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	Pelaksanaan pembangunan yang semakin mantap menuju kota ekologis.

		Mengelola sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan serta meminimalkan resiko bencana.	
Pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial dan kualitas sumberdaya manusia yang semakin membaik
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			

Sumber : RPJMN 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, 2016-2021, dan RPJP Kota Palu 2005-2025

Kebijakan tersebut dijadikan dasar dalam penetapan prioritas, sasaran, strategi dan kebijakan RKPD Kota Palu Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa pencanaan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu disinergikan antar perencanaan tahunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan Pemerintah Kota Palu, sesuai P-RPJMD Kota Palu 2016-2021 yaitu :

1. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi pemerintah dalam pembangunan daerah selama lima tahun;
2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
3. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan;

4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
5. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan serta instansi terkait.

Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Berikut uraian tujuan, sasaran pembangunan untuk periode lima tahun kedepan pada tiap misi dan sub misi yang telah ditetapkan, dan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 .

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terwujudnya pemetaan potensi sumberdaya Kota Palu berbasis IT .	Mewujudkan sistem informasi potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis GIS.	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi sumberdaya kota palu berbasis GIS.	persentase ketersediaan dokumen hasil survey dan pemetaan potensi		0	33,33 %	77,77 %	90 %	95 %	100 %	100 %
				persentase potensi sumber daya yang dapat diakses melalui sistem informasi berbasis GIS.		0	33,33 %	77,77 %	90 %	95 %	100 %	100 %
2	Peningkatan dan pengembangan daya saing potensi. sumberdaya manusia .	Mewujudkan pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas.	Meningkatnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar sembilan tahun.	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar.	SD	0,01	0,035	0,03	0,025	0,02	0,015	0,015
					SMP	0,3	0,32	0,25	0,2	0,15	0,1	0,1
		Mewujudkan karakter bangsa melalui pendidikan agama dan budaya.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas anak didik dalam mengikuti pendidikan agama dan budaya .	persentase siswa kelas lima yang mengikuti tambahan pendidikan agama.		0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				persentase siswa kelas tujuh yang mengikuti tambahan pendidikan agama.		0	0	18%	36%	36%	36%	36%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
				persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni.	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya.	0	75 %	80%	100%	100%	100%	100%
		Mewujudkan pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas.	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
				Indeks pelayanan kesehatan Rumah Sakit.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
				Prevalensi balita gizi buruk.	0,70	0,66	0,62	0,58	0,54	0,50	0,50
				persentase penanggulangan kejadian luar biasa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan kelurahan siaga aktif.	89,13	91,30	97,83	100	100	100	100

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
3	Kelurahan inovasi unggul dan mandiri berbasis Iptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan dan mengembangkan usaha berbasis industri rumah tangga.	Terwujudnya IKM baru menjadi unggul dan mandiri.	Jumlah IKM baru yang unggul dan mandiri.	0	22 Klpk	27 Klpk	81 Klpk	81 Klpk	81 Klpk	81 Klpk
		Mewujudkan pengembangan usaha mikro.	Meningkatnya usaha mikro mandiri.	persentase usaha mikro diintervensi menjadi mandiri	0	40,8%	60,8%	80%	88%	100%	100%
		Membina pelaku usaha ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan.	Terwujudnya pelaku usaha ekonomi kreatif dan inovatif.	persentase usaha ekonomi kreatif diintervensi menjadi mandiri.	0	0	35,25%	66,87%	98,11%	100%	100%
4	Rasionalisasi birokrasi pemerintah kota palu yang efisien dan efektif berbasis budaya.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.	Opini Laporan Keuangan.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	CC	CC	B	B	B	BB	BB
				Indeks Reformasi birokrasi.	Sangat Kurang	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	Baik	Baik
				Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan	2,9807	2,9999	3,0000	3,0100	3,0150	3,0200	3,0200

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
				pemerintah daerah.							
5	Penataan dan pengembangan infrastruktur Kota berbasis wisata budaya.	Melaksanakan Peningkatan dan pengembangan pelayanan transportasi Kota.	Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman.	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan.	0	6	6	10	12	14	14
				Jumlah angkutan umum melayani setiap lintasan trayek.	0	0	29 Angkutan Umum	17 Angkutan Umum	15 Angkutan Umum	14 Angkutan Umum	14 Angkutan Umum
				Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak.	61,48%	82,59%	86,67%	90,93%	95,37%	100%	100%
		Melaksanakan Peningkatan dan pengembangan dekorasi Kota berbasis budaya.	Terwujudnya penataan dekorasi kota memiliki nilai budaya.	Cakupan dekorasi kota bernilai budaya	0	0	30%	80%	90%	100%	100%
				Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah .	0	1	5	9	10	10	10
		Melakukan Penataan dan Peningkatan fungsi ruang-ruang publik Kota berbasis budaya.	Terwujudnya ruang publik Kota yang berbasis nilai budaya.	Ruang publik kota yang bernilai budaya.	7,69%	30,76%	76,92%	84,61	92,30%	100%	100%
		Melaksanakan penataan manajemen kebersihan dan keindahan Kota berbasis budaya.	Terwujudnya kebersihan Kota yang partisipatif.	persentase pemrosesan sampah (tingkat pengangkutan ke TPA).	55%	60%	65%	90%	100%	100%	100%
				Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat.	12 ton/hari	15 ton/hari	18 ton/hari	45 ton/hari	50 ton/hari	50 ton/hari	50 ton/hari

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
				Tingkat partisipasi kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan.	0	15%	30%	50%	75%	100%	100%
		Melaksanakan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat wisata berbasis budaya dan religi.	Terwujudnya pusat-pusat wisata berbasis budaya dan religi.	persentase pusat wisata berbasis budaya dan religi.	0	0	40%	60%	80%	100%	100%
		Mewujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan.	Terwujudnya infrastruktur kota (perumahan yang layak, sanitasi, pelayanan air minum dan jalan).	persentase kondisi jalan mantap.	44,81%	51,54%	59,27%	68,16%	78,38%	90,14%	90,14%
				persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik.	33,70%	46,04%	54,76%	66,10%	80,84%	100%	100%
				persentase jembatan dalam kondisi baik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				persentase kawasan kumuh yang tertata	0	17,61	58,71	100	100	100	100
		6	Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Bangsa	Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Dalam Aspek Masyarakat	Indeks kerukunan beragama	69	69	71	71	72
Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	24					25	25	26	27	28	28

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
		Melakukan pembinaan dan penguatan lembaga Seni budaya.	Terwujudnya pembinaan dan penguatan lembaga seni dan budaya.	Jumlah lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi.	0	17	27	37	50	50	50

Sumber: P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021

4.1.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Kota Palu Tahun 2020, mempertimbangkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena berbagai strategi dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Palu juga diarahkan untuk mendukung kebijakan pusat dan provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN 2005-2025 dan visi misi Presiden serta agenda prioritas pembangunan (*Nawacita*) tujuan pengembangan wilayah pada Tahun 2015-2019 adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Tujuan pengembangan wilayah ini akan dicapai melalui sasaran-sasaran agenda prioritas pembangunan (*Nawacita*) sebagai berikut:

1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah;
2. Meningkatnya produksi perikanan; berkembangnya energi dan mineral kelautan; berkembangnya kawasan wisata bahari; dan berkembangnya industri maritim dan perkapalan;
3. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah di masing-masing pulau yang ditandai dengan berkembangnya daerah tertinggal sebanyak 80 kabupaten tertinggal dapat terentaskan;
4. Pembangunan 5 kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa-Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa;

5. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi;
6. Pengembangan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa-Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan;
7. Pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali.
8. Untuk pembangunan desa dan kawasan perdesaan, sasarannya adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
9. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, sasarannya adalah dengan memperkuat sedikitnya 39 pusat-pusat pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
10. Pengembangan kawasan perbatasan difokuskan pada 10 PKSN dan pengembangan 16 PKSN lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya, terutama 187 Lokasi Prioritas (Lokpri) perbatasan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman;
11. Untuk meminimalkan atau mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang, maka sasaran penanggulangan bencana dan

IV-28

pengurangan risiko bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, PKSN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri maupun pusat-pusat pertumbuhan lainnya.

12. Menguatnya tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah;
13. Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung sasaran pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah kota melakukan, penetapan strategi pembangunan dalam lima tahun yang disesuaikan dengan tujuan pemerintah Kota Palu, yang tertuang dalam P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, adapun pilihan strategi yang akan dilaksanakan yaitu :

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan data dan informasi;
2. Penyediaan aplikasi sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS;
3. Penyediaan instrumen dan metode penelitian/survey;
4. Melakukan pendataan potensi sumberdaya Kota Palu;
5. Pengembangan sumber daya aparatur pengelola data dan informasi pada semua perangkat daerah dan kelurahan;
6. Penyediaan perangkat keras jaringan pada semua perangkat daerah dan kelurahan;
7. Pembangunan jaringan sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu;
8. Menyediakan dan membangun pusat data potensi sumber daya Kota Palu.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kedua dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan;

IV-29

2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan;
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan agama bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar;
4. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan seni tradisional di tingkat sekolah menengah pertama;
5. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan berkualitas.
6. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan;

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Ketiga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha, pemerintah dan perguruan tinggi;
2. Mengembangkan keanekaragaman usaha masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal berbasis industri rumah tangga;
3. Mendorong peran swasta dan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif;

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Keempat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran kelembagaan pemerintah daerah;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja ASN dan kelembagaan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Menerapkan sistem pengawasan internal;
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga pengawasan;
6. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya aparatur dan pemanfaatan sarana prasarana yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
7. Membentuk Tim Pendamping Pembangunan Daerah;
8. Melakukan asistensi program kegiatan dan anggaran secara berjenjang;
9. Melakukan perencanaan berbasis aplikasi;

10. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah berbasis aplikasi.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kelima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas transportasi perkotaan;
2. Mewujudkan ciri khas wajah kota dengan dekorasi ornamen etnis lokal;
3. Mengembangkan dan melengkapi fasilitas publik kota berbasis budaya lokal;
4. Mengoptimalkan tata kelola persampahan dan keindahan kota;
5. Mewujudkan perilaku/budaya bersih terhadap pengelolaan sampah;
6. Membentuk Satgas Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan;
7. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan inklusif berbasis kawasan;
8. Pengembangan potensi wisata berbasis budaya;
9. Penataan penguasaan dan kepemilikan tanah melalui pengarusutamaan agraria.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Keenam dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal;
2. Menguatkan peran dan fungsi lembaga adat dalam kehidupan sosial masyarakat;
3. Menguatkan peran dan fungsi lembaga Agama dalam kehidupan sosial masyarakat;
4. Mengembangkan seni budaya dan olah raga;

Selain strategi di atas, juga terdapat Standar Pelayanan Minimal seperti yang telah diamanatkan oleh Perundang-undangan sebagai salah satu indikator kinerja daerah dengan tujuan untuk memenuhi

IV-31

pelayanan dasar yang merupakan kebutuhan dasar warga Negara. Dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum pada Pasal 3 ayat 2 sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan;
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
7. Pelayanan Kesehatan Balita;
8. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
13. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
14. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
15. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
16. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
17. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
18. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

19. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
21. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
22. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
23. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana;
24. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran;
25. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti;
26. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;
27. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;
28. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti; Dan
29. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Strategi untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Palu diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pemukiman dan sub sektor perumahan, dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan strategi, yaitu:
 - A. Mengidentifikasi data dan informasi secara lengkap (data terlama hingga terbaru) yang dibutuhkan dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman:
 - a) Menyiapkan informasi dan data yang relevan tentang kondisi permukiman dan perumahan pascabencana khususnya terkait dengan data geologi lingkungan wilayah, serta menggunakan data historis untuk mitigasi bencana masa depan;

- b) Melakukan analisis multi risiko bencana khususnya di wilayah terdampak pascabencana sebagai acuan untuk penetapan lokasi perumahan dan permukiman.
- B. Memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim:
- a) Memfasilitasi masyarakat serta menyiapkan lokasi permukiman baru untuk menampung warga yang pindah (*ex-situ*) ke Kelurahan Talise-Tondo, Kelurahan Duyu, Kelurahan Petobo, dan Kelurahan Balaroa sebagai tempat relokasi.
 - b) Mengakomodir keinginan masyarakat yang ingin tetap membangun di tanah miliknya dengan syarat bukan merupakan daerah terlarang (*in-situ*);
 - c) Mengembangkan rencana pembangunan berbasis kelurahan dan atau kecamatan (*village planning*) sebagai instrumen utama rekonstruksi wilayah kelurahan pascabencana.
- C. Membantu dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan:
- a) Membantu korban yang ingin kembali ke tempat tinggal semula dalam bentuk *in-cash* atau *in-kind* yang setara, beserta dukungan perabotan utama perumahan;
 - b) Membantu penyediaan perumahan, prasarana dan sarana dasar pendukung bagi korban bencana yang akan direlokasi (*resettlement*).
- D. Menyediakan lahan relokasi yang aman dan cocok bagi perumahan dan permukiman:
- a) Mengidentifikasi area risiko bencana mempertimbangkan potensi bahaya bencana, hasil kajian geologi, serta ditetapkan oleh pemerintah;
 - b) Menyiapkan dan merancang kawasan permukiman baru yang dapat diterima oleh masyarakat secara sosial dan budaya serta ramah lingkungan;

- c) Memberikan kemudahan terkait dengan proses administrasi (kepemilikan lahan), dan membantu penyediaan legalitas tanah bagi warga yang tinggal secara *ex-situ*;
 - d). Memberikan ganti rugi lahan likuifaksi yang dinyatakan zona merah.
- E. Menetapkan dan menerapkan pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana untuk kawasan permukiman.
 - a) Menetapkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang di dalamnya memuat *building code* agar bangunan rumah dapat tahan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, dan likuifaksi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing;
 - b) Mempertegas prosedur perizinan mendirikan bangunan serta pengawasan pada masa konstruksinya untuk dapat sesuai dengan *building code* khususnya pada wilayah yang rawan risiko bencana;
 - c) Membangun mitigasi non-struktural berupa pembangunan kelurahan tangguh/siaga dalam menggalang praktik budaya pengurangan risiko bencana yang didukung serta diperkuat oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi maupun pemerintah.
- 2. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu :
 - A. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar:
 - a) Pembangunan kembali sarana dan prasarana kebutuhan dasar yang tahan terhadap gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi serta bencana lain yang relevan yang tidak berada pada zona rawan bencana;

- b) Menetapkan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap.
- B. Mengembangkan kembali sistem transportasi dan komunikasi yang lebih baik:
- a) Membuka akses dan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah (Jembatan IV dan Jembatan V) serta wilayah hunian baru;
 - b) Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana terkait dengan akses masuk antara lain terminal, pelabuhan laut dan bandara udara beserta jaringan pendukungnya;
 - c) Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/ atau membangun fasilitas baru yang tahan terhadap potensi bencana di masa depan.
- C. Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana:
- a) Meningkatkan persiapan fasilitas infrastruktur yang mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana;
 - b) Merehabilitasi dan merekonstruksi drainase kawasan untuk mengurangi potensi dampak negatif kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
 - c) Mengendalikan banjir untuk wilayah yang rawan melalui kegiatan normalisasi sungai, perbaikan/pembangunan tanggul, dan perbaikan fasilitas pengendali banjir.
- D. Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi:
- a) Melakukan studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya, dan agama untuk setiap kegiatan peningkatan dan pembangunan fasilitas baru sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan investasi;

- b) Memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru;
 - c) Keputusan jadwal pelaksanaan perlu selalu memperhatikan tingkat kepentingan (*urgency*) dan tingkat kesiapan (*readiness*);
 - e) Menerapkan metode pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien.
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi sosial. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu :
- A. Meningkatkan fasilitas keamanan dan perlindungan bagi masyarakat korban bencana
 - a) Melakukan pendataan korban baik yang sudah meninggal, maupun luka-luka sehingga diketahui jumlah kebutuhan dasar.
 - b) Memberi bantuan tempat perlindungan sementara serta fasilitas mendasar lain seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan serta mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan.
 - B. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat korban bencana, yaitu:
 - a) Melakukan pendampingan psikologi kepada korban bencana dan keluarganya;
 - b) Memberikan bantuan dan jaminan bagi masyarakat rentan.
 - C. Memfasilitasi pendidikan yang berkelanjutan
 - a) Melakukan perbaikan serta memaksimalkan fungsi fasilitas pendidikan yang sudah ada;
 - b) Menyediakan sarana pendidikan tambahan serta aksesibilitas yang menjangkau masyarakat;
 - c) Menyelenggarakan pendidikan darurat;

- d) Menyelenggarakan pendidikan bencana pada seluruh golongan usia untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
- D. Meningkatkan kualitas kesehatan korban bencana
 - a) Memperbaiki dan membangun kembali fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak serta menyediakan sarana dan alat kesehatannya.
 - b) Mencegah dan mengendalikan dampak penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
- E. Melestarikan warisan budaya baik adat, tradisi dan kegiatan seni
 - a) Membangun kembali bukti sejarah masyarakat melalui puing-puing bangunan pascabencana (monumen peringatan bencana).
 - b) Mengoptimalkan fungsi komunitas dalam menjaga adat, tradisi serta kegiatan seni lokal.
- 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu:
 - A. Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat yang mendukung kegiatan ekonomi.
 - B. Memulihkan kegiatan perbankan.
 - a) Melakukan perbaikan sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermediasi;
 - b) Mengidentifikasi nasabah beserta ahli warisnya;
 - c) Restrukturisasi aset perbankan.
 - C. Memulihkan pendapatan masyarakat korban bencana.
 - a) Menyediakan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi rekonstruksi dan sesuai dengan lokasi permukiman baru yang lebih tahan terhadap bencana.

- b) Memberikan pelatihan berbagai pekerjaan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan, melalui pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan *mobile training unit*.
 - D. Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana, berupa:
 - a) Memberikan bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat;
 - b) Memberikan hibah langsung maupun kemudahan kredit perbankan;
 - E. Meningkatkan dukungan kepada masyarakat korban bencana
 - a) Menyediakan insentif kredit berupa pemutihan kredit dan peringanan beban kredit, serta pemberian bantuan teknis.
 - b) Mengoptimalkan pemanfaatan dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat.
 - c) Melakukan penguatan koperasi, UMKM, dan IKM melalui pelatihan, pendampingan, serta bantuan modal usaha.
 - d). Relokasi tempat jualan baru bagi UMKM pesisir pantai ke hutan kota Kaombona, kawasan wisata Salena, dan Kawasan Wisata Uventumbu.
 - e) Melakukan pendampingan untuk pengembangan komunitas (*community development*).
- 5. Rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor. Kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu:
 - A. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - a) Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender;
 - b) Menyediakan layanan konseling atau dukungan psikososial;
 - c) Melakukan kegiatan pemberdayaan wanita.

- B. Memberikan bantuan pemulihan khusus yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi kejadian bencana dimasa mendatang
- C. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan untuk mendukung pelayanan masyarakat.
 - a) Memperbaiki dan membangun gedung-gedung pemerintahan daerah beserta sarana pendukungnya;
 - b) Memulihkan ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - c) Meningkatkan koordinasi dan asistensi pemerintahan sebagai wadah yang menaungi kegiatan pemulihan dan pembangunan pascabencana;
 - d) Menyediakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan.
- D. Memperkuat sektor keamanan.
- E. Pengurangan risiko bencana
 - a) Membangun sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan melalui pembangunan *shelter* penyelamatan dan jalur penyelamatan/evakuasi pada daerah pemukiman kawasan pantai rawan bencana tsunami dan kawasan berpotensi likuifaksi;
 - b) Membentuk masyarakat tangguh bencana.

Dalam RPJP Kota Palu Tahun 2005-2025, juga tertera strategi untuk mencapai visi “Kota Palu untuk semua” (*City for All*), yang di tuangkan kedalam sasaran yang di jabarkan menjadi 7 (tujuh) pencapaian strategi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan;
2. Menyediakan pelayanan publik yang layak dan terjangkau;

3. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat;
4. Persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan;
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertumpuh pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
7. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta meminimalkan resiko bencana.

Agar sinkronisasi tersebut tercapai, maka perlu memantapkan strategi nasional dengan strategi pembangunan Kota Palu, adapun strategi pembangunan nasional tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Secara umum strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 digariskan sebagai berikut:

A. Norma Pembangunan, yaitu :

1. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
2. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

B. Tiga Dimensi Pembangunan, meliputi :

1. Dimensi pembangunan manusia

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-

manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko, pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerjakeras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas :

- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada Negara lain.
- Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar- besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri di prioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat diseluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok

IV-42

pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas:

1. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal didesa;
2. Wilayah pinggiran;
3. Luar Jawa; dan
4. Kawasan Timur.

C. Kondisi perlu sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas terkait aspek sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil adalah:

- a. Kepastian dan penegakan hukum;
- b. Keamanan dan ketertiban;
- c. Politik dan demokrasi; dan
- d. Tata kelola dan reformasi birokrasi.

D. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan *Output* cepat yang dapat di jadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sasaran dan prioritas RKP Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dan program prioritas sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
- e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.

- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
 - e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
 - b. Mempercepat transformasi struktural.
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
 - d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
 - e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.

- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa visi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan

Rangkaian kata-kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu akronim Juri Teradil. Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang memberi maslahat bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana. Dengan demikian menunjukkan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah harus dituntun oleh kemampuan dan kejernihan hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap individu dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan serangkaian misi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai

IV-47

berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah, kelembagaan politik, sosial budaya, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Tahap Pertama dan Kedua, maka RPJMD Provinsi Sulawesi Tahap Ketiga (2016-2021) mengusung visi Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, dilaksanakan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Seajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Sinkronisasi serta keterkaitan antar berbagai prioritas dan hierarki pembangunan diperlukan agar, arah penanganan dapat fokus pada hasil (*outcome*). Keterkaitan antara agenda Nawacita dan prioritas pembangunan provinsi sulawei tengah, hubungannya dengan prioritas pembangunan Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.5.
Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (*Nawacita*) dengan Prioritas
Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Agenda Prioritas Nasional	10 Prioritas Pembangunan Sulteng	11 Prioritas Pembangunan Kota Palu
1	2	3	4
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Terbangunnya ketrentaman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan	Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu
2	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Percepatan reformasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kab/Kota	Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata
		Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan	Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan
		Percepatan pemberdayaan ekonomi kerayatan dan pengentasan kemiskkinan	
4	Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Percepatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan	Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya

		HAM	
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Memastikan terselenggarakannya pendidikan yang terjangkau dan berkualitas melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik di setiap kecamatan
		Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan	Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas
		Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas	
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	Melanjutkan pengelolaan sumber daya agribisnis dan maritim yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang berdaya saing	Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS
		Pemantapan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan <i>market friendly</i>	Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi	Melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang berdaya saing	Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan
			Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk Mendukung

			pariwisata
8	Melakukan revolusi karakter bangsa	Memastikan terselenggarakannya pendidikan yang terjangkau dan berkualitas melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu
9	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan	Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu
		Pemantapan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan <i>market friendly</i>	Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu

Sumber : RPJMN 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, 2016-2021, dan P-RPJMD Kota Palu 2016-2021

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu

Pembangunan daerah Kota Palu yang mengacu pada visi dan misi pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, perlu di operasionalkan melalui menjabarkan prioritas pembangunan daerah pada tiap-tiap misi. Tujuan prioritas pembangunan adalah memberi arah dan fokus pembangunan Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Prioritas pembangunan diharapkan akan menjadi agenda utama pembangunan yang akan diimplementasikan dan terukur dalam upaya mewujudkan Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Taqwa. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Palu Tahun 2016 -2021 di atas, maka prioritas pembangunan Kota Palu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Program Prioritas Pembangunan Kota Palu

Misi	Prioritas pembangunan
1. Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT	1. Membangun data base sistem informasi; 2. Mengintegrasikan sistem informasi

	pada seluruh perangkat pemerintahan daerah;
2. Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Potensi Sumberdaya Manusia	1. Membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; 2. Meningkatkan kualitas pendidik dan anak didik yang beriman dan bertakwa; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; 4. Mendorong pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; 5. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau; 6. Memperkuat pendidikan kejuruan yang berorientasi pada pengelolaan potensi sumberdaya lokal.
3. Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Masyarakat	1 Meningkatkan kualitas pelaku usaha kecil pengelola sumberdaya lokal; 2 Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan; 3 Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata; 4 Membangun iklim berusaha yang kondusif bagi tumbuhnya investasi.
4. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang Efisien dan Efektif Berbasis Budaya	1. Penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien; 2. Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel dan; 3. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bagi aparatur.

5. Penataan dan Pengembangan Infrastruktur Kota Berbasis Wisata Budaya	1. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan; 2. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik; 3. Pengelolaan persampahan kota yang mengedepankan peningkatan partisipasi masyarakat; 4. Revitalisasi cagar budaya daerah yang akan menjadi pusat wisata budaya baru; 5. Pembangunan fasilitas publik yang menggunakan ornamen khas daerah sebagai identitas kota.
6. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa	1. Meningkatkan peran lembaga adat dalam menerapkan nilai-nilai kearifan lokal di tengah masyarakat; 2. Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu; 3. Meningkatkan pagelaran seni dan budaya tradisional sebagai upaya pelestarian seni dan budaya daerah.

Sumber : P-RPJMD Kota Palu 2016-2021

Berdasarkan penetapan prioritas pembangunan pada tiap-tiap misi di atas, maka dapat disusun prioritas pembangunan Kota Palu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas;
4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan

5. Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata;
6. Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya;
7. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan;
8. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik;
9. Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya;
10. Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu;
11. Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu

Prioritas pembangunan yang ada tersebut, kemudian dijadikan acuan untuk membuat prioritas tahunan, walaupun jumlah dan arahnya cenderung identik, hal tersebut didasarkan karena permasalahan strategis yang disasar cenderung membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, diharapkan dapat diselesaikan secara komprehensif dengan pendekatan menyeluruh. Untuk menjamin konsistensinya maka dibuat persandingan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam RPJMD provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Adapun hasil persandingan prioritas berdasarkan tingkatan pemerintahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.7
Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2020,
Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020,
Dan Prioritas P-RPJMD Kota Palu 2016-2021

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RKPD Provinsi 2020)	Prioritas Tahunan P-RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2020
1	Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan	• Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
2.	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas	Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas	• Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
3	Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan	Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu	• Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
4.	Melanjutkan pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing	Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata	• Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa

			bumi, Tsunami dan Likuifaksi
5.	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial	Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan	• Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
6.	Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan <i>market friendly</i>		
7.	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota	Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan	• Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
8.	Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan	Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya	• Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
9.	Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM	Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya	• Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akutabel, dan profesional berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
10.	Terbangunnya Ketentraman,	Pembentukan kelembagaan adat di tiap	• Pembentukan kelembagaan adat

	Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan,	wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu	di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
11.	Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS	• Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS • Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Sulteng 2020, P-RPJMD Kota Palu 2016-2021

Program prioritas disusun untuk menyelesaikan permasalahan strategis Kota Palu yang telah tertuang dalam P-RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, sebagai Kota yang multifungsi, Kota Palu terus menghadapi permasalahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan denngan kesehatan, pendidikan, budaya, adat, daya saing ekonomi, lingkungan dan sumberdaya alam infrastruktur daerah. Adapun relevansi antara isu strategis pembangunan Kota Palu dan prioritas pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2020, tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8
 Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu
 Strategis Pembangunan Kota Palu dan Prioritas Pembangunan
 Daerah (RKPD) Tahun 2020

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2020
1		2	3
1	Pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia	Peningkatan kualitas sistem informasi daerah	• Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
2	Kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	Pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas	• Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik di setiap kecamatan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Pembangunan berbudaya dan beradat	• Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Pariwisata dan budaya	• Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2020
1		2	3
		Pelayanan kesehatan murah terjangkau dan berkualitas	• Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
3	Pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat perkotaan	• Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi • Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
4	Reformasi birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM	Rasionalisasi birokrasi	• Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
5	Pembangunan infrastruktur daerah mendukung kemandirian energi	Peningkatan kualitas infrastruktur kota berbasis budaya	• Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi
		Peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman kota	• Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2020
1		2	3
			budaya • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi

Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, P-RPJMD Kota Palu 2016-2021

Pembuatan prioritas dilaksanakan untuk mempermudah dalam pemberian arah dan fokus pembangunan secara tahunan, serta dimanfaatkan untuk menjawab sejumlah tantangan dan isu yang dihadapi oleh pemerintah Kota Palu dimasa mendatang. Adapun penjabaran program prioritas Kota Palu kedalam, program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 beserta PD penanggung jawab pelaksana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2020 serta PD Penanggung jawab

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
Rehabilitasi dan Rekonstuksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
	Program Kesiap-siagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	
	Program Penyiapan Logistik Bencana	
	Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	jaringannya	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan PKLK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
	Program pembangunan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
	Program Pengendalian Banjir	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	
	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Penataan, Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	RSU Anutapura
Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS;	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Studi dan Penelitian	Badan Penelitian & Pengembangan
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan;	Program wajib belajar 9 tahun	Dinas Pendidikan
	Program Palu <i>Kana Mapande</i>	
	Program Pendidikan Non Formal	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas;	Program Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	
	Program Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Administrator KEK
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
Mengembangkan kluster industri kreatif ditiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Dinas Perdagangan & Perindustrian
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Usaha Industri Kreatif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	
Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan
	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	
	Program Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
Peningkatan luasan ruang terbuka hijau sebagai sarana ruang publik	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan tata ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya	Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan RTH	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
	Program Pengendalian	

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	pencemaran dan merusak lingkungan hidup	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas pariwisata
	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	
	Program Pengendalian banjir	
	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
	Program Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	
	Program Pengelolaan Rusunawa	
Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana	Dinas Pekerjaan Umum

Prioritas Pembangunan Kota Palu	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu	PD Penanggung Jawab
	Aparatur (Pembangunan Bantaya)	
	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Kecamatan
	Program Pengembangan keserasian kebijakan pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
	Program Palu no budaya ante no ada	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber : Diolah dari P-RPJMD Kota Palu 2016-2021

4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu

Pembangunan di daerah tidak boleh parsial dan berdiri sendiri tapi harus komprehensif dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2020 Pemerintah Kota Palu tetap berperdoman pada Nawacita, Misi Pemerintah Republik Indonesia, begitupun harus selaras dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keterkaitan antara Nawacita, misi Pemerintah Republik Indonesia, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu dapat dilihat pada Tabel 4.10 di bawah ini :

Tabel 4.10
Matriks Keterkaitan *Nawacita*, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu

Nawacita	Misi RPJMN 2015 – 2019	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Misi RPJMD Kota Palu 2016-2021
1. Memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas	Misi 1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Misi 4 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan Provinsi maju di kawasan timur indonesia	Misi 1 Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT (Nawacita ke 3 dan ke 6)
	Misi 6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional		
	Misi 2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	Misi 5 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	Misi 2 Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya Manusia (Nawacita ke 5 dan ke 8)
	Misi 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan		

IV-67

pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong <i>land reform</i> dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di Tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-	sejahtera		
	Misi 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam Kebudayaan	Misi 5 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	Misi 6 Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa (Nawacita ke 8 dan ke 9)
	Misi 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Misi 3 Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan (Nawacita ke 3, ke 6, dan ke 7)
	Misi 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing		
	Misi 3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara Maritim Misi 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Misi 1 Melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM	Misi 4: Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya (Nawacita ke 1, ke 2, dan ke 4)
	Misi 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung kemandirian energi	Misi 5 Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya (Nawacita ke 3 dan ke 6)

ruang dialog antar warga.	Misi 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam Kebudayaan	Misi 5 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya	Misi 6 Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa (Nawacita ke 8 dan ke 9)

Sumber : RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Prov. Sulteng 2016-2021, dan P-RPJMD Kota Palu 2016-2021

4.2.5. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2020, mengacu pada sasaran pembangunan nasional kemudian dijabarkan kedalam target-target pokok pembangunan daerah sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pada Tahun 2020, adapun sasaran target kinerja pembangunan Kota Palu Tahun 2020, disandingkan dengan target pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 serta target pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2020

Indikator	Sasaran RKP Nasional (2020)	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (2020)	Sasaran Pembangunan Kota Palu (2020)
Pertumbuhan PDRB	5,3 - 5,6%	6,25 – 6,50%	5,0 - 5,5%
Inflasi	2,0 - 4,0%	3,5 – 4,5%	3 - 4_ %
Tingkat Kemiskinan	8,5 - 9,0	13,5 – 14 %	5-6,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8 - 5,1	4,0 – 4,5 %	5,0 - 5,50%
IPM	72,5	68,5 - 69,9	80,5
Indeks Gini	0,375 - 0,380	0,300 – 0,325	0,355 – 0,36

Sumber : Permendagri 31 Tahun 2019, RPJMD Provinsi Sulteng 2016-2021, dan P-RPJMD Kota Palu 2016-2021.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2020 menekankan perencanaan pembangunan berdasarkan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS). Holistik-Tematik dimaknai untuk mencapai sasaran prioritas Kota Palu perlu koordinasi multi sektor. Selanjutnya, integratif yaitu pencapaian tujuan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lain atau dengan kata lain adanya kombinasi berbagai program atau kegiatan. Pendekatan terakhir yakni spasial dimaknai pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan lokasi dengan mengintegrasikan fasilitas pendukung lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Upaya percepatan pencapaian misi yang sifatnya lintas sektor dan lintas perangkat daerah serta merupakan inovasi Pemerintah Kota Palu dilakukan melalui program inovasi sebagai berikut:

1. Palu Kana Mapande

Dalam rangka mewujudkan anak didik yang beriman dan bertakwa, maka dilakukan kegiatan tambahan jam belajar Agama bagi siswa kelas 5 Sekolah Dasar. Siswa beragama Islam dalam bentuk Pengajaran Baca Tulis Al-qur'an, begitupun bagi agama Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha disesuaikan dengan sistem pembelajaran agama yang dianutnya. Program ini dilanjutkan secara bertahap pada tingkat Sekolah Menengah Pertama untuk menjaga kesinambungan program sejak Sekolah Dasar.

2. Pemberdayaan lembaga adat dan peradilan adat

Lembaga Adat Kaili pada dasarnya merupakan bagian dari Masyarakat Adat dan Hukum Adat Kaili. Masyarakat Kaili mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya di dalam kehidupan sosial, memiliki hukum adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi dan mempunyai aturan, sanksi dalam hukum adat serta kearifan lokal yang melingkupi kehidupan penduduk etnis Kaili.

Kelembagaan adat Kaili memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pembangunan daerah, melalui pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional.

Dalam pelaksanaan kelembagaan adat kaili dan peradilan adat kaili akan dibentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum lembaga adat kaili dan peradilan adat kaili.

3. Satuan Tugas K5

Satuan Tugas Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan (Satgas K5) dibentuk pada setiap kelurahan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, kepolisian, ASN, dan TNI. Satgas K5 bertujuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan di wilayah kelurahan masing-masing.

4. Kelurahan inovasi unggul dan mandiri

Kelurahan inovasi unggul dan mandiri dilakukan melalui upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha melalui pemagangan, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kapasitas manajemen usaha melalui alih teknologi dan pengetahuan, pemetaan usaha masyarakat di tingkat kelurahan serta penguatan teknologi dan pengetahuan dalam pemanfaatan potensi lokal. Selanjutnya, melakukan fasilitasi pengembangan IKM berbasis komoditi unggulan, peningkatan aksesibilitas peran swasta dalam

usaha ekonomi kreatif dan inovatif, memfasilitasi dan intermediasi pengembangan IKM berbasis ekonomi kreatif, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi lokal, memfasilitasi dan intermediasi akses pelaku usaha terhadap permodalan bagi IKM, menyediakan informasi dan akses investasi berbasis sumber daya lokal. Hingga pada akhirnya setiap IKM dapat menjadi IKM yang unggul dan mandiri.

5. Palu *Nobudaya Ante Noada*

Palu *nobudaya ante noada* merupakan pendidikan penguatan karakter bagi siswa sekolah pendidikan dasar dengan melibatkan seniman dan budayawan di Kota Palu untuk memberikan materi tambahan terkait budaya dan kearifan lokal, sehingga diharapkan anak-anak di Kota Palu dapat mengetahui segala budaya yang dimiliki Kota Palu dan nusantara. Hingga pada akhirnya program ini dapat mewujudkan generasi muda yang paham terhadap budaya dan kearifan lokal di lembah Kaili.

6. Gerakan *Gali Gasa* (3G) terintegrasi Germas, PKK, dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

Gerakan *Gali Gasa* merupakan gerakan moral yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Kota Palu yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat soal kebersihan. Karena persoalan sampah bukan hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah melainkan juga menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Gerakan *gali gasa* sendiri berasal dari bahasa Kaili *gali gasa* yang artinya sangat bersih.

Integrasi Gerakan *Gali Gasa*, Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Palu.

Kegiatan ini juga mengintegrasikan upaya perbaikan gizi Balita sebagai bentuk upaya preventif dan kuratif terhadap kasus gizi buruk serta penanganan untuk menurunkan *stunting* di Kota Palu.

7. Puskesmas *Nomoni*

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan murah, terjangkau, dan berkualitas, maka dilakukan upaya perbaikan pelayanan dengan *tagline* Puskesmas *Nomoni*. Puskesmas *Nomoni* diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan tidak memberikan batasan pada ruang dan waktu. Puskesmas *Nomoni* diimplementasikan melalui :

a. Penambahan Jam Pelayanan

Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas, maka dilakukan tambahan jam pelayanan pada sore sampai dengan malam dan pendaftarannya menggunakan sistem antrian elektronik dan tidak dipungut biaya.

b. *Ambulance Emergency Nomoni*

Pelayanan kesehatan pada Puskesmas juga dilengkapi dengan mobil ambulance yang disiapkan khusus untuk pasien rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit, dan akan dikembangkan menjadi NEST (*Nomoni Emergency Services Team*) yakni ambulance yang dilengkapi tim medis terlatih dan sarana ambulance emergency yang dapat diakses oleh masyarakat langsung dengan menggunakan aplikasi berbasis GPS.

c. Puskesmas Siaga Narkoba

Pemerintah Kota Palu menetapkan 13 Puskesmas untuk memberikan pelayanan konseling jiwa, penyalahgunaan Napza, dan ketergantungan zat adiktif yang dilakukan oleh dokter terlatih dan memiliki Sertifikat BNN. Puskesmas ini dilengkapi dengan Tim/ Satuan Kerja Keluarga Sehat Anti Narkoba yang dapat dimobilisasi untuk tindak lanjut ke sekolah - sekolah maupun *door to door*.

8. Pengembangan kawasan wisata berbasis budaya

Untuk mewujudkan Kota Palu sebagai kota destinasi, maka dibutuhkan sarana prasarana wisata berbasis budaya yang nyaman

dan representatif. Penataan kawasan berbasis pada lima dimensi yakni dimensi gunung, dimensi teluk, dimensi sungai, dimensi lembah, dan dimensi bukit.

9. Forum pendampingan Pembangunan Daerah

Dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah dan menginteraksikan permasalahan pembangunan, maka pemerintah Kota Palu membentuk Forum Pendampingan Pembangunan Kota Palu yang terdiri dari Tim Pendamping Pembangunan Pemerintah Kota Palu dan Forum *Libu Ntodea*.

a. Tim Pendamping Pembangunan Pemerintah Kota Palu

Tim pendamping terdiri dari unsur akademisi, unsur masyarakat, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, dan profesional. Tugas Tim Pendamping Pembangunan Pemerintah Kota Palu, yaitu :

1. Melakukan pendampingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Melakukan klarifikasi dan asistensi program kegiatan dan anggaran pada Perangkat Daerah.
3. Melakukan kajian analisa dan sinkronisasi program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak dan manfaat program, kegiatan, dan anggaran.

b. Forum *Libu Ntodea*

Forum *Libu Ntodea* merupakan forum interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Palu untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan permasalahan pembangunan di Kota Palu.

10. *E-planning*

Penerapan perencanaan kota yang berbasis teknologi informasi member ruang kepada masyarakat untuk lebih interaktif dan berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi sarana membangun transparansi, proses yang responsive dan partisipatif sehingga lebih akuntabel. Keterbukaan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses proses dan pelaksanaan

perencanaan diharapkan dapat meningkatkan semangat dari masyarakat untuk lebih berperandan mengambil posisi sebagai bagi andalam pembangunan Kota Palu.

11. Musrenbang Inklusi

Musrenbang inklusi merupakan sarana penjangkaran informasi, aspirasi, dan ide program kegiatan yang diperuntukkan bagi kaum marginal. Musrenbang ini didesain secara khusus yang diperuntukkan untuk kaum difabel, trans gender, korban pelanggaran HAM, kelompok pemulung, kelompok gelandangan dan pengemis, kelompok pengamen, PSK, tukang ojek, Lansia, orang dalam HIV AIDS, dan kelompok-kelompok lainnya yang selama ini tidak ada ruang dan waktu untuk berpartisipasi dalam Musrenbang eksklusif.

Selanjutnya, program prioritas merupakan program yang dianggap dapat mendukung arah kebijakan, strategi, sasaran dan tujuan pembangunan pada tiap-tiap misi. Program dan kegiatan Prioritas yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2020.

5.1. Program Kegiatan Pemerintah Kota Palu Terkait Dimensi Pembangunan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas. Sementara, tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah 2020 yaitu Membangun Kembali Sulawesi Tengah melalui Penguatan Mutu Modal Manusia dan Infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu menetapkan sasaran dan prioritas pembangunan yang selaras dan mendukung pencapaian lima dimensi pembangunan nasional serta

prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari:
 - a).Revolusi mental, b).Pembangunan pendidikan, c).Pembangunan kesehatan; dan d).Pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari:
 - a).Kedaulatan pangan, b).Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan;
 - c).Kemaritiman dan kelautan, dan d).Pariwisata, kawasan industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari:
 - a).Pemerataan antar kelompok pendapatan, b).Perbatasan Negara dan daerah tertinggal, c).Pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d).Pengembangan konektivitas nasional.
4. Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, kinerja aparatur), serta pertahanan dan keamanan

Selanjutnya, untuk mewujudkan dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, dan dimensi pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maka tujuan, sasaran, indikator serta target Pemerintah Kota Palu dalam RKPD 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5.1

Keterkaitan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palu dengan Dimensi Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020

Sasaran Pembangunan Nasional	Ruang Lingkup Dimensi Pembangunan Nasional	Pembangunan Kota Palu				Target Kinerja	
		Tujuan	Sasaran	Indikator Target		Kondisi Awal	2020
Dimensi pemerataan dan kewilayahan	Pemerataan antar kelompok pendapatan	Mewujudkan sistem informasi potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis GIS.	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS.	Persentase ketersediaan dokumen hasil survey dan pemetaan potensi		0	95 %
				Persentase potensi sumber daya yang dapat diakses melalui sistem informasi berbasis GIS.		0	95 %
Dimensi Pembangunan Manusia	Pembangunan pendidikan	Mewujudkan pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas.	Meningkatnya pendidikan dasar bagi usia wajib belajar sembilan tahun .	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar	SD	0,01	0,02
					SMP	0,3	0,15
		Mewujudkan karakter bangsa melalui pendidikan agama dan budaya.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas anak didik dalam mengikuti pendidikan agama dan budaya .	Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama		0	100%
				Persentase siswa kelas 7 yang mengikuti tambahan pendidikan agama		0	36%
				Persentase Sekolah Menengah Pertama yang		0	100%

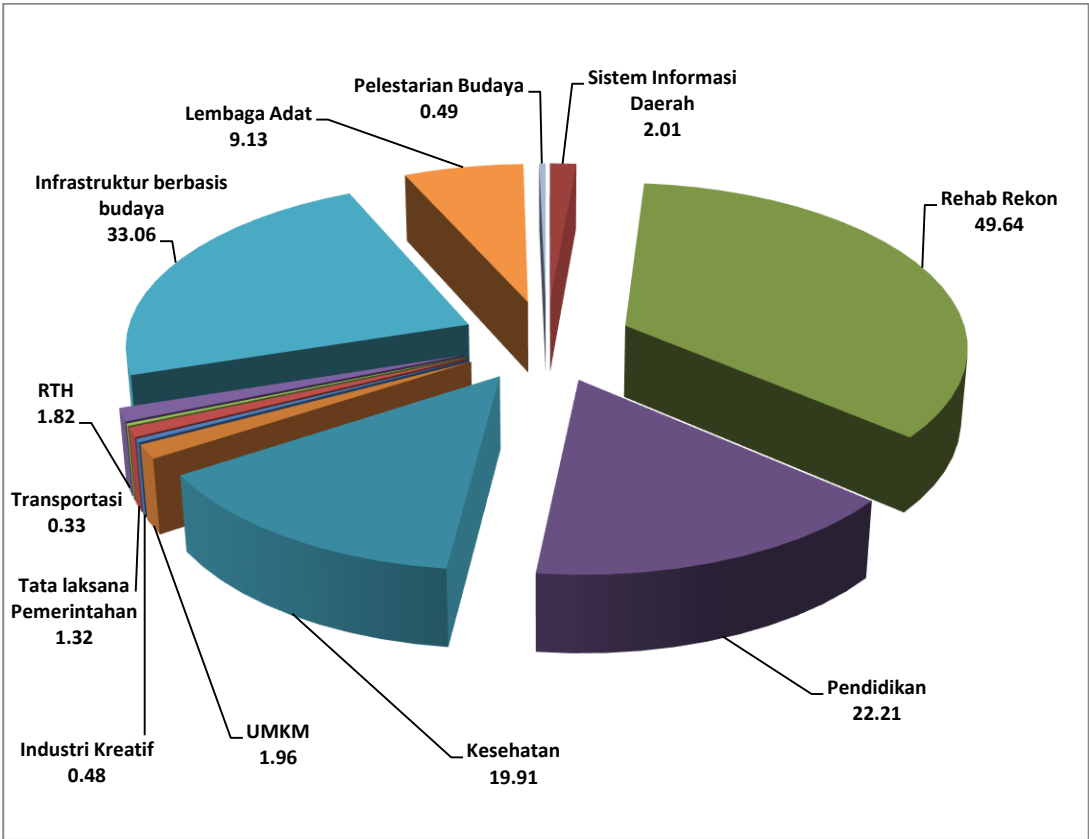
Sasaran Pembangunan Nasional	Ruang Lingkup Dimensi Pembangunan Nasional	Pembangunan Kota Palu			Target Kinerja	
		Tujuan	Sasaran	Indikator Target	Kondisi Awal	2020
	Pembangunan Kesehatan	Mewujudkan pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas	Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	memiliki sanggar seni		
				Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya	0	100%
				Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	Baik	Baik
				Indeks pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Baik	Baik
				Prevalensi balita gizi buruk	0,70	0,54
				Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100%	100%
				Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	89,13	100
Dimensi Pembangunan Sektor unggulan	Pemerataan antarkelompok pendapatan	Meningkatkan dan mengembangkan usaha berbasis industri rumah tangga.	Terwujudnya IKM baru menjadi unggul dan mandiri	Jumlah IKM baru yang unggul dan mandiri.	0	81 Klpk
		Mewujudkan pengembangan usaha mikro.	Meningkatnya usaha mikro mandiri.	Persentase usaha mikro diintervensi menjadi mandiri	0	88%
		Membina pelaku usaha ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan.	Terwujudnya pelaku usaha ekonomi kreatif dan inovatif.	Persentase usaha ekonomi kreatif diintervensi menjadi mandiri.	0	98,11%

Sasaran Pembangunan Nasional	Ruang Lingkup Dimensi Pembangunan Nasional	Pembangunan Kota Palu			Target Kinerja	
		Tujuan	Sasaran	Indikator Target	Kondisi Awal	2020
Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Tata kelola dan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.	Opini Laporan Keuangan.	0	WTP
				Nilai evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	CC	B
				Indeks Reformasi birokrasi.	Sangat Kurang	Cukup
				Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	2,9807	3,0150
Pembangunan dimensi pemerataan dan kewilayahan	Pengembangan konektivitas	Melaksanakan Peningkatan dan pengembangan pelayanan transportasi Kota	Terwujudnya penataan transportasi yang aman dan nyaman	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan.	0	12
				Jumlah angkutan umum melayani setiap lintasan trayek.	0	15 Angkutan Umum
				Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak.	61,48%	95,37%
	Perkotaan	Melaksanakan Peningkatan dan pengembangan dekorasi Kota berbasis budaya	Terwujudnya penataan dekorasi kota memiliki nilai budaya.	Cakupan dekorasi kota bernilai budaya	0	90%
				Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah .	0	10
		Melakukan Penataan dan Peningkatan	Terwujudnya ruang publik Kota yang	Ruang publik kota yang bernilai budaya.	7,69%	92,30%

Sasaran Pembangunan Nasional	Ruang Lingkup Dimensi Pembangunan Nasional	Pembangunan Kota Palu			Target Kinerja	
		Tujuan	Sasaran	Indikator Target	Kondisi Awal	2020
		fungsi ruang-ruang publik Kota berbasis budaya	berbasis nilai budaya.			
		Melaksanakan penataan manajemen kebersihan dan keindahan Kota berbasis budaya.	Terwujudnya kebersihan Kota yang partisipatif.	Persentase pemrosesan sampah (tingkat pengangkutan ke TPA).	55%	100%
				Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat.	12 ton/hari	50 ton/hari
				Tingkat partisipasi kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan.	0	75%
		Melaksanakan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat wisata berbasis budaya dan religi.	Terwujudnya pusat-pusat wisata berbasis budaya dan religi	Persentase pusat wisata berbasis budaya dan religi	0	80%
		Mewujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar kota yang	Terwujudnya infrastruktur kota (perumahan yang layak, sanitasi, pelayanan air	Persentase kondisi jalan mantap.	44,81%	78,38%
				Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik.	33,70%	80,84%

Sasaran Pembangunan Nasional	Ruang Lingkup Dimensi Pembangunan Nasional	Pembangunan Kota Palu			Target Kinerja	
		Tujuan	Sasaran	Indikator Target	Kondisi Awal	2020
		berkelanjutan.	minum dan jalan).	persentase jembatan dalam kondisi baik.	100%	100%
				Persentase kawasan kumuh yang tertata	0%	100%
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Penegakan hukum	Melakukan Pembinaan, Penguatan dan Pengembangan Peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam tata kehidupan sosial	Terwujudnya peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial	Indeks kerukunan beragama	69	72
				Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan local dan budaya	24	27
Dimensi Pembangunan sektor unggulan	Pertumbuhan percepatan industri dan kawasan wisata	Melakukan pembinaan dan penguatan lembaga Seni budaya	Terwujudnya pembinaan dan penguatan lembaga seni dan budaya.	Jumlah lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi	0	50

Prioritas program dalam RKPD Tahun 2020 terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Alokasi pembiayaan untuk program prioritas sebagaimana Gambar 5.1 di bawah ini :



Gambar 5.1
Alokasi Pembiayaan Program Prioritas Tahun 2020

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Hal ini berdasarkan pada aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Besaran capaian indikator pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan perkiraan capaian hasil dan dampak program pembangunan daerah sesuai tahapan tahunan pada P-RPJMD Tahun 2016-2021. Penetapan kinerja capaian indikator pembangunan daerah Kota Palu bertujuan mengukur tingkat pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang telah dijanjikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Palu selama periode Tahun 2020.

Indikator kinerja pembangunan daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Palu periode Tahun 2020 dijadikan dasar oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Palu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode Tahun 2020. Dengan demikian, indikator capaian pembangunan daerah dalam RKPD menjadi dasar bagi PD dalam pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan. Oleh karena itu, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PD ditetapkan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang diukur dari capaian indikator kinerja program kegiatan merupakan keberhasilan pemerintah Kota Palu dalam pembangunan daerah yang diukur dari capaian indikator pembangunan daerah dalam RKPD periode yang bersesuaian. Oleh karena itu, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome/impact*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

VI-1

RKPD KOTA PALU TAHUN 2020

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Palu Tahun 2020

No	Indikator		Target IKU Tahun 2020
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Survey dan Pemetaan Potensi		95 %
2	Persentase potensi sumber daya yang dapat diakses melalui sistem informasi berbasis GIS		95 %
3	Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan dasar	SD	0,02
		SMP	0,15
4	Persentase siswa kelas 5 yang mengikuti tambahan pendidikan agama		100%
5	Persentase siswa kelas 7 yang mengikuti tambahan pendidikan agama		36%
6	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sanggar seni		100%
7	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menggunakan atribut budaya		100%
8	Indeks pelayanan kesehatan puskesmas		Baik
9	Indeks pelayanan kesehatan Rumah Sakit		Baik
10	Prevalensi balita gizi buruk		0,54
11	Persentase penanggulangan kejadian luar biasa		100%
12	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif		100
13	Jumlah IKM baru yang unggul dan mandiri		81 Klpk
14	Persentase usaha mikro diintervensi menjadi mandiri		88%
15	Persentase usaha ekonomi kreatif diintervensi menjadi mandiri		98,11%
16	Opini Laporan Keuangan		WTP

No	Indikator	Target IKU Tahun 2020
17	Nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	B
18	Indeks Reformasi birokrasi	Cukup
19	Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	3,0100
20	Jumlah lintasan trayek angkutan umum yang ditetapkan	12
21	Jumlah Angkutan Umum melayani setiap lintasan trayek	15 Angkutan Umum
22	Ketersediaan lokasi lahan parkir yang layak	95,37%
23	Cakupan dekorasi kota bernilai budaya	90%
24	Jumlah <i>sculpture</i> berbasis nilai budaya dan sejarah	10
25	Ruang publik kota yang bernilai budaya	92,30%
26	Persentase pemrosesan sampah (tingkat pengangkutan ke TPA)	100%
27	Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	50 ton/Hari
28	Tingkat partisipasi kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan	75%
29	Persentase pusat wisata berbasis budaya dan religi	80%
30	Persentase kondisi jalan mantap	78,38%
31	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	80,84%
32	Persentase jembatan dalam kondisi baik	100%
33	Persentase kawasan kumuh yang tertata	100%
34	Indeks Kerukunan Beragama	71
35	Jumlah kebijakan Pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	25
36	Jumlah lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi	45

Selanjutnya, penetapan Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada Tabel 6.2 di bawah ini :

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Palu Tahun 2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	Pertumbuhan PDRB	5 -5.5 %
2	Laju inflasi	3 – 4 %
3	PDRB per kapita	52.000.000
4	Indeks Gini	0,355 - 0,36
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	
	a. 40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	16,75
	b. 40% Penduduk Berpenghasilan Menengah	39,80
	c. 20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	43,35
6	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	93,50-95,00
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,5
8	Angka melek huruf	100,00
9	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	12,70
10	Angka usia harapan hidup	71,00
11	Prevalensi balita gizi kurang (%)	0,54
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,15
13	Tingkat pengangguran terbuka	5 -5.5 %
14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) ADHB	1,22
15	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) ADHB	10,62
16	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) ADHB	8,42
Aspek Daya Saing Daerah		
1	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	65%
2	Angka kriminalitas (per 10.000 penduduk)	16,75
3	Rasio ketergantungan	37,35
4	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	3.5-3
Aspek Pelayanan Umum		
	Pelayanan Urusan Wajib	
	Terkait Pelayanan Dasar	
1.	Pendidikan	
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	71,58

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
1.2	Angka Partisipasi Kasar	
	1.2.1 Angka Partisipasi Kasar SD	112
	1.2.1 Angka Partisipasi Kasar SMP	103
1.3	Angka Partisipasi Murni	
	1.3.1 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	100
	1.3.2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket b	82,31
1.4	Angka Partisipasi Sekolah	
	1.4.1 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	100
	1.4.1 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/Paket B	100
1.5	Angka Putus Sekolah	
	1.5.1 Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	0,02
	1.5.2 Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B	0,15
1.6	Angka Kelulusan (AL)	
	1.6.1 Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100
	1.6.2 Angka Kelulusan SMP/MTS/Paket B	100
1.7	Angka Melanjutkan (AM)	
	1.7.1 Angka Melanjutkan SD/MI/Paket A	95,9
	1.7.2 Angka Melanjutkan SMP/MTS/Paket B	93,87
1.8	Fasilitas Pendidikan	
	1.8.1 Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	67,05
	1.8.2 Sekolah Pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik	68
1.9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	
	SD	1:18
	SMP	1:31
1.10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	
	SD	1:26
	SMP	1:23
1.11	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	
	SD	1:28
	SMP	1: 17
1.12	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,88
1.13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV	87,95
2.	Kesehatan	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi	0,9982
2.2	Angka kematian Balita per 1.000 Kelahiran hidup	3,17
2.3	Angka kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran hidup	1,66
2.4	Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup	206,90
2.5	Rasio Puskesmas per satuan Penduduk	3,8
2.6	Rasio Dokter per satuan Penduduk	46
2.7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100
2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	98
2.9	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100
2.10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100
2.11	AFP Rate per 100.000 penduduk	2
2.12	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	100
2.13	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	73,5
2.14	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100
2.15	Penderita Diare yang ditangani	100
2.16	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100
2.17	Cakupan kunjungan bayi	100
2.18	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	100
2.19	Cakupan pelayanan nifas	100
2.20	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	90
2.21	Cakupan pelayanan anak Balita	98
2.22	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	95
2.23	Cakupan penjangkauan kesehatan anak usia pendidikan dasar	100
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	65
2.25	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.1	Pekerjaan Umum	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
3.1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	78,38
3.1.2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0,21
3.1.3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	72,80
3.1.4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	4,17
3.1.5	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	2,94
3.1.6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	6,91
3.1.7	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	84,92
3.1.8	Rasio jaringan irigasi	12,28
3.1.9	Persentase penduduk berakses air minum	80,13
3.1.10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	44,09
3.2.	Penataan Ruang:	
3.2.1	Persentase luas RTH dari luas wilayah kota	92,00
3.2.2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	63,18
3.2.3	Ketaatan terhadap RTRW (%)	99,73
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
4.1	Rasio rumah layak huni	26,24%
4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,98%
4.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,00%
4.4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertata	100,00%
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
5.1	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	3,01
5.2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	12,00
5.3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	1,00
5.4	Persentase Penegakan PERDA	1,00
5.5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100
5.6	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
5.7	Persentase kelompok siswa yang mendapat sosialisasi pengetahuan penanggulangan bencana	40%
5.8	Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang mendapat sosialisasi pengetahuan penanggulangan bencana	80%
5.9	Persentase kelurahan di zona merah yang mendapat simulasi berbasis bencana	65%
5.10	Persentase pembentukan kelurahan tangguh di daerah rawan bencana	60%
5.11	Persentase pembentukan sekolah tangguh bencana di daerah rawan bencana	35%
5.12	Persentase daerah rawan bencana yang terpetakan	85%
5.13	Persentase pemasangan rambu rawan bencana terpenuhi di daerah rawan bencana	80%
5.14	Persentase penanganan bencana pada saat terjadinya bencana	85%
5.15	Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang terlatih	50%
5.16	Persentase pengadaan logistik yang terlaksana	50%
5.17	Persentase Tindak Lanjut Kajian Untuk Pemulihan Pasca Bencana (Jitu-Pasna)	65%
6.	Sosial	
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	92,45
6.2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	92,45
6.3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100,00
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	73,81
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00
6.6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100,00
6.7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	79,89

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
	Urusan Wajib	
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	
1.	Tenaga Kerja	
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,78%
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	85,71%
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	13,86%
1.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	31,25%
1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	62,50%
1.6	Besaran tenagakerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	50,00%
1.7	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,23
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	55,71
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	31,43
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	84,29
2.4	Rasio KDRT	0,10
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	26,38
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	43,44
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1,18
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00
2.13	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	0,96
2.14	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	0,93
2.15	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA	1,11
2.16	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	228
3.	Pangan	
3.1	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	65
3.2	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari)	1.800
3.3	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90
4.	Pertanahan	
4.1	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%
5.	Lingkungan Hidup	
5.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	276
5.2	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	2
5.3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	10
5.4	Persentase sampah yang terangkut	100%
5.5	Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	50 ton
5.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	70
5.7	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	81%
5.8	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	17
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6.1	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
6.2	Rasio anak (0-18 tahun) beraktekelahiran	100
6.3	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada
6.4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	100
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7.1	Persentase PKK aktif	95%
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,16
8.2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	81,82
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	72,73
8.4	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1
8.5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	9
8.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,76
8.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,17
8.8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	0,12
8.9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,31
8.10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	0,14
8.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	76,68%
8.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75,35%
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	38,98%
8.14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	100,0%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
	di setiap Kecamatan	
8.15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	89,47%
8.16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%
8.17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	50,43
8.18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%
8.19	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	55,16%
8.20	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	59,75%
8.21	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan	1,52
8.22	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	75,67%
8.23	Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	29,02%
9.	Perhubungan	
9.1	Jumlah penumpang angkutan darat melalui terminal	165.372
9.2	Jumlah trayek angkutan umum	12
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	2583
9.4	Persentase layanan angkutan darat	19,14%
9.5	Persentase Pemenuhan Uji Kendaraan (KIR)	61%
9.6	Pemasangan Rambu-rambu	91%
9.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3,7
10.	Komunikasi dan Informatika	
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat	1

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
	Kecamatan	
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	1
10.3	Jumlah Staf IT yang terlatih	178 org
10.4	Jumlah OPD yang terintegrasi dalam sistem informasi (Website)	39
10.5	Jumlah sarana pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat (media	7 media
10.6	Jumlah terlaksananya diseminasi informasi kegiatan pemerintah kota	4
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	
11.1	Persentase koperasi aktif	0,91%
11.2	Persentase BPR/LKM aktif	1%
11.3	Persentase Usaha Mikro	0,77%
12.	Penanaman Modal	
12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
12.2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	55
12.3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	950
12.4	Kenaikan / Penurunan Nilai realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	5,00%
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	56
14.	Statistik	
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tersedia
15.	Persandian	
15.1	Jumlah Sandiman yang tersedia	4
16.	Kebudayaan	
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	12
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	6

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3
17.	Perpustakaan	
17.1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun	0,95
17.2	Rasio judul buku dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	31,25
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,011
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan	292
17.5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	3
18.	Kearsipan	
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	29
18.2	Jumlah SDM Pengelola kearsipan	25
	Urusan Pilihan	
1.	Pariwisata	
1.1	Kunjungan wisata	99,03%
1.2	Lama kunjungan Wisata	150,30 Hari
2.	Pertanian	
2.1	Produksi tanaman pangan utama	
	1. Padi (ton)	2.674
	2. Jagung (ton)	3.056
2.2	Produksi tanaman hortilkultura utama	
	- Bawang merah (ton)	18.156
2.3	Produksi peternakan utama	
	1. Sapi (ekor)	8.572
	2. Kambing/domba (ekor)	136.196
	3. Unggas (ekor)	6.957.144
2.4	Produksi olahan pertanian utama	
	1. Bawang goreng (kg)	212.242
	2. Minyak kelapa sehat (Ltr)	232
	3. Abon (Kg)	89.945
2.5	Nilai Tukar Petani (NTP)	104
5.	Perdagangan	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
5.1	Jumlah pasar yang direvitalisasi	6
5.2	Persentase penyelesaian sengketa konsumen	100%
5.3	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	75%
6.	Perindustrian	
6.1	Cakupan Bina IKM	43%
6.2	Persentase IKM yang memiliki izin	70%
7.	Kelautan dan Perikanan	
7.1	Produksi perikanan	
	1. Perikanan tangkap (ton)	2.865
	2. Perikanan budi daya (ton)	58,07
7.2	Nilai Tukar Nelayan	107
	Penunjang Urusan	
1.	Perencanaan Pembangunan	
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Konsisten
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Konsisten
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai
2.	Keuangan	
2.1	Persentase SILPA terhadap APBD	0,14%
2.2	Persentase belanja pendidikan (20%)	23,80%
2.3	Persentase belanja kesehatan (10%)	28,23%
2.4	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	58,26%
		35,95%
2.5	Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa	3,89%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
2.6	Penetapan APBD	Tepat Waktu
3.	Pendapatan	
3.1	Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD	40,80
3.2	Rasio Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD	6,04
3.3	Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD	0,84
3.4	Rasio Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap PAD	52,31
4.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
4.1	Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JP
4.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	5,70
4.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	80,44
4.4	Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah	39
4.5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada instansi pemerintah	3.122
4.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintah	4.156
5.	Penelitian dan pengembangan	
5.1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan.	80%
5.2	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan.	90%
5.3	Penerapan SIDA:	
5.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	90%
5.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	90%
6.	Pengawasan	
6.1	Persentase tindak lanjut temuan	97,50%
6.2	Persentase pelanggaran pegawai	0,50%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian IKK Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
7.	Sekretariat Dewan	
7.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tersedia
7.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Tersedia
7.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Terintegrasi

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2020 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2020, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2020. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2020, mengacu pada isu-isu strategis, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kota Palu dengan pendekatan kewilayahan (spatial), yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian prioritas rencana pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020, organisasi perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan pendekatan rasional, realistis, dan proporsional. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan mengisyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

Untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan, telah dilaksanakan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dimulai dari Pra Musrenbang atau Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kota Palu. RKPD Tahun 2020 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk menjamin terlaksananya dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. PD di Kota Palu serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD

Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta dan kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.

2. RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dan pedoman bagi PD dalam menyusun kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu 2020.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2020 setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan.
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Wali Kota Palu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKPD Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian untuk pelaksanaannya.

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

VII-2

**RKPD KOTA PALU
TAHUN 2020**